

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia
(dahulu Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II)
dan entitas anaknya/
*(formerly Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II)
and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements
as of December 31, 2021 for the year then ended
with independent auditors' report*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4-6	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	7	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	8	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9-336	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA (DAHULU
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTORS' STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA (FORMERLY
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas
lain/Residential address/in accordance with personal
identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas
lain/Residential address/in accordance with personal
identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned below:

- : Arif Suhartono
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara, 14310, Indonesia
- : Jl. Tunas Kelapa Raya / 167
RT/RW 005/007 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa
Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
- : 62-21-4301080
- : Direktur Utama/President Director

- : Mega Satria
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara, 14310, Indonesia
- : Jl. Senayan Blok HH.11/4 RT/RW 003/015
Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
- : 62-21-4301080
- : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended.
2. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, and,
b. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control system.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 29 Maret 2022 / March 29, 2022

Arif Suhartono
Direktur Utama/
President Director

Mega Satria
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022

**The Shareholder and the Board of Commissioners and Directors
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II) and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 (lanjutan)

Penekanan suatu hal

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian, efektif tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan penggabungan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal ini.

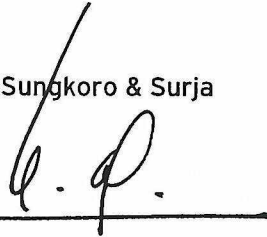
Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 (continued)

Emphasis of matters

As discussed in Note 1f to the consolidated financial statements, effective October 1, 2021, the Company merged with Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, with the Company as the surviving entity. Our opinion is not modified with respect of this matter.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Moch. Dadang Syachruna

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/Public Accountant Registration No. AP.0697

29 Maret 2022/March 29, 2022



00352

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
		31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2d,2e,2g,2u,5 45,46,47 2d,2e,2u	12.922.388.587	11.613.056.790	21.820.013.924	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	6,45,46,47	5.718.525.973	11.094.379.218	2.624.641.107	Short-term investments
Piutang usaha - neto	2d,2u,7				Trade receivables - net
Pihak ketiga	46,47	1.253.132.841	1.277.605.993	1.427.409.151	Third parties
Pihak berelasi	2e,45	263.129.705	279.352.489	567.011.017	Related parties
Piutang lain-lain - neto	2d,2u,8				Other receivables - net
Pihak ketiga	46,47	126.988.519	103.528.199	238.179.011	Third parties
Pihak berelasi	2e,45	1.153.378.016	1.316.074.276	1.432.457.049	Related parties
Uang muka dan beban dibayar di muka	2i,9	258.677.724	192.477.003	254.756.941	Advances and prepaid expenses
Pendapatan masih akan diterima	2d,2u,10				Accrued revenues
Pihak ketiga	46,47	297.585.161	435.894.846	437.277.939	Third parties
Pihak berelasi	2e,45	33.383.321	67.889.867	123.414.505	Related parties
Persediaan	2h,11	217.674.563	187.041.439	201.270.798	Inventories
Pajak dibayar di muka	2s,24a	1.080.535.298	1.161.817.240	1.662.075.285	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	2u,47	55.194.659	154.078.392	117.794.047	Other current assets
Total Aset Lancar		23.380.594.367	27.883.195.752	30.906.300.774	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Investasi jangka panjang	2j,12	3.751.638.877	3.518.317.017	3.635.325.634	Long-term investment
Properti investasi - neto	2k,13	873.433.978	867.416.746	885.703.650	Investment properties - net
Aset tetap - neto	2l,14	46.300.182.922	44.578.602.925	42.239.772.185	Fixed assets - net
Aset kerjasama operasi - neto	2n,15	408.013.146	434.117.133	461.100.101	Joint operation assets - net
Aset hak-guna - neto	2m,17	452.002.189	516.020.761	-	Right-of-use assets - net
Aset pajak tangguhan	2s,24f	587.268.838	753.558.421	241.393.302	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	2o,16	38.760.454.848	36.701.629.229	32.528.607.574	Intangible assets - net
Taksiran tagihan restitusi pajak	2s,24a	750.660.351	1.312.773.446	1.174.901.960	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	2u,18,47	964.824.984	2.011.116.364	2.461.193.103	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar		92.848.480.133	90.693.552.042	83.627.997.509	Total Non-current Assets
TOTAL ASET		116.229.074.500	118.576.747.794	114.534.298.283	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2021
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

		Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	Catatan/ Notes	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	2u,19,46	5.196.855	4.000.000	34.193.914	Short-term bank loans
Utang usaha	2d,2u				Trade payables
Pihak ketiga	20,46,47	1.338.142.064	1.686.203.358	3.044.115.352	Third parties
Pihak berelasi	2e,45	1.926.350.211	3.267.820.968	3.672.159.168	Related parties
Pendapatan diterima di muka					Short-term unearned revenues
jangka pendek	2q,21	1.298.045.484	1.379.039.522	1.207.043.755	Taxes payable
Utang pajak	2s,24b	578.540.987	647.527.154	827.210.649	Accrued expenses
Beban akrual	2u,22,47	3.699.192.020	3.664.488.679	3.838.675.350	Current maturities of long-term liabilities
Bagian lancar atas liabilitas					Bonds payable
jangka panjang	2u,46,47				Bank loans
Utang obligasi	25	-	499.768.052	-	Lease liabilities
Utang bank	26	2.365.898.747	504.471.670	388.678.828	Other current liabilities
Liabilitas sewa	2m,17	76.345.578	75.354.511	-	Third parties
Liabilitas jangka pendek lainnya	2u,23				Related parties
Pihak ketiga	47	1.182.432.796	1.023.914.350	762.147.091	
Pihak berelasi	2e,45	1.066.277.650	930.066.278	608.481.268	
Total Liabilitas Jangka Pendek		13.536.422.392	13.682.654.542	14.382.705.375	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah	2d,2u				Long-term liabilities - net
dikurangi bagian lancar	47,48				of current maturities
Utang obligasi	25	40.176.176.480	39.699.180.499	39.615.134.308	Bonds payable
Utang bank	26	6.656.343.511	11.128.996.490	8.613.919.696	Bank loans
Liabilitas sewa	2m,17	257.540.134	319.371.402	-	Lease liabilities
Utang lembaga keuangan non-bank	2d,2u,27				Loan from non-bank financial institution
Pihak ketiga	47	476.290.919	332.402.837	213.793.871	Third parties
Pihak berelasi	45	949.751.736	670.300.506	437.976.537	Related parties
Liabilitas pajak tangguhan	2s, 24f	105.071.621	117.774.083	91.505.345	Deferred tax liabilities
Pendapatan diterima di muka					Long-term unearned revenue
jangka panjang	2q,28	4.495.055.535	4.620.448.208	4.604.082.256	Other long-term liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	2d,2u,29,47	962.389.202	792.645.412	702.551.614	Employee benefit liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2t,30	6.560.923.531	6.938.142.497	4.822.593.130	
Total Liabilitas Jangka Panjang		60.639.542.669	64.619.261.934	59.101.556.757	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		74.175.965.061	78.301.916.476	73.484.262.132	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
Tanggal 31 Desember 2021
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

		Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	Catatan/ Notes	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)					LIABILITIES AND EQUITY (continued)
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B					Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively
Modal dasar - 33.000.000 saham dan, terdiri dari: 1 saham seri A dwiwarna dan 32.999.999 saham Seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 4.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					Authorized capital - 33,000,000 shares, consist of: 1 Series A Dwiwarna share and 32,999,999 Series B shares as of December 31, 2021 and 4,000,000 shares as of December 31, 2020 and 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.457.067 saham terdiri dari: 1 saham Seri A Dwiwarna dan 8.457.066 saham Seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1.444.029 saham pada pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		8.475.067.000	1.444.029.000	1.444.029.000	Issued and fully paid - 8,457,067 shares consists of: 1 Series A Dwiwarna share and 8,457,066 Series B shares as of December 31, 2021 and 1,444,029 shares as of December 31, 2020 and 2019
Modal donasi	31	26.825.982	26.825.982	26.825.982	Donated capital
Tambahan modal disetor	2f,33	(1.128.322.898)	(205.004.707)	(317.597.475)	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya		1.466.121	-	-	Other equity component
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	1b,2c,34	836.072.934	836.072.934	836.072.934	Difference in value of transactions with non-controlling interest
Ekuitas <i>merging entity</i>	1f,1g	-	21.516.406.212	21.050.900.765	Merging entity equity
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		29.925.514.788	15.021.058.681	13.273.514.540	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		4.434.909.230	993.019.548	2.455.762.802	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	1e,36	(2.062.503.591)	(1.119.546.220)	(105.008.860)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto		40.509.029.566	38.512.861.430	38.664.499.688	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali	2c,37	1.544.079.873	1.761.969.888	2.385.536.463	Non-controlling interests
Ekuitas - neto		42.053.109.439	40.274.831.318	41.050.036.151	Equity - net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		116.229.074.500	118.576.747.794	114.534.298.283	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021,
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Years Ended December 31,

	2021	Catatan/ Notes	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4)	
Pendapatan operasi	28.814.806.337	2r,38	26.591.131.827	<i>Operating revenues</i>
Pendapatan konstruksi	3.195.512.405	2r,39	3.924.471.433	<i>Construction revenues</i>
Beban operasi	(22.503.946.817)	2r,40	(20.675.933.360)	<i>Operating expenses</i>
Beban konstruksi	(3.195.512.405)	2r,39	(3.924.471.433)	<i>Construction expenses</i>
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	229.338.106	2r,41	(196.538.108)	<i>Other operating income (expense) - net</i>
LABA USAHA	6.540.197.626		5.718.660.359	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	407.775.884	2r,42	699.581.748	<i>Finance income</i>
Beban keuangan	(2.540.082.866)	2r,43	(2.544.366.171)	<i>Finance costs</i>
Bagian laba entitas asosiasi	255.107.588	2j,2n,44	(39.998.707)	<i>Equity in income of associates</i>
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	4.662.998.232		3.833.877.229	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(487.671.869)	24d	(436.180.278)	<i>Final tax expense</i>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	4.175.326.363		3.397.696.951	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN		2s		CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(847.733.176)	24d,24e	(745.867.105)	<i>Current</i>
Tangguhan	(151.447.911)	24d,24f	307.112.625	<i>Deferred</i>
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	3.176.145.276		2.958.942.471	INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak	94.351.746	2t,36	(1.643.196.940)	<i>Remeasurements of defined benefit plans - net off tax</i>
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	13.379.913	1e,36	(329.050.522)	<i>Exchange differences due to financial statements translation</i>
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(47.180.224)	2g,36	108.347.081	<i>Changes in fair value of available-for-sale financial assets</i>
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	3.236.696.711		1.095.042.090	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021,
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Years Ended December 31,

	2021	Catatan/ Notes	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4)	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA <i>MERGING ENTITY</i> YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	3.292.133.734		3.076.425.168	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	(115.988.458)	2c	(117.482.697)	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA <i>MERGING ENTITY</i>	3.176.145.276		2.958.942.471	INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT
Penyesuaian atas laba <i>merging entity</i> :				Adjustment of merging entity's profit:
Pemilik entitas induk	(2.280.313.686)		(1.805.995.892)	Owner of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	130.572.397		88.960.075	Non-controlling interests
	(2.149.741.289)		(1.717.035.817)	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA <i>MERGING ENTITY</i> YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	1.011.820.048		1.270.429.276	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	14.583.939	2c	(28.522.622)	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA <i>MERGING ENTITY</i>	1.026.403.987		1.241.906.654	INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021,
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Years Ended December 31,

	2021	Catatan/ Notes	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4)	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	3.351.776.051		1.212.324.495	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	(115.079.340)	2c	(117.282.405)	Non-controlling interests
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	3.236.696.711		1.095.042.090	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT
Penyesuaian atas laba komprehensif lainnya <i>merging entity:</i>				Adjustment of merging entity's other comprehensive income:
Pemilik entitas induk	(2.170.608.365)		(956.432.580)	Owner of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	129.586.062		88.563.419	Non-controlling interests
	(2.041.022.303)		(867.869.161)	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	1.181.167.686		255.891.915	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	14.506.722		(28.718.786)	Non-controlling interests
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	1.195.674.408		227.173.129	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	1.028.217	2v	2.130.446	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh)	842.992	2v	1.560.716	DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent entity

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Modal donasi/ Donation capital	Tambah modal disetor/ Additional paid- in capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity component	Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali/ Difference in value of transactions with non- controlling interest	Ekuitas merging entites/ Equity merging entities	Saldo laba/Retained earnings		Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income					Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Ekuitas - neto/ Equity - net	
							Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Exchange difference due to financial statement translation	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ Remeasurements of defined benefit plans	Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual/ Changes in fair value of available for-sale financial assets	Neto/ Net				
Saldo per 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 (dilaporkan sebelumnya)	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	-	836.072.934	-	13.273.514.540	2.455.762.802	620.425.512	(510.069.366)	(215.365.006)	17.613.598.923	532.133.658	18.145.732.581	Balance as of January 1, 2020/ December 31, 2019 (as previously reported)	
Penyajian kembali	-	-	-	-	-	21.050.900.765	-	-	-	-	-	21.050.900.765	1.853.402.805	22.904.303.570	Restatement	
Saldo per 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 (Disajikan kembali - Catatan 4)	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	-	836.072.934	21.050.900.765	13.273.514.540	2.455.762.802	620.425.512	(510.069.366)	(215.365.006)	38.664.499.688	2.385.536.463	41.050.036.151	Balance as of January 1, 2020/ December 31, 2019 (As restated - Note 4)	
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK 71	-	-	-	-	-	-	-	(277.409.727)	-	-	-	(277.409.727)	-	(277.409.727)	Beginning balance adjustment for implementation of PSAK 71	
Pembagian dividen kas	-	-	-	-	-	-	-	(708.218.661)	-	-	-	(708.218.661)	(21.134.537)	(729.353.198)	Distribution of cash dividend	
Cadangan umum	-	-	-	-	-	-	1.747.544.141	(1.747.544.141)	-	-	-	-	-	-	General reserve	
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali	-	-	112.592.768	-	-	-	-	-	-	-	-	112.592.768	-	112.592.768	Difference arising from business combination of entities under common control	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	(329.050.940)	-	-	(329.050.940)	418	(329.050.522)	Exchange difference due to financial statement translation	
Pengukuran kembali program imbalan pasti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(793.822.665)	-	(793.822.665)	(207.618)	(794.030.283)	Remeasurements of defined benefit plans	
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.336.245	108.336.245	10.836	108.347.081	Changes in fair value of available- for-sale financial assets	
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	1.270.429.275	-	-	-	1.270.429.275	(28.522.622)	1.241.906.653	Income for the year	
Laba proforma <i>merging entity</i>	-	-	-	-	-	465.505.447	-	-	-	-	-	465.505.447	(573.713.052)	(108.207.605)	Proforma income from merging entity	
Saldo per 31 Desember 2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)	1.444.029.000	26.825.982	(205.004.707)	-	836.072.934	21.516.406.212	15.021.058.681	993.019.548	291.374.572	(1.303.892.031)	(107.028.761)	38.512.861.430	1.761.969.888	40.274.831.318	Balance as of December 31, 2020 (As restated - Note 4)	
Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif	-	-	32.100.516.121	-	-	-	-	-	-	-	-	32.100.516.121	-	32.100.516.121	Additional capital based on determination of definitive value	
Pembagian dividen kas	-	-	-	-	-	-	-	(560.000.000)	-	-	-	(560.000.000)	-	(560.000.000)	Distribution of cash dividend	
Cadangan umum	-	-	-	-	-	-	624.857.249	(624.857.249)	-	-	-	-	-	-	General reserve	
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali	-	-	(33.312.976.996)	-	-	-	-	-	-	-	-	(33.312.976.996)	-	(33.312.976.996)	Difference arising from business combination of entities under common control	
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	13.379.913	93.442.628	(47.180.224)	59.642.317	909.118	60.551.435	Other comprehensive income	
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	3.292.133.734	-	-	-	3.292.133.734	(115.988.458)	3.176.145.276	Income for the year	
Laba proforma <i>merging entity</i>	-	-	-	-	-	676.401.829	-	-	-	-	-	676.401.829	(65.629.646)	610.772.183	Proforma income from merging entity	
Pembalikan proforma ekuitas <i>merging entity</i>	7.031.038.000	-	289.142.684	1.466.121	-	(22.192.808.041)	14.279.598.858	1.334.613.197	-	(1.002.599.688)	-	(259.548.869)	(37.181.029)	(296.729.898)	Reversal of proforma equity merging entity	
Saldo per 31 Desember 2021	8.475.067.000	26.825.982	(1.128.322.898)	1.466.121	836.072.934	-	29.925.514.788	4.434.909.230	304.754.485	(2.213.049.091)	(154.208.985)	40.509.029.566	1.544.079.873	42.053.109.439	Balance as of December 31, 2021	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021,
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Years Ended December 31,

	2021	Catatan/ Notes	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	28.876.470.288		27.085.501.244	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(14.481.551.070)		(14.473.317.581)	Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(5.661.556.853)		(5.472.976.164)	Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(1.319.862.044)		(997.779.715)	Payment for income taxes
Penghasilan bunga	1.336.818.218		1.196.017.199	Interest received
Penerimaan pajak	1.078.288.509		63.644.781	Tax receipt
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	9.828.607.048		7.401.089.764	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	322.271.932		240.088.963	Receipt of dividend
Laba penjualan aset tetap	(1.969.868)		2.941.075	Gain on disposal assets
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(6.908.699.330)		(9.290.836.817)	Acquisition of fixed assets and intangible assets
Penerimaan (penempatan) investasi jangka pendek	5.742.520.260		(8.147.327.201)	Receipt of (placement) short-term investments
Penjualan (penambahan) pada penyertaan saham	(2.674.308.254)		142.500.000	Sales (additional) of investment in shares
Kas Neto Digunakan dari Aktivitas Investasi	(3.520.185.260)		(17.052.633.980)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Setoran modal saham	1.201.500.000		84.100.000	Capital additional
Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	(4.345.416.914)		962.524.322	Receipt (payment) of bank loans and other financial institution
Penerimaan pinjaman	1.611.983.309		3.431.790.723	Receipt of loans
Pembayaran bunga	(2.752.569.073)		(3.537.254.879)	Interest payment
Pembayaran liabilitas sewa	(162.741.729)	17	(153.938.339)	Payments of lease liabilities
Pembayaran dividen	(560.000.000)	35	(1.377.043.949)	Payment of dividend
Kas Neto Digunakan dari Aktivitas Pendanaan	(5.007.244.407)		(589.822.122)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	1.301.177.381		(10.241.366.338)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	8.154.416		34.409.204	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	11.613.056.790	5	21.820.013.924	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	12.922.388.587	5	11.613.056.790	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" atau "Pelindo II") ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 07 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 1 Oktober 2021 mengenai persetujuan perubahan nama, anggaran dasar dan logo Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021 (Catatan 1f).

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" or "Pelindo II") ("the Company" or "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on Government Regulation No. 57 Year 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan II was changed into a State Owned Company (Persero). As result of such government regulation, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Notarial Deed No. 3 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the establishment of the Ministry of State-Owned Enterprise ("MOSOE") in 1998, the Company has been under the supervision of MOSOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by the Company's General Meeting of Shareholders Decision Statement notarized by Notarial Deed No. 07 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated October 1, 2021 regarding approval on changes in the Company's name, Articles of Association and logo. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0053936.AH.01.02 dated October 1, 2021 (Note 1f).

Based on the Notarial Deed No. 09 dated August 21, 2019, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs to changes the type of shares which originally without series, changed to be consisted of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") melakukan penggabungan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II), dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1f).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, information technology services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

On October 1, 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") merged to the Company (formerly Pelindo II), with the Company (formerly Pelindo II) as the surviving entity (Note 1f).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Sehubungan dengan penggabungan tersebut di atas, Perusahaan mengelola 4 (empat) Regional yang terdiri dari:

Regional 1

Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Regional 1 memiliki 15 (lima belas) pelabuhan cabang dan 11 (sebelas) pelabuhan perwakilan. Wilayah kerja cabang-cabang operasional pelabuhan adalah sebagai berikut:

Cabang Kelas Utama	Belawan	Prime Class Branch
Cabang Kelas I	Dumai dan/and Terminal Petikemas Belawan	Class I Branches
Cabang Kelas II-A	Pekanbaru	Class II-A Branches
Cabang Kelas II-B	Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, dan/and Kuala Tanjung	Class II-B Branches
Cabang Kelas III	Batam, Sei Pakning, dan/and Sibolga	Class III Branches
Cabang Kelas IV	Malahayati, Lhokseumawe, dan/and Tanjung Balai Asahan	Class IV Branches
Cabang Kelas V	Tembilahan dan/and Gunung Sitoli	Class V Branches

Regional 2

Regional 2 mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari:

Cabang Pelabuhan Utama	Tanjung Priok, Banten dan/and Panjang	Main Port Branch
Cabang Pelabuhan Madya	Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi dan/and Cirebon	Medium Port Branches
Cabang Pelabuhan Pratama	Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan/and Tanjung Pandan	Small Port Branches

Regional 3

Regional 3 mengelola 4 (empat) kantor regional yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Terminal Pelabuhan (Cabang) yang terdiri dari:

Regional	Cabang/Branch	Region
Jawa Timur		East Java
Cabang Kelas Utama	Tanjung Perak	Prime Class Branch
Cabang Kelas II	Gresik	Class II Branch
Cabang Kelas III	Tanjung Wangi	Class III Branch
Cabang Kelas IV	Tanjung Tembaga dan/and Kalianget	Class IV Branches
Bali Nusra		Bali Nusra
Cabang Kelas II	Benoa	Class II Branch
Cabang Kelas III	Tenau Kupang, Lembar dan/and Labuan Bajo	Class III Branches
Cabang Kelas IV	Bima, Celukan Bawang, Maumere, Badas, Waingapu, Kalabahi, dan/and Ende Ippi	Class IV Branches

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

In relation to the merger as mentioned above, the Company manages 4 (four) Regions as follows:

Region 1

In providing its services, Region 1 has 15 (fifteen) port branches and 11 (eleven) representative branches. Work areas of operational branches of port are as follows:

	Belawan	Prime Class Branch
	Dumai dan/and Terminal Petikemas Belawan	Class I Branches
	Pekanbaru	Class II-A Branches
	Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, dan/and Kuala Tanjung	Class II-B Branches
	Batam, Sei Pakning, dan/and Sibolga	Class III Branches
	Malahayati, Lhokseumawe, dan/and Tanjung Balai Asahan	Class IV Branches
	Tembilahan dan/and Gunung Sitoli	Class V Branches

Region 2

Region 2 manages 12 (twelve) Port Branches as follows:

	Tanjung Priok, Banten dan/and Panjang	Main Port Branch
	Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi dan/and Cirebon	Medium Port Branches
	Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan/and Tanjung Pandan	Small Port Branches

Region 3

Region 3 manages 4 (four) regional offices which includes 29 (twenty nine) Port Terminals (Branches) as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Regional 3

Regional 3 mengelola 4 (empat) kantor regional yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Terminal Pelabuhan (Cabang) yang terdiri dari: (lanjutan)

Regional	Cabang/Branch	Region
Jawa Tengah		Central Java
Cabang Kelas I	Tanjung Emas, Terminal Petikemas Semarang	Class I Branches
Cabang Kelas II	Tanjung Intan	Class II Branch
Cabang Kelas IV	Tegal	Class IV Branch
Kalimantan		Kalimantan
Cabang Kelas I	Banjarmasin	Class I Branch
Cabang Kelas II	Bagendang	Class II Branch
Cabang Kelas III	Sampit, Kotabaru, Batulicin, dan/and Mekar Putih	Class III Branches
Cabang Kelas IV	Pulang Pisau, Kumai dan/and Bumiharjo	Class IV Branches

Regional 4

Regional 4 mengelola 31 (tiga puluh satu) cabang yang terdiri dari:

Cabang Kelas Utama	Makassar dan Terminal Petikemas Makassar/ Makassar and Makassar Container Terminal	Main Branch
Cabang Kelas Madya	Terminal Petikemas Makassar New Port/ Makassar New Port Container Terminal	Middle Branch
Cabang Kelas Satu	Balikpapan, Samarinda, Bitung, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Terminal Petikemas Bitung/and Bitung Container Terminal	First Class Branch
Cabang Kelas Dua	Tarakan, Ternate, Pantoloan, Kendari dan/and Bontang	Second Class Branch
Cabang Kelas Tiga	Manokwari, Biak, Nunukan, Tanjung Redep, Parepare dan/and Merauke	Third Class Branch
Cabang Kelas Empat	Gorontalo, Tolitoli, Fakfak dan/and Manado	Fourth Class Branch
Unit Pelayanan Kepelabuhanan Strategic Business Unit	UPK Sangat Marine Service, Properti Non Kepelabuhanan, Intan Curah Perkasa, Intan Pesona Pariwisata, dan Terminal Petikemas Indonesia Timur/ and Eastern Indonesia Container Terminal	Port Services Unit Strategic Business Unit

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

Region 3

Region 3 manages 4 (four) regional offices which includes 29 (twenty nine) Port Terminals (Branches) as follows: (continued)

Region 4

Region 4 manages 31 (thirty one) branches as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tanggal 7 Mei 2008.
- b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015.
- c. Surat Menteri Perhubungan No. HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).
- d. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan No. 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 121 Tahun 2018.
- f. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 166 Tahun 2015.
- g. Peraturan Menteri Perhubungan No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- h. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations:

- a. Act No. 17 Tahun 2008 regarding Shipping dated May 7, 2008.
- b. Government Regulation No. 61 Tahun 2009 regarding Port dated October 20, 2009, as amended by Government Regulation No. 64 Year 2015.
- c. Minister of Transportation's Letter No. HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No. 17 Tahun 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).
- d. Government Regulation No. 15 Tahun 2016 regarding Type and Tariff on Non-Tax Revenues types that apply to the Ministry of Transportation.
- e. Regulation of the Minister of Transportation No. 72 Tahun 2017 on Types, Structures, Classes, and Mechanisms for Determining Port Services Rates as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 121 Tahun 2018.
- f. Regulation of the Minister of Transportation No. 15 Tahun 2015 on Concessions and Other Forms of Cooperation between the Government and Business Entity Ports Sector as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 166 Tahun 2015.
- g. Regulation of the Minister of Transportation No. 57 Tahun 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation No. 51 Tahun 2015 concerning the Operation of Seaports.
- h. Regulation of the Minister of Transportation No. 77 Tahun 2016 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax Revenue that apply At the Directorate General of Sea Transportation.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

- i. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sebagai BUP.
- j. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 936 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.
- k. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- l. Keputusan Menteri Perhubungan No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP").
- m. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 603 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- n. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.
- o. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 730 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations: (continued)

- i. Decree of the Minister of Transportation of Republic Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 dated March 2, 2011 regarding issuance of business permit to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a BUP.*
- j. Decision of Minister of Transportation No. KP 936 Tahun 2012 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Port Operation Entity.*
- k. Decision of Minister of Transportation No. KP 1121 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.*
- l. Decree of Minister of Transportation No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as Port Operation Entity ("BUP").*
- m. Decree of Minister of Transportation No. KP 603 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.*
- n. Decision of Minister of Transportation No. KP 27 Tahun 2011 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) as Port Operation Entity.*
- o. Decision of Minister of Transportation No. KP 730 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

- p. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ("NIB") kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan tanggal 25 September 2018.
- q. Perjanjian konsesi (Catatan 49).

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/Ownership percent			Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination		
			31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019		31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019
Kepemilikan langsung / Direct ownership									
PT Prima Indonesia Logistik ("PIL")	Medan	Jasa logistik/Logistic service	99,67%	99,67%	99,67%	2014	358.829.673	392.104.065	72.424.303
PT Prima Pengembangan Kawasan ("PPK")	Medan	Pengembangan kawasan/Region developer	90,00%	90,00%	90,00%	2015	900.317.677	899.389.444	98.144.837
PT Prima Husada Cipta Medan ("PHCM")	Medan	Layanan jasa kesehatan/Health care services	99,70%	99,70%	99,70%	2016	71.146.634	38.299.762	22.106.580
PT Prima Terminal Petikemas ("PTP1")	Medan	Layanan terminal petikemas/Container port services	70,00%	70,00%	70,00%	2013	3.206.686.441	3.233.653.816	3.223.795.923
PT Prima Multi Terminal ("PMT")	Medan	Terminal petikemas dan konvensional/Container and multicargo terminal	55,00%	55,00%	55,00%	2014	3.713.797.403	3.971.706.852	4.232.027.591
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDI")	Jakarta	Sistem informasi/Information system	51,00%	51,00%	51,00%	1995	63.663.137	95.075.606	79.282.586

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations: (continued)

- p. The Government of the Republic of Indonesia c.q OSS Organizing Management Institution based on the provisions of Article 24 paragraph 1 of government regulation number 24 year 2018 concerning electronic integrated business licensing services ("NIB") to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which are set on 25 September 2018.
- q. Concession agreement (Note 49).

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation

As of December 31, 2021 and 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/Ownership percent			Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination		
			31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019		31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019
<u>Kepemilikan langsung / Direct ownership (lanjutan/continued)</u>									
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	Jakarta	Jasa logistik/Logistic services	99,00%	99,00%	99,00%	2002	865.710.890	906.370.055	84.682.897
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") ^{v)}	Jakarta	Terminal kendaraan/ Car terminal	71,28%	71,28%	71,28%	2012	1.960.929.214	1.827.715.741	262.080.95
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") ^{vii)}	Jakarta	Sistem informasi/ Information system	99,00%	99,00%	99,00%	2012	163.124.440	137.134.393	60.100.918
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ("PPI")	Jakarta	Pengembangan pelabuhan/ Port development	99,89%	99,89%	99,89%	2012	15.559.407.092	5.136.951.404	841.105.04
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Jakarta	Jasa peralatan pelabuhan/ Port equipment services	99,00%	99,00%	99,00%	2012	225.749.31	199.238.113	57.445.101
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyedia energi listrik dan air bersih/ Electricity provider and treated water	55,00%	55,00%	55,00%	2012	191.234.589	175.927.346	45.105.432
PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo")	Jakarta	Pengerukan alur/ Dredging	99,93%	99,93%	99,93%	1991	430.624.904	373.782.108	76.359.505
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("JAI") ^{vi)}	Jakarta	Penyedia jasa transportasi laut/ Ship transportation services provider	76,89%	76,89%	76,89%	2013	1.449.715.963	1.397.383.219	1.277.801.802
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Jakarta	Jasa pelatihan dan pendidikan maritim dan logistic/ Maritime and logistic education services	99,00%	99,00%	99,00%	2013	93.462.940	64.532.883	71.354.014
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/ container and multicargo terminal	99,00%	99,00%	99,00%	2013	1.275.310.698	4.711.001.619	1.762.867.454
PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/ Container and multicargo terminal	99,00%	99,00%	99,00%	2013	1.389.731.399	4.555.083.524	1.099.123.570
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Jakarta	Investasi pasar modal dan konsultan bisnis/ Investment in stock exchange and business consultant	99,00%	99,00%	99,00%	2017	1.035.473.853	1.073.885.201	1.036.864.363

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/Ownership percent			Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination		
			31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019		31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019
<u>Kepemilikan langsung / Direct ownership (lanjutan/continued)</u>									
PT Terminal Petikemas Surabaya ("TPS")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/Container port services	99,50%	99,50%	99,50%	1999	2.651.990.612	2.043.353.665	1.789.406.335
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/Container port services	96,84%	96,84%	96,84%	2002	4.310.583.419	3.974.496.765	3.696.174.378
PT Pelindo Marine Service ("PMS")	Surabaya	Layanan jasa kapal/Shipping services	98,23%	98,23%	98,23%	2011	1.670.790.972	1.845.664.632	1.638.141.996
PT Terminal Teluk Lamong ("TTL")	Surabaya	Layanan terminal petikemas dan curah kering/Container and dry bulk port services	99,50%	99,50%	99,50%	2013	797.343.088	717.611.660	667.177.840
PT Pelindo Daya Sejahtera ("PDS")	Surabaya	Layanan penyedia jasa tenaga kerja/Human resources services	90,00%	90,00%	90,00%	2008	210.558.102	202.338.316	167.539.358
PT Kaltim Kariangau Terminal ("KKT")	Balikpapan	Layanan terminal petikemas/Container port service	50,00%	50,00%	50,00%	2012	160.170.950	188.852.062	96.015.498
PT Equiport Inti Indonesia ("EII")	Makassar	Jasa pemeliharaan/Maintenance services	99,29%	99,29%	99,29%	2012	115.512.217	89.391.524	50.327.283
PT Nusantara Terminal Services ("NTS")	Makassar	Bongkar muat/Loading unloading	99,16%	99,16%	99,16%	2013	79.401.311	76.934.614	57.955.495
PT Pelindo Terminal Petikemas ("SPTP") (dahulu/formerly PT Terminal Petikemas)	Surabaya	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim/Provision and operation of maritime services	99,90%	25,00%	25,00%	2013	150.288.574	134.140.778	31.111.708
PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")	Makassar	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim/Provision and operation of maritime services	99,90%	-	-	2021	125.153.051	-	-
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	Medan	Pelayanan jasa terminal non-petikemas/Non-container terminal services	99,90%	-	-	2021	149.135.356	-	-
PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL")	Jakarta	Jasa logistik/logistic services	99,90%	-	-	2021	83.154.426	-	-
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership</u>									
<u>Dimiliki melalui/Owned through PIL</u>									
PT Prima Multi Peralatan ("PMP")	Medan	Jasa pemeliharaan dan perbaikan/Equipment Maintenance and repair services	99,00%	99,00%	99,00%	2019	67.512.708	28.070.089	13.148.877

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/Ownership percent			Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination		
			31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019		31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership (lanjutan/continued)</u>									
<u>Dimiliki melalui/Owned through PPI</u>									
PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")	Jakarta	Penyertaan saham pada proyek Jalan Tol/Investment in Toll and access Road Project	99,79%	99,52%	99,52%	2014	3.287.110.395	1.000.147.569	79.593.101
PT Menara Maritim Indonesia ("MMI") ^{viii}	Jakarta	Jasa pengelola properti/Building management service	99,99%	78,87%	78,87%	2018	713.773.830	655.089.060	57.601.919
<u>Dimiliki melalui/Owned through API</u>									
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (Catatan 1g/ Notes 1g ⁱⁱ)	Jakarta	Operasi jalan tol/ Toll road operation	100,00%	45,00%	45,00%	2006	10.807.877.590	8.966.942.359	375.640.508
<u>Dimiliki melalui/Owned through TPS</u>									
PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas	Surabaya	Jasa terminal petikemas/ Container port services	99,00%	99,00%	99,00%	2016	671.120	667.291	667.790
<u>Dimiliki melalui/Owned through BJT</u>									
PT Berlian Manyar Sejahtera ("BMS")	Surabaya	Layanan terminal/ Port services	60,00%	60,00%	60,00%	2012	1.291.838.128	1.076.495.522	990.995.604
PT Pelindo Properti Indonesia ("PPI1")	Surabaya	Pengelolaan properti/ Property management	99,91%	99,91%	99,91%	2014	172.213.748	137.354.589	138.227.647
PT Berkah Industri Mesin Angkat ("BIMA")	Surabaya	Jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan/Port equipment maintenance and repair service	90,00%	90,00%	90,00%	2015	202.830.021	164.815.343	109.595.952
PT Terminal Curah Semarang ("TCS")	Semarang	Jasa pelayanan curah cair dan gas/Liquid bulk and gas services	51,00%	51,00%	51,00%	2015	847.354	2.115.438	53.765.258

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/Ownership percent			Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination		
			31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019		31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership (lanjutan/continued)</u>									
<u>Dimiliki melalui/Owned through PMS</u>									
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS")	Surabaya	Jasa pengerukan, reklamasi dan pengelolaan alur pelayaran/ Dredging, reclamation Service and management of shipping channel	90,00%	90,00%	90,00%	2014	586.152.148	520.417.229	528.097.719
PT Pelindo Energi Logistik ("PEL")	Surabaya	Perdagangan jasa/ Trading services	98,90%	90,00%	90,00%	2014	494.780.481	520.168.658	551.284.560
PT Berkah Multi Cargo ("BMC")	Surabaya	Jasa angkutan multi modal/ Multi-modal transportation services	99,80%	99,80%	99,80%	2015	115.931.443	124.434.863	119.883.956
<u>Dimiliki melalui/Owned through TTL</u>									
PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI")	Surabaya	Penyediaan energi/ Energy provider	99,00%	99,00%	99,00%	2014	179.967.734	154.101.291	135.330.012
<u>Dimiliki melalui/Owned through PDS</u>									
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera ("TEDS")	Surabaya	Kegiatan tally/ Tally activity	99,00%	99,00%	99,00%	2014	20.843.815	17.233.405	16.039.950
<u>Dimiliki melalui/Owned through NTS</u>									
PT Intan Sejahtera Utama ("ISU")	Makassar	Penyediaan jasa ketenagakerjaan/ Employment services provider	99,60%	99,60%	99,60%	2019	30.695.642	22.759.823	19.966.146
<u>Entitas asosiasi/Associate entities</u>									
PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP")	Jakarta	Rumah sakit/ Hospital	32,88%	32,88%	99,84%	1999	704.687.910	548.048.589	75.930.021
PT Portek Indonesia	Surabaya	Layanan terminal petikemas/ Stevedoring equipment maintenance	49,00%	49,00%	49,00%	1999	11.517.531	11.517.531	11.517.531
PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")	Banjarmasin	Pengelolaan alur pelayanan Sungai Barito/ Management of Shipping Barito River	40,00%	40,00%	40,00%	2004	129.159.146	126.688.061	124.947.401
PT Jasa Marga Bali Tol ("JBT")	Bali	Pengelolaan jalan tol/ Toll road operator	13,86%	13,86%	17,58%	2011	1.827.452.099	1.820.838.360	1.890.157.490

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/Ownership percent			Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination		
			31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019		31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019
Entitas asosiasi/Associate entities (lanjutan/continued)									
PT Prima Husada Citra ("PHC")	Surabaya	Layanan jasa kesehatan/ Health care services	31,73%	31,73%	98,73%	1999	492.692.215	444.415.648	396.148.132
PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") (Catatan 50f/ Note 50f)	Jakarta	Terminal petikemas/ Container terminal	48,90%	48,90%	48,90%	1999	16.811.477.500	18.098.499.339	42.577.010
Dimiliki melalui/Owned through PII									
PT Prima Tangki Indonesia ("PTI")	Medan	Perdagangan dan pergudangan/ Trading and warehousing	20,00%	20,00%	20,00%	2013	212.849.468	212.363.761	21.720.312
Dimiliki melalui/Owned through IPC TPK									
PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") (Catatan 50d/ Note 50d)	Jakarta	Terminal petikemas/ Container terminal	51,00%	51,00%	51,00%	2014	3.725.893.761	3.629.484.871	3.878.213.647
Dimiliki melalui/Owned through BJTJ									
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("BKMS")	Surabaya	Pengelolaan kawasan industri JIPE/JIPE industrial estate management	40,00%	40,00%	40,00%	2012	7.111.460.493	6.782.542.323	6.187.896.430
PT Terminal Nilam Utara ("TNU")	Surabaya	Layanan terminal curah cair dan gas/ Liquid and gas bulk terminal service	40,00%	40,00%	40,00%	2013	392.687.318	409.267.771	434.556.428
PT Energi Manyar Sejahtera ("EMS")	Surabaya	Jasa pembangkit listrik/ Power plant service	30,00%	30,00%	30,00%	2015	1.101.761	1.101.762	1.101.762
PT Prima Citra Nutrisi ("PCN")	Surabaya	Layanan jasa catering/ Catering service	30,00%	30,00%	30,00%	2016	11.471.348	12.608.437	11.118.057
Dimiliki melalui/Owned through PEL									
PT Lamong Nusantara Gas ("LNG")	Surabaya	Pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian Terminal LNG Jawa Timur/ Development, management and operation of LNG terminal in East Java	49,00%	49,00%	49,00%	2019	148.731.767	148.135.270	145.083.823

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/Ownership percent			Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination		
			31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019		31 Des/ Dec 31, 2021	31 Des/ Dec 31, 2020	31 Des/ Dec 31, 2019
Operasi Bersama/Joint Operation									
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja ("TPK Koja") (Catatan 50e/ Note 50e).	Jakarta	Terminal petikemas/ Container terminal	54,91%	54,91%	54,91%	1994	3.641.898.183	3.718.062.921	520.428.809
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Koja ("MKO MTKI") ⁱⁱⁱ⁾	Gresik	Terminal kendaraan/ Car terminal	45,00%	45,00%	45,00%	2015	3.048.669	3.083.275	4.339.729
ⁱ⁾ Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1.						ⁱ⁾ The financial statements of NPCT1 is not consolidated into IPC TPK's financial statements, due to IPC TPK has no control over NPCT1.			
ⁱⁱ⁾ Pada bulan September 2015, API melakukan akuisisi 45% kepemilikan saham di CTP.						ⁱⁱ⁾ On September 2015, API performed an acquisition of 45% share of ownership in CTP.			
ⁱⁱⁱ⁾ Pada bulan April 2015, IKT membentuk manajemen kerjasama operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia dengan porsi pendanaan 45%.						ⁱⁱⁱ⁾ On April 2015, IKT establishing joint operation management Maspion Terminal Kendaraan Indonesia with funding portion of 45%.			
^{iv)} Pada bulan Desember 2017, JAI menerbitkan saham baru sebanyak 1.215.506.500 saham atau 23% dari modal ditempatkan dan disetor JAI setelah penawaran umum perdana saham JAI di Bursa Efek Indonesia.						^{iv)} On December 2017, JAI issued new shares of 1,215,506,500 shares or 23% of JAI's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.			
^{v)} Pada bulan Juli 2018, IKT menerbitkan saham baru sebanyak 509.147.700 saham atau 28% dari modal ditempatkan dan disetor IKT setelah penawaran umum perdana saham IKT di Bursa Efek Indonesia.						^{v)} On July 2018, IKT issued new shares of 509.147.700 shares or 28% of IKT's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.			
^{vi)} Pada bulan Agustus 2020, Perusahaan melakukan penjualan saham RSP kepada PT Pertamina Bina Medika IHC sebesar 67% sehingga kepemilikan saham Perusahaan menjadi sebesar 32,88% dan karenanya laporan keuangan RSP tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian ini sejak pengendalian telah beralih ke PBM IHC.						^{vi)} On August 2020, the Company sold shares of RSP to PT Pertamina Bina Medika IHC by 67%, bringing the Company's share ownership to 32.88% and therefore the financial statements of RSP have not been consolidated in the consolidated financial statements since control has been transferred to PBM IHC.			
^{vii)} Pada tanggal 14 April 2021, PPI melakukan setoran saham portepel ke ILCS sebanyak 101.010 lembar saham atau 1% dari total kepemilikan saham ILCS. Sehingga kepemilikan saham ILCS oleh Perusahaan menjadi 99% atau sebanyak 10.000.000 lembar saham.						^{vii)} On April 14, 2021, PPI deposited portfolio stocks to ILCS equivalent to 101.010 shares or 1% of ILCS total share ownership. So, the Company hold the share ownership of ILCS by 99% or equivalent to 10,000,000 shares.			
^{viii)} Pada tanggal 16 April 2021, PPI melakukan pembelian saham MMI dari PT PP Properti Tbk sebesar 21,13%, dengan nilai pengalihan sebesar Rp70.087.500. Sehingga kepemilikan PPI atas MMI saat ini adalah sebesar 100% atau setara dengan 3.106.250.000 lembar saham.						^{viii)} On April 16, 2021, PPI purchased MMI shares from PT PP Properti Tbk for 21.13%, with a transfer value of Rp70,087,500. So that the ownership of PPI over MMI currently is 100% or equivalent to 3,106,250,000 shares.			

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows: (continued)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PIL

PIL didirikan berdasarkan akta No. 34 tanggal 26 September 2014 oleh Rahmad Nauli Siregar, SH., Notaris di Medan pada dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- 27882.40.10.2014 tanggal 6 Oktober 2014.

Modal dasar PIL sebesar Rp205.500.000 terdiri atas 205.500 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 99,67% atau sebanyak 204.820 saham dengan nilai sebesar Rp204.820.000.
- Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kota Medan ("Kopkarpel UTPK") memiliki 0,33% atau sebanyak 680 saham dengan nilai sebesar Rp680.000.

Saat ini, PIL bergerak dalam bidang penyediaan jasa angkutan multimoda, depo petikemas serta layanan logistik lainnya.

Pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh saham PIL milik Perusahaan (dahulu Pelindo I) dialihkan kepada SPSL (Catatan 52f).

PPK

PPK didirikan berdasarkan akta No. 15 tanggal 8 September 2015 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2455231.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 8 September 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PIL

PIL was established based on deed No. 34 dated September 26, 2014 by Rahmad Nauli Siregar, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU- 27882.40.10.2014 dated October 6, 2014.

The authorized capital of PIL amounted to Rp205,500,000 composed of 205,500 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo I) owns 99.67% or 204,820 shares with total amount of Rp204,820,000.*
- *Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kota Medan ("Kopkarpel UTPK") owns 0.33% or 680 shares with total amount of Rp680,000.*

Currently, PIL operates in providing multimode transportation, container yard and other logistic services.

On March 1, 2022, all PIL's shares owned by the Company (formerly Pelindo I) were transferred to SPSL (Note 52f).

PPK

PPK was established based on Deed No. 15 dated September 8, 2015 by Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-2455231.AH.01.01. Tahun.2015 dated September 8, 2015.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PPK (lanjutan)

Modal dasar PPK sebesar Rp3.000.000.000 terdiri atas 3.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 90,00% atau sebanyak 759.000 saham dengan nilai sebesar Rp759.000.000
- PMT memiliki 10,00% atau sebanyak 84.333 saham dengan nilai sebesar Rp84.333.000.

Saat ini, PPK bergerak dalam bidang penyewaan properti dan utilitas.

Pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh saham PPK milik Perusahaan (dahulu Pelindo I) dialihkan kepada SPSL (Catatan 52f).

PHCM

PHCM didirikan berdasarkan akta No. 4 tanggal 8 November 2016 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052052.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016.

Modal dasar PHCM sebesar Rp20.000.000 terdiri atas 20.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 99,70% atau sebanyak 15.840 saham dengan nilai sebesar Rp15.840.000.
- Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 0,30% atau sebanyak 50 saham dengan nilai sebesar Rp50.000.

Saat ini, PHCM bergerak dalam bidang rumah sakit dan pelayanan kesehatan.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PPK (continued)

The authorized capital of PPK amounted to Rp3,000,000,000 composed of 3,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo I) owns 90.00% or 759,000 shares with total amount of Rp759,000,000.
- PMT owns 10.00% or 84,333 shares with total amount of Rp84,333,000.

Currently, PPK operates in real estate and utilities.

On March 1, 2022, all PPK's shares owned by the Company (formerly Pelindo I) were transferred to SPSL (Note 52f).

PHCM

PHCM was established based on deed No. 4 dated November 8, 2016 by Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0052052. AH.01.01.Tahun 2016 dated November 22, 2016.

The authorized capital of PHCM amounted to Rp20,000,000 composed of 20,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo I) owns 99.70% or 15,840 shares with total amount of Rp15,840,000.
- Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 0.30% or 50 shares with total amount of Rp50,000.

Currently, PHCM operates in hospital and health care provider.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP1

PTP1 didirikan berdasarkan akta No. 162 tanggal 30 Juli 2013 oleh Rahmad Nauli Siregar, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 3 September 2013. Perusahaan memulai kegiatan operasional di bulan April 2021.

Modal dasar PTP1 sebesar Rp4.500.000.000 terdiri atas 4.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 623.572.000 saham atau sebesar Rp623.572.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 70% atau sebanyak 436.500.000 saham dengan nilai sebesar Rp436.500.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) memiliki 15% atau sebanyak 93.536.000 saham dengan nilai sebesar Rp93.536.000.
- PT Utama Karya (Persero) memiliki 15% atau sebanyak 93.536.000 saham dengan nilai sebesar Rp93.536.000.

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 04 Juni 2020 dari Henry Tjong, SH., Notaris di Medan, bahwa saham Perusahaan yang telah disetor dan ditempatkan berjumlah Rp623.572.000. Berdasarkan Keputusan Sirkuler, para Pemegang Saham Perusahaan dengan bulat memutuskan dan menyetujui melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp958.464.000 dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar dan modal ditempatkan /disetor sebesar Rp334.892.000 dengan nominal sebesar Rp1.000 per lembar.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP1

PTP1 was established based on deed No. 162 by July 30, 2013 Rahmad Nauli Siregar, SH., Notary in Medan on, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 3, 2013. The company is started their operational activity in April 2021.

The authorized capital of PTP1 amounted to Rp4,500,000,000 composed of 4,500,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp623,572,000 composed of 623,572,000 shares with share ownership as follows:

- The Company (formerly Pelindo I) owns 70% or 436,500,000 shares with total amount of Rp436,500,000.
- PT Wijaya Karya (Persero) owns 15% or 93,536,000 shares with total amount of Rp93,536,000.
- PT Utama Karya (Persero) owns 15% or 93,536,000 shares with total amount of Rp93,536,000.

Based on Deed No. 04 dated June 04, 2020 by Henry Tjong, SH., Notary in Medan, that the Company's paid-up and issued shares amounted to Rp623,572,000. Based on the Circular Decision, the Shareholders of the Company unanimously decided and agreed to increase the authorized capital to Rp958,464,000 with a nominal value of Rp1,000 per share and the issued/paid-up capital of Rp334,892,000 with a nominal value of Rp1,000 per share.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP1 (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 30 Juli 2020 dari Henry Tjong, SH., Notaris di Medan, para Pemegang Saham Perusahaan dengan bulat memutuskan dan menyetujui melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp4.500.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar dan modal ditempatkan /disetor sebesar Rp264.000.000 dengan nominal sebesar Rp1.000 per lembar. Sehingga modal disetor semula sebesar 958.464.000 menjadi sebesar Rp1.222.464.000. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 70% atau sebanyak 855.724.000 saham dengan nilai sebesar Rp855.724.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) memiliki 15% atau sebanyak 183.370.000 saham dengan nilai sebesar Rp183.370.000.
- PT Hutama Karya (Persero) memiliki 15% atau sebanyak 183.370.000 saham dengan nilai sebesar Rp183.370.000.

Saat ini, PTP1 bergerak dalam bidang pengoperasian terminal petikemas dan jasa kepelabuhanan lainnya di Belawan.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham PTP1 milik Perusahaan (dahulu Pelindo I) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

PMT

PMT didirikan berdasarkan akta No. 04 tanggal 26 September 2014 oleh Tuti Sumarni, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-26883.40.10.2014 tanggal 29 September 2014.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP1 (continued)

Based on Deed No. 36 dated July 30, 2020 from Henry Tjong, SH., Notary in Medan, the Shareholders of the Company unanimously decided and agreed to increase the authorized capital to Rp4,500,000,000 with a nominal value of Rp. 1,000 per share and issued/paid-up capital of Rp264,000,000 with a nominal value of Rp. 1,000 per share. So that the paid-up capital was originally 958,464,000 to Rp1,222,464,000. The composition of the issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo I) owns 70% or 855,724,000 shares with total amount of Rp855,724,000.
- PT Wijaya Karya (Persero) owns 15% or 183,370,000 shares with total amount of Rp183,370,000.
- PT Hutama Karya (Persero) owns 15% or 183,370,000 shares with total amount of Rp183,370,000.

Currently, PTP1 operates in providing container services and other port services in Belawan.

On January 3, 2022, all PTP1's shares owned by the Company (formerly Pelindo I) were transferred to SPTP (Note 52e).

PMT

PMT was established based on deed No. 04 dated September 26, 2014 by Tuti Sumarni, SH., Notary in Jakarta, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU- 26883.40.10.2014 dated September 29, 2014.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PMT (lanjutan)

Modal dasar PMT sebesar Rp3.177.000.000 terdiri atas 3.177.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) memiliki 55% atau sebanyak 807.048 saham dengan nilai sebesar Rp807.048.000.
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 366.840 saham dengan nilai sebesar Rp366.840.000.
- PT Waskita Karya (Persero) memiliki 20% atau sebanyak 293.472 saham dengan nilai sebesar Rp293.472.000.

PMP

PMP didirikan berdasarkan akta No. 74 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Hj. Bambang Suprianto, SH., Sp.N., M.H di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006164.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019.

Modal dasar PMP sebesar Rp50.000.000 terdiri atas 50.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PIL memiliki 99% atau sebanyak 12.375 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.375.000.
- PMT memiliki 1% atau sebanyak 125 saham dengan nilai nominal sebesar Rp125.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PMT (continued)

The authorized capital of PMT amounted to Rp3,177,000,000 composed of 3,177,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo I) owns 55% or 807,048 shares with total amount of Rp807,048,000.
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) owns 25% or 366,840 shares with total amount of Rp366,840,000.
- PT Waskita Karya (Persero) owns 20% or 293,472 shares with total amount of Rp293,472,000.

PMP

PMP was established based on deed No. 74 dated December 28, 2018 made by Notary Hj. Bambang Suprianto, SH., Sp.N., MH in Jakarta and got approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0006164.AH.01.01.Tahun 2019 dated February 6, 2019.

The authorized capital of PMP amounted to Rp50,000,000 composed of 50,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- PIL owns 99% or 12,375 shares with total amount of Rp12,375,000.
- PMT owns 1% or 125 shares with total amount of Rp125,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTI

PTI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 12 Desember 2013 oleh Rahmad Nauli Siregar SH., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-68302.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013.

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 27 April 2016 oleh Ashoya Ratam, SH., M.kn, Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PIL telah menyertakan saham sebanyak 18.000 lembar saham PTI, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- 0008200.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Charleston Logistics Pte. Ltd. memiliki 49,00% atau sebanyak 88.200 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp44.100.000.
- PT Tason Putra Mandiri memiliki 22,80% atau sebanyak 41.040 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20.520.000.
- PIL memiliki 20,00% atau 36.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000.
- Tuan Gaotama Setiawan memiliki 8,20% atau 14.760 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.380.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTI

PTI was established under Notarial Deed No. 41 dated December 12, 2013 of Public Notary Rahmad Nauli Siregar, SH., and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU- 68302.AH.01.01.Tahun 2013 dated December 27, 2013.

Based on Deed No. 65 dated April 27, 2016 by Ashoya Ratam, SH., M.kn, Notary in Jakarta concerning the Declaration of Decisions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders', PIL has been approved to purchase of 18,000 shares in PTI, and the deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0008200.AH.01.02.Tahun 2016 dated April 28, 2016.

The capital share ownership of issued and fully paid capital are as follows:

- *Charleston Logistics Pte. Ltd. owns 49.00% or 88,200 shares with nominal amount of Rp44,100,000.*
- *PT Tason Putra Mandiri owns 22.80% or 41,040 shares with nominal amount of Rp20,520,000.*
- *PIL owns 20.00% or 36,000 shares with nominal amount of Rp18,000,000.*
- *Mr. Gaotama Setiawan owns 8.20% or 14,760 shares with nominal amount of Rp7,380,000.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

EDII

EDII didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Agustus 1995.

Modal dasar EDII adalah sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 51,00% atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000.
- PT Sisindokom Teknologi memiliki 49,00% atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, *transfer* data, penjualan piranti lunak dan pelayanan administrasi efek.

MTI

MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002.

Modal dasar MTI sebesar Rp28.500.000 terdiri dari 57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 34.629.439 saham atau sebesar Rp17.314.719.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

EDII

EDII was established based on Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1995 of Sulami Mustafa, S.H and was approved by Minister of Justice in Decree No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.

The authorized capital of EDII amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000,000 shares with share ownership as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 51.00% or 12,750,000 shares amounting to Rp12,750,000.*
- *PT Sisindokom Teknologi owns 49.00% or 12,250,000 shares amounting to Rp12,250,000.*

Currently, EDII's activities consist of providing of information data, data transfer, software sales and securities administration services.

MTI

MTI was established based on Notarial Deed of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 dated February 15, 2002. The establishment of MTI was approved by Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal April 11, 2002.

The authorized capital of MTI amounted to Rp28,500,000 composed of 57,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp17,314,719 composed of 34,629,439 shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1,00% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144.

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang jasa transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, dan kepabeanan.

Pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh saham MTI milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPSL (Catatan 52f).

RSP

RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Nelly Elsy Tahamata. SH., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999.

Modal dasar RSP sebesar Rp153.979.000 terdiri dari 153.979 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat pada tanggal 30 Juni 2020, PT Pertamina Bina Medika IHC ("PBM IHC") melakukan pengambilalihan 103.166 lembar saham RSP yang dimiliki oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) (67%) senilai Rp167.500.000.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum pengambilalihan saham tersebut sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,88% atau sebanyak 153.799 saham dengan nilai nominal sebesar Rp15.379.900.000.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,12% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MTI (continued)

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 34,283,150 shares with total amount of Rp17,141,575.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 1.00% or 346,289 shares with total amount of Rp173,144.

Currently, MTI's activities are in transportation, warehousing, cargo consolidation, cargo space provision and customs services.

On March 1, 2022, all MTI's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPSL (Note 52f).

RSP

RSP was established based on Establishment Notarial Deed of Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., No. 2 dated May 1, 1999 and has been approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia with the Decree No. C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999.

The authorized capital RSP of Rp153,979,000 composed of 153,979 shares with par value Rp1,000,000 (full amount) per share.

Based on Decision-Shares Conditional Agreement on June 30, 2020, PT Pertamina Bina Medika IHC ("PBM IHC") takeover RSP 103,166 shares owned by the Company (formerly Pelindo II) (67%) worth Rp167,500,000.

The capital share ownership of issued and fully paid capital before shares takeover is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 99.88% or 153,799 shares with total amount of Rp15,379,900,000.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.12% or 180 shares with total amount of Rp180,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

RSP (lanjutan)

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pengambilalihan saham tersebut dan pada tanggal 1 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

- PBM IHC memiliki 67% atau sebanyak 103.166 saham dengan nilai nominal sebesar Rp103.166.000.
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 32,88% atau sebanyak 50.633 saham dengan nilai nominal sebesar Rp50.633.000.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,12% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

IKT

IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November 2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IKT No. 19 tanggal 18 Juli 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, atau sejumlah sebanyak-banyaknya 557.142.800 saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana IKT, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, termasuk pengalokasian sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari saham baru yang dikeluarkan dengan program ESA (*Employee Stock Option Allocation*).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

RSP (continued)

The capital share ownership of issued and fully paid capital after shares takeover and as of October 1, 2021 is as follows:

- *PBM IHC owns 67% or 103,166 shares with total amount of Rp103,166,000.*
- *The Company (formerly Pelindo II) owns 32.88% or 50,633 shares with total amount of Rp50,633,000.*
- *Koperasi Pegawai Maritim owns 0.12% or 180 shares with total amount of Rp180,000.*

Currently, RSP activities are in health services and other health support services.

IKT

IKT was established based on Notarial Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, SH., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IKT was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 dated November 19, 2012.

*Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of IKT No. 19 dated July 18, 2018 by Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed, amount of shares issued in the context of Public Offering were at most 30% from the issued and paid-up capital after the Public Offering has been completed, or no more than 557,142,800 of new shares offered to the public through the IKT's Initial Public Offering, each with nominal value of Rp100 (full amount) per share, including allocation of at most 10% of new shares issued with the ESA (*Employee Stock Option Allocation*) program.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IKT (lanjutan)

Modal dasar IKT sebesar Rp181.838.482 terdiri dari 1.818.384.820 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh IKT adalah sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 71,28% atau sebanyak 1.296.144.749 saham dengan nilai sebesar Rp129.614.475.
- MTI memiliki 0,72% atau sebanyak 13.092.371 saham dengan nilai sebesar Rp1.309.237.
- PII memiliki 5,54% atau sebanyak 100.682.600 saham dengan nilai sebesar Rp10.068.260.
- Masyarakat memiliki 22,46% atau sebanyak 408.465.100 saham dengan nilai sebesar Rp40.846.510.

Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpang dan pelayanan logistik lainnya.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham IKT milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPMT (Catatan 52c).

ILCS

ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21 September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengakuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49,00% porsi kepemilikan saham ILCS.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IKT (continued)

The authorized capital of IKT amounting Rp181,838,482 consisted of 1,818,384,820 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of issued and paid-up capital of IKT are as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 71.28% or 1,296,144,749 shares with total amount of Rp129,614,475.
- MTI owns 0.72% or 13,092,371 shares with total amount of Rp1,309,237.
- PII owns 5.54% or 100,682,600 shares with total amount of Rp10,068,260.
- Public owns 22.46% or 408,465,100 shares with total amount of Rp40,846,510.

Currently, IKT's activities consist of car terminal management, stevedoring/cargodoring, yard operation and other logistic services.

On January 3, 2022, all IKT's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPMT (Note 52c).

ILCS

ILCS was established based on Notarial Deed No. 11 dated September 21, 2012 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. The establishment of ILCS was approved by Minister of Law and Human Rights No.AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 dated September 26, 2012.

The authorized capital of ILCS amounted to Rp400,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share.

On October 9, 2020, the Company (formerly Pelindo II) acquired the share ownership of PT Multimedia Nusantara in ILCS of 4,900,000 shares or equivalent to 49.00% of the share ownership of ILCS.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

ILCS (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 14 September 2021 oleh Notaris Refki Ridwan, S.H, M.BA, Sp.N, PPI menyetorkan saham dalam portepel sejumlah 101.010 lembar saham pada ILCS dengan nilai Rp1.010.100. Penyetoran saham dalam portepel tersebut telah disetujui oleh pemegang saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham No. PR.03/7/4/1/PCB/UT/PI.II-21.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum penyetoran saham tersebut sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 100,00% atau sebanyak 10.000.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp100.000.000.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah penyetoran saham tersebut sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 10.000.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp100.000.000.
- PPI memiliki 1,00% atau sebanyak 101.010 lembar saham dengan nilai sebesar Rp1.010.100.

Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *e-trade logistic* dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa *e-commerce*, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

ILCS (continued)

Based on Deed No. 12 on September 14, 2021 by Notary Refki Ridwan, S.H, M.BA, Sp.N, PPI deposited portfolio stocks amounted 101,010 shares in ILCS with transfer value of Rp1,010,100. The deposit of portfolio stocks has been approved by the shareholders based on the Decision of the Shareholders Without Going Through The General Meeting of Shareholders No. PR.03/7/4/1/PCB/UT/PI.II-21.

The capital share ownership of issued and fully paid capital before shares deposits is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 100.00% or 10,000,000 shares with total amount of Rp100,000,000.

The capital share ownership of issued and fully paid capital before shares depositis as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 10,000,000 shares with total amount of Rp100,000,000.
- PPI owns 1.00% or 101,010 shares with total amount of Rp1,010,100.

Currently, ILCS' activities consist of providing *e-trade logistic services* and other services including data management, *e-commerce*, consultation on computing and informatics engineering services, software development services, multimedia provision and utilization through telecommunication hardware and consultation in information technology services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PPI

PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan (dahulu Pelindo II) melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp900.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp225.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan MTI masing-masing sebesar Rp224.750.000 dan Rp250.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-0019856.AH.01.02 tanggal 25 September 2018.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 37 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam PPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp342.000.

Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,89% atau sebanyak 22.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp224.750.000.
- PII memiliki 0,11% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PPI

PPI was established based on Notarial Deed No. 9 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Deed No. 11 dated September 13, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company (formerly Pelindo II) increased the authorized capital to Rp900,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp225,000,000 which was subscribed by the Company (formerly Pelindo II) and MTI amounting to Rp224,750,000 and Rp250,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0019856.AH.01.02 dated September 25, 2018.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 37 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in PPI to PII with a buying price of Rp342,000.

The authorized capital of PPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.89% or 22,475,000 shares with total amount of Rp224,750,000.*
- *PII owns 0.11% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PPI (lanjutan)

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pengembangan pelabuhan.

Pada tanggal 17 Februari 2022, PPI berubah nama menjadi PT Pelindo Solusi Logistik (Catatan 52c).

JPPI

JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam JPPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp227.500.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrik dan mekanikal, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*), serta bidang usaha terkait.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PPI (continued)

Currently, PPI engages in port development.

On February 17, 2022, PPI change its company name to PT Pelindo Solusi Logistik (Note 52c).

JPPI

JPPI was established based on Notarial Deed No. 8 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in JPPI to PII with a buying price of Rp227,500.

The authorized capital of JPPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 2,475,000 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, JPPI activities are in providing technical activities including installation, reparation and maintenance and installation of technical tools, installation of equipment for water, gas, telecommunication, electrical and mechanical and boiler/pressure vessel and the related activities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JPPI (lanjutan)

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham JPPI milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

EPI

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

Modal dasar EPI sebesar Rp174.543.000 terdiri dari 17.454.300 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 55,00% atau sebanyak 2.400.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.000.000.
- PT Haleyora Power memiliki 45,00% atau sebanyak 1.963.575 saham dengan nilai sebesar Rp19.635.750.

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik dan penyediaan air bersih di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham EPI milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

Rukindo

Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JPPI (continued)

On January 3, 2022, all JPPI's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPJM (Note 52d).

EPI

EPI was established based on Notarial Deed No. 11 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 14, 2012.

The authorized capital of EPI amounted to Rp174,543,000 composed of 17,454,300 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 55.00% or 2,400,000 shares with total amount of Rp24,000,000.
- PT Haleyora Power owns 45.00% or 1,963,575 shares with total amount of Rp19,635,750.

Currently, EPI's activities consist of providing electrical supply and supplying treated water on port areas and surrounding.

On January 3, 2022, all EPI's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPJM (Note 52d).

Rukindo

Rukindo was established under the name of PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Deed No. 2 dated October 1, 1991 of Achmad Bajumi, S.H., a substitute of Notary Imas Fatimah, S.H., which was subsequently amended by Deed No. 51 dated February 11, 1992 of Notary Imas Fatimah, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Rukindo (lanjutan)

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 47 tanggal 28 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan (dahulu Pelindo II) menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp195.000.000 yang akan dikonversi menjadi modal pada akhir tahun ke-10 (sepuluh). Saham yang diterbitkan sejumlah 195.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 48 tanggal 28 Desember 2017 yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima 70.000 saham baru sebagai hasil konversi utang Rukindo kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II). Kepemilikan saham Perusahaan (dahulu Pelindo II) di Rukindo bertambah menjadi 99,93%.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,93% atau sebanyak 806.622 saham dengan nilai sebesar Rp806.622.000.
- PPI memiliki 0,07% atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham Rukindo milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Rukindo (continued)

The authorized capital of Rukindo amounted to Rp2,000,000,000 composed of 2,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 47 dated December 28, 2017, the Company's (formerly Pelindo II) shareholders approved the following matters:

- Increase in the issued and paid capital from Rp195,000,000 which will be converted into capital at the end of 10 (ten) year. The issued shares amounted to 195,000 shares with a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 48 dated December 28, 2017, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-AH.01.03-0007913 dated January 10, 2018, the Company (formerly Pelindo II) received 70,000 newly-issued shares as a result of the conversion of Rukindo's payable to the Company (formerly Pelindo II). The Company's (formerly Pelindo II) shares ownership in Rukindo increased to 99.93%.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 99.93% or 806,622 shares with total amount of Rp806,622,000.
- PPI owns 0.07% or 542 shares with total amount of Rp542,000.

Currently, Rukindo's main activities consist of dredging of sail navigation channel, port basin, reclamation and transportation of dredging products.

On January 3, 2022, all Rukindo shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPJM (Note 52d).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JAI

JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JAI No. 14 tanggal 11 Oktober 2017 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham JAI menyetujui diantaranya:

- Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Pengeluaran saham dari portopel JAI, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum selesai dilaksanakan atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.743.987.600 saham baru, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham JAI.
- Meningkatkan modal dasar JAI dari sebesar Rp100.000.000 menjadi Rp1.500.000.000, yang terbagi atas 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp58.000.000 menjadi Rp406.930.460 dimana peningkatan sebesar Rp348.930.460 atau sebesar 3.489.304.600 saham dilakukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) melalui inbreng 21 unit kapal, terdiri dari 9 unit kapal pandu, 10 unit kapal tunda dan 2 unit kapal kepil. Inbreng kapal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Toto Suharto & Rekan dengan hasil penilaian No. P.PP.17.00.0111 tanggal 9 Juni 2017.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JAI

JAI was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 9, 2013.

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of JAI No. 14 dated October 11, 2017 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, JAI's shareholders agree among others:

- Change in par value of share from Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share.
- Issuance of shares from JAI's portfolio, which represents new shares issued from the portfolio of as much as 30% of the issued and paid-up capital after the public offering has been completed or as much as 1,743,987,600 new shares, offered to the public through initial public offering.
- Increase of the authorized share capital of JAI from Rp100,000,000 to Rp1,500,000,000, divided into 15,000,000,000 shares at par value of Rp100 (full amount) per share and the increase of issued and paid-up capital from Rp58,000,000 to Rp406,930,460 whereby an increase of Rp348,930,460 or 3,489,304,600 shares was performed by the Company (formerly Pelindo II) through injection of 21 units of vessels, consist of 9 units of pilotage vessels, 10 units of tug vessels and 2 units of mooring vessels. Injection of vessels has been appraised by KJPP Toto Suharto & Partners through appraisal report No. P.PP.17.00.0111 dated June 9, 2017.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JAI (lanjutan)

Modal dasar JAI sebesar Rp1.500.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 76,89% atau sebanyak 4.063.504.600 saham dengan nilai sebesar Rp406.350.460.
- MTI memiliki 0,11% atau sebanyak 5.800.000 saham dengan nilai sebesar Rp580.000.
- PII memiliki 10,78% atau sebanyak 569.551.400 saham dengan nilai sebesar Rp56.955.140.
- Masyarakat memiliki 12,07% atau sebanyak 637.915.300 saham dengan nilai sebesar Rp63.791.530.
- Saham treasury 0,15% atau sebanyak 8.039.800 saham dengan nilai sebesar Rp803.980

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham JAI milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

PMLI

PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JAI (continued)

The authorized capital of JAI amounted to Rp1,500,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp100 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 76.89% or 4,063,504,600 shares with total amount of Rp406,350,460.
- MTI owns 0.11% or 5,800,000 shares with total amount of Rp580,000.
- PII owns 10.78% or 569,551,400 shares with total amount of Rp56,955,140.
- Public owns 12.07% or 637,915,300 shares with total amount of Rp63,791,530.
- Treasury stock 0.15% or 8,039,800 shares with total amount Rp803,980

Currently, JAI's activities consist of pilotage and tug services, sea, river, lake and crossing transportation, ship rental and ship agencies.

On January 3, 2022, all JAI's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPJM (Note 52d).

PMLI

PMLI was established based on Notarial Deed No. 26 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PMLI was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 2, 2013.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PMLI (lanjutan)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 1 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 300 saham yang ada dalam PMLI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp173.500.

Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 29.700 saham dengan nilai sebesar Rp29.700.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.

Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan, pelatihan, konsultasi di bidang maritim dan logistik serta mengelola fasilitas dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan.

PTP

PTP didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PMLI (continued)

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 1 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 300 shares in PMLI to PII with a buying price of Rp173,500.

The authorized capital of PMLI amounted to Rp120,000,000 composed of 120,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 29,700 shares with total amount of Rp29,700,000.*
- *PII owns 1.00% or 300 shares with total amount of Rp300,000.*

Currently, PMLI's activities consist of providing educational, training services, consultation on maritime and logistic areas and also managing facilities and infrastructure of education and training.

PTP

PTP was established based on Notarial Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PTP was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian No.HK.566/20/13/PI/II-13 tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PTP mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo II) setuju untuk memberikan hak kepada PTP untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta penggunaan lahan pelabuhan yang merupakan aset milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan addendum II No. KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 dan No. HK.566/27/12/1/PTP-17 tanggal 27 Desember 2017 dimana PTP dan Perusahaan (dahulu Pelindo II) sepakat, diantaranya untuk tidak lagi mengadakan kerjasama serah operasi Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam PTP kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp16.549.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

Based on agreement No. HK.566/20/13/PI/II-13, dated December 27, 2013, the Company (formerly Pelindo II) and PTP entered into Agreement of Handover of Port Facilities, Port Supporting Facilities and Land under Right to Operate (HPL) of the Company (formerly Pelindo II) on Tanjung Priok Branch. Based on the agreement, the Company (formerly Pelindo II) agreed to provide the rights to PTP to operate port facilities and port supporting facilities also the land owned by the Company (formerly Pelindo II) to perform Port Services and other services based on the terms and condition stipulated in the agreement. This agreement have been extended several times. Recently with addendum II No. KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 and No. HK.566/27/12/1/PTP-17 dated on December 27, 2017 whereas PTP and the Company (formerly Pelindo II) agreed among others, to no longer holding the cooperation of handover of the Right to Operate (HPL) owned by Company's (formerly Pelindo II) Tanjung Priok Branch.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 29 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in PTP to PII with a buying price of Rp16,549,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan (dahulu Pelindo II) tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 18 Mei 2018, diatur mengenai zonasi bisnis PTP di cabang pelabuhan Perusahaan (dahulu Pelindo II), termasuk kegiatan pengoperasian dan pola kerjasama serta pembagiannya.

Pada tanggal 16 Juli 2018, PTP melakukan *spin-off* operasi petikemasnya di pelabuhan Tanjung Priok kepada IPC TPK, pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Juli 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) cabang Bengkulu dan Jambi terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 Agustus 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) cabang Panjang terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 September 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) cabang Banten terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

The authorized capital of PTP amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

Based on Company's (formerly Pelindo II) Directors' Decision Letter dated December 22, 2017, as has been amended on May 18, 2018, it regulated PTP's business zonation in Company's (formerly Pelindo II) port branches, including the operational activities as well as the agreement scheme and allocation.

On July 16, 2018, PTP spins-off its container operation in Tanjung Priok port to IPC TPK, a related party.

On July 31, 2018, PTP cooperates with Company's (formerly Pelindo II) Bengkulu branch and Jambi branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On August 1, 2018, PTP cooperates with Company's (formerly Pelindo II) Panjang branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On September 1, 2018, PTP cooperates with Company's (formerly Pelindo II) Banten branch in relation to operational and management of non-container terminal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Pada tanggal 1 Januari 2019, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) cabang Palembang, Pangkal Balam, Cirebon dan Tanjung Pandan terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 Juli 2019, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) cabang Teluk Bayur terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham PTP milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPMT (Catatan 52c).

IPC TPK

IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam IPC TPK kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp7.915.500.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

On January 1, 2019, PTP cooperates with the Company's (formerly Pelindo II) Palembang branch, Pangkal Balam branch, Cirebon branch and Tanjung Pandan branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On July 1, 2019, PTP cooperates with the Company's (formerly Pelindo II) Teluk Bayur branch in relation to operational and management of non-container terminal.

Currently, PTP's activities consist of container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and warehousing and field services.

On January 3, 2022, all PTP's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPMT (Note 52c).

IPC TPK

IPC TPK was established based on Notarial Deed No. 25 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IPC TPK was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 dated July 25, 2013.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 36 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in IPC TPK to PII with a buying price of Rp7,915,500.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IPC TPK (lanjutan)

Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, IPC TPK bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas dan jasa kepelabuhanan lainnya.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham IPC TPK milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

PII

PII didirikan berdasarkan Akta No. 112 tanggal 17 November 2017 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017.

Modal dasar PII sebesar Rp800.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,00% atau sebanyak 198.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp198.000.000.
- MTI memiliki 1,00% atau sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.

Saat ini, PII bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan maupun jasa terkait kepelabuhanan lainnya, investasi di pasar modal dan pasar uang, jasa konsultasi bisnis serta bertindak sebagai penasihat.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IPC TPK (continued)

The authorized capital of IPC TPK amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, IPC TPK's activities consist of container terminal services and other port services.

On January 3, 2022, all IPC TPK's shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPTP (Note 52e).

PII

PII was established based on Deed No. 112 dated November 17, 2017 of Notary Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision letter No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 dated November 21, 2017.

The authorized capital of PII amounted to Rp800,000,000 which is divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 99.00% or 198,000 shares with total amount of Rp198,000,000.
- MTI owns 1.00% or 2,000 shares with total amount of Rp2,000,000.

Currently, PII's activities consist of investment in companies engaged in port services and other port related services, investment in capital markets and money markets, business consultancy services and acting as advisor.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

API

API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014. Anggaran Dasar API telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan (dahulu Pelindo II) melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

API

API was established based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014. API's Articles of Association has been amended based on Deed No. 29 dated March 26, 2015 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, regarding the increase in authorized and paid-in capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 dated April 27, 2015.

Based on Deed No. 33 dated December 21, 2017 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company (formerly Pelindo II) increased the authorized capital to Rp1,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp386,000,000 which was subscribed by PPI and PTP amounting to Rp382,140,000 and Rp3,860,000, respectively. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0027756.AH.01.02. TAHUN 2017 dated December 27, 2017.

Based on Deed No. 26 dated December 28, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the issued and fully paid capital to Rp805,760,000 which was subscribed by PPI and PTP amounted to Rp801,900,000 and Rp3,860,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

API (lanjutan)

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 99,52% atau sebanyak 80.190.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp801.900.000.
- PTP memiliki 0,48% atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.

Saat ini, kegiatan API terutama terkonsentrasi pada investasi pada CTP, entitas asosiasi yang bergerak dalam penyelenggaraan proyek jalan tol.

NPCT1

NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC TPK memiliki 51,00% atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki 49,00% atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

Saat ini, NPCT1 bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat barang.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

API (continued)

The capital share ownership of issued and fully paid capital are as follows:

- PPI owns 99.52% or 80,190,000 shares with total amount of Rp801,900,000.
- PTP owns 0.48% or 386,000 shares with total amount of Rp3,860,000.

Currently, the API's activities are primarily concentrated on investment in CTP, an associate which is engaged in a toll road project.

NPCT1

NPCT1 was established based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

The authorized capital of NPCT1 amounted to Rp340,725,600 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital are as follows:

- IPC TPK owns 51.00% or 510 Class A shares with total amount of Rp173,770,056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49.00% or 490 Class B shares with total amount of Rp166,955,544.

Currently, NPCT1 engage in cargo handling services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JICT

JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsyé Tahamata, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH'99 tanggal 29 Maret 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsyé Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut (Catatan 50f, 50g, 50h dan 50i):

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 48,90% atau sebanyak 216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp108.289.249.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,10% atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp221.449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) memiliki 51,00% atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JICT

JICT was established based on Notarial Deed No. 72 dated March 27, 1999 of Notary Nelly Elsyé Tahamata, S.H., M.Kn. The establishment of JICT was approved by Minister of Law and Human Rights No. C-5466.HT.01.01.TH'99 dated March 29, 1999.

Based on Deed of Amendment No. 77 and 78 dated March 30, 1999 by Notary Nelly Elsyé Tahamata, S.H., the authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406, comprising of 1 Series A share for The Government of Republic of Indonesia portion and 442,900,812 Series B shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows (Note 50f, 50g, 50h and 50i):

- The Company (formerly Pelindo II) owns 48.90% or 216,578,498 Series B shares with total amount of Rp108,289,249.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.10% or 442,899 Series B shares with total amount of Rp221,449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 51.00% or 225,879,415 Series B shares with total amount of Rp112,939,707.

Currently, JICT's activities consist of port services, container terminal services, dockyard and other related services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Imas Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 ("Amendemen I") dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011 ("Amendemen II"), tanggal 5 Agustus 2014 ("Amendemen III") dan tanggal 22 Juni 2015. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu tanggal 1 November 1998 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Maret 2039 (Catatan 50e).

Proporsi investasi partisipan untuk tahun 2021 adalah 54,91% untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan 45,09% untuk HPI.

Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas.

CTP

Berdasarkan Perjanjian Pengambilbagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham MTDX tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, API, MTD Capital Bhd dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa API akan melakukan investasi di MTDX dengan cara mengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan MTDX. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan API menjadi pemilik 45,00% saham MTDX.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja was established based on Deed No. 53 dated October 23, 1996 of Imas Fatimah, S.H. and on Master Cooperation Agreement dated August 16, 1994 between the Company (formerly Pelindo II) and PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). The agreement was substantially revised on March 26, 1999 ("Amendment I") and revised further on June 22, 2011 ("Amendment II"), August 5, 2014 ("Amendment III") and June 22, 2015. The term of the agreement is 20 (twenty) years from the date of commencement of full commercial operations on November 1, 1998 and has been extended until March 26, 2039 (Note 50e).

The investment proportions of the participants for the year 2021 are 54.91% for the Company (formerly Pelindo II) and 45.09% for HPI.

Currently, TPK Koja's activities consist of operating and managing a container port and terminal.

CTP

Based on Conditional Share Subscription Agreement and Shareholders Agreement of MTDX dated April 14, 2015, which was amended and restated on August 28, 2015, API, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that API will invest in MTDX by subscribing to 130,220 new shares with a total nominal amount of Rp118,500,200 (representing 45% share ownership) issued by MTDX. On September 18, 2015, the transaction was completed and API became the owner of 45.00% shares in MTDX.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

CTP (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX mengganti nama menjadi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0011468.AH.01.02 tanggal 26 Mei 2017.

Pada bulan Oktober 2021, API meningkatkan kepemilikan saham di CTP dari 45,00% menjadi 100,00% (Catatan 1g).

MKO MTKI

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu perjanjian adalah 25 (dua puluh lima) tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45,00% dan 55,00%.

Pada bulan Maret 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia telah beroperasi secara komersial dan bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan.

MMI

MMI didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Juli 2018 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0033122.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018.

Modal dasar MMI sebesar Rp350.000.000 yang terbagi atas 350.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

CTP (continued)

Based on Deed No. 17 dated May 24, 2017 drawn before Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX change the name to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0011468.AH.01.02 dated May 26, 2017.

On October 2021, API increase share ownership in CTP from 45.00% to 100.00% (Note 1g).

MKO MTKI

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate ("MIE") by establishing MKO MTKI. The period of agreement is 25 (twenty five) years with the funding portion for IKT and MIE amounted to 45.00% and 55.00%, respectively.

On March, 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia has operated commercially and engages in car terminal operation.

MMI

MMI was established based on Deed No. 16 dated July 5, 2018 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0033122.AH.01.01. Tahun 2018 dated July 16, 2018.

The authorized capital of MMI amounted to Rp350,000,000 which is divided into 350,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MMI (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MMI No. 54 tanggal 16 April 2021, PPI mengakuisisi kepemilikan saham PT PP Properti Tbk pada MMI sebanyak 656.250.000 lembar saham atau setara dengan 21,13% porsi kepemilikan saham MMI dengan nilai pengalihan sebesar Rp70.087.500.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum pengambilalihan saham tersebut sebagai berikut:

- PPI memiliki 78,87% atau sebanyak 2.450.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp245.000.000.
- PT PP Properti Tbk memiliki 21,13% atau sebanyak 656.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp65.625.000.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah pengambilalihan saham tersebut sebagai berikut:

- PPI memiliki 100,00% atau sebanyak 3.106.250.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp310.625.000.

Saat ini, MMI belum melakukan kegiatan komersial.

Pada tanggal 17 Februari 2022, PPI berubah nama menjadi PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) (Catatan 52c).

TPS

TPS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 April 1999 oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No.C-6465 HT.01.01 Th.99 tanggal 9 April 1999.

Modal dasar TPS sebesar Rp127.884.057 terdiri dari 255.768.116 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MMI (continued)

Based on the Decision of the Meeting Deed of MMI No. 54 dated April 16, 2021, PPI acquired the share ownership of PT PP Properti Tbk in MMI of 656,250,000 shares or equivalent to 21,13% of the share ownership of MMI with transfer value of Rp70,087,500.

The capital share ownership of issued and fully paid capital before shares takeover is as follows:

- *PPI owns 78.87% or 2,450,000,000 shares with total amount of Rp245,000,000*
- *PT PP Properti Tbk owns 21.13% or 656,250,000 shares with total amount of Rp65,625,000.*

The capital share ownership of issued and fully paid capital after shares takeover is as follows:

- *PPI owns 100.00% or 3,106,250,000 shares with total amount of Rp310,625,000.*

At the moment, MMI has not performed any commercial activities.

On February 17, 2022, PPI change its company name to PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) (Note 52c).

TPS

TPS was established under the Notarial Deed No. 1 dated April 1, 1999 of Notary Rahmat Santoso, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-6465 HT.01.01 Th.99 dated April 9, 1999.

The authorized capital of TPS amounted to Rp127,884,057 composed of 255,768,116 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPS (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 50,50% atau sebanyak 129.162.897 saham dengan nilai nominal Rp64.581.448.
- P&O Dover memiliki 49,00% atau sebanyak 125.326.377 saham dengan nilai nominal Rp62.663.188.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau sebanyak 1.278.841 saham dengan nilai nominal Rp639.420.

Berdasarkan Akta Notaris No. 143 tanggal 28 April 2019, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, mengenai Perjanjian Pemindahan Hak (Jual Beli) Saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 99,50% atau sebanyak 254.489.274 saham dengan nilai nominal Rp127.244.637.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau sebanyak 1.278.841 saham dengan nilai nominal Rp639.420.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham TPS milik Perusahaan (dahulu Pelindo III) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

BJTI

BJTI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 9 Januari 2002 oleh Notaris Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 tanggal 5 Maret 2002.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPS (continued)

- The Company (formerly Pelindo III) owns 50.50% or 129,162,897 shares with total amount of Rp64,581,448.
- P&O Dover owns 49.00% or 125,326,377 shares with total amount of Rp62,663,188.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 1,278,841 shares with total amount of Rp639,420.

Based on Notarial Deed No. 143 dated April 28, 2019, by Notary Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notary in Surabaya, regarding the Agreement on Transfer of Rights (Sale and Purchase) of Shares. The composition of the issued and fully paid capital as of January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

- The Company (formerly Pelindo III) owns 99.50% or 254,489,274 shares with total amount of Rp127,244,637.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 1,278,841 shares with total amount of Rp639,420.

On January 3, 2022, all TPS's shares owned by the Company (formerly Pelindo III) were transferred to SPTP (Note 52e).

BJTI

BJTI was established under the Notarial Deed No. 1 dated January 9, 2002 of Notary Moendjiati Soegito S.H., Notary in Jakarta, and was approved Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 dated March 5, 2002.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

BJTI (lanjutan)

Anggaran Dasar BJTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 1 tanggal 1 Maret 2017 oleh Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2017 dan peningkatan modal dasar menjadi Rp4.000.000.000 terbagi atas 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham dan persetujuan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp1.114.310.000 terbagi atas 1.114.310 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-0006656.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 18 Maret 2017.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (Pelindo III) memiliki 96,84% atau sebanyak 1.079.138 saham dengan nilai sebesar Rp1.079.138.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 3,16% atau sebanyak 35.172 saham dengan nilai nominal sebesar Rp35.172.000.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham BJTI milik Perusahaan (dahulu Pelindo III) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

PMS

PMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 31 Desember 2011 oleh Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-34988.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.

Modal dasar PMS sebesar Rp260.500.000 terdiri dari 260.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

BJTI (continued)

BJTI's Articles of Association has been amended several times, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 1 dated March 1, 2017 by Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the approval of Company's Budget Plan (RKAP) year 2017 and increase of authorized capital to become Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share and approval of reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp1,114,310,000 divided into 1,114,310 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-0006656.AH.01.02. Year 2017 dated March 18, 2017.

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *The Company (formerly Pelindo III) owns 96.84% or 1,079,138 shares amounting to Rp1,079,138,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 3.16% or 35,172 shares amounting to Rp35,172,000.*

On January 3, 2022, all BJTI's shares owned by the Company (formerly Pelindo III) were transferred to SPTP (Note 52e).

PMS

PMS was established under the Notarial Deed No. 8 dated December 31, 2011, of Notary Stephanus R. Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-34988.AH.01.01 Tahun 2012 dated September 27, 2012.

The authorized capital of PMS amounted to Rp260,500,000 composed of 260,500,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PMS (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 97,89% atau sebanyak 255.000.000 saham dengan nilai nominal Rp255.000.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 2,11% atau sebanyak 5.500.000 saham dengan nilai nominal Rp5.500.000.

Anggaran Dasar PMS telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 1 tanggal 18 November 2019 oleh Heni Yuniartin, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar menjadi Rp310.500.000.000 terbagi atas 310.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0361631 Tahun 2019 tanggal 19 November 2019.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki 98,23% atau sebanyak 305.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp305.000.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 1,77% atau sebanyak 5.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.500.000.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham PMS milik Perusahaan (dahulu Pelindo III) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

TTL

TTL didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 309 tanggal 30 Desember 2013, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., Magister Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-10997.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PMS (continued)

- The Company (formerly Pelindo III) owns 97.89% or 255,000,000 shares with total amount of Rp255,000,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 2.11% or 5,500,000 shares with total amount of Rp5,500,000.

PMS's Articles of Association has been amended, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 1 dated November 18, 2019 by Heni Yuniartin, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the notification amendment of the Articles of Association to become Rp310,500,000,000 divided into 310,500,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0361631 Year 2019 dated November 19, 2019.

The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- The Company (formerly Pelindo III) owns 98.23% or 305,000,000 shares amounting to Rp305,000,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.77% or 5,500,000 shares amounting to Rp5,500,000.

On January 3, 2022, all PMS's shares owned by the Company (formerly Pelindo III) were transferred to SPJM (Note 52d).

TTL

TTL was established under Notarial Deed No. 309 dated December 30, 2013, of Notary Yatiningsih, S.H., Master of Laws, Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-10997.AH.01.01 Tahun 2014 dated March 13, 2014.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TTL (lanjutan)

Modal dasar TTL sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 400.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 99,50% atau sebanyak 134.325 saham dengan nilai nominal Rp134.325.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau 675 saham dengan nilai nominal Rp675.000.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham TTL milik Perusahaan (dahulu Pelindo III) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

PDS

PDS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 10 Maret 2008 oleh Notaris Inas Abdullah Thalib, S.H., Notaris di Gresik, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-18839AH.01.01.TH.2008 tanggal 16 April 2008.

Modal dasar PDS sebesar Rp17.500.000 terdiri dari 35.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 31.500 saham dengan nilai nominal Rp15.750.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 10,00% atau sebanyak 3.500 saham dengan nilai nominal Rp1.750.000.

PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas (dahulu PT Berlian Manyar Stevedore ("BMST"))

BMST didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 241 tanggal 28 Januari 2016, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013280.AH.01.11 tanggal 30 Januari 2016.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TTL (continued)

The authorized capital of TTL amounted to Rp400,000,000 composed of 400,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company (formerly Pelindo III) owns 99.50% or 134,325 shares with total amount of Rp134,325,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 675 shares with total amount of Rp675,000.

On January 3, 2022, all TTL's shares owned by the Company (formerly Pelindo III) were transferred to SPTP (Note 52e).

PDS

PDS was established under Notarial Deed No. 41 dated March 10, 2008 by Notary Inas Abdullah Talib, S.H., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-18839AH.01.01.TH.2008 dated April 16, 2008.

The authorized capital of PDS amounted to Rp17,500,000 composed of 35,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- The Company (formerly Pelindo III) owns 90.00% or 31,500 shares with total amount of Rp15,750,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 3,500 shares with total amount of Rp1,750,000.

PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas (formerly PT Berlian Manyar Stevedore ("BMST"))

BMST was established under Notarial Deed No.241 dated January 28, 2016 by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0013280.AH.01.11 dated January 30, 2016.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

**PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas (d/h
PT Berlian Manyar Stevedore ("BMST"))
(lanjutan)**

Modal dasar BMST adalah sebesar Rp2.000.000 terdiri dari 2.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 60,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.
- UEPN memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 200 saham dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 6 September 2019, dan Akta Notaris No. 08 tanggal 31 Oktober 2019, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai Perjanjian Jual Beli saham "PT Berlian Manyar Stevedore". Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 1 Januari 2020/31 Desember 2019 sebagai berikut:

- TPS memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 495 saham dengan nilai sebesar Rp495.000.
- UEPN memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 5 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 11 November 2019, oleh Notaris Mira Irani S.H., M.Kn., PT BMST mengubah namanya menjadi PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas ("PT Pelindo3 TPK") dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063161.AH.01.01 tanggal 28 November 2019.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

**PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas
(d/h PT Berlian Manyar Stevedore ("BMST"))
(continued)**

The authorized capital of BMST amounted to Rp2,000,000 composed of 2,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- BJTI owns 60.00% or 300 shares amounting to Rp300,000.
- UEPN owns 40.00% or 200 shares amounting to Rp200,000.

Based on Notarial Deed No. 02 dated September 6, 2019, and Notary Deed No. 08 dated October 31, 2019, by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the Agreement of Sale and Purchase of shares "PT Berlian Manyar Stevedore". The composition of the issued and fully paid capital as of January 1, 2020/ December 31, 2019 are as follows:

- TPS owns 99.00% or 495 shares amounting to Rp495,000.
- UEPN owns 1.00% or 5 shares amounting to Rp5,000.

Based on Notary Deed No. 03 dated November 11, 2019 by Notary Mira Irani S.H., M.Kn., PT BMST changed its name to PT Pelindo3 Terminal Peti Kemas ("PT Pelindo3 TPK") which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0063161.AH.01.01 dated November 28, 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

BMS

BMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 12 Juni 2012 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya. PT BMS secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.164 Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013.

Modal dasar BMS adalah sebesar Rp1.000.000.000 terdiri dari 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 60,00% atau sebanyak 432.600 saham dengan nilai sebesar Rp432.600.000.
- UEPN memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 288.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.400.000.

PPI1

PPI1 didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 5 Desember 2014 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0130014.40.80.2014 tanggal 12 Desember 2014.

Modal dasar PPI1 adalah sebesar Rp220.000.000 terdiri dari 220.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 99,91% atau sebanyak 84.920.000 saham dengan nilai sebesar Rp84.920.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 0,09% atau sebanyak 80.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp80.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

BMS

BMS was established under Notarial Deed No. 12 dated June 12, 2012 of Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya. PT BMS had officially become Badan Usaha Pelabuhan (BUP), by Minister of Transportation under Decision Letter No. KP.164 Year 2013 dated February 15, 2013.

The authorized capital of BMS amounted to Rp1,000,000,000 composed of 1,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT BJTI owns 60.00% or 432,600 shares amounting to Rp432,600,000.*
- *UEPN owns 40.00% or 288,400 shares amounting to Rp288,400,000.*

PPI1

PPI1 was established under Notarial Deed No. 5 dated December 5, 2014 by Notary Yahya Abdullah Waber, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0130014.40.80.2014 dated December 12, 2014.

The authorized capital of PPI1 amounted to Rp220,000,000 composed of 220,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PT BJTI owns 99.91% or 84,920,000 shares amounting to Rp84,920,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.09% or 80,000 shares amounting to Rp80,000.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

BIMA

BIMA didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 11 November 2015 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-2468002.AH.01.01 tanggal 23 November 2015.

Modal dasar BIMA adalah sebesar Rp10.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 90,00% atau 6.750 saham dengan nilai sebesar Rp6.750.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp750.000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 17 tanggal 6 September 2021 oleh Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, mengenai pengesahan peningkatan modal dasar menjadi Rp90.000.000 terbagi atas 90.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp22.500.000 terbagi atas 22.500 lembar saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0049916.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 15 September 2021. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 90,00% atau 20.250 saham dengan nilai sebesar Rp20.250.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 2.250 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.250.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

BIMA

BIMA was established under Notarial Deed No. 6 dated November 11, 2015, by Notary Yahya Abdullah Waber, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-2468002.AH.01.01 dated November 23, 2015.

The authorized capital of BIMA amounted to Rp10,000,000 composed of 10,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *BJTI owns 90.00% or 6,750 shares amounting to Rp6,750,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 750 shares amounting to Rp750,000.*

The Company's Articles of Association has been amended, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 17 dated September 6, 2021 by Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, regarding the approval of the increase of authorized capital to Rp90,000,000 divided into 90,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share and the increase of issued and fully paid shares to Rp22,500,000 divided into 22,500 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree No. AHU-0049916.AH.01.02 year 2021 dated September 15, 2021. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *BJTI owns 90.00% or 20,250 shares amounting to Rp20,250,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 2,250 shares amounting to Rp2,250,000.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TCS

TCS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 189 tanggal 15 Desember 2015, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0003534.AH.01.01 tanggal 21 Januari 2016.

Modal dasar TCS adalah sebesar Rp240.000.000 terdiri dari 240.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 51,00% atau sebanyak 30.600 saham dengan nilai sebesar Rp30.600.000.
- PT Andahanesa Abadi memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 29.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp29.400.000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 74 tanggal 29 Januari 2020 oleh Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, mengenai pengesahan penurunan modal dasar menjadi Rp8.000.000 terbagi atas 8.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham dan penurunan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp2.000.000 terbagi atas 2.000 lembar saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0026976.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 1 April 2020.

APBS

APBS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 21 April 2014 oleh Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-06051.40.10.2014 tanggal 25 April 2014.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TCS

TCS was established, under Notarial Deed No. 189 dated December 15, 2015, by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0003534.AH.01.01 dated January 21, 2016.

The authorized capital of TCS amounted to Rp240,000,000 composed of 240,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- BJTI owns 51.00% or 30,600 shares amounting to Rp30,600,000.
- PT Andahanesa Abadi owns 49.00% or 29,400 shares amounting to Rp29,400,000.

The Company's Articles of Association has been amended, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 74 dated January 29, 2020 by Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, regarding the approval of the decrease of authorized capital to Rp8,000,000 divided into 8,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share and the decrease of issued and fully paid shares to Rp2,000,000 divided into 2,000 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree No. AHU-0026976.AH.01.02 year 2020 dated April 1, 2020.

APBS

APBS was established under Notarial Deed No. 9 dated April 21, 2014 by Notary Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notary in Depok, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-06051.40.10.2014 dated April 25, 2014.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

APBS (lanjutan)

Modal dasar APBS adalah sebesar Rp750.000.000 terdiri dari 750.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 168.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp168.750.000.
- Van Oord memiliki sebesar 5,00% atau sebanyak 9.375.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.375.000.
- Gerbang Sarana Utama memiliki sebesar 5,00% atau sebanyak 9.375.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.375.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 10 Februari 2021 oleh Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, Notaris di Surabaya, mengenai jual beli saham serta perubahan komposisi kepemilikan saham dari "PT Alur Pelayaran Barat Surabaya". Komposisi modal yang telah ditempatkan per 1 Oktober 2021 sebagai berikut:

- PMS memiliki sebesar 93,00% atau sebanyak 174.375.000 saham dengan nilai sebesar Rp174.375.000.
- Gerbang Sarana Utama memiliki sebesar 7,00% atau sebanyak 13.125.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp13.125.000.

PEL

PEL didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 9 September 2014 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-2963.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014.

Modal dasar PEL adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

APBS (continued)

The authorized capital of APBS amounted to Rp750,000,000 composed of 750,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- PMS owns 90.00% or 168,750,000 shares amounting to Rp168,750,000.
- Van Oord owns 5.00% or 9,375,000 shares amounting to Rp9,375,000.
- Gerbang Sarana Utama owns 5.00% or 9,375,000 shares amounting to Rp9,375,000.

Based on Notarial Deed No. 02 dated February 10, 2021, by Notary Stephanus R. Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya, regarding the agreement of sale and purchase along with changes on composition of shareholders in "PT Alur Pelayaran Barat Surabaya". The composition of the fully paid capital as of October 1, 2021 are as follows:

- PMS owns 93.00% or 174,375,000 shares amounting to Rp174,375,000.
- Gerbang Sarana Utama owns 7.00% or 13,125,000 shares amounting to Rp13,125,000.

PEL

PEL was established under Notarial Deed No. 2 dated September 9, 2014, by Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-2963.40.10.2014 dated October 14, 2014.

The authorized capital of PEL amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PEL (lanjutan)

- PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 9.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp9.000.000.
- PEL (pembelian kembali) memiliki sebesar 9,00% atau sebanyak 900.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp900.000.
- BJTI memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 100.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 4 tanggal 30 Desember 2020 oleh Amanda Mirza Evariana, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, mengenai pengesahan penurunan modal dasar menjadi Rp36.400.000 terbagi atas 36.400.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per lembar saham dan penurunan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp9.100.000 terbagi atas 9.100.000 lembar saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0014114.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 7 Maret 2021. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PMS memiliki sebesar 98,90% atau sebanyak 9.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp9.000.000.
- BJTI memiliki sebesar 1,10% atau sebanyak 100.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

BMC

BMC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 16 Desember 2015, oleh Notaris Yohana S. Aminah Hadijanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU.2473417.AH.01.01 tanggal 21 Desember 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PEL (continued)

- PMS owns 90.00% or 9,000,000 shares amounting to Rp9,000,000.
- PEL (buyback) owns 9.00% or 900,000 shares amounting to Rp900,000.
- BJTI owns 1.00% or 100,000 shares amounting to Rp100,000.

The Company's Articles of Association has been amended, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 4 dated December 30, 2020 by Amanda Mirza Evariana, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, regarding the approval of the decrease of authorized capital to Rp36,400,000 divided into 36,400,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share and the decrease of issued and fully paid shares to Rp9,100,000 divided into 9,100,000 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by decree No. AHU-0014114.AH.01.02 Year 2021 dated March 7, 2021. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- PMS owns 98.90% or 9,000,000 shares amounting to Rp9,000,000.
- BJTI owns 1.10% or 100,000 shares amounting to Rp100,000.

BMC

BMC was established under Notarial Deed No.17 dated December 16, 2015, by the Notary Yohana S. Aminah Hadijanto, S.H., M.Kn., Notary in Kendal, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU.2473417.AH.01.01 dated December 21, 2015.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

BMC (lanjutan)

Modal dasar BMC adalah sebesar Rp1.000.000 terdiri dari 1.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 900 saham dengan nilai sebesar Rp900.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 29 November 2019, oleh Notaris Amanda Mirza Ervariana, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0102677.AH.01.02 Tahun 2019. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 1 Januari 2020/31 Desember 2019 sebagai berikut:

- PMS memiliki sebesar 99,80% atau sebanyak 50.900 saham dengan nilai sebesar Rp50.900.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 0,20% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

LEGI

LEGI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 58 tanggal 8 Desember 2014, oleh Notaris Yatiningsih, SH., M.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005031.AH.01.01 tanggal 3 Februari 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

BMC (continued)

The authorized capital of BMC amounted to Rp1,000,000 composed of 1,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PMS owns 90.00% or 900 shares amounting to Rp900,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 100 shares amounting to Rp100,000.

Based on Notarial Deed No. 5 dated November 29, 2019, by Notary Amanda Mirza Ervariana, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0102677.AH.01.02 Tahun 2019. The composition of the issued and fully paid capital as of January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

- PMS owns 99.80% or 50,900 shares amounting to Rp50,900,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.20% or 100 shares amounting to Rp100,000.

LEGI

LEGI was established under Notarial Deed "No. 58 dated December 8, 2014 by Notary Yatiningsih, SH., M.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0005031.AH.01.01 on February 3, 2015.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

LEGI (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Akta Notaris No. 35 oleh Notaris Yatiningih, S.H., M.H., tanggal 7 Juni 2017, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan pemindahan hak saham TTL pada Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebanyak 91 saham atau sebesar Rp91.000. Penjualan saham tersebut telah disahkan dengan Akta Jual Beli saham No. 36 tanggal 7 Juni 2017 oleh Yatiningih, S.H., M.H.

Modal dasar LEGI adalah sebesar Rp36.000.000 terdiri dari 36.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- TTL memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 9.009 saham dengan nilai sebesar Rp9.009.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 91 saham dengan nilai nominal sebesar Rp91.000.

TEDS

TEDS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 360 tanggal 29 September 2014, oleh Notaris Yatiningih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-306131.40.10.2014 tanggal 21 Oktober 2014.

Modal dasar TEDS adalah sebesar Rp5.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PDS memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 3.960 saham dengan nilai sebesar Rp1.980.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 40 saham dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

LEGI (continued)

Based on Extraordinary General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 35 dated June 7, 2017 by Yatiningih, S.H., M.H., the shareholders approved and authorized the transfer of shares from TTL to Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to 91 shares or equivalent to Rp91,000. The transfer of shares was approved by Deed of Sale and Purchase of shares No. 36 dated June 7, 2017 by Yatiningih, S.H., M.H.

The authorized capital of LEGI amounted to Rp36,000,000 composed of 36,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *TTL owns 99.00% or 9,009 shares amounting to Rp9,009,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.00% or 91 shares amounting to Rp91,000.*

TEDS

TEDS was established under Notarial Deed No. 360 dated September 29, 2014, by Notary Yatiningih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, and was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-306131.40.10.2014 dated October 21, 2014.

The authorized capital of TEDS amounted to Rp5,000,000 composed of 10,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *PDS owns 99.00% or 3,960 shares amounting to Rp1,980,000.*
- *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.00% or 40 shares amounting to Rp20,000.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT Portek Indonesia

PT Portek Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 175 tanggal 21 September 1999 oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-2242 HT.01.01 TH2000 tanggal 14 Februari 2000.

Modal dasar PT Portek Indonesia adalah sebesar USD2.000.000 (angka penuh) terdiri dari 400 saham dengan nilai nominal USD5.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 49 saham dengan nilai sebesar Rp2.670.500.
- Portek System & Equipment Pte Ltd., Singapura memiliki 51,00% atau sebanyak 51 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.779.500.

PT Pelindo Terminal Petikemas (dahulu PT Terminal Petikemas Indonesia) (SPTP)

SPTP didirikan dengan nama PT Terminal Petikemas Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 10 April 2013, oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar SPTP pada saat pendirian adalah sebesar Rp500.000.000 terdiri dari 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki sebesar 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT Portek Indonesia

PT Portek Indonesia was established under Notarial Deed No. 175 dated September 21, 1999 by Notary Rahmat Santoso, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-2242 HT.01.01 TH2000 dated February 14, 2000.

The authorized capital of PT Portek Indonesia amounted to USD2,000,000 (full amount) composed of 400 shares with par value of USD5,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company (formerly Pelindo III) owns 49.00% or 49 shares amounting to Rp2,670,500.
- Portek System & Equipment Pte Ltd., Singapore owns 51.00% or 51 shares amounting to Rp2,779,500.

PT Pelindo Terminal Petikemas (formerly PT Terminal Petikemas Indonesia) (SPTP)

SPTP was established namely PT Terminal Petikemas Indonesia under Notary Deed No. 36 dated April 10, 2013 by Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-21873.AH.01.01. Year 2013 dated April 24, 2013.

The authorized capital of SPTP at established date amounted to Rp500,000,000 composed of 500,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

**PT Pelindo Terminal Petikemas
(dahulu PT Terminal Petikemas Indonesia)
(SPTP) (lanjutan)**

- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

Perusahaan memiliki 100% atau sebanyak 150.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 18 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, tanggal 11 Oktober 2021, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan perubahan nama menjadi PT Pelindo Terminal Petikemas, perubahan modal, nama, tempat kedudukan dan logo SPTP.

Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial.

Ambapers

Ambapers didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 26 Maret 2004 oleh Notaris Grace Senda Sardjito, S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-14469 HT.01.TH.2004 11 Juni 2004.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 16 oleh Notaris Neddy Farmanto, S.H., tanggal 9 Maret 2018, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp5.000.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

**PT Pelindo Terminal Petikemas
(formerly PT Terminal Petikemas Indonesia)
(SPTP) (continued)**

- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.

The Company owns 100% or 150,000 shares with nominal amount of Rp150,000,000.

Based on the Decision Statement of the General Meeting of Shareholders in the Notary Deed No. 18 by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, October 11, 2021, the shareholders have approved and ratified the change of name to PT Pelindo Terminal Petikemas, the changes of capital, name, domicile and logo of SPTP.

Currently, TPI has not yet started commercial operation.

Ambapers

Ambapers was established under Notarial Deed No. 9 dated March 26, 2004 by Notary Grace Senda Sardjito, S.H., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No.C-14469 HT.01.TH.2004 dated June 11, 2004.

Based on General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 16 dated March 9, 2018 by Neddy Farmanto, S.H., the shareholders approved and authorized the reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp5,000,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Ambapers (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 33 Tanggal 21 Maret 2017 oleh Notaris Neddy Farmanto, S.H., para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp6.000.000.

Modal dasar Ambapers adalah sebesar Rp20.000.000 terdiri dari 20.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 6.000 saham dengan nilai sebesar Rp6.000.000.
- PT Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 60,00% atau sebanyak 9.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.000.000.

JBT

JBT didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 22 Agustus 2011 oleh Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.TH.2011 tanggal 25 November 2011.

Modal dasar JBT adalah sebesar Rp745.434.000 terdiri dari 745.434 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 17,58% atau sebanyak 131.048 saham dengan nilai sebesar Rp131.048.000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 55,00% atau sebanyak 409.993 saham dengan nilai nominal sebesar Rp409.993.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Ambapers (continued)

Based on General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 33 dated March 21, 2017 by Neddy Farmanto, S.H., the shareholders approved and authorized the reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp6,000,000.

The authorized capital of Ambapers amounted to Rp20,000,000 composed of 20,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company (formerly Pelindo IV) owns 40.00% or 6,000 shares amounting to Rp6,000,000.
- PT Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan owns 60.00% or 9,000 shares amounting to Rp9,000,000.

JBT

JBT was established under Notarial Deed No. 2 dated August 22, 2011 by Notary Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H. and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-57740.AH.01.01.TH.2011 dated November 25, 2011.

The authorized capital of JBT amounted to Rp745,434,000 composed of 745,434 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- The Company (formerly Pelindo III) owns 17.58% or 131,048 shares amounting to Rp131,048,000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 55.00% or 409,993 shares amounting to Rp409,993,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JBT (lanjutan)

- Pemerintah Provinsi Bali memiliki 8,01% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- Pemerintah Kabupaten Badung memiliki 8,01% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- PT Angkasa Pura I memiliki 8,00% atau sebanyak 59.635 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.635.000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Hutama Karya (Persero) memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki 0,40% atau sebanyak 2.982 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.982.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 12 November 2020 oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasamarga Bali Tol, para pemegang saham menyetujui tambahan modal ditempatkan dan disetor ke dalam kas Perseroan sebesar Rp200.000.000 oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 13,86% atau sebanyak 131.048 saham dengan nilai sebesar Rp131.048.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JBT (continued)

- Government of Bali Province owns 8.01% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.
- Government of Badung District owns 8.01% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.
- PT Angkasa Pura I owns 8.00% or 59,635 shares amounting to Rp59,635,000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Hutama Karya (Persero) owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 0.40% or 2,982 shares amounting to Rp2,982,000.

Based on Notarial Deed No. 24 dated November 12, 2020, by Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding the Minutes of Meeting of

PT Jasamarga Bali Tol, the shareholders approved the additional issued and fully paid to the PT Jasamarga Bali Tol's cash amounting to Rp200,000,000 by PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

The composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2021 and December 31, 2020 are as follows:

- The Company (formerly Pelindo III) owns 13.86% or 131,048 shares amounting to Rp131,048,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

JBT (lanjutan)

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut (lanjutan):

- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 64,44% atau sebanyak 609.193 saham dengan nilai nominal sebesar Rp609.193.000.
- Pemerintah Provinsi Bali memiliki 6,32% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- Pemerintah Kabupaten Badung memiliki 6,32% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- PT Angkasa Pura I memiliki 6,31% atau sebanyak 59.635 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.635.000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki 0,79% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Hutama Karya (Persero) memiliki 0,79% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) memiliki 0,79% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki 0,40% atau sebanyak 3.782 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.782.000.

PHC

PHC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 September 1999 oleh Notaris Syafran, S.H., Notaris di Semarang, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-16306 HT.01.01 TH.1999, tanggal 13 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 11 tanggal 13 September 1999.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

JBT (continued)

The composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2021 and December 31, 2020 are as follows (continued):

- PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 64.44% or 609,193 shares amounting to Rp609,193,000.
- Government of Bali Province owns 6.32% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.
- Government of Badung District owns 6.32% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.
- PT Angkasa Pura I owns 6.31% or 59,635 shares amounting to Rp59,635,000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk owns 0.79% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Hutama Karya (Persero) owns 0.79% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) owns 0.79% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 0.40% or 3,782 shares amounting to Rp3,782,000.

PHC

PHC was established under Notarial Deed No. 1 dated September 1, 1999 of Notary Syafran, S.H., Notary at Semarang, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-16306 HT.01.01 TH.1999, dated September 13, 1999 and was published in the State Gazette No. 11, dated September 13, 1999.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

PHC (lanjutan)

Modal dasar PHC sebesar Rp142.000.000 terdiri dari 284.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 98,73% atau sebanyak 280.400.000 saham dengan nilai nominal Rp140.200.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 1,27% atau sebanyak 3.600.000 saham dengan nilai nominal Rp1.800.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 7 Agustus 2020, oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Pelindo Husada Citra", komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 1 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 31,73% atau sebanyak 90.120.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp45.060.000.
- PT Pertamina Bina Medika IHC memiliki sebesar 67% atau sebanyak 190.280.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp95.140.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 1,27% atau sebanyak 3.600.000 saham dengan nilai nominal Rp1.800.000.

PBM IHC

Berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 7 Agustus 2020, oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar "PT Pertamina Bina Medika IHC", komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

PHC (continued)

The authorized capital of PHC amounted to Rp142,000,000 composed of 284,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The composition share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- The Company (formerly Pelindo III) owns 98.73% or 280,400,000 shares with total amount of Rp140,200,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.27% or 3,600,000 shares with total amount of Rp1,800,000.

Based on Notarial Deed No. 18 dated August 7, 2020, by Notary Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding the Statement of shareholders' decisions of PT Pelindo Husada Citra, the composition of the issued and fully paid capital as of October 1, 2021 and December 31, 2020 are as follows:

- The Company (formerly Pelindo III) owns 31.73% or 90,120,000 shares with total amount of Rp45,060,000.
- PT Pertamina Bina Medika IHC owns 67% or 190,280,000 shares with total amount of Rp95,140,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.27% or 3,600,000 shares with total amount of Rp1,800,000.

PBM IHC

Based on Notarial Deed No.42 dated August 7, 2020, by Notary Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding the Statement of shareholders' decisions of PT Pertamina Bina Medika IHC, the composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2020 are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

PBM IHC (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebesar 4,00% atau sebanyak 1.168.743 saham dengan nilai nominal sebesar Rp116.874.300.
- PT Pertamina (Persero) memiliki sebesar 81,11% atau sebanyak 23.700.021 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.370.002.100.
- PT Perkebunan Nusantara X memiliki sebesar 5,62% atau sebanyak 1.643.253 saham dengan nilai nominal sebesar Rp164.325.300.
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki sebesar 2,00% atau sebanyak 584.372 saham dengan nilai nominal sebesar Rp58.437.200.
- PT Perkebunan Nusantara XI memiliki sebesar 1,94% atau sebanyak 566.840 saham dengan nilai nominal sebesar Rp56.684.000.
- PT Timah Tbk. memiliki sebesar 1,78% atau sebanyak 518.889 saham dengan nilai nominal sebesar Rp51.888.900.
- PT Perkebunan Nusantara XII memiliki sebesar 1,74% atau sebanyak 508.403 saham dengan nilai nominal sebesar Rp50.840.300.
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. memiliki sebesar 0,75% atau sebanyak 218.239 saham dengan nilai nominal sebesar Rp21.823.900.
- PT Krakatau Industrial Estate Cilegon memiliki sebesar 0,61% atau sebanyak 178.559 saham dengan nilai nominal sebesar Rp17.855.900.
- PT Krakatau Bandar Samudera memiliki sebesar 0,44% atau sebanyak 128.959 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.895.900.
- PT Pertamina Pedeve Indonesia memiliki sebesar 0,01% atau sebanyak 1.484 saham dengan nilai nominal sebesar Rp148.400.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

PBM IHC (continued)

- The Company (formerly Pelindo III) owns 4.00% or 1,168,743 shares with total amount of Rp116,874,300.
- PT Pertamina (Persero) owns 81.11% or 23,700,021 shares with total amount of Rp2,370,002,100.
- PT Perkebunan Nusantara X owns 5.62% or 1,643,253 shares with total amount of Rp164,325,300.
- The Company (formerly Pelindo II) owns 2.00% or 584,372 shares with total amount of Rp58,437,200.
- PT Perkebunan Nusantara XI owns 1.94% or 566,840 shares with total amount of Rp56,684,000.
- PT Timah Tbk. owns 1.78% or 518,889 shares with total amount of Rp51,888,900.
- PT Perkebunan Nusantara XII owns 1.74% or 508,403 shares with total amount of Rp50,840,300.
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. owns 0.75% or 218,239 shares with total amount of Rp21,823,900.
- PT Krakatau Industrial Estate Cilegon owns 0.61% or 178,559 shares with total amount of Rp17,855,900.
- PT Krakatau Bandar Samudera owns 0.44% or 128,959 shares with total amount of Rp12,895,900.
- PT Pertamina Pedeve owns 0.01% or 1,484 shares with total amount of Rp148,400.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

BKMS

BKMS didirikan dengan Akta Notaris No. 56 tanggal 18 Mei 2012 oleh Notaris Ardi Kristiar berkedudukan di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Andayani Risilawati S.H., M.H.,C.N., No. 01 tanggal 19 Maret 2014 berkedudukan di Gresik, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0019775 tanggal 27 Maret 2015.

Modal dasar BKMS adalah sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 800.000 saham dengan nilai sebesar Rp800.000.000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) memiliki 60,00% atau sebanyak 1.200.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.200.000.000.

TNU

TNU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 89 tanggal 23 Agustus 2013 oleh Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-13479.AH.01.01 Tahun 2014.

Modal dasar TNU adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 68.500 saham dengan nilai sebesar Rp68.500.000.
- PT Andahanesa Abadi memiliki 60,00% atau sebanyak 102.750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp102.750.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

BKMS

BKMS was established under Notarial Deed, No. 56 dated May 18, 2012 by Notary Ardi Kristiar in Jakarta and has recent amended by Notary Andayani Risilawati, SH., MH., CN., No. 01 dated March 19, 2014 domiciled in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0019775 dated March 27, 2015.

The authorized capital of BKMS amounted to Rp4,000,000,000 composed of 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *BJTI owns 40.00% or 800,000 shares amounting to Rp800,000,000.*
- *PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) owns 60.00% or 1,200,000 shares amounting to Rp1,200,000,000.*

TNU

TNU was established under Notarial Deed No. 89 dated August 23, 2013 of Notary Yulia, S.H., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-13479.AH.01.01 Year 2014.

The authorized capital of TNU amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- *BJTI owns 40.00% or 68,500 shares amounting to Rp68,500,000.*
- *PT Andahanesa Abadi owns 60.00% or 102,750 shares amounting to Rp102,750,000.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

EMS

EMS didirikan berdasarkan Akta No.14 tanggal 5 Maret 2015 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010566.AH.01.01 tanggal 6 Maret 2015.

Modal dasar EMS adalah sebesar Rp4.000.000 terdiri dari 4.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- BJTI memiliki sebesar 30,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.
- UEPN memiliki 45,00% atau sebanyak 450 saham dengan nilai nominal sebesar Rp450.000.
- PT Santiniluwansa Lestari memiliki 15,00% atau sebanyak 150 saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.
- PT Amanah Indo Invest memiliki 10,00% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

PCN

PCN didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 11 Januari 2016, oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002328.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016.

Modal dasar PCN adalah sebesar Rp20.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PHC memiliki sebesar 70,00% atau sebanyak 7.000 saham dengan nilai sebesar Rp3.500.000.
- BJTI memiliki sebesar 30,00% atau sebanyak 3.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

EMS

EMS was established under Notarial Deed No. 14 dated March 5, 2015 by Yulia, S.H., Notary in Jakarta., and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0010566.AH.01.01 dated March 6, 2015.

The authorized capital of EMS amounted to Rp4,000,000 composed of 4,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *BJTI owns 30.00% or 300 shares amounting to Rp300,000.*
- *UEPN owns 45.00% or 450 shares amounting to Rp450,000.*
- *PT Santiniluwansa Lestari owns 15.00% or 150 shares amounting to Rp150,000.*
- *PT Amanah Indo Invest owns 10.00% or 100 shares amounting to Rp100,000.*

PCN

PCN was established under Notarial Deed No. 35 dated January 11, 2016, by Notary Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0002328.AH.01.01 Tahun 2016 dated January 15, 2016.

The authorized capital of PCN amounted to Rp20,000,000 composed of 40,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *PHC owns 70.00% or 7,000 shares amounting to Rp3,500,000.*
- *BJTI owns 30.00% or 3,000 shares amounting to Rp1,500,000.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

LNG

LNG didirikan berdasarkan Akta No.01 tanggal 1 Oktober 2019 dari Heni Yuniyantini, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051386.AH.01.01 tanggal 5 Oktober 2019.

Modal dasar dan disetor LNG masing-masing sebesar Rp580.000.000 dan Rp145.000.000, yang terdiri dari 145.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT PGN LNG Indonesia (PLI) memiliki sebesar 51,00% atau sebanyak 73.950 saham dengan nilai sebesar Rp73.950.000.
- PEL memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 71.050 saham dengan nilai sebesar Rp71.050.000.

PPI1 - Patimban

PPI1 - Patimban didirikan berdasarkan Akta No.1 tanggal 5 Februari 2021 dari Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-008867.AH.01.01 tanggal 5 Februari 2021.

Modal dasar PPI1 - Patimban adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT CTCorp Infrastruktur Indonesia memiliki sebesar 32,00% atau sebanyak 3.200.000 saham dengan nilai sebesar Rp3.200.000.
- PT Indika Logistic & Support memiliki 29,00% atau sebanyak 2.900.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.900.000.
- PT U Connectivity Services memiliki 29,00% atau sebanyak 2.900.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.900.000.
- PT Terminal Petikemas Surabaya memiliki 10,00% atau sebanyak 1.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

LNG

LNG was established under Notarial Deed No. 01 dated October 1, 2019 by Heni Yuniyantini, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0051386.AH.01.01 dated October 5, 2019.

The authorized capital and issued and paid capital of LNG totaling Rp580,000,000 and Rp145,000,000 respectively, which consists of 145,000 shares with nominal value per share of Rp1,000,000 (full amount). The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PGN LNG Indonesia (PLI) owns 51.00% or 73,950 shares amounting to Rp73,950,000.
- PEL owns 49.00% or 71,050 shares amounting to Rp71,050,000.

PPI1 - Patimban

PPI1 - Patimban was established under Notarial Deed No. 1 dated February 5, 2021 by Dedy Syamri, S.H., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-008867.AH.01.01 dated February 5, 2021.

The authorized capital of PPI1 - Patimban amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT CTCorp Infrastruktur Indonesia owns 32.00% or 3,200,000 shares amounting to Rp3,200,000.
- PT Indika Logistic & Support owns 29.00% or 2,900,000 shares amounting to Rp2,900,000.
- PT U Connectivity Services owns 29.00% or 2,900,000 shares amounting to Rp2,900,000.
- PT Terminal Petikemas Surabaya owns 10.00% or 1,000,000 shares amounting to Rp1,000,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

KKT

KKT didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 8 Februari 2012 dari Notaris Hasanuddin, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Samarinda, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012.

Modal dasar KKT sebesar Rp500.000 terdiri dari 1.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) memiliki sebesar 50% atau sebanyak 125 lembar saham dengan nilai nominal Rp62.500.
- Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya memiliki sebesar 50% atau sebanyak 125 lembar saham dengan nilai nominal Rp62.500.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham KKT milik Perusahaan (dahulu Pelindo IV) dialihkan kepada SPTP (Catatan 52e).

EII

EII didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 69 tanggal 16 Januari 2012 dari Notaris Yenny Himawan, S.H.,M.Kn, Notaris di Makassar, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-11047.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012.

Modal dasar EII sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) memiliki sebesar 99,29% atau sebanyak 28.050 lembar saham dengan nilai nominal Rp28.050.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

KKT

KKT was established under the Notarial Deed No. 22 dated February 8, 2012 of Notary Hasanuddin, S.H., M.Hum., M.Kn, Notary in Samarinda, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 dated March 26, 2012.

The authorized capital of KKT amounted to Rp500,000 composed of 1,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo IV) owns 50% or 125 shares with total amount of Rp62,500.*
- *Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya owns 50% or 125 shares with total amount of Rp62,500.*

On January 3, 2022, all KKT's shares owned by the Company (formerly Pelindo IV) were transferred to SPTP (Note 52e).

EII

EII was established under the Notarial Deed No. 69 dated January 16, 2012 of Notary Yenny Himawan, S.H.,M.Kn, Notary in Makassar, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter AHU-11047.AH.01.01 Tahun 2012 dated February 29, 2012.

The authorized capital of EII amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- *The Company (formerly Pelindo IV) owns 99.29% or 28,050 shares with total amount of Rp28,050,000.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

EII (lanjutan)

- Koperasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki sebesar 0,71% atau sebanyak 200 lembar saham dengan nilai nominal Rp200.000.

Pada tanggal 3 Januari 2022, seluruh saham EII milik Perusahaan (dahulu Pelindo IV) dialihkan kepada SPJM (Catatan 52d).

NTS

NTS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 11 Oktober 2013 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-506034.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 4 November 2013.

Modal dasar NTS sebesar Rp200.000.000 terdiri dari 200.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) memiliki sebesar 99,16% atau sebanyak 60.240 lembar saham dengan nilai nominal Rp60.240.000.
- Koperasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki sebesar 0,84% atau sebanyak 510 lembar saham dengan nilai nominal Rp510.000.

Pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh saham NTS milik Perusahaan (dahulu Pelindo IV) dialihkan kepada SPSL (Catatan 52f).

ISU

ISU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 29 November 2018 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

EII (continued)

- Koperasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 0.71% or 200 shares with total amount of Rp200,000.

On January 3, 2022, all EII's shares owned by the Company (formerly Pelindo IV) were transferred to SPJM (Note 52d).

NTS

NTS was established under the Notarial Deed No. 3 dated October 11, 2013 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-506034.AH.01.01 Tahun 2013 dated November 4, 2013.

The authorized capital of NTS amounted to Rp200,000,000 composed of 200,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- The Company (formerly Pelindo IV) owns 99.16% or 60,240 shares with total amount of Rp60,240,000.
- Koperasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 0.84% or 510 shares with total amount of Rp510,000.

On March 1, 2022, all NTS's shares owned by the Company (formerly Pelindo IV) were transferred to SPSL (Note 52f).

ISU

ISU was established under the Notarial Deed No. 9 dated November 29, 2018 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0057261.AH.01.01 Tahun 2018 dated November 30, 2018.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

ISU (lanjutan)

Modal dasar ISU sebesar Rp500.000 terdiri dari 1.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- NTS memiliki sebesar 99,60% atau sebanyak 249 lembar saham dengan nilai nominal Rp124.500.
- EII memiliki sebesar 0,40% atau sebanyak 1 lembar saham dengan nilai nominal Rp500.

SPJM

SPJM didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 29 September 2021 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0061303.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021.

Modal dasar SPJM sebesar Rp580.000.000 yang terbagi atas 580.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,90% atau sebanyak 144.855 saham dengan nilai nominal sebesar Rp144.855.000.
- ILCS memiliki 0,10% atau sebanyak 145 saham dengan nilai nominal sebesar Rp145.000.

Saat ini, SPJM belum melakukan kegiatan komersial.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

ISU (continued)

The authorized capital of ISU amounted to Rp500,000 composed of 1,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- NTS owns 99.60% or 249 shares with total amount of Rp124,500.
- EII owns 0.40% or 1 shares with total amount of Rp500.

SPJM

SPJM was established based on Deed No. 20 dated September 29, 2021 of Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0061303.AH.01.01 Tahun 2021 dated September 30, 2021.

The authorized capital of SPJM amounted to Rp580,000,000 which is divided into 580,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 99.90% or 144,855 shares with total amount of Rp144,855,000.
- ILCS owns 0.10% or 145 shares with total amount of Rp145,000.

At the moment, SPJM has not performed any commercial activities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

SPMT

Modal dasar SPMT sebesar Rp696.000.000 yang terbagi atas 696.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,90% atau sebanyak 173.826 saham dengan nilai nominal sebesar Rp173.826.000.
- ILCS memiliki 0,10% atau sebanyak 174 saham dengan nilai nominal sebesar Rp174.000.

Saat ini, SPMT belum melakukan kegiatan komersial.

SPSL

SPSL didirikan berdasarkan Akta No. 21 tanggal 29 September 2021 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0061322.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021.

Modal dasar SPSL sebesar Rp408.000.000 yang terbagi atas 408.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 99,90% atau sebanyak 101.898 saham dengan nilai nominal sebesar Rp101.898.000.
- ILCS memiliki 0,10% atau sebanyak 102 saham dengan nilai nominal sebesar Rp102.000.

Saat ini, SPSL belum melakukan kegiatan komersial.

Pada tanggal 16 Februari 2022, SPSL berubah nama menjadi PT Pelindo Logistik Indonesia (PLI) (Catatan 52b).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

SPMT

The authorized capital of SPMT amounted to Rp696,000,000 which is divided into 696,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 99.90% or 173,826 shares with total amount of Rp173,826,000.
- ILCS owns 0.10% or 174 shares with total amount of Rp174,000.

At the moment, SPMT has not performed any commercial activities.

SPSL

SPSL was established based on Deed No. 21 dated September 29, 2021 of Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0061322.AH.01.01 Tahun 2021 dated September 30, 2021.

The authorized capital of SPSL amounted to Rp408,000,000 which is divided into 408,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company (formerly Pelindo II) owns 99.90% or 101,898 shares with total amount of Rp101,898,000.
- ILCS owns 0.10% or 102 shares with total amount of Rp102,000.

At the moment, SPSL has not performed any commercial activities.

On February 16, 2022, SPSL change its company name to PT Pelindo Logistik Indonesia (PLI) (Note 52b).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Investasi Saham dan Operasi Bersama (lanjutan)

SPSL (lanjutan)

Pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh saham PLI milik Perusahaan (dahulu Pelindo I) dialihkan kepada SPSL (Catatan 52f).

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 dan No. SK-335/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No.08 dan No. 09 tanggal 6 Oktober 2021, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

31 Desember 2021

Dewan Komisaris

Pt. Komisaris Utama/
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Marsetio
Raden Agus Haryoto Purnomo
Didi Sumedi
Sudung Situmorang
Antonius Rainier Haryanto
Heru Sukanto
Muchtar Luthfi Mutty

31 Desember 2021

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko
Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum
Direktur Strategi
Direktur Investasi
Direktur Pengelola

Arif Suhartono
Hambra
Mega Satria
Ihsanuddin Usman
Prasetyo
Boy Robyanto
Putut Sri Muljanto

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates, Share Investment and Joint Operation (continued)

SPSL (continued)

On March 1, 2022, all PLI's shares owned by the Company (formerly Pelindo I) were transferred to SPSL (Note 52f).

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Board of Commissioners and Directors

Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021 and No. SK-335/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.08 and No. 09 dated October 6, 2021, the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commissioners and Directors as follows:

December 31, 2021

Board of Commissioners

Acting President Commissioner/
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

December 31, 2021

Directors

President Director
Vice President Director
Director of Finance and Risk
Management
Director of Human Resources and
General Affair
Strategy Director
Investment Director
Managing Director

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit,
Sekretaris Perusahaan dan Karyawan
(lanjutan)**

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen	Moermahadi Soerja Djanegara
Komisaris Independen	Suaidi Marasabessy
Komisaris Independen	Nurrachman
Komisaris	Kushari Suprianto
Komisaris	Montty Girianna
Komisaris	D. Andhi Nirwanto
Komisaris	R. Agus H. Purnomo

Direksi

Direktur Utama	Arif Suhartono
Wakil Direktur Utama	Hambra
Direktur Komersial	Rima Novianti
Direktur Teknik	Zuhri Iryansyah
Direktur Operasi	Muarip
Direktur Keuangan	Yon Irawan
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Ihsanuddin Usman
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Ogi Rulino

1 Januari 2020/31 Desember 2019

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	-
Komisaris Independen	Suaidi Marasabessy
Komisaris	Kushari Suprianto
Komisaris	Montty Giriana
Komisaris	D. Andhi Nirwanto
Komisaris	Djadmiko
Komisaris	R. Agus H. Purnomo

Direksi

Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Wakil Direktur Utama	Hambra
Direktur Komersial	Arif Suhartono
Direktur Teknik	Dani Rusli Utama
Direktur Operasi	Prasetyadi
Direktur Keuangan	Widyaka Nusapati
Direktur Sumber Daya Manusia	Rizal Ariansyah
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Ogi Rulino

1. GENERAL (continued)

**c. Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee, Corporate Secretary and
Employees (continued)**

**Board of Commissioners and Directors
(continued)**

December 31, 2020

Board of Commissioners

President/Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Vice President of Director
Director of Commercial
Director of Engineering
Director of Operations
Director of Finance
Director of Human Resources and General Affair
Director of Transformation and Business Development

January 1, 2020/December 31, 2019

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Vice President of Director
Director of Commercial
Director of Engineering
Director of Operations
Director of Finance
Director of Human Resources Director of Transformation and Business Development

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021

Komite Audit

Ketua	Heru Sukanto
Wakil Ketua	Didi Sumedi
Anggota	Ahmad Zakie Mubarak
Anggota	Sofia Chairunnisa

Sekretaris Perusahaan	Ali Mulyono
-----------------------	-------------

31 Desember 2020

Komite Audit

Ketua	Kushari Suprianto
Anggota	Pionir H
Anggota	Muhdi Al Fajar

Sekretaris Perusahaan	Ari Santoso
-----------------------	-------------

1 Januari 2020/31 Desember 2019

Komite Audit

Ketua	Kushari Suprianto
Anggota	Rakmat Adi Santosa
Anggota	Muhdi Al Fajar

Sekretaris Perusahaan	Shanti Puruhita
-----------------------	-----------------

Karyawan

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 masing-masing sebanyak 3.595, 3.668 dan 4.640 karyawan (tidak diaudit).

d. Mata Uang Pelaporan

Mata uang fungsional Kelompok Usaha adalah Rupiah, kecuali TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat.

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah Rupiah.

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Audit Committee and Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2021, 2020 dan January 1 2020/December 31, 2019 are as follows:

December 31, 2021

Audit Committee

Head
Deputy Head
Member
Member

Corporate Secretary

December 31, 2020

Audit Committee

Head
Member
Member

Corporate Secretary

January 1, 2020/December 31, 2019

Audit Committee

Head
Member
Member

Corporate Secretary

Employees

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are 3,595, 3,668 and 4,640 employees, respectively (unaudited).

d. Reporting Currency

The Group's functional currency is Rupiah, except TPK Koja, NPCT1 and JICT which are in United States Dollar.

The presentation currency of the Group's consolidated financial statements is in Rupiah.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, laporan keuangan TPK Koja, NPCT1 dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	291.374.572	620.425.512	<i>Beginning balance</i>
Efek penjabaran - neto	13.379.913	(329.050.940)	<i>Effect due to translation - net</i>
Saldo akhir	304.754.485	291.374.572	<i>Ending balance</i>

f. Penggabungan

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") pada tanggal 1 Oktober 2021 mengatur diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan perusahaan di Pelabuhan yang telah diselenggarakan beserta aset perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selanjutnya diselenggarakan dan dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo II;
- Pelindo II wajib melakukan penyesuaian terhadap perizinan, konsesi dan dokumen hukum paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penggabungan;

1. GENERAL (continued)

e. Translation into Presentation Currency

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of TPK Koja, NPCT1 and JICT were translated to Rupiah currency based on the following:

- *Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;*
- *Income and expenses were translated using the average exchange rate; and*
- *All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.*

Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:

f. Merger

Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 101 Year 2021 regarding the Merger of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") into Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") on October 1, 2021, stipulating among others:

- *Port operational activities that have been carried out along with the operational assets owned or controlled by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are subsequently managed and owned or controlled by Pelindo II;*
- *Pelindo II is required to make adjustments to permits, concessions and legal documents no later than 2 (two) years since the date of merger;*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

- Nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Pelindo II ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tanggal 1 Oktober 2021 dari notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV setuju dan sepakat untuk menggabungkan diri dengan Pelindo II, dimana Pelindo II sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha. Rancangan penggabungan telah disetujui oleh pemegang saham masing-masing perusahaan pada tanggal yang sama sebagai berikut:

- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo I No. 1 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo II No. 2 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo III No.3 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo IV No. 4 tanggal 1 Oktober 2021.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, seluruh pihak menyetujui penggabungan dengan kondisi diantaranya sebagai berikut:

1. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas dari Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih kepada Pelindo II.
2. Semua izin, konsesi, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.
3. Sejak tanggal efektif, seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

- *The definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are combined into Pelindo II are determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOE.*

Based on the Deed of Merger No. 5 dated October 1, 2021 from the notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV agreed to merge with Pelindo II, where Pelindo II as the surviving entity. The plan design of merger was approved by the shareholders of each company on the same date as follows:

- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo I General Shareholders Meeting (GSM) No. 1 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo II General Shareholders Meeting (GSM) No. 2 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo III General Shareholders Meeting (GSM) No. 3 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo IV General Shareholders Meeting (GSM) No. 4 on October 1, 2021.*

Based on the Deed of Merger No. 5, all parties agreed to the merger with the following conditions among others:

1. *All operations, businesses, and activities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
2. *All permits, concessions, facilities, licenses, approvals and utilizations that have been granted by the authorities to Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
3. *Since the effective date, all assets and liabilities owned by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

4. Seluruh pekerja Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV akan menjadi pekerja Pelindo II mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja dan Berita Acara Kesepakatan antara Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV dengan para pengurus serikat pekerja Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV tanggal 24 Juni 2021.

Komposisi modal saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV sebelum dan setelah penggabungan adalah sebagai berikut (nominal penuh):

Sebelum Penggabungan

Pelindo I

Modal Dasar	Rp6.800.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.700.000.000

Pelindo II

Modal Dasar	Rp4.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.444.029.000

Pelindo III

Modal Dasar	Rp3.200.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp2.218.953.000

Pelindo IV

Modal Dasar	Rp10.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp3.112.085.000

Setelah Penggabungan

Pelindo II

Modal Dasar	Rp33.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp8.475.067.000

Saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV memiliki nilai nominal saham yang sama, yaitu sebesar Rp1.000 per saham. Sehubungan penggabungan, Pelindo II akan menerbitkan saham baru kepada Negara Republik Indonesia sesuai dengan jumlah saham yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia pada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV. Hal ini merupakan nilai sementara atas Pelindo II dimana nilai definitif atas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabung ke dalam Pelindo II akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN (Catatan 52a).

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

4. All Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV workers will become Pelindo II workers in accordance with the provisions of the laws and regulations regarding labor and the Minutes of Agreement between Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV with the management of the Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV labor union on June 24, 2021.

The composition of the share capital of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV before and after the merger are as follows (full amount):

Before Merger

Pelindo I

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

Pelindo II

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

Pelindo III

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

Pelindo IV

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

After Merger

Pelindo II

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

The shares of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV have the same nominal value, which is Rp1,000 per share. In connection with the merger, Pelindo II will issue new shares to the Republic of Indonesia in accordance with the number of shares previously owned by the Republic of Indonesia in Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV. This is a temporary value for Pelindo II where the definitive value for Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are merged into Pelindo II will be determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOEs (Note 52a).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, dinyatakan bahwa tanggal efektif penggabungan adalah pada saat terbitnya Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pelindo II sehubungan penggabungan, yaitu melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-0014401 tanggal 1 Oktober 2021. Dengan efektifnya penggabungan ini, maka Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selaku perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar demi hukum sejak tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah menyajikan dampak dari penggabungan tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 7 tanggal 1 Oktober 2021, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya perubahan Anggaran Dasar, logo dan nama Perusahaan dari sebelumnya Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia atau disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021.

Pengalihan aset dan liabilitas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Pelindo II dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berdasarkan PSAK No. 38, pengalihan aset, liabilitas, saham dan/atau instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Kelompok Usaha yang sama.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

Based on the above Deed of Merger No. 5, it is stated that the effective date of the merger is the date of issuance of the Receipt Notification of the Merger of the Entities from the Minister of Law and Human Rights of Pelindo II in connection with the merger, which is through its letter No. AHU-AH.01.10-0014401 dated October 1, 2021. With the commencement of this merger, Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV as the merging entities are dissolved by law since that date.

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended, have presented the effects of the merger.

Based on the Deed of General Meeting of Shareholders Decision No. 7 dated October 1, 2021, the shareholders approved among others the changes of Article of Association, logo and name of the Company from Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia or abbreviated PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0053936.AH.01.02 dated October 1, 2021.

The transfer of assets and liabilities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to Pelindo II are recorded based on the pooling of interest method in accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination of Entities Under Common Control".

Based on PSAK No. 38, the transfer of assets, liabilities, shares and/or other ownership instruments between entities under common control will not result in a profit or loss for the Company or individual entities that are in the same group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan.

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan konsolidasian selama penggabungan terjadi disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal.

Penggabungan tersebut di atas menggunakan nilai buku berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Perubahan kedua atas PMK No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha. Sesuai dengan peraturan tersebut, manajemen akan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan aset Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Perusahaan (dahulu Pelindo II). Manajemen berkeyakinan dapat memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut untuk menggunakan nilai buku untuk tujuan perpajakan sehubungan dengan transaksi penggabungan.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

Because of restructuring transactions between entities under common control do not change the economic substance of the ownership of the assets, liabilities, shares or other ownership instruments that are exchanged, the transferred assets or liabilities must be recorded at their book value using the pooling of interest method.

In applying the pool of interests method, the components of the consolidated financial statements during the merger occurred are presented as if the merger had occurred since the beginning of the earliest presentation period.

Such merger as mentioned above is using book value which based on Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 dated June 4, 2021 regarding Second Amendment on PMK No. 52/PMK.010/2017 regarding The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover and General Director of Tax Regulation No. PER-21/PJ/2021 dated December 9, 2021 regarding Amendment on General Director of Tax Regulation No. PER-03/PJ/2021 regarding Procedures of Proposal and Issuance on Using Book Value for The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover. In accordance with the regulation, management will submit proposal to General Director of Tax to obtain approval for using book value on the transfers of assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company (formerly Pelindo II). Management believes that it can fulfill all requirements as required by such regulation for using book value for tax purposes in relation to the merger.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode pelaporan. Penyesuaian bagian kepentingan Perusahaan atas aset neto Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV, disajikan pada "Ekuitas *Merging Entity*" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019. Laba neto dari entitas yang bergabung dicatat sebagai "Laba Proforma *Merging Entity*" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020 (Catatan 4).

Sehubungan dengan telah ditetapkan PP No. 101 tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) (Catatan 1f) serta Surat Direksi Perusahaan (dahulu Pelindo II) tanggal 24 November 2021 tentang Usulan Nilai Kekayaan Definitif Perusahaan, Menteri BUMN menyampaikan usulan nilai kekayaan definitif kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No. S-956/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Usulan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) berdasarkan laporan KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 23 September 2021.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

The consolidated statements of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 have been restated as if the effect of merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV into the Company had occurred since the beginning of the reporting period. The adjustment of the Company's interest in the net assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV is presented in "*Merging Entity Equity*" in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019. Net income from entities merged are recorded as "*Proforma Income from Merging Entity*" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 4).

In relation to the establishment of PP No. 101 Year 2021 dated October 1, 2021 regarding the merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company (formerly Pelindo II) (Note 1f) and the Company's (formerly Pelindo II) Directors Letter dated November 24, 2021 regarding Proposal of Definitive Net Assets Value of the Company, the Minister of SOE delivered proposal of definitive net assets value to Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its letter No. S-956/MBU/12/2021 dated December 14, 2021. Such proposed definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount) based on the report of KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, independent appraisal, dated September 23, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan usulan Menteri BUMN tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusannya No.527/KMK.6/2021 tanggal 29 Desember 2021, menetapkan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) (Catatan 1f).

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Nomor S-38/MBU/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah diaktakan oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notaris di Jakarta, melalui Akta Nomor 2 tanggal 9 Februari 2022, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya:

- Peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp156.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 156.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).
- Pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 39.131.555 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) sehingga seluruhnya berjumlah Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh):
 - Sebesar Rp13.378.078.900.000 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo I ke dalam Perusahaan.
 - Sebesar Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo III ke dalam Perusahaan.
 - Sebesar Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo IV ke dalam Perusahaan.
 - Sebesar Rp878.740 (nilai penuh) merupakan setoran modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

Based on the proposal of the Minister of SOE as mentioned, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its Decision No.527/KMK.6/2021 dated December 29, 2021 established the definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount) (Note 1f).

Based on the decision of the Minister of SOE as the GMS Number S-38/MBU/01/2022 dated January 12, 2022 regarding Changes of Capital Structure and Changes of the Company's Article of Association, which has been notarized by Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notary in Jakarta, through Deed Number 2 dated February 9, 2022, the Company's shareholder approved among others:

- Increase of the Company's authorized capital to Rp156,000,000,000,000 (full amount) divided into 156,000,000 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).
- Issuance/placement of unused shares (portfolio) amounting to 39,131,555 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) totalling to Rp39,131,555,000,000 (full amount) which all taken by the State of The Republic of Indonesia.
- Additional capital by the State of The Republic of Indonesia to the Company's shares amounting to Rp39,131,555,000,000 (full amount):
 - Amounting to Rp13,378,078,900,000 (full amount) as a result of the merger of Pelindo I to the Company.
 - Amounting to Rp17,323,408,459,305 (full amount) as a result of the merger of Pelindo III to the Company.
 - Amounting to Rp8,435,066,761,955 (full amount) as a result of the merger of Pelindo IV to the Company.
 - Amounting to Rp878,740 (full amount) is a capital injection by the State of The Republic of Indonesia arising from the capitalization of part of the Company's reserves..

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

g. Penambahan kepemilikan CTP

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat pada tanggal 21 Juli 2021 dan Akta Jual Beli Saham yang diaktakan dengan akta Notaris Ny. Hastuti Nainggolan, SH., M.Kn, No. 1 tanggal 1 Oktober 2021, API membeli saham CTP yang dimiliki oleh PT Waskita Toll Road (entitas dibawah pengendalian yang sama dan tidak bersifat sementara) sebanyak 1.386.131 lembar saham dengan harga beli sebesar Rp2.445.141.067 sehingga kepemilikan API pada CTP mengalami peningkatan dari 45,00% menjadi 100,00%.

API telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada PT Waskita Toll Road pada tanggal 14 Oktober 2021.

Pembelian saham CTP oleh API tersebut memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi penambahan kepemilikan di CTP tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto di CTP diakui sebagai bagian dari akun "Tambah Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, dengan perhitungan sebagai berikut:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ Amount recognized on transaction	
Total nilai tercatat aset neto	2.256.810.555	<i>Total carrying amount of net assets</i>
55,00% dari total nilai tercatat aset neto	1.241.245.805	<i>55.00% of total carrying amount of net assets</i>
Peningkatan aset neto	1.241.245.805	Increase in net assets
Imbalan yang dialihkan	2.445.141.067	<i>Consideration paid</i>
Tambahan modal disetor	(1.203.895.262)	Additional paid-in capital

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

The Deed of changes in Article of Association as mentioned above has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Number AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 dated March 1, 2022

g. Increase in ownership of CTP

Based on the Conditional Sales and Purchase Agreement on July 21, 2021 and The Deed of Shares Sales and Purchase which notarized by the Notarial Deed of Ny. Hastuti Nainggolan SH., M.Kn, No. 1 dated October 1 2021, API acquired CTP's shares which owned by PT Waskita Toll Road (an entity under common control and is not temporary) amounted to 1,386,131 shares at a purchase price of Rp2,445,141,067 which made the API's ownership in CTP increased from 45.00% to 100.00%.

API has made payment of the shares transfer to PT Waskita Toll Road on October 14, 2021.

The acquisition of CTP by the API meet the criteria of business combination entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the increase in ownership of CTP transaction is recognized using the pooling of interest method. The difference between the consideration paid and the carrying amount of the net assets in CTP is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, with calculation as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**h. Penyelesaian Laporan Keuangan
Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 29 Maret 2022. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Kelompok Usaha adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

1. GENERAL (continued)

**h. Completion of Consolidated Financial
Statements**

The consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on March 29, 2022. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

**a. Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements**

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan" or "OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian (lanjutan)**

Kelompok Usaha telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Kelompok Usaha akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Kelompok Usaha menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 22: Definisi Bisnis

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis mengklarifikasi bahwa untuk dianggap sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset harus mencakup minimal, input dan proses substantif yang bersama-sama, berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan menghasilkan output. Selain itu, Amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu bisnis tetap ada walaupun tidak mencakup seluruh input dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output. Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, tetapi dapat berdampak pada periode-periode mendatang jika Kelompok Usaha melakukan kombinasi bisnis.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements (continued)**

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Changes in Accounting Principles

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2021, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

**Amendments to Statement of Financial
Accounting Standards ("PSAK") 22:
Definition of a Business**

The amendment to PSAK 22 Business Combinations clarifies that to be considered a business, an integrated set of activities and assets must include, at a minimum, an input and a substantive process that, together, significantly contribute to the ability to create output. Furthermore, it clarifies that a business can exist without including all of the inputs and processes needed to create outputs. These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group, but may impact future periods should the Group enter into any business combinations.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

**Amendemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62,
PSAK 71 dan PSAK 73 - Reformasi Acuan
Suku Bunga (Tahap 2)**

Amendemen-Amendemen ini memberikan kelonggaran sementara terkait dengan dampak pelaporan keuangan ketika suku bunga penawaran antarbank (*Interbank Offered Rate*) diganti dengan acuan suku bunga alternatif yang hampir bebas risiko (SBB). Amendemen tersebut mencakup cara praktis sebagai berikut ini:

- Cara praktis yang mensyaratkan perubahan kontraktual, atau perubahan arus kas yang secara langsung sebagaimana disyaratkan oleh reformasi (suku bunga acuan), untuk diperlakukan sebagai perubahan suku bunga mengambang, yang setara dengan pergerakan suku bunga pasar.
- Mengizinkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi suku bunga acuan terhadap penetapan dan dokumentasi lindung nilai tanpa penghentian hubungan lindung nilai.
- Memberikan kelonggaran sementara kepada entitas untuk memenuhi ketentuan dapat diidentifikasi secara terpisah, pada saat instrumen SBB ditetapkan sebagai lindung nilai dari suatu komponen risiko.

Amendemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. Kelompok Usaha bermaksud untuk menggunakan cara praktis di periode-periode mendatang jika dapat diterapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Changes in Accounting Principles (continued)

**Amendments to PSAK 55, PSAK 60, PSAK
62, PSAK 71 and PSAK 73 - Interest Rate
Benchmark Reform (Phase 2)**

The amendments provide temporary reliefs which address the financial reporting effects when an interbank offered rate (IBOR) is replaced with an alternative nearly risk-free interest rate (RFR). The amendments include the following practical expedients:

- A practical expedient to require contractual changes, or changes to cash flows that are directly required by the (interest rate benchmark) reform, to be treated as changes to a floating interest rate, equivalent to a movement in a market rate of interest.
- Permit changes required by interest rate benchmark reform to be made to hedge designations and hedge documentation without the hedging relationship being discontinued.
- Provide temporary relief to entities from having to meet the separately identifiable requirement when an RFR instrument is designated as a hedge of a risk component.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group. The Group intends to use the practical expedients in future periods if they become applicable.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

**Amendemen PSAK 73: Sewa - Konsesi Sewa
Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021**

Sehubungan dengan pandemi yang terus berlangsung, Amendemen tambahan diterbitkan pada bulan Maret 2021 dimana memperpanjang cakupan periode konsesi sewa, yang merupakan salah satu syarat penerapan cara praktis, dari tanggal 30 Juni 2021 dalam amendemen PSAK 73 Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 yang diterbitkan di bulan Mei 2020, menjadi 30 Juni 2022.

Jika penyewa telah menerapkan cara praktis dalam Amendemen di bulan Mei 2020, maka diharuskan untuk terus menerapkannya secara konsisten, untuk semua kontrak sewa dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa, menggunakan Amendemen tersebut. Jika penyewa tidak menerapkan cara praktis dalam Amendemen di bulan Mei 2020 untuk konsesi sewa yang memenuhi syarat, maka penyewa tidak dapat menerapkan cara praktis dalam Amendemen di bulan Maret 2021.

Amendemen Maret 2021 diterapkan secara retrospektif, dengan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal Amendemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba pada awal periode pelaporan tahunan di mana penyewa pertama kali menerapkan Amendemen tersebut.

Namun, Kelompok Usaha belum menerima konsesi sewa terkait Covid-19, tetapi berencana untuk menerapkan cara praktis jika berlaku dalam periode penerapan yang diizinkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Changes in Accounting Principles (continued)

**Amendments to PSAK 73: Leases - Covid-
19 Related Rent Concessions After June 30,
2021**

In light of the ongoing pandemic additional amendment was subsequently issued in March 2021 to extend the scope of the lease concession period, which is one of the conditions for applying the practical expedient, from June 30, 2021 in Covid-19 Related Rent Concessions - Amendments to PSAK 73: Leases issued in May 2020, to June 30, 2022.

If a lessee already applied the practical expedient in the May 2020 amendment, it is required to continue to apply the practical expedient consistently, to all lease contracts with similar characteristics and in similar circumstances, using the March 2021 amendment. If a lessee did not apply the practical expedient in the May 2020 amendment to eligible lease concessions, it is prohibited from applying the practical expedient in the March 2021 amendment.

The March 2021 amendment is to be applied retrospectively, recognizing the cumulative effect of initially applying that amendment as an adjustment to the opening balance of retained earnings at the beginning of the annual reporting period in which the lessee first applies the amendment.

However, the Group has not received Covid-19-related rent concessions but plans to apply the practical expedient if it becomes applicable within allowed period of application.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Penyesuaian Tahunan 2021

Berikut adalah ringkasan informasi tentang penyesuaian PSAK tahunan 2021 yang berlaku efektif untuk pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penyempurnaan PSAK tahunan pada dasarnya merupakan rangkaian Amendemen dalam lingkup sempit yang memberikan klarifikasi agar tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip yang ada atau prinsip-prinsip baru.

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, beberapa perubahan tentang pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.
- PSAK 13: Properti Investasi, tentang pengungkapan penerapan model nilai wajar telah dihapus.
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, tentang ruang lingkup penurunan nilai aset dan menghapus perbedaan dengan IFRS pada IAS 36 paragraf 04(a).
- PSAK 66: Pengaturan Bersama, mengenai penyesuaian pada paragraf 25, PP11, PP33A(b) dan catatan kakinya, C12 dan C14 tentang rujukan ke PSAK 71: Instrumen Keuangan.
- ISAK 16: Pengaturan Konsesi Jasa, mengenai penyesuaian dalam beberapa paragraf dalam contoh ilustrasi agar konsisten dengan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, *investor* mengendalikan *investee* jika dan hanya jika *investor* memiliki seluruh hal berikut ini:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Changes in Accounting Principles (continued)

2021 Annual Improvements

The following summary provides information on the annual improvements of PSAKs that are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2021. The annual improvements of PSAK are basically a set of narrow scope amendments that provide clarification so that there are no significant changes to existing principles or new principles.

- PSAK 1: Presentation of Financial Statements, some changes regarding consideration made by management in the process of applying accounting policies that significantly affect the amounts they recognize in the financial statements.
- PSAK 13: Investment Property, regarding disclosure of applying fair value model has been deleted.
- PSAK 48: Impairment of Assets, regarding the scope of impairment of assets and deletion of the difference with IFRS in IAS 36 paragraph 04(a).
- PSAK 66: Joint Arrangement, Regarding adjustments in paragraphs 25, PP11, PP33A(b) and its footnotes, C12 and C14 regarding reference to PSAK 71: Financial instruments.
- ISAK 16: Service concession arrangement, regarding adjustment in several paragraphs in illustrative example to be consistent with PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Kelompok Usaha tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Kelompok Usaha memperoleh kendali sampai tanggal Kelompok Usaha tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Principles of Consolidation (continued)

- i) *Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,*
- ii) *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- iii) *The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- i) *The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,*
- ii) *Rights arising from other contractual arrangements, and*
- iii) *The Group's voting rights and potential voting rights.*

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Kelompok Usaha dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" (Catatan 1d dan 1e).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset takberwujud.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (nilai penuh):

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Dolar Amerika				
Serikat (USD) 1	14.269	14.105	13.901	United States Dollar (USD) 1
Euro Eropa (EUR) 1	16.126	17.330	15.589	European Euro (EUR) 1
Dolar Singapura (SGD) 1	10.533	10.644	10.321	Singapore Dollar (SGD) 1

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Principles of Consolidation (continued)

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" (Note 1d and 1e).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2021, 2020 and 2019 (full amount):

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 45.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Transactions with Related Parties

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 45.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

f. Business Combinations Entities Under Common Control

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Kas dan Setara Kas (lanjutan)

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

h. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan *crane*, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

i. Beban Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah salah satu tipe pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Cash and Cash Equivalents (continued)

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

h. Inventory

Inventory was recorded using the weighted average method and specific identification. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Allowance for inventory obsolescence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

j. Investment in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Kelompok Usaha atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Kelompok Usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Kelompok Usaha. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Kelompok Usaha atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Investment in Associates (continued)

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Setelah penerapan metode ekuitas, Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

k. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Investment in Associates (continued)

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

k. Investment Properties

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Company has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lives of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Properti Investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

l. Aset Tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

<u>Jenis Aset</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan
Kapal
Alat fasilitas pelabuhan
Instalasi fasilitas pelabuhan
Jalan dan bangunan
Peralatan
Kendaraan
Emplasemen

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Investment Properties (continued)

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period of retirement or disposal.

l. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

After to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of fixed assets start when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

<u>Tahun/Years</u>	<u>Type of Assets</u>
2 - 50	Building and port facilities
4 - 20	Vessels
2 - 20	Port equipment
2 - 50	Port facility installation
2 - 50	Road and building
3 - 25	Equipment
4 - 5	Vehicles
3 - 50	Emplacement

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset Tetap (lanjutan)

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Fixed Assets (continued)

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the asset is derecognized.

At the end of reporting period, the residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

Land is stated at cost and not depreciated.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

l. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya perbaikan yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Aset kerjasama operasi merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset kerjasama operasi dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

m. Sewa

Kelompok Usaha menilai pada saat inisiasi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Kelompok Usaha sebagai Penyewa

Kelompok Usaha menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Kelompok usaha mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Fixed Assets (continued)

The cost of major repairs is recognized as the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Joint operation assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Joint operation assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

m. Lease

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna

Kelompok usaha mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Kelompok Usaha pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Kelompok Usaha akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Kelompok Usaha dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Lease (continued)

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Kelompok Usaha menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Kelompok Usaha menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Kelompok Usaha juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Kelompok Usaha sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Kelompok Usaha tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Lease (continued)

Lease liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Pengaturan bersama

Kelompok Usaha merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Kelompok Usaha dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Kelompok Usaha mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:

- Ventura bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak hanya pada net aset dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Kelompok Usaha mempertimbangkan hal-hal berikut:

- struktur pengaturan bersama
- bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- persyaratan pengaturan kontraktual
- ketika relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Kelompok Usaha mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Joint arrangements

The Group is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Group and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Group classifies its interests in joint arrangements as either:

- *Joint ventures: where the Group has rights to only the net assets of the joint arrangement*
- *Joint operations: where the Group has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.*

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Group considers:

- *the structure of the joint arrangement*
- *the legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle*
- *the contractual terms of the joint arrangement agreement*
- *any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).*

The Group accounts for its interests joint operations by recognising its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

o. Intangible Assets

Intangible assets of the Group consist of concession rights asset, software and deferred charges.

Intangible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direviu setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat: i) dilepaskan; atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Aset Hak Konsesi

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset shall be derecognize: i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Concession Rights Assets

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi terminal pelabuhan dan alur pelayaran diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Kelompok Usaha dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/OP. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/OP pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

The Group records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are port terminal and shipping channel concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of the port terminal and shipping channel. During the construction period, the accumulated port terminal and shipping channel construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") for no consideration.

Concession asset which granted to the Group are transferrable with approval from the Government/OP. These concession assets will be transferred to the Government/OP at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang meliputi biaya pembangunan dermaga, pengadaan tanah dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi Pemeliharaan Terminal

Dalam pengoperasian terminal, Kelompok Usaha mempunyai kewajiban untuk menyerahkan aset pada akhir masa konsesi kepada OP dalam kondisi baik, antara lain dengan melakukan pemeliharaan secara berkala. Provisi pemeliharaan terminal diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - port terminal and shipping channel which includes cost of port development, land acquisition and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets are amortized over the concession period using straight line method.

Provision for Terminal Maintenance

In operating terminal, the Group has the obligation to transfer assets to OP at the end of concession period in good condition, among others by performing regular maintenance. The estimated net provision for terminal maintenance is discounted to its present value that reflects current provision.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

q. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima di muka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

p. Capitalization of Borrowing Cost

The Group implemented PSAK No. 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

q. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Pendapatan dan Beban

Kelompok Usaha mengadopsi PSAK 72 pada tanggal 1 Januari 2020 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui efek kumulatif pada awal penerapan PSAK 72 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020.

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah (*5-steps model*) tunggal berbasis prinsip untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan, sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkan barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Revenue and Expenses

The Group adopted PSAK 72 dated January 1, 2020 using a retrospective method modified by recognizing the cumulative effect at the beginning of the application of PSAK 72 as an adjustment to the opening balance of equity on January 1, 2020.

PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers" provides a comprehensive framework for determining how, when and how much revenue should be recognized. This standard provides a principle-based, single 5-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers, as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Selain itu, dalam mengadopsi PSAK 72, Kelompok Usaha juga memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pembiayaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengalihan untuk barang atau layanan tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Kelompok Usaha untuk pendapatan pelayanan terminal petikemas, perusahaan tanah, bangunan, air & listrik, pelayanan jasa terminal, pelayanan jasa kapal, jasa logistik, pelayanan kesehatan, pendapatan pas pelabuhan, perusahaan peralatan, pelayanan jaringan & konsultasi sistem informasi, pelayanan jasa barang, jasa keuangan, pendapatan dan pendapatan jasa lain-lain.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Kelompok Usaha menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa.

Fitur yang mengindikasikan bahwa Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal mencakup:

- a. Kelompok Usaha mempunyai tanggung jawab utama menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan, atau memenuhi pesanan, misalnya Kelompok Usaha bertanggungjawab untuk penerimaan atas produk dan jasa yang dipesan atau dibeli oleh pelanggan;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Revenue and Expenses (continued)

In addition, in adopting PSAK 72, the Group has also chosen to apply practical guidance not to take into account the impact of the financing component when the period between payment for the goods or services promised and the transfer for the goods or services to the customer is less than one year.

Below is a summary of the Group's revenue recognition accounting policies for revenue from container services, land, building, water & electricity, terminal services, vessel services, logistic services, medical services, port entry fee, equipment services, network services and consultant of information system, cargo services, financial services, cleaning services and other services.

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Group and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.

The Group assesses its revenue arrangements against certain criteria to determine whether it is acting as principal or agent. The Group acts as the principal if it bears the impact of significant benefits and risks associated with the sale of goods and services.

Features that indicate that the Group is acting as a principal include:

- a. *The Group has the main responsibility of providing goods or services to customers, or fulfilling orders, for example, the Group is responsible for receiving products and services ordered or purchased by customers;*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Fitur yang mengindikasikan bahwa Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal mencakup: (lanjutan)

- b. Kelompok Usaha mempunyai risiko persediaan sebelum atau setelah pesanan pelanggan, selama pengiriman atau pengembalian;
- c. Kelompok Usaha mempunyai kebebasan untuk menentukan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya menyediakan barang dan jasa tambahan; dan
- d. Kelompok Usaha menanggung risiko kredit pelanggan atas jumlah yang dapat diterima dari pelanggan.

Kelompok Usaha telah melakukan analisa atas transaksi penjualan dan menyimpulkan bahwa Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal pada semua perjanjian pendapatan.

Pengakuan Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama tahun berjalan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan dari aset atau peningkatan liabilitas yang menyebabkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan pembagian kepada pemilik ekuitas. Beban diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

s. Perpajakan

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Revenue and Expenses (continued)

Features that indicate that the Group is acting as a principal include: (continued)

- b. The Group is subject to inventory risk before or after a customer order, during delivery or return;
- c. The Group has the freedom to determine prices either directly or indirectly, for example providing additional goods and services; and
- d. The Group bears the credit risk of the customers for the amounts it can receive from the customers.

The Group has analyzed the sales transaction and concluded that the Group acts as the principal in all revenue agreements.

Expenses Recognition

Expenses represent decreases in economic benefits during the year in the form of cash outflows or decreases from assets or increases in liabilities that cause a decrease in equity, other than those related to distributions to owners of equity. Expenses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred.

s. Taxation

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Kelompok Usaha beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam SPT sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kelompok Usaha juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Taxation (continued)

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Corporate Income Tax - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previous unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to the items that previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengukuran dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Kelompok Usaha menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

t. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Taxation (continued)

Uncertainty over Income Tax

In accordance with ISAK 34: Uncertainty Over Income Tax Treatments which is effective on January 1, 2019, stated that the recognition and measurement of tax assets and liabilities that contain uncertainty over income tax are determined by considering whether to be treated separately or together, the assumptions used in the examination of tax treatments by the Tax Authorities, consideration the probability that the Tax Authorities will accept uncertain tax treatment and re-consideration or estimation if there is a change in facts and circumstances.

If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is probable, the measurement is in line with income tax fillings. If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is not possible, the Group measures its tax balances using the method that provides the better predict of resolution (i.e. most likely amount or expected value).

Accordingly, management believes that the interpretation did not have a significant impact on the consolidated financial statements.

t. Employee Benefits

Post-Employment Benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the *projected-unit-credit* method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the *projected-unit-credit* method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat memengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan. Penerapan peraturan tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini.

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (*Cipta Kerja*), which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (*non-permanent employees*), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees. The implementation of the new regulation did not result in major changes to the Group's accounting policy and had no material impact on the amounts reported for the current.

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Other long term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Program Iuran Pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara reguler merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

u. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Kelompok Usaha mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLK"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Kelompok Usaha telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2r.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Kelompok Usaha untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Defined Contribution Plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

u. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2r.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- NWLR.

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kelompok Usaha mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Kelompok Usaha yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang, aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- FVTPL.

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investments, other current assets and other non-current assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Instrumen utang Kelompok Usaha yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada instrumen utang dengan kuotasi yang termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Kelompok Usaha dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Kelompok Usaha memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at FVOCI (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Group's debt instruments at FVOCI includes investments in quoted debt instruments included under other non-current financial assets.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Kelompok Usaha diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir
Atau
- Kelompok Usaha telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Kelompok Usaha telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Kelompok Usaha telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Kelompok Usaha mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Kelompok Usaha masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Kelompok Usaha tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Kelompok Usaha tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Kelompok Usaha.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Kelompok Usaha untuk membayar kembali.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired
Or
- The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual dan akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Kelompok Usaha atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Kelompok Usaha menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, utang bank, liabilitas jangka panjang lainnya, utang obligasi, utang lembaga keuangan non-bank dan liabilitas sewa.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Initial Recognition and Measurement
(continued)

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liability, bank loans, other long term liabilities, bonds payable, loan from non-bank financial institution and lease liabilities.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman) (lanjutan)

(ii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings) (continued)

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Laba per Saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Labanya per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun pelaporan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.

w. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

x. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

Diluted earning per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting year, adjusted to assume conversion of all potential dilutive ordinary shares.

w. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

x. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

x. Informasi Segmen (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

y. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

z. Klasifikasi Lancar dan Tak Lancar

Kelompok Usaha menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

x. Segment Information (continued)

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. Segments are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

y. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

z. Classification of Current and Non-Current Assets

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or
- iv) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Klasifikasi Lancar dan Tak Lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2022**

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis -
Rujukan ke Kerangka Konseptual

Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum, amendemen PSAK 22:

- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30".
- Mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang telah diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Classification of Current and Non-Current
Assets (continued)**

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective**

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. The Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

**Effective beginning on or after
January 1, 2022**

Amendments to PSAK 22: Business
Combinations - Reference to Conceptual
Frameworks

These amendments clarify the interactions between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and the Conceptual Framework of Financial Reporting.

In general, the amendments to PSAK 22:

- Add a description regarding "liabilities and contingent liabilities within the scope of PSAK 57 or ISAK 30".
- Clarifying the contingent liabilities recognized at the acquisition date.
- Adds definition of a contingent asset and its accounting treatment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2022 (lanjutan)**

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis -
Rujukan ke Kerangka Konseptual (lanjutan)

Amendemen PSAK 22 ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan Amendemen ini tidak diekspektasi memiliki dampak pada pelaporan keuangan Kelompok Usaha pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas
Kontijensi, dan Aset Kontijensi tentang Kontrak
Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak

Amendemen PSAK 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, dimana terdiri dari:

1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan Amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Kelompok Usaha pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 71:
Instrumen Keuangan

Amendemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

**Effective beginning on or after
January 1, 2022 (continued)**

Amendments to PSAK 22: Business
Combinations - Reference to Conceptual
Frameworks (continued)

These amendments will become effective on January 1, 2022 with earlier application permitted and are not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

Amendments to PSAK 57: Provisions,
Contingent Liabilities, and Contingent Assets -
Onerous Contract Fulfillment Costs

These amendments provide that costs to fulfill an onerous contract consist of costs that are directly related to the contract, which consist of:

1. incremental costs to fulfill the contract, and
2. allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.

Amendments to PSAK 57 are effective on January 1, 2022 with earlier application permitted and are not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

2020 Annual Improvements – PSAK 71:
Financial Instruments

The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the modified terms of a financial liability required derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2022 (lanjutan)**

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71:
Instrumen Keuangan (lanjutan)

Amendemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Kelompok Usaha pada saat diadopsi untuk pertama kali.

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 73: Sewa

Amendemen terhadap Contoh Ilustrasi 13 yang merupakan bagian dari PSAK 73 dengan menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian perbaikan properti sewaan oleh pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan mengenai perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena cara insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

Amendemen ini diterapkan secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan diperkenankan namun Amendemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Kelompok Usaha pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2023**

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil
sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

**Effective beginning on or after
January 1, 2022 (continued)**

2020 Annual Improvements - PSAK 71:
Financial Instruments (continued)

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

2020 Annual Improvements - PSAK 73: Leases

The amendment to Illustrative Example 13 accompanying PSAK 73 removes from the example the illustration of the reimbursement of leasehold improvements by the lessor in order to resolve any potential confusion regarding the treatment of lease incentives that might arise because of how lease incentives are illustrated in that example.

The amendment prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

**Effective beginning on or after
January 1, 2023**

Amendments to PSAK 16: Fixed Assets -
Proceeds before Intended Use

The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2023 (lanjutan)**

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil
sebelum Penggunaan yang Diintensikan
(lanjutan)

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dimana entitas pertama kali menerapkan Amendemen tersebut.

Amendemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan
Keuangan Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai
Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif.

Amendemen tersebut diekspektasikan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

**Effective beginning on or after
January 1, 2023 (continued)**

Amendments to PSAK 16: Fixed Assets -
Proceeds before Intended Use (continued)

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and shall be applied retrospectively to items of property, plant and equipment made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

The amendments are not expected to have a material impact on the financial reporting of the Group.

Amendments to PSAK 1: Presentation of
Financial Statements - Classification of a
Liability as current or non-current

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and shall be applied retrospectively.

The amendments are not expected to have a material impact on the financial reporting of the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2023 (lanjutan)**

Amendemen PSAK 1: Penyajian laporan
keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan
Akuntansi

Amendemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amendemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amendemen ini berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Kelompok Usaha saat ini sedang menilai dampak dari Amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

**Effective beginning on or after
January 1, 2023 (continued)**

Amendment of PSAK 1: Presentation of
financial statement - Disclosure of accounting
policies

This amendments provides guidance and examples to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendment aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments are effective on or after January 1, 2023 with earlier application permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's accounting policy disclosures.

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors –
Definition of Accounting Estimates

The amendments introduces a definition of 'accounting estimates' and clarify the distinction between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2023 (lanjutan)**

Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
terkait Definisi Estimasi Akuntansi (lanjutan)

Amendemen tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan dini diperkenankan. Kelompok Usaha saat ini sedang menilai dampak dari Amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan
tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan
Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Kelompok Usaha saat ini sedang menilai dampak dari Amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

**Effective beginning on or after
January 1, 2023 (continued)**

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors -
Definition of Accounting Estimates (continued)

The amendments are effective on or after January 1, 2023 and apply to changes in accounting policies and changes in accounting estimates that occur on or after the start of that period. Earlier application is permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes -
Deferred Tax related to Assets and Liabilities
arising from a Single Transaction

This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and similar transactions.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 with early adoption permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2025

PSAK 74: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 74 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 74. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Kelompok Usaha pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

*Effective beginning on or after
January 1, 2025*

PSAK 74: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 74 will replace PSAK 62: Insurance Contracts. PSAK 74 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

PSAK 74 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 71 and PSAK 72 on or before the date of initial application of PSAK 74. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS**

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgements and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.109.540 (2020: Rp18.134.450). Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 24.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Nilai tercatat atas tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.334.916 (2020: Rp11.277.104). Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 24.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following disclosure represent a summary of the significant estimates, judgements and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgement is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of December 31, 2021 was Rp31,109,540 (2020: Rp18,134,450). Further details regarding taxation are disclosed in Note 24.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. The carrying amount of the Group's claims for tax refund and tax assessments under appeal as of December 31, 2021 was Rp30,334,916 (2020: Rp11,277,104). Further explanations regarding this account are provided in Note 24.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak -
Kelompok Usaha sebagai penyewa

Kelompok Usaha menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Kelompok usaha memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Kelompok Usaha mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Kelompok Usaha menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 11.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada Catatan 2u.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Lease term of contracts with renewal and
termination options - the Group as lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 11.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial
liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by complying the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2u.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 7.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Otoritas Pelabuhan ("OP") memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 49).

Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan terminal pelabuhan dan alur pelayaran kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Classification of financial assets and financial liabilities (continued)

If the Group determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, the Group includes them in a group of trade receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for companys of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a company of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the company. Further details are disclosed in Note 7.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. ISAK 16 provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

Port Authority ("OP") granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 49).

Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the port terminal and shipping channel free of any form of charges, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the port terminal and shipping channel.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Kelompok Usaha berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Kelompok Usaha mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp3.195.512.405 dan Rp3.924.471.433.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

Kerugian Kredit Ekpektasian untuk Aset Keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Kelompok Usaha menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekpektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Kelompok Usaha telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Service concession arrangement (continued)

The Group has made judgement that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the year ended December 31, 2021 dan 2020, the Group recognized construction revenue amounting to Rp3,195,512,405 and Rp3,924,471,433, respectively.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

Expected Credit Loss for Financial Assets

For trade receivables and contract assets, the Group applies practical guidelines in calculating expected credit losses. Accordingly, the Group does not identify changes in credit risk, but rather measures the allowance for losses based on expected credit losses as long as the assets hold at the reporting date. The Group has established a provisioning matrix based on historical data on credit losses, adjusted for specific forward-looking factors related to customers and the economic environment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekpektasian untuk Aset Keuangan
(lanjutan)

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Kelompok Usaha menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Kelompok Usaha menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Kelompok Usaha menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 7 dan 8.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Expected Credit Loss for Financial Assets
(continued)

For debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, the Group applies the simplified method. At each reporting date, the Group evaluates whether a debt instrument is considered to have low credit risk using all available information without undue cost or effort. In conducting this evaluation, the Group reassesses the external credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when the contract payment is more than 30 days in arrears.

The Group evaluates whether there is objective evidence that trade receivables are impaired at the end of each reporting period. Provision for impairment of trade and other receivables is calculated based on the current condition and historical collectibility of trade receivables. These provisions are adjusted periodically to reflect actual and estimated results. Details of the nature and carrying amount of provision for impairment of receivables are disclosed in Notes 7 and 8.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Kelompok Usaha menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL atas piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk mengelompokkan pelanggan ke segmen yang memiliki pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif default yang diamati Kelompok Usaha secara historis. Kelompok Usaha akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi kedepan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah default di sektor usaha Kelompok Usaha, tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif default yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi kedepan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang dapat diamati secara historis, taksiran kondisi ekonomi dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Kelompok Usaha dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual default pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of financial assets

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Group's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Estimate useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2l. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2h, 2j, 2l, 2o, 11, 13, 14, 15, 16 dan 18.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 24.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2s dan 24.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimate useful lives of fixed assets (continued)

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2l. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Group's operations.

Further details are disclosed in Notes 2h, 2j, 2l, 2o, 11, 13, 14, 15, 16 and 18.

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 24.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2s and 24.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja karyawan

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan masing-masing sebesar Rp6.560.923.531, Rp6.938.142.497 dan Rp4.822.593.130 (Catatan 30).

Penyusutan aset hak-guna

Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset hak-guna antara 1 (satu) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Employee benefits

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the Management's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, employee benefits liability amounted to Rp6,560,923,531, Rp6,938,142,497 and Rp4,822,593,130, respectively (Note 30).

Depreciation of right-of-use assets

The costs of right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these leased assets to be within 1 (one) to 33 (thirty three) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Sewa - Memperkirakan suku bunga pinjaman tambahan

Kelompok Usaha tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman tambahan (IBR) untuk mengukur liabilitas sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Kelompok Usaha untuk meminjam dengan syarat yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkup ekonomi yang serupa.

Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perusahaan, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedianya tingkat suku bunga yang dapat diobservasi atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan dari sewa. Kelompok Usaha mengestimasi IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti tingkat suku bunga pasar) jika tersedia dan diperlukan untuk membuat estimasi-spesifik entitas tertentu.

Amortisasi aset hak konsesi

Kelompok Usaha melakukan amortisasi hak aset konsesi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi pemeliharaan aset konsesi

Provisi pemeliharaan aset konsesi ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk pemeliharaan sehubungan dengan kewajiban penyerahan aset kepada OP dalam kondisi baik pada akhir masa konsesi.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Leases - Estimating the incremental borrowing rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment.

The IBR therefore reflects what the Group 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates.

Amortization of concession assets

The Group decided to amortized concession assets using straight line method over the concession period.

Provision for concession assets maintenance

Provision for concession assets maintenance will be recorded periodically based on the estimated provision needed for maintenance in relation to the obligation to transfer assets to OP in good condition at the end of concession period.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 telah disajikan kembali untuk mencerminkan (1) dampak penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan (Catatan 1f), dan (2) dampak penambahan kepemilikan di CTP (Catatan 1g), seolah-olah seluruh kombinasi bisnis tersebut telah terjadi sejak awal periode pelaporan. Dengan demikian, penyesuaian bagian kepentingan Perusahaan atas aset neto entitas yang bergabung dan aset neto CTP, disajikan pada "Ekuitas *Merging Entity*" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019. Laba (rugi) neto dari entitas yang bergabung dan CTP yang diperoleh dicatat sebagai "Laba (Rugi) Proforma *Merging Entity*" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020.

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, efek penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	31 Desember 2020/December 31, 2020			
	Dilaporkan Sebelumnya/ As previously reported	Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ <i>Merger transaction adjustment effect (Note 1f)</i>	Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ <i>CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)</i>	Disajikan kembali/ As restated
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	5.298.274.315	6.253.595.090	61.187.385	11.613.056.790
Investasi jangka pendek	11.090.879.218	3.000.000	500.000	11.094.379.218
Piutang usaha, neto	621.234.556	935.723.926	-	1.556.958.482
Piutang lain-lain, neto	1.191.805.010	338.669.913	(110.872.448)	1.419.602.475
Uang muka dan beban dibayar di muka	93.350.043	93.947.569	5.179.391	192.477.003
Pendapatan masih akan diterima	278.739.081	225.045.632	-	503.784.713
Persediaan	55.314.157	131.727.282	-	187.041.439
Pajak dibayar di muka	524.068.875	637.748.365	-	1.161.817.240
Aset lancar lainnya	9.822.586	137.014.618	7.241.188	154.078.392
Total Aset Lancar	19.163.487.841	8.756.472.395	(36.764.484)	27.883.195.752
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi jangka panjang	2.776.393.603	1.360.500.056	(618.576.642)	3.518.317.017
Properti investasi - neto	337.941.738	529.475.008	-	867.416.746
Aset tetap - neto	14.190.173.679	30.041.679.395	346.749.851	44.578.602.925
Aset kerjasama operasi - neto	434.117.133	-	-	434.117.133
Aset hak-guna - neto	162.800.761	271.051.587	82.168.413	516.020.761
Aset pajak tangguhan	158.035.340	595.523.081	-	753.558.421
Aset takberwujud - neto	11.863.510.745	16.271.570.007	8.566.548.477	36.701.629.229
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.052.309.931	260.463.515	-	1.312.773.446
Aset tidak lancar lainnya	1.545.880.270	404.157.618	61.078.476	2.011.116.364
Total Aset Tidak Lancar	32.521.163.200	49.734.420.267	8.437.968.575	90.693.552.042
TOTAL ASET	51.684.651.041	58.490.892.662	8.401.204.091	118.576.747.794

4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The consolidated statements of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 have been restated to reflect (1) the effect of merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company (Note 1f), and (2) the effect of increase of ownership in CTP (Note 1g), as if all business combination had occurred since the beginning of the reporting period. Therefore, the adjustment of the Company's interest over the merged entities net assets and CTP net assets are presented in "Equity of *Merging Entity*" in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019. Net profit (loss) from the merged entities and CTP acquired are recorded as "Profit (Loss) Proforma *Merging Entity*" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Summary of amounts previously reported, the adjustments effect and the restated amounts are as follows:

Consolidated statement of financial position

	ASSETS
CURRENT ASSETS	
Cash and cash equivalent	11.613.056.790
Short-term investment	11.094.379.218
Trade receivables, net	1.556.958.482
Other receivables, net	1.419.602.475
Advances and prepaid expenses	192.477.003
Accrued revenues	503.784.713
Inventories	187.041.439
Prepaid taxes	1.161.817.240
Other current assets	154.078.392
Total Current Assets	27.883.195.752
NON-CURRENT ASSETS	
Long-term investments	3.518.317.017
Investment properties - net	867.416.746
Fixed assets - net	44.578.602.925
Joint operation assets - net	434.117.133
Right-of-use assets - net	516.020.761
Deferred tax assets	753.558.421
Intangible assets - net	36.701.629.229
Estimated claims for tax refund	1.312.773.446
Other non-current assets	2.011.116.364
Total Non-current Assets	90.693.552.042
TOTAL ASSETS	118.576.747.794

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

**4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position (continued)

	31 Desember 2020/December 31, 2020				
	Dilaporkan Sebelumnya/ As previously reported	Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ Merger transaction adjustment effect (Note 1f)	Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)	Disajikan kembali/ As restated	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	-	-	4.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha	1.581.921.230	1.624.912.796	1.747.190.300	4.954.024.326	Trade payables
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	957.175.849	421.863.673	-	1.379.039.522	Short-term unearned revenues
Utang pajak	357.031.402	290.495.752	-	647.527.154	Taxes payable
Beban akrual	1.765.278.079	1.475.399.894	423.810.706	3.664.488.679	Accrued expenses
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang					Current maturities of long-term liabilities
Utang obligasi	-	499.768.052	-	499.768.052	Bonds payable
Utang bank	-	504.471.670	-	504.471.670	Bank loans
Liabilitas sewa	60.214.419	15.140.092	-	75.354.511	Lease liabilities
Liabilitas jangka pendek lainnya	314.856.006	1.127.076.349	512.048.273	1.953.980.628	Other current liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.040.476.985	5.959.128.278	2.683.049.279	13.682.654.542	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar					Long-term liabilities - of current maturities
Utang obligasi	22.333.703.064	17.365.477.435	-	39.699.180.499	Bonds payable
Utang bank	-	7.558.701.974	3.570.294.516	11.128.996.490	Bank loans
Liabilitas sewa	112.676.519	206.694.883	-	319.371.402	Lease liabilities
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	1.002.703.343	1.002.703.343	Loan from non-bank financial institution
Liabilitas pajak tangguhan	43.507.959	74.266.124	-	117.774.083	Deferred tax liabilities
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.060.901.225	558.027.174	1.519.809	4.620.448.208	Long-term unearned revenue
Liabilitas jangka panjang lainnya	242.158.111	83.251.986	467.235.315	792.645.412	Other long-term liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2.764.262.295	4.173.880.202	-	6.938.142.497	Employee benefit liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	29.557.209.173	30.020.299.778	5.041.752.983	64.619.261.934	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	34.597.686.158	35.979.428.056	7.724.802.262	78.301.916.476	TOTAL LIABILITIES

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

**4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020					
Dilaporkan Sebelumnya/ As previously reported	Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ Merger transaction adjustment effect (Note 1f)	Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)	Disajikan kembali/ As restated		
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES AND EQUITY (continued)	
Ekuitas				Equity	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity	
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing				Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount)	
Modal dasar - 4.000.000 saham				Authorized capital - 4,000,000 shares	
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham	1.444.029.000	-	1.444.029.000	Issued and fully paid - 1,444,029 shares	
Modal donasi	26.825.982	-	26.825.982	Donated capital	
Tambahan modal disetor	(205.004.707)	-	(205.004.707)	Additional paid-in capital	
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	-	836.072.934	-	836.072.934	Difference in value of transactions with non-controlling interest
Ekuitas <i>merging entity</i>	-	20.925.719.926	590.686.286	21.516.406.212	Merging entity equity
Saldo laba				Retained earnings	
Ditentukan penggunaannya	15.021.058.681	-	15.021.058.681	Appropriated	
Belum ditentukan penggunaannya	907.447.522	-	85.572.026	993.019.548	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	(1.119.689.737)	-	143.517	(1.119.546.220)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	16.074.666.741	21.761.792.860	676.401.829	38.512.861.430	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali	1.012.298.142	749.671.746	-	1.761.969.888	Non-controlling interests
Ekuitas - neto	17.086.964.883	22.511.464.606	676.401.829	40.274.831.318	Equity - net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	51.684.651.041	58.490.892.662	8.401.204.091	118.576.747.794	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

**4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position
(continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/ Years Ended December 31, 2020					
	Dilaporkan Sebelumnya/ As previously reported	Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ Merger transaction adjustment effect (Note 1f)	Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)	Disajikan kembali/ As restated	
Pendapatan operasi	10.453.610.044	16.137.521.783	-	26.591.131.827	Operating revenues
Pendapatan konstruksi	957.228.613	1.962.041.774	1.005.201.046	3.924.471.433	Construction revenues
Beban operasi	(8.271.983.135)	(12.403.950.225)	-	(20.675.933.360)	Operating expenses
Beban konstruksi	(957.228.613)	(1.962.041.774)	(1.005.201.046)	(3.924.471.433)	Construction expenses
Beban operasi lainnya – neto	(85.551.623)	(107.837.176)	(3.149.309)	(196.538.108)	Other operating expense - net
LABA USAHA	2.096.075.286	3.625.734.382	(3.149.309)	5.718.660.359	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	508.515.645	189.322.558	1.743.545	699.581.748	Finance income
Beban keuangan	(1.122.841.759)	(1.419.948.396)	(1.576.016)	(2.544.366.171)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi	(97.537.586)	58.238.991	(700.112)	(39.998.707)	Equity in income of associates
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.384.211.586	2.453.347.535	(3.681.892)	3.833.877.229	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(397.544.704)	(38.635.574)	-	(436.180.278)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	986.666.882	2.414.711.961	(3.681.892)	3.397.696.951	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN					CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
Kini	(116.190.631)	(629.676.474)	-	(745.867.105)	Current
Tangguhan	286.311.037	(7.304.062)	28.105.650	307.112.625	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN	1.156.787.288	1.777.731.425	24.423.758	2.958.942.471	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak	(794.030.284)	(849.350.669)	184.013	(1.643.196.940)	Remeasurements of defined benefit plans - net off tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(329.194.038)	143.516	-	(329.050.522)	Exchange differences due to financial statements translation
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	108.347.081	-	-	108.347.081	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	141.910.047	928.524.272	24.607.771	1.095.042.090	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian

**4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position

	1 Januari 2020/31 Desember 2019/ January 1, 2020/December 31, 2019				
	Dilaporkan Sebelumnya/ As previously reported	Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ Merger transaction adjustment effect (Note 1f)	Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)	Disajikan kembali/ As restated	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	15.603.533.329	6.040.249.242	176.231.353	21.820.013.924	Cash and cash equivalent
Investasi jangka pendek	2.596.701.126	27.939.981	-	2.624.641.107	Short-term investment
Piutang usaha, neto	848.025.482	1.146.394.686	-	1.994.420.168	Trade receivables, net
Piutang lain-lain, neto	830.069.397	437.204.768	403.361.895	1.670.636.060	Other receivables, net
Uang muka dan beban dibayar di muka	104.181.981	148.283.756	2.291.204	254.756.941	Advances and prepaid expenses
Pendapatan masih akan diterima	305.452.354	255.240.090	-	560.692.444	Accrued revenues
Persediaan	82.940.596	118.330.202	-	201.270.798	Inventories
Pajak dibayar di muka	680.605.067	981.470.218	-	1.662.075.285	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	10.253.126	43.351.836	64.189.085	117.794.047	Other current assets
Total Aset Lancar	21.061.762.458	9.198.464.779	646.073.537	30.906.300.774	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Investasi jangka panjang	3.211.023.600	1.008.476.665	(584.174.631)	3.635.325.634	Long-term investments
Properti investasi - neto	357.295.487	528.408.163	-	885.703.650	Investment properties - net
Aset tetap - neto	13.387.155.835	28.852.135.176	481.174	42.239.772.185	Fixed assets - net
Aset kerjasama operasi - neto	461.100.101	-	-	461.100.101	Joint operation assets - net
Aset pajak tangguhan	73.873.814	259.300.281	(91.780.793)	241.393.302	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	10.818.271.480	15.096.560.865	6.613.775.229	32.528.607.574	Intangible assets - net
Taksiran tagihan restitusi pajak	958.917.154	215.984.806	-	1.174.901.960	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	1.711.199.806	628.291.009	121.702.288	2.461.193.103	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	30.978.837.277	46.589.156.965	6.060.003.267	83.627.997.509	Total Non-current Assets
TOTAL ASET	52.040.599.735	55.787.621.744	6.706.076.804	114.534.298.283	TOTAL ASSETS

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

**4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position
(continued)

	1 Januari 2020/31 Desember 2019/ January 1, 2020/December 31, 2019				
	Dilaporkan Sebelumnya/ As previously reported	Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ Merger transaction adjustment effect (Note 1f)	Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)	Disajikan kembali/ As restated	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	34.193.914	-	-	34.193.914	Short-term bank loans
Utang usaha	1.436.482.338	3.024.083.218	2.255.708.964	6.716.274.520	Trade payables
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	845.489.224	361.554.531	-	1.207.043.755	Short-term unearned revenues
Utang pajak	445.015.994	376.014.880	6.179.775	827.210.649	Taxes payable
Beban akrual	2.274.726.626	1.557.809.664	6.139.060	3.838.675.350	Accrued expenses
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang					Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	12.000	388.666.828	-	388.678.828	Bank loans
Liabilitas jangka pendek lainnya	317.802.505	1.023.552.276	29.273.578	1.370.628.359	Other current liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.353.722.601	6.731.681.397	2.297.301.377	14.382.705.375	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar					Long-term liabilities - of current maturities
Utang obligasi	21.984.178.194	17.630.956.114	-	39.615.134.308	Bonds payable
Utang bank	114.978.000	5.853.483.564	2.645.458.132	8.613.919.696	Bank loans
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	651.770.408	651.770.408	Loan from non-bank financial institution
Liabilitas pajak tangguhan	254.289.069	(157.433.923)	(5.349.801)	91.505.345	Deferred tax liabilities
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.005.631.257	598.450.999	-	4.604.082.256	Long-term unearned revenue
Liabilitas jangka panjang lainnya	235.263.928	25.937.414	441.350.272	702.551.614	Other long-term liabilities
Liabilitas imbalan kerja	1.966.325.908	2.856.267.222	-	4.822.593.130	Employee benefit liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	28.560.666.356	26.807.661.390	3.733.229.011	59.101.556.757	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	33.914.388.957	33.539.342.787	6.030.530.388	73.484.262.132	TOTAL LIABILITIES

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Ikhtisar angka-angka sebagaimana dilaporkan sebelumnya, penyesuaian dan angka-angka setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

**4. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

Summary of amounts previously reported, the adjustments and the restated amounts are as follows: (continued)

Consolidated statement of financial position (continued)

	1 Januari 2020/31 Desember 2019/ January 1, 2020/December 31, 2019				
	Dilaporkan Sebelumnya/ As previously reported	Efek penyesuaian transaksi penggabungan (Catatan 1f)/ Merger transaction adjustment effect (Note 1f)	Efek penyesuaian transaksi akuisisi CTP (Catatan 1g)/ CTP acquisition transaction adjustment effect (Note 1g)	Disajikan kembali/ As restated	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)					LIABILITIES AND EQUITY (continued)
Ekuitas					Equity
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing Modal dasar - 4.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham	1.444.029.000	-	-	1.444.029.000	Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) Authorized capital - 4,000,000 shares Issued and fully paid - 1,444,029 shares
Modal donasi	26.825.982	-	-	26.825.982	Donated capital
Tambahan modal disetor	(317.597.475)	-	-	(317.597.475)	Additional paid-in capital
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	-	836.072.934	-	836.072.934	Difference in value of transactions with non-controlling interest
Ekuitas merging entity	-	20.394.876.151	656.024.614	21.050.900.765	Merging entity equity
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	13.273.514.540	-	-	13.273.514.540	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	2.455.762.802	-	-	2.455.762.802	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	(105.008.860)	-	-	(105.008.860)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	16.777.525.989	21.230.949.085	656.024.614	38.664.499.688	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali	1.348.684.789	1.017.329.872	19.521.802	2.385.536.463	Non-controlling interests
Ekuitas - neto	18.126.210.778	22.248.278.957	675.546.416	41.050.036.151	Equity - net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	52.040.599.735	55.787.621.744	6.706.076.804	114.534.298.283	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Kas	42.703.201	101.731.358	22.123.101	Cash on hand
Bank	4.727.772.682	3.018.630.537	2.465.078.215	Cash in banks
Deposito berjangka	8.151.912.704	8.492.694.895	19.332.812.608	Time deposits
Total kas dan setara kas	12.922.388.587	11.613.056.790	21.820.013.924	Total cash and cash equivalents

a. Kas

a. Cash on hand

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Rupiah	42.703.201	101.731.358	22.123.101	Rupiah

b. Bank

b. Cash in banks

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
<u>Rupiah:</u>				<u>Rupiah:</u>
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	368.088.278	423.116.891	123.142.371	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	58.890.818	42.122.255	42.415.021	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	36.918.896	44.958.944	9.462.526	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.293.298	3.917.685	4.028.865	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	1.151.216	5.086.865	32.893.252	PT Bank Permata Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.130.734	2.653.138	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	356.120	17.253.283	10.561.558	PT Bank Bukopin Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	7.738.149	2.721.937	3.679.954	Others (each below Rp2 billion)
Pihak berelasi (Catatan 45a)	3.725.987.853	1.567.270.855	1.876.032.958	Related parties (Note 45a)
Subtotal	4.205.555.362	2.109.101.853	2.102.216.505	Sub-total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

b. Bank (lanjutan)

b. Cash in banks (continued)

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
<u>Dolar AS:</u>				<u>US Dollar:</u>
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Bank Permata Tbk	1.442.617	9.331	4.205.314	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	1.200.001	508.921.912	15.750.732	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	63.333	6.302.103	39.249.344	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	16.806	-	25.811.490	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	4.226.276	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	680.254	572.841	5.165.084	Others (each below Rp2 billion)
Pihak berelasi (Catatan 45a)	518.814.309	393.722.497	268.453.426	Related parties (Note 45a)
Subtotal	522.217.320	909.528.684	362.861.666	Sub-total
<u>Euro:</u>				<u>Euro:</u>
Pihak berelasi (Catatan 45a)	-	-	44	Related parties (Note 45a)
Total bank	4.727.772.682	3.018.630.537	2.465.078.215	Total cash in banks

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
<u>Rupiah:</u>				<u>Rupiah:</u>
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	577.710.000	194.410.000	164.510.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	75.400.000	219.000.000	473.200.000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Permata Tbk	54.000.000	-	12.000.000	PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	24.000.000	142.000.000	207.500.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DKI	15.000.000	-	3.412.058	PT Bank DKI
PT Bank BTPN Syariah Tbk	10.000.000	10.513.179	13.217.229	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank Mega Syariah	10.000.000	2.000.000	3.000.000	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	10.000.000	-	1.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Pembangunan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	9.100.000	15.100.000	15.100.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Bank BRI Agroniaga Tbk	6.000.000	13.000.000	-	PT Bank BRI Agroniaga Tbk
PT Bank BTPN	5.000.000	-	-	PT Bank BTPN
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.119.691	14.518.213	74.682.478	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Mayapada International Tbk	1.000.000	8.000.000	2.000.000	PT Bank Mayapada International Tbk

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

	<u>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</u>			
	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019</u>	
<u>Rupiah: (lanjutan)</u>				<u>Rupiah: (continued)</u>
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				<u>Third parties (continued)</u>
PT Bank Maybank				PT Bank Maybank
Indonesia Tbk	1.000.000	3.000.000	1.500.000	Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	-	3.000.000	3.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pembangunan				PT Bank Pembangunan
Daerah Bali	-	5.000.000	5.000.000	Daerah Bali
PT Bank NTB Syariah	-	-	61.500.000	PT Bank NTB Syariah
PT Bank UOB Indonesia Tbk	-	-	35.596.970	PT Bank UOB Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk	-	-	36.011.830	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Jatim Syariah	-	-	16.500.000	PT Bank Jatim Syariah
PT Bank Muamalat	-	-	5.000.000	PT Bank Muamalat
PT Bank J Trust Indonesia	-	-	5.000.000	PT Bank J Trust Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah				PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Selatan	-	-	5.000.000	Kalimantan Selatan
PT Bank OCB NISP Tbk	-	-	3.000.000	PT Bank OCB NISP Tbk
PT Bank Pembangunan				PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah	-	-	3.000.000	Daerah Jawa Tengah
PT Bank BCA Syariah	-	-	2.000.000	PT Bank BCA Syariah
PT Bank Pembangunan				PT Bank Pembangunan
Daerah Nusa Tenggara Barat	-	-	2.000.000	Daerah Nusa Tenggara Barat
PT Bank Panin Dubai	-	-	1.000.000	PT Bank Panin Dubai
Syariah Tbk	-	-	1.000.000	Syariah Tbk
Pihak berelasi (Catatan 45a)	7.190.688.390	4.323.761.302	4.823.725.504	Related parties (Note 45a)
Subtotal	7.990.018.081	4.953.302.694	5.978.456.069	Sub-total
<u>Dolar AS:</u>				<u>US Dollar:</u>
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	5.605.625	PT Bank Central Asia Tbk
Pihak berelasi (Catatan 45a)	161.894.623	3.539.392.201	13.348.750.914	Related parties (Note 45a)
Total deposito berjangka	8.151.912.704	8.492.694.895	19.332.812.608	Total time deposits

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	<u>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,</u>			
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rupiah	2,25% - 5,27%	5,25% - 7,50%	4,50% - 9,25%	Rupiah
Dolar AS	0,10% - 3,00%	1,00% - 3,25%	1,35% - 4,00%	US Dollar

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. INVESTASI JANGKA PENDEK

6. SHORT-TERM INVESTMENTS

	<u>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</u>			
	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019</u>	
<u>Deposito berjangka</u>				<u>Time deposits</u>
<u>Rupiah:</u>				<u>Rupiah:</u>
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-	3.000.000	3.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	-	-	5.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	-	-	3.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	-	-	3.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
Pihak berelasi (Catatan 45b)	1.650.000.000	500.000	104.642.400	Related parties (Note 45b)
<u>Dolar AS:</u>				<u>US Dollar:</u>
Pihak berelasi (Catatan 45b)	4.068.327.340	10.946.890.500	2.154.655.000	Related parties (Note 45b)
Total deposito berjangka	5.718.327.340	10.950.390.500	2.273.297.400	Total time deposits
<u>Surat Berharga Komersial (SBK)</u>				<u>Securities (SBK)</u>
<u>Rupiah:</u>				<u>Rupiah:</u>
SBK I PT Pengelola Aset (Persero)	-	-	13.939.981	SBK I PT Pengelola Aset (Persero)
Efek yang diperdagangkan	198.633	143.988.718	337.403.726	Marketable securities
Total investasi jangka pendek	5.718.525.973	11.094.379.218	2.624.641.107	Total short-term investments

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Time deposits represent deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and were not used as collateral.

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	<u>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,</u>			
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rupiah	2,25% - 6,25%	5,35% - 9,25%	4,50% - 9,25%	Rupiah
Dolar AS	0,20% - 0,75%	0,75% - 1,25%	1,33% - 3,55%	US Dollar

Efek yang diperdagangkan merupakan instrumen keuangan dalam bentuk saham jangka pendek dan reksadana pasar uang.

Marketable securities represent financial instrument in shares of stock and money market mutual funds.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Pihak ketiga				Third parties
Swasta	2.120.714.748	2.069.140.307	1.960.818.835	Private
Perorangan	9.376.284	6.617.779	11.034.160	Individuals
Dikurangi:				Less:
Penyisihan penurunan nilai	(876.958.191)	(798.152.093)	(544.443.844)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	1.253.132.841	1.277.605.993	1.427.409.151	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 45c)	547.400.440	646.204.156	795.166.440	Related parties (Note 45c)
Dikurangi:				Less:
Penyisihan penurunan nilai	(284.270.735)	(366.851.667)	(228.155.423)	Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	263.129.705	279.352.489	567.011.017	Related parties - net
Total piutang usaha - neto	1.516.262.546	1.556.958.482	1.994.420.168	Total trade receivables - net

b. Berdasarkan mata uang

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Rupiah	2.587.659.966	2.688.875.278	2.691.798.587	Rupiah
Dolar AS	89.831.507	33.086.965	75.141.944	US Dollar
Dolar Singapura	-	-	78.902	Singapore Dollar
Total	2.677.491.473	2.721.962.243	2.767.019.433	Total
Dikurangi:				Less:
Penyisihan penurunan nilai	(1.161.228.927)	(1.165.003.761)	(772.599.265)	Allowance for impairment
Neto	1.516.262.546	1.556.958.482	1.994.420.168	Net

c. Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

c. Movements in the allowance for expected credit loss, are as follows:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Saldo awal	1.165.003.761	772.599.265	563.534.540	Beginning balance
Penyisihan	122.259.579	447.038.448	211.101.892	Allowance for impairment
Pemulihan	(126.034.413)	(54.633.952)	(2.037.167)	Reversal
Saldo akhir	1.161.228.927	1.165.003.761	772.599.265	Ending balance

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, management believes that the allowance for expected credit loss of trade receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk on receivables from third parties.

The following table presents the aging analysis of trade receivables.

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Belum jatuh tempo	540.601.210	654.680.568	398.347.946	Not yet overdue
Lewat jatuh tempo				Overdue
1-90 hari	914.452.233	971.366.722	1.096.365.462	1-90 days
91-180 hari	145.965.228	182.697.751	200.008.304	91-180 days
Lebih dari 180 hari	1.076.472.802	913.217.202	1.011.767.175	More than 180 days
Subtotal	2.677.491.473	2.721.962.243	2.706.488.887	Subtotal
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(1.161.228.927)	(1.165.003.761)	(712.068.719)	Less: Allowance for impairment
Neto	1.516.262.546	1.556.958.482	1.994.420.168	Net

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER RECEIVABLES

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Swasta	185.862.939	139.904.132	273.385.846	Private
Perorangan	10.838.039	3.485.654	6.261.145	Individuals
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(69.712.459)	(39.861.587)	(41.467.980)	Less: Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	126.988.519	103.528.199	238.179.011	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 45d)	1.242.292.898	1.428.560.529	1.566.539.047	Related parties (Note 45d)
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(88.914.882)	(112.486.253)	(134.081.998)	Less: Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	1.153.378.016	1.316.074.276	1.432.457.049	Related parties - net
Piutang lain-lain - neto	1.280.366.535	1.419.602.475	1.670.636.060	Other receivables - net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Saldo awal	152.347.840	175.549.978	110.331.968	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	6.279.501	(23.202.138)	65.218.010	<i>Provision (reversal) for the year</i>
Saldo akhir	158.627.341	152.347.840	175.549.978	<i>Ending balance</i>

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir tahun pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

The movement in the allowance for impairment of other receivable are as follows:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Saldo awal	152.347.840	175.549.978	110.331.968	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	6.279.501	(23.202.138)	65.218.010	<i>Provision (reversal) for the year</i>
Saldo akhir	158.627.341	152.347.840	175.549.978	<i>Ending balance</i>

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting year, the Group's management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
<u>Uang muka</u>				<u>Advances</u>
Operasional	67.420.878	59.027.000	55.099.834	<i>Operational</i>
Lain-lain	1.518.015	823.922	892.674	<i>Others</i>
Subtotal	68.938.893	59.850.922	55.992.508	<i>Sub-total</i>
<u>Beban dibayar di muka</u>				<u>Prepaid expenses</u>
Pegawai	52.374.591	61.630.898	65.484.055	<i>Employees</i>
Asuransi	44.471.527	31.832.643	33.199.577	<i>Insurance</i>
Sewa	42.059.099	15.697.868	10.398.707	<i>Rental</i>
Umum	14.060.826	9.803.669	7.836.293	<i>General</i>
Pemeliharaan	12.008.540	369.137	43.766.441	<i>Maintenance</i>
Lain-lain	24.764.248	13.291.866	38.079.360	<i>Others</i>
Subtotal	189.738.831	132.626.081	198.764.433	<i>Sub-total</i>
Total	258.677.724	192.477.003	254.756.941	<i>Total</i>

9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

10. ACCRUED REVENUES

	<u>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</u>			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Pihak ketiga	297.585.161	435.894.846	437.277.939	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45e)	33.383.321	67.889.867	123.414.505	Related parties (Note 45e)
Total	330.968.482	503.784.713	560.692.444	Total

11. PERSEDIAAN

11. INVENTORIES

	<u>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</u>			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Suku cadang	176.273.424	162.416.045	148.809.889	Spareparts
Bahan bakar	42.728.088	25.695.651	28.646.294	Fuels
Alat tulis dan barang cetakan	643.761	628.103	1.152.643	Stationaries and printings
Obat, bahan, dan alat medis	331.907	595.578	16.036.127	Medicines, materials, and equipment
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	6.182.313	3.548.653	11.709.186	Others (each below Rp1 billion)
Total	226.159.493	192.884.030	206.354.139	Total
Dikurangi:				Less:
Penyisihan persediaan usang	(8.484.930)	(5.842.591)	(5.083.341)	Allowance for inventory obsolescence
Neto	217.674.563	187.041.439	201.270.798	Net

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolescence is as follows:

	<u>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</u>			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Saldo awal	5.842.591	5.083.341	6.061.043	Beginning balance
Pemulihan tahun berjalan	-	(1.275.273)	(710.590)	Recovery during the year
Penambahan tahun berjalan	2.642.339	2.034.523	(267.112)	Addition during the year
Saldo akhir	8.484.930	5.842.591	5.083.341	Ending balance

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. INVESTASI JANGKA PANJANG

12. LONG-TERM INVESTMENT

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Investasi pada entitas asosiasi	3.109.069.141	3.079.458.527	3.299.295.879	Investment in associates
Investasi pada penyertaan saham	82.207.761	22.034.000	30.278.100	Investment in share of stocks
Investasi pada surat utang	560.361.975	416.824.490	305.751.655	Investment in bonds
Total	3.751.638.877	3.518.317.017	3.635.325.634	Total

a. Investasi pada entitas asosiasi

a. Investment in associates

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Metode ekuitas				Equity method
BKMS	1.073.791.573	983.415.201	925.599.602	BKMS
JICT (Catatan 50g)	1.023.072.772	1.195.871.471	1.802.286.963	JICT (Note 50g)
NPCT1 (Catatan 50b, 50c, 50d dan 50e)	359.887.918	299.868.935	337.706.705	NPCT1 (Notes 50b, 50c, 50d and 50e)
PHC	120.306.580	73.416.596	-	PHC
LNG	71.941.751	71.485.655	70.869.046	LNG
TNU	38.577.798	48.570.979	60.726.334	TNU
RSP	35.894.180	7.179.599	-	RSP
JBT	28.229.200	51.364.498	46.515.482	JBT
Ambapers	26.548.330	21.397.468	19.545.469	Ambapers
PTI	19.026.070	15.244.500	15.087.749	PTI
PCN	2.084.440	1.935.096	-	PCN
EMS	330.529	330.529	330.529	EMS
NWPKL				FVOCI
PBM IHC	288.750.000	288.750.000	-	PBM IHC
PT Djakarta Llyod	20.628.000	20.628.000	20.628.000	PT Djakarta Llyod
Total	3.109.069.141	3.079.458.527	3.299.295.879	Total

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The movements of investments in associates are as follows:

	31 Desember/December 31, 2021				
	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value
Metode ekuitas					Equity method
Dimiliki melalui Perusahaan					Owned through the Company
BKMS	40,00%	800.000.000	273.685.226	106.347	1.073.791.573
JICT	48,90%	108.289.249	559.896.301	354.887.222	1.023.072.772
PHC	31,73%	45.060.000	75.915.104	(668.524)	120.306.580
LNG	49,00%	71.050.000	891.751	-	71.941.751
TNU	40,00%	68.500.000	(29.922.202)	-	38.577.798
RSP	32,88%	13.706.360	22.236.037	(48.217)	35.894.180
JBT	13,86%	131.048.000	(102.804.955)	(13.845)	28.229.200
Ambapers	40,00%	6.000.000	20.361.307	187.023	26.548.330
PCN	30,00%	1.500.000	584.440	-	2.084.440
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

12. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

a. Investment in associates (continued)

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements of investments in associates are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2021

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas (lanjutan)						Equity method (continued)
Dimiliki melalui PIL PTI	20,00%	18.000.000	1.026.070	-	19.026.070	Owned through PIL PTI
Dimiliki melalui IPC TPK NPCT1	51,00%	173.770.056	156.461.679	29.656.183	359.887.918	Owned through IPC TPK NPCT1
NWPKL						FVOCI
Dimiliki melalui Perusahaan PBM IHC	6,00%	288.750.000	-	-	288.750.000	Owned through the Company PTI
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	-	20.628.000	PTI
Total		1.749.272.165	975.690.787	384.106.189	3.109.069.141	Total

31 Desember/December 31, 2020

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas						Equity method
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
JICT	48,90%	108.289.248	1.057.544.585	30.037.638	1.195.871.471	JICT
BKMS	40,00%	800.000.000	183.514.563	(99.362)	983.415.201	BKMS
PHC	31,73%	45.060.000	28.776.376	(419.780)	73.416.596	PHC
LNG	49,00%	71.050.000	435.655	-	71.485.655	LNG
JBT	13,86%	131.047.297	(79.714.945)	32.146	51.364.498	JBT
TNU	40,00%	68.500.000	(19.954.690)	25.669	48.570.979	TNU
Ambapers	40,00%	6.000.000	15.220.049	177.419	21.397.468	Ambapers
RSP	32,88%	13.706.360	(6.478.544)	(48.217)	7.179.599	RSP
PCN	30,00%	1.500.000	435.096	-	1.935.096	PCN
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	EMS
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	Portek Indonesia
Dimiliki melalui PIL PTI	20,00%	18.000.000	(2.755.500)	-	15.244.500	Owned through PIL PTI
Dimiliki melalui IPC TPK NPCT1	51,00%	173.770.056	99.537.499	26.561.380	299.868.935	Owned through IPC TPK NPCT1
NWPKL						FVOCI
Dimiliki melalui Perusahaan PBM IHC	6,00%	288.750.000	-	-	288.750.000	Owned through the Company PTI
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	-	20.628.000	PTI
Total		1.749.271.461	1.273.920.173	56.266.893	3.079.458.527	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

12. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

a. Investment in associates (continued)

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements of investments in associates are as follows: (continued)

1 Januari 2020/31 Desember 2019/January 1, 2020/December 31, 2019
Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas						Equity method
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
JICT	48,90%	108.289.248	1.113.555.444	580.442.271	1.802.286.963	JICT
BKMS	40,00%	800.000.000	125.782.185	(182.583)	925.599.602	BKMS
LNG	49,00%	71.050.000	(180.954)	-	70.869.046	LNG
TNU	40,00%	68.500.000	(7.799.561)	25.895	60.726.334	TNU
JBT	17,58%	131.047.297	(84.597.840)	66.025	46.515.482	JBT
Ambapers	40,00%	6.000.000	13.598.255	(52.786)	19.545.469	Ambapers
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	EMS
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	Portek Indonesia
Dimiliki melalui PIL						Owned through PIL
PTI	20,00%	18.000.000	(2.912.251)	-	15.087.749	PTI
Dimiliki melalui IPC TPK						Owned through IPC TPK
NPCT1	51,00%	173.770.056	141.558.496	22.378.153	337.706.705	NPCT1
NWPKL						FVOCI
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	-	20.628.000	PTI
Total		1.400.255.101	1.296.363.803	602.676.975	3.299.295.879	Total

b. Investasi pada penyertaan saham

b. Investment in share of stock

Disajikan kembali - Catatan 4/
As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.304.818	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	14.250.000	15.062.500	17.312.500	PT Astra International Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.920.020	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bukit Asam Tbk	9.015.086	5.620.000	5.320.000	PT Bukit Asam Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6.394.820	-	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	5.102.500	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.630.446	-	-	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	2.992.240	-	-	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.342.535	-	-	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	2.172.000	-	-	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	13.185.796	1.351.500	2.543.100	Others (each below Rp2 billion)
Total	82.207.761	22.034.000	30.278.100	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

12. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

c. Investasi pada surat utang

c. Investment in bonds

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
PT Medco Power Indonesia	51.906.614	51.812.250	50.432.290	PT Medco Power Indonesia
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	-	50.000.000	50.000.000	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	10.941.195	-	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	-	20.415.680	51.367.050	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	508.455.361	283.655.365	153.952.315	Others (each below Rp2 billion)
Total	560.361.975	416.824.490	305.751.655	Total

13. PROPERTI INVESTASI

13. INVESTMENT PROPERTIES

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/
Year Ended December 31, 2021

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	553.013.673	5.873	-	22.990.641	576.010.187	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	693.909.905 28.074.591	6.221.205 -	- -	- -	700.131.110 28.074.591	Port facilities Roads and buildings
Total	1.274.998.169	6.227.078	-	22.990.641	1.304.215.888	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	(395.931.577) (11.649.846)	(21.049.365) (624.312)	- -	- -	(416.980.942) (12.274.158)	Port facilities Roads and buildings
Total	(407.581.423)	(21.673.677)	-	-	(429.255.100)	Total
Dikurangi:						Less:
Penyisihan penurunan nilai	-	-	-	(1.526.810)	(1.526.810)	Allowance for impairment
Nilai buku neto	867.416.746				873.433.978	Net book value

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/
Year ended December 31, 2020
Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	546.380.618	6.633.055	-	-	553.013.673	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	696.927.491 28.074.591	- -	(3.017.586) -	- -	693.909.905 28.074.591	Port facilities Roads and buildings
Total	1.271.382.700	6.633.055	(3.017.586)	-	1.274.998.169	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	(374.657.010) (11.022.040)	(21.671.974) (627.806)	397.407 -	- -	(395.931.577) (11.649.846)	Port facilities Roads and buildings
Total	(385.679.050)	(22.299.780)	397.407	-	(407.581.423)	Total
Nilai buku neto	885.703.650				867.416.746	Net book value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp35.780.564, Rp34.927.083 dan Rp22.518.573, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas properti investasi.

13. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Depreciation expenses of investment properties are recorded as part of operating expenses.

The fair value of investment properties as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are calculated amounting to Rp35,780,564, Rp34,927,083 and Rp22,518,573, respectively, which determined based on Sales Value of Tax Object (NJOP) of the investment properties.

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/
Year Ended December 31, 2021

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	3.321.174.108	49.458.238	-	33.079.170	3.403.711.516	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	18.145.061.821	77.741.877	(589.348)	891.643.080	19.113.857.430	Port facilities
Kapal	5.644.336.695	32.627.057	(3.343.767)	272.096.891	5.945.716.876	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	16.031.236.158	577.169.837	(16.607.812)	120.943.700	16.712.741.883	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	2.937.873.881	71.809.367	-	489.210.214	3.498.893.462	Port installation
Jalan dan bangunan	5.801.563.436	116.301.487	(2.355.484)	(136.349.275)	5.779.160.164	Roads and buildings
Peralatan	1.458.075.401	33.843.992	(6.648.513)	184.121.476	1.669.392.356	Equipment
Kendaraan	192.995.218	1.279.568	(11.471.022)	(4.687.592)	178.116.172	Vehicles
Emplasemen	550.609.196	4.386.607	(878.000)	107.911.591	662.029.394	Emplacement
Subtotal	54.082.925.914	964.618.030	(41.893.946)	1.957.969.255	56.963.619.253	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	6.023.457.792	4.404.300.132	(7.981.912)	(2.486.531.926)	7.933.244.086	Construction in progress
Total	60.106.383.706	5.368.918.162	(49.875.858)	(528.562.671)	64.896.863.339	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(3.742.590.535)	(664.737.328)	462.049	5.669.531	(4.401.196.283)	Port facilities
Kapal	(2.050.939.452)	(288.699.894)	3.276.892	3.790.305	(2.332.572.149)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(5.815.145.155)	(1.590.715.301)	13.178.426	(35.410.423)	(7.428.092.453)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(988.819.802)	(151.473.698)	-	(14.264.620)	(1.154.558.120)	Port-installation
Jalan dan bangunan	(1.497.185.498)	(203.020.416)	1.458.778	5.003.586	(1.693.743.550)	Roads and buildings
Peralatan	(987.292.760)	(222.793.381)	6.488.338	3.819.258	(1.199.778.545)	Equipment
Kendaraan	(141.203.612)	(10.523.923)	8.862.822	25.485.738	(117.378.975)	Vehicles
Emplasemen	(185.401.183)	(23.054.196)	97.517	2.683.593	(205.674.269)	Emplacement
Total	(15.408.577.997)	(3.155.018.137)	33.824.822	(3.223.032)	(18.532.994.344)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(119.202.784)	-	48.128.344	7.388.367	(63.686.073)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	44.578.602.925				46.300.182.922	Net book value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/
Year ended December 31, 2020
Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	3.160.782.511	5.666.069	-	154.725.528	3.321.174.108	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	16.231.701.424	8.022.446	(10.751.627)	1.916.089.578	18.145.061.821	Port facilities
Kapal	5.348.564.072	41.275.408	(41.254.895)	295.752.110	5.644.336.695	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	15.745.422.051	64.281.366	(424.638.955)	646.171.696	16.031.236.158	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	2.751.185.584	18.145.864	-	168.542.433	2.937.873.881	Port installation
Jalan dan bangunan	4.767.709.961	18.846.974	(987.417)	1.015.993.918	5.801.563.436	Roads and buildings
Peralatan	1.335.912.231	19.268.422	(5.494.787)	108.389.535	1.458.075.401	Equipment
Kendaraan	199.942.212	5.659.784	(7.580.281)	(5.026.497)	192.995.218	Vehicles
Emplasemen	490.409.592	-	-	60.199.604	550.609.196	Emplacement
Subtotal	50.031.629.638	181.166.333	(490.707.962)	4.360.837.905	54.082.925.914	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	5.590.920.155	5.336.984.497	(19.201.714)	(4.885.245.146)	6.023.457.792	Construction in progress
Total	55.622.549.793	5.518.150.830	(509.909.676)	(524.407.241)	60.106.383.706	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(3.153.128.182)	(593.085.558)	15.980.453	(12.357.248)	(3.742.590.535)	Port facilities
Kapal	(1.706.762.505)	(281.766.015)	39.405.517	(101.816.449)	(2.050.939.452)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(5.154.370.039)	(1.108.348.019)	437.146.023	10.426.880	(5.815.145.155)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(811.174.253)	(178.121.487)	-	475.938	(988.819.802)	Installation
Jalan dan bangunan	(1.260.196.015)	(238.987.788)	641.178	1.357.127	(1.497.185.498)	Roads and buildings
Peralatan	(910.117.010)	(82.400.553)	4.292.132	932.671	(987.292.760)	Equipment
Kendaraan	(136.604.525)	(10.614.859)	6.015.772	-	(141.203.612)	Vehicles
Emplasemen	(162.423.246)	(23.007.887)	-	29.950	(185.401.183)	Emplacement
Total	(13.294.775.775)	(2.516.332.166)	503.481.075	(100.951.131)	(15.408.577.997)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(88.001.833)	(32.118.267)	917.316	-	(119.202.784)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	42.239.772.185				44.578.602.925	Net book value

Beban penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets are recorded as part of operating expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Group insured its fixed assets as follows:

31 Desember 2021

December 31, 2021

Perusahaan Asuransi/ Insurance Company	Risiko Asuransi/ Insurable Risk	Nilai Pertanggungan Asuransi/Insurance Coverage Amount
PT Asuransi Kredit Indonesia PT Asuransi FPG Indonesia PT Asuransi Ramayana PT MS Amlin PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Shipowners Mutual Protection Indemnity Association PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Risiko kebakaran, <i>property all risk, industrial all risk</i> dan risiko lainnya/ <i>Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks</i>	Rp46.550.371.671; USD528.000.000

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2020

December 31, 2020

Perusahaan Asuransi/ Insurance Company	Risiko Asuransi/ Insurable Risk	Nilai Pertanggungan Asuransi/Insurance Coverage Amount
PT Asuransi Kredit Indonesia PT Asuransi FPG Indonesia PT Asuransi Ramayana PT MS Amlin PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Shipowners Mutual Protection Indemnity Association PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Asuransi Bina Dana Arta PT Asuransi Staco Mandiri PT Asuransi Chubb Syariah	Risiko kebakaran, <i>property all risk, industrial all risk</i> dan risiko lainnya/ <i>Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks</i>	Rp48.714.024.888; USD569.402.000

1 Januari 2020/31 Desember 2019

January 1, 2020/December 31, 2019

Perusahaan Asuransi/ Insurance Company	Risiko Asuransi/ Insurable Risk	Nilai Pertanggungan Asuransi/Insurance Coverage Amount
PT Asuransi Kredit Indonesia PT Asuransi FPG Indonesia PT Asuransi Ramayana PT MS Amlin PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Shipowners Mutual Protection Indemnity Association PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Asuransi Bina Dana Arta PT Asuransi Staco Mandiri PT Asuransi Chubb Syariah PT Asuransi Jasaraharja Putera	Risiko kebakaran, <i>property all risk, industrial all risk</i> dan risiko lainnya/ <i>Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks</i>	Rp38.885.908.423; USD571.000.000

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset tidak lancar lainnya sebesar Rp331.589.436, reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi sebesar Rp22.990.641 dan reklasifikasi aset tetap menjadi aset takberwujud sebesar Rp173.982.594.

Reclassification as of December 31, 2021 includes reclassification of property, plant and equipment into other current assets amounting to Rp331,589,436, reclassification of property and equipment amounting to Rp22,990,641 and reclassification of assets into intangible assets amounting to Rp173,982,594.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk reklasifikasi aset takberwujud menjadi aset tetap sebesar Rp43.511.404, reklasifikasi aset tidak lancar lainnya menjadi aset tetap sebesar Rp137.068.813, reklasifikasi aset tetap menjadi aset tidak lancar lainnya sebesar Rp17.404.054, reklasifikasi aset tetap menjadi aset takberwujud sebesar Rp282.193.221, reklasifikasi aset tetap menjadi aset tersedia untuk dijual sebesar Rp9.570.545, reklasifikasi aset tetap menjadi aset tetap usul hapus sebesar Rp6.477.151 serta reklasifikasi aset tetap dalam penyelesaian ke aset takberwujud sebesar Rp443.291.685.

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap

Pada tahun 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV (entitas yang menggabungkan diri ke dalam Perusahaan), serta entitas anak (PTP, PII dan PPI) menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Penjualan aset tetap/Sale of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai pelepasan/Sales value	Nilai buku/Book value	Laba (rugi) penjualan/Gain (loss) of sales	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners Approval
Perusahaan (dahulu/formerly Pelindo II)	3.521.883	3.148.632	373.251	No. 45/DK/PI.II/VII.2020 tanggal 31 Juli 2020/No. 45/DK/PI.II/VII.2020 dated July 31, 2020
Pelindo III	11.005.302	7.428.218	3.577.084	No. UM.186/08/S/CMSR-2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/ No. UM.186/08/S/CMSR-2021 dated August 13, 2021 and SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 dated September 23, 2021
Pelindo IV	154.255	2.899	151.356	No. 45/DK/PI.II/VII.2020 tanggal 31 Juli 2020/No. 45/DK/PI.II/VII.2020 dated July 31, 2020
PTP	6.763.000	3.546.690	3.216.310	No. SK.46/KU.202/DUT-2021 tanggal 10 September 2021, No. UM.186/08/S/CMSR-2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan No. SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 Tanggal 23 September 2021/ No. SK.46/KU.202/DUT-2021 dated September 10, 2021, No. UM.186/08/S/CMSR-2021 dated August 13, 2021 and No. Ministerial Decree No. S-722/MBU/09/2021 September 23, 2021
Total	21.444.440	14.126.439	7.318.001	

14. FIXED ASSETS (continued)

Reclassification on December 31, 2020 included reclassification of intangible assets to fixed assets amounting to Rp43,511,404, reclassification of other non current assets to fixed assets amounting to Rp137,068,813, reclassification of fixed assets to other non-current assets amounting to Rp17,404,054, reclassification of fixed assets to intangible assets amounting to Rp282,193,221, reclassification of fixed assets to assets held for sale amounting to Rp9,570,545, reclassification of fixed assets to written-off fixed assets amounting to Rp6,477,151 and reclassification of fixed assets under construction to intangible assets amounting to Rp443,291,685.

Sale and Write-off of Fixed Assets

In 2021, the Company (formerly Pelindo II) and Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV (entities that merged into the Company), as well as subsidiaries (PTP, PII and PPI) sold and written-off several fixed assets with details as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

Pada tahun 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV (entitas yang menggabungkan diri ke dalam Perusahaan), serta entitas anak (PTP, PII dan PPI) menjual dan menghapusbukkan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

Penghapusan aset tetap/Write-off of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai buku/Book value	Laba (rugi) penjualan/Gain (loss) of sales
Pelindo I	2.844.376	(2.844.376)
Pelindo III	1.965.207	(1.965.207)
Pelindo IV	690.727	(690.727)
PII	39.474	(39.474)
PPI	-	-
Total	5.539.784	(5.539.784)

Pada tahun 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Pelindo III (entitas yang menggabungkan diri ke dalam Perusahaan), serta entitas anak (Rukindo) menjual dan menghapusbukkan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Penjualan aset tetap/Sale of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai pelepasan/Sales value	Nilai buku/Book value
Pelindo III	974.078	2.657.520
Rukindo	6.680.000	3.508.274
Total	7.654.078	6.165.794

14. FIXED ASSETS (continued)

Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)

In 2021, the Company (formerly Pelindo II) and Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV (entities that merged into the Company), as well as subsidiaries (PTP, PII and PPI) sold and written-off several fixed assets with details as follows: (continued)

Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners Approval

No. KU.61/151/DK/PP.I/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020/ No. KU.61/151/DK/PP.I/VII/2020 date July 27, 2020
No. UM.186/08/S/CMSR-2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan SK Menteri No. S-722/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/No. UM.186/08/S/CMSR-2021 dated August 13, 2021 and Ministerial Decree No. S-722/MBU/09/2021 dated 23 September 2021
No. SK.3/KU.202/DUT-2021 tanggal 9 Februari 2021, No. SK.014/KU.202/DUT-2020 tanggal 13 April 2020 dan No. SK Menteri S-623/MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021/ No. SK.3/KU.202/DUT-2021 dated February 9, 2021, No. SK.014/KU.202/DUT-2020 dated April 13, 2020 and No. Ministerial Decree S-623/MBU/08/2021 dated August 25, 2021
No. 003/DK-PII/Eksternal/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020/No. 003/DK-PII/Eksternal/X/2020 dated October 12 2020
No. DK/26/11/1/PPI-2021 tanggal 26 November 2021/No. DK/26/11/1/PPI-2021 dated November 26, 2021

In 2020, the Company (formerly Pelindo II) and Pelindo III (an entity that merged into the Company), as well as a subsidiary (Rukindo) sold and written-off several fixed assets with details as follows:

Laba (rugi) penjualan/Gain (loss) of sales	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners Approval
(1.683.442)	No. UM.49/08/CMSR-2020 tanggal 31 Agustus 2020/ No. UM.49/08/CMSR-2020 date August 31, 2020
3.171.726	No. UM.49/08/CMSR-2020 tanggal 31 Agustus 2020/ No. UM.49/08/CMSR-2020 date August 31, 2020
1.488.284	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

Pada tahun 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Pelindo III (entitas yang menggabungkan diri ke dalam Perusahaan), serta entitas anak (Rukindo) menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

Penghapusan aset tetap/Write-off of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai buku/Book value	Laba (rugi) penjualan/Gain (loss) of sales
Perusahaan (dahulu/formerly Pelindo II)	262.807	(262.807)
Rukindo	-	-
Total	262.807	(262.807)

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

**Disajikan kembali - Catatan 4/
As restated - Note 4**

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.773.342.376	3.471.248.216	3.163.363.350
Jalan dan bangunan	781.678.607	1.338.358.613	415.223.464
Emplasemen	564.691.967	3.178.767	175.467.852
Kapal	324.424.550	446.558.201	659.805.197
Alat fasilitas pelabuhan	204.236.990	387.421.740	627.408.034
Peralatan	138.923.954	182.368.724	55.836.894
Instalasi fasilitas pelabuhan	138.882.469	167.114.625	489.606.601
Lainnya	7.063.175	27.208.906	4.208.763
Total	7.933.244.088	6.023.457.792	5.590.920.155

Port facilities
Roads and buildings
Emplacement
Vessels
Port equipment
Equipment
Port installation
Others
Total

14. FIXED ASSETS (continued)

Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)

In 2020, the Company (formerly Pelindo II) and Pelindo III (an entity that merged into the Company), as well as a subsidiary (Rukindo) sold and written-off several fixed assets with details as follows: (continued)

**Persetujuan pemegang saham/Dewan
Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners
Approval**

No. 15/DK/PI.II/III-2020 tanggal 31 Maret 2020 dan No. X-793/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019/ No. 15/DK/PI.II/III-2020 date Maret 31, 2020 dan No. X-793/MBU/10/2019 date October 17, 2019

No. 004/DKPI/2020 tanggal 21 Januari 2020/No. 004/DKPI/2020 date January 21, 2020

Construction in Progress

Construction in progress consists of:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion	Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	4,00% - 91,00%	2022	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
Pekerjaan pembangunan kapal	2,00% - 65,00%	2022	Construction of ship
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	3,00% - 87,00%	2022	Construction of yard
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	10,00% - 92,00%	2021-2024	Building and port equipment facilities
Instalasi fasilitas pelabuhan	16,00% - 67,00%	2022	Port facility installation

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion	Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	1,00% - 98,00%	2021	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
Pekerjaan pembangunan kapal	3,00% - 80,00%	2021-2022	Construction of ship
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	5,00% - 95,00%	2021	Construction of yard
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	10,00% - 99,00%	2021-2022	Building and port equipment facilities
Instalasi fasilitas pelabuhan	24,00% - 84,00%	2021	Port facility installation

14. FIXED ASSETS (continued)

Construction in Progress (continued)

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2021 are as follows:

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2020 are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

**Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap
(lanjutan)**

Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion	Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	2,00% - 99,00%	2021	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
Pekerjaan pembangunan kapal	31,00% - 99,00%	2020	Construction of ship
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	23,53% - 95,00%	2020	Construction of yard Building and port equipment facilities
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	0,05%-99,00%	2020-2022	Port facility installation
Instalasi fasilitas pelabuhan	4,00% - 99,00%	2020-2021	Soil ripening
Pematangan tanah	99,00%	2021	

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp89.535.918, Rp192.396.381 dan Rp247.738.510 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019.

14. FIXED ASSETS (continued)

Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)

Construction in Progress (continued)

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to Rp89,535,918, Rp192,396,381 and Rp247,738,510 for the years ended December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, respectively.

15. ASET KERJASAMA OPERASI

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 50e) dan PT Maspion Industrial Estate, dengan rincian sebagai berikut:

15. JOINT OPERATION ASSETS

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja dan MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 50e) and PT Maspion Industrial Estate, respectively, with details as follow:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ Year ended December 31, 2021						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	-	772.669.489	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	1.113.946	-	-	87.538.706	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	Port installation
Jalan dan bangunan	1.082.111	-	-	-	1.082.111	Roads and buildings
Peralatan	1.535.821	-	-	-	1.535.821	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	876.747.148	1.113.946	-	-	877.861.094	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET KERJASAMA OPERASI (lanjutan)

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 50e) dan PT Maspion Industrial Estate, dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

15. JOINT OPERATION ASSETS (continued)

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja dan MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 50e) and PT Maspion Industrial Estate, respectively, with details as follow: (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/
Year ended December 31, 2021

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(381.740.341)	(20.516.613)	-	-	(402.256.954)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(53.685.589)	(6.034.232)	-	-	(59.719.821)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(4.429.943)	(380.103)	-	-	(4.810.046)	Port installation
Jalan dan bangunan	(415.644)	(14.333)	-	-	(429.977)	Roads and buildings
Peralatan	(1.470.518)	(34.589)	-	-	(1.505.107)	Equipment
Emplasemen	(887.980)	(177.596)	-	-	(1.065.576)	Emplacement
Total	(442.630.015)	(27.157.466)	-	-	(469.787.481)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	-	(60.467)	-	-	(60.467)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	434.117.133				408.013.146	Net book value

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/
Year ended December 31, 2020
Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	-	772.669.489	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	Port installation
Jalan dan bangunan	602.861	479.250	-	-	1.082.111	Roads and buildings
Peralatan	609.224	926.597	-	-	1.535.821	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	875.341.301	1.405.847	-	-	876.747.148	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(361.223.727)	(20.516.614)	-	-	(381.740.341)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(47.699.898)	(5.985.691)	-	-	(53.685.589)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(3.782.575)	(647.368)	-	-	(4.429.943)	Port installation
Jalan dan bangunan	(227.576)	(188.068)	-	-	(415.644)	Roads and buildings
Peralatan	(597.040)	(873.478)	-	-	(1.470.518)	Equipment
Emplasemen	(710.384)	(177.596)	-	-	(887.980)	Emplacement
Total	(414.241.200)	(28.388.815)	-	-	(442.630.015)	Total
Nilai buku neto	461.100.101				434.117.133	Net book value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET TAKBERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

	<i>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</i>			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Aset hak konsesi	39.317.534.983	36.971.125.428	32.106.704.089	Concession rights assets
Piranti lunak	1.332.014.102	1.251.393.901	772.420.659	Software application
Sertifikasi	143.041.164	142.810.494	143.624.929	Certification
Lisensi	93.309.813	93.044.688	93.044.688	License
Aset dalam penyelesaian	72.392.067	105.543.969	557.726.479	Construction in progress
Aset takberwujud lainnya	300.537.663	205.129.207	450.018.122	Other intangible assets
Subtotal	41.258.829.792	38.769.047.687	34.123.538.966	Sub-total
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(2.498.374.944)	(2.067.418.458)	(1.594.931.392)	Accumulated amortization allowance for impairment
Neto	38.760.454.848	36.701.629.229	32.528.607.574	Net

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, aset takberwujud tidak dijaminkan.

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, intangible assets are not pledged as collateral.

Aset hak konsesi

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan terminal pelabuhan dan jalan tol Cibitung - Cilincing berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 49).

Concession rights assets

Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Port Authority to the Company to develop and operate port terminal and the Cibitung - Cilincing toll road based on Concession Agreement (Note 49).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal pelabuhan dan konstruksi jalan tol masih dalam konstruksi adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the average percentage completion of port and toll road construction are as follows:

Terminal Pelabuhan dan Jalan Tol/ Port Terminal and Toll Road	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Kalibaru	97,78%	94,01%	70,84%
Kijing	92,60%	80,01%	46,32%
Teluk Lamong	94,00%	90,50%	75,00%
Manyar Gresik	95,00%	76,00%	52,50%
Kuala Tanjung	100,00%	39,00%	37,00%
Makassar New Port	79,71%	63,57%	6,82%
Cibitung-Cilincing Toll Road	92,15%	88,35%	82,32%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal pelabuhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Terminal Pelabuhan dan Jalan Tol/ Port Terminal and Toll Road	2021	2020	2019
Kalibaru	198.224.721	135.348.204	124.983.524
Kijing	119.624.272	59.398.592	62.767.985
Makassar New Port	90.437.248	209.601.777	182.053.319
Teluk Lamong	26.115.965	31.736.396	41.123.556
Belawan Fase II	-	245.835.807	79.019.722
Cibitung-Cilincing Toll Road	511.684.405	418.212.539	338.189.911

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (*electronic data interchange*), aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan VGM untuk sistem operasi terminal.

16. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Borrowing costs capitalized for the concession assets of port terminal for the year ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

The Group's management believes that there was no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019.

Software

Software application represents cost incurred for the development of Port Wide Solution application for car terminal services, container terminal services and warehouse and Annual Technical Support (ATS) and change request, licensed software application used for electronic data interchange, operational application, ERP (finance, human resources, technical information system), development of Port Community System/Inaportnet, dash board system application to present information regarding operational performance, system integration, autogate integration and VGM for terminal operating system.

17. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

17. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The movements in right-of-use assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ Year ended December 31, 2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga perolehan					
Bangunan fasilitas pelabuhan	194.592.564	9.077.383	-	-	203.669.947
Kapal	119.407.557	-	-	-	119.407.557
Alat fasilitas pelabuhan	23.224.766	2.472.861	-	-	25.697.627
Peralatan	113.513.905	-	(14.778.348)	-	98.735.557
Tanah	174.268.831	-	(603.671)	-	173.665.160
Kendaraan	3.471.137	34.222.799	(1.328.614)	-	36.365.322
Subtotal	628.478.760	45.773.043	(16.710.633)	-	657.541.170
					Acquisition Costs
					<i>Port facilities</i>
					<i>Vessels</i>
					<i>Port equipment</i>
					<i>Equipments</i>
					<i>Lands</i>
					<i>Vehicles</i>
					Subtotal

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**17. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA
(lanjutan)**

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

**17. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE
LIABILITIES (continued)**

The movements in right-of-use assets are as follows: (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ Year ended December 31, 2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan fasilitas pelabuhan	(23.243.659)	(48.568.237)	-	-	(71.811.896)
Kapal	(55.621.215)	(28.998.101)	-	-	(84.619.316)
Alat fasilitas pelabuhan	(12.629.956)	(5.802.799)	-	-	(18.432.755)
Peralatan	(18.154.093)	(5.584.463)	12.996.127	-	(10.742.429)
Tanah	(674.450)	(3.224.583)	322.356	-	(3.576.677)
Kendaraan	(2.134.626)	(15.195.717)	974.435	-	(16.355.908)
Subtotal	(112.457.999)	(107.373.900)	14.292.918	-	(205.538.981)
Nilai buku bersih	516.020.761				452.002.189

Accumulated Depreciation
Port facilities
Vessels
Port equipment
Equipment
Lands
Vehicles
Subtotal
Net book value

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ Year ended December 31, 2020 Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Dampak Penerapan PSAK 73/ Impact of Implementation PSAK 73	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga perolehan					
Bangunan fasilitas pelabuhan	-	181.238.824	-	13.353.740	194.592.564
Kapal	-	31.321.247	-	88.086.310	119.407.557
Alat fasilitas pelabuhan	-	21.163.550	-	2.061.216	23.224.766
Peralatan	-	113.513.905	-	-	113.513.905
Tanah	-	174.268.831	-	-	174.268.831
Kendaraan	-	1.032.822	-	2.438.315	3.471.137
Subtotal	-	522.539.179	-	105.939.581	628.478.760
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan fasilitas pelabuhan	-	(21.064.279)	-	(2.179.380)	(23.243.659)
Kapal	-	(55.621.215)	-	-	(55.621.215)
Alat fasilitas pelabuhan	-	(11.981.301)	-	(648.655)	(12.629.956)
Peralatan	-	(18.154.093)	-	-	(18.154.093)
Tanah	-	(674.450)	-	-	(674.450)
Kendaraan	-	(2.134.626)	-	-	(2.134.626)
Subtotal	-	(109.629.964)	-	(2.828.035)	(112.457.999)
Nilai buku bersih	-				516.020.761

Acquisition Costs
Port facilities
Vessels
Port equipment
Equipment
Lands
Vehicles
Subtotal
Accumulated Depreciation
Port facilities
Vessels
Port equipment
Equipment
Lands
Vehicles
Subtotal
Net book value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**17. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA
(lanjutan)**

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020 disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4
Liabilitas sewa		
Bagian jangka pendek	76.345.578	75.354.511
Bagian jangka panjang	257.540.134	319.371.402
Total	333.885.712	394.725.913

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	2021	2020 disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4
Beban penyusutan aset hak-guna	107.373.900	109.629.964
Bunga atas liabilitas sewa	35.293.846	20.796.162
Total	142.667.746	130.426.126
Jumlah kas keluar untuk:		
Pembayaran liabilitas sewa	126.329.193	133.142.177
Pembayaran bunga	36.412.536	20.796.162
Total	162.741.729	153.938.339

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Kelompok Usaha sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Kelompok Usaha. Kelompok Usaha mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Kelompok Usaha mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Kelompok Usaha.

**17. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE
LIABILITIES (continued)**

The detail of lease liabilities is as follows:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020 disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4	
Liabilitas sewa		Lease liabilities
Bagian jangka pendek	75.354.511	Current portion
Bagian jangka panjang	319.371.402	Non-current portion
Total	394.725.913	Total

Amount recognized in statement of cash flow is as follows:

	2021	2020 disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4	
Beban penyusutan aset hak-guna	107.373.900	109.629.964	Depreciation of right-of-use assets
Bunga atas liabilitas sewa	35.293.846	20.796.162	Interest on lease liabilities
Total	142.667.746	130.426.126	Total
Jumlah kas keluar untuk:			Total cash outflow for:
Pembayaran liabilitas sewa	126.329.193	133.142.177	Payment of lease liabilities
Pembayaran bunga	36.412.536	20.796.162	Payment of interests
Total	162.741.729	153.938.339	Total

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**17. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA
(lanjutan)**

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2021	2020 disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4
<u>Liabilitas sewa</u>		
Saldo awal	394.725.913	-
Penambahan selama tahun berjalan	45.773.043	273.352.811
Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 73	-	277.409.727
Arus kas	(162.741.729)	(153.938.339)
Perubahan non-kas	56.128.484	(2.098.286)
Saldo akhir	333.885.711	394.725.913

Berdasarkan penilaian manajemen Kelompok Usaha, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019.

17. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as follow:

	2021	2020 disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4
<u>Liabilitas sewa</u>		
Saldo awal	394.725.913	-
Penambahan selama tahun berjalan	45.773.043	273.352.811
Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 73	-	277.409.727
Arus kas	(162.741.729)	(153.938.339)
Perubahan non-kas	56.128.484	(2.098.286)
Saldo akhir	333.885.711	394.725.913

Based on the evaluation of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of right-of-use assets as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019.

18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

18. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4		
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019
Uang muka pembelian aset tetap	248.304.048	172.467.503	406.371.161
Aset tetap tidak produktif	130.179.339	130.182.642	129.511.829
Pajak final dibayar di muka (Catatan 24g)	126.924.148	1.244.598.181	1.230.024.963
Jaminan pelaksanaan	69.777.240	64.999.265	64.999.265
Piutang pemulihan investasi	64.838.387	55.016.590	269.245.974
Uang jaminan	42.549.064	21.053.483	17.096.154
Goodwill	32.550.784	32.550.782	35.090.782
Piutang pajak	29.340.959	56.479.833	-
Aset tetap belum dimanfaatkan	25.493.693	25.392.745	25.392.745
Aset lain-lain	381.667.895	404.904.994	465.445.407
Dikurangi:			
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(186.800.573)	(196.529.654)	(181.985.177)
Total	964.824.984	2.011.116.364	2.461.193.103

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Aset tetap tidak produktif merupakan aset tetap yang tidak dapat dioperasikan lagi dalam kegiatan operasional Kelompok Usaha, yang sebagian besar terdiri atas kapal, dan alat-alat fasilitas pelabuhan seperti *transtainer*, *Rubber Tired Gantry Crane (RTGC)*, *forklift*, *reach stacker*, dan *harbour mobile crane*.

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru dan Kijing (Catatan 49a dan 49b).

Piutang pajak merupakan piutang kelebihan pembayaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Goodwill terutama merupakan *goodwill* yang timbul dari transaksi akuisisi 45,00% kepemilikan saham di CTP (dahulu MTDX) senilai Rp31.407.481 pada tahun 2015.

Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan (dahulu Pelindo II).

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

Aset lain-lain terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam, peralatan *vessel traffic service*, dan perbaikan kapal keruk.

19. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek terdiri dari:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Rupiah				Rupiah
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank OCBC NISP Tbk	5.196.855	4.000.000	6.000.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
Pihak berelasi (Catatan 45f)	-	-	28.193.914	Related party (Note 45f)
Total	5.196.855	4.000.000	34.193.914	Total

18. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Unproductive fixed assets are fixed assets that cannot be operated anymore in the Group's operational activities, which mostly consist of ships and port facilities such as *transtainer*, *Rubber Tired Gantry Crane (RTGC)*, *forklift*, *reach stacker*, and *harbour mobile crane*.

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal and Kijing Terminal (Notes 49a and 49b).

Tax receivables represents overpayment of Tax of Land and Building (PBB) and Value Added Tax (VAT).

Goodwill mainly represents *goodwill* arising from acquisition of 45.00% shares ownership in CTP (formerly MTDX) amounting to Rp31,407,481 in 2015.

Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which has not been distributed to the Company (formerly Pelindo II).

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

Other assets mainly represents deferred charge for dredging, vessel traffic service equipment, and dredges repairment.

19. SHORT-TERM BANK LOANS

Short-term bank loans consist of:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

EDII

Pada tanggal 13 Oktober 2020, EDII memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP, Tbk. ("OCBC") berupa fasilitas rekening koran ("fasilitas RK"), bank garansi ("fasilitas BG") dan Demand Loan CPFP ("fasilitas DL") masing-masing dengan batas maksimum sebesar Rp4.000.000, Rp20.000.000, dan Rp15.000.000 dengan tingkat suku bunga 11%, 11%, dan 0% yang berakhir pada tanggal 10 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, saldo fasilitas RK masing-masing sebesar Rp2.748.419 dan Rp0 dan saldo fasilitas DL masing-masing sebesar Rp5.196.855 dan Rp4.000.000.

Pada tanggal 25 November 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari OCBC senilai Rp6.000.000 dengan suku bunga setara 11,75% per tahun dengan jatuh tempo pada 10 November 2020. Saldo pinjaman per 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.000.000.

20. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Pihak ketiga				Third parties
Swasta	1.333.914.474	1.680.386.403	3.044.115.352	Private
Perorangan	4.227.590	5.816.955	-	Individuals
Subtotal - pihak ketiga	1.338.142.064	1.686.203.358	3.044.115.352	Subtotal - third parties
Pihak berelasi (Catatan 45g)	1.926.350.211	3.267.820.968	3.672.159.168	Related parties (Note 45g)
Total	3.264.492.275	4.954.024.326	6.716.274.520	Total

b. Berdasarkan mata uang

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Rupiah	2.949.116.000	4.553.491.536	5.792.481.301	Rupiah
Dolar AS	315.376.275	400.394.149	923.668.515	US Dollar
Euro Eropa	-	138.641	124.704	European Euro
Total	3.264.492.275	4.954.024.326	6.716.274.520	Total

19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

EDII

On October 13, 2020, EDII obtained a loan from PT Bank OCBC NISP, Tbk. ("OCBC") in the form of current account facility, Bank Guarantee (BG facilities) and Demand Loan CPFP (DL facilities) with a maximum limit of Rp4,000,000, Rp20,000,000, and Rp15,000,000, respectively, with an interest rate of 11%, 11%, and 0% on December 10, 2021.

As of December 31, 2021, and December 31, 2020, the balance of the current account facility is Rp2,748,419 and Rp0 and the balance of the demand loan (DL) facilities is Rp5,196,855 and Rp4,000,000, respectively.

On November 25, 2019, the Company obtained loan facility from OCBC amounting to Rp6,000,000 with the equivalent interest rate of 11.75% per annum with the maturity date on November 10, 2020. Balance of the loan as of January 1, 2020/December 31, 2019 amounted to Rp6,000,000.

20. TRADE PAYABLES

a. Based on suppliers

b. By currency

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**21. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA
PENDEK**

21. SHORT-TERM UNEARNED REVENUES

	<i>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</i>			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Sewa kwartalan (Catatan 50d dan 50e)	695.543.951	654.685.673	520.544.218	Quarterly rent (Notes 50d and 50e)
Uang untuk diperhitungkan Pihak ketiga	130.044.647	194.792.015	160.525.209	Advances from customers Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45h)	8.064.950	59.290.895	41.108.803	Related parties (Note 45h)
Pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	172.666.515	146.993.072	200.137.450	Land, building, water and electricity services
Pendapatan diterima di muka jangka pendek - lainnya	66.976.899	12.050.934	74.493.810	Other short-term unearned revenues
Subtotal	1.073.296.962	1.067.812.589	996.809.490	
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang (Catatan 28)	224.748.522	311.226.933	210.234.265	Current portion of long-term unearned revenue (Note 28)
Total	1.298.045.484	1.379.039.522	1.207.043.755	Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Kelompok Usaha.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

22. BEBAN AKRUAL

22. ACCRUED EXPENSES

	<i>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</i>			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Pegawai	1.536.062.485	1.362.433.077	1.180.628.855	Employees
Kerjasama mitra usaha	708.323.183	866.823.662	550.648.656	Partnership
Umum	417.036.376	572.154.903	1.055.395.304	General
Bunga	351.739.853	348.881.640	333.081.800	Interest
Bahan	206.967.006	102.363.721	213.467.133	Material
Pemeliharaan	167.675.465	108.486.693	144.995.439	Maintenance
Asuransi	41.050.044	16.245.675	30.959.550	Insurance
Biaya konsesi	26.989.964	28.354.981	32.077.764	Concession fee
Lain-lain	243.347.644	258.744.327	297.420.849	Others
Total	3.699.192.020	3.664.488.679	3.838.675.350	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. BEBAN AKRUAL (lanjutan)

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pelatihan dan pendidikan.

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Beban akrual - biaya konsesi merupakan biaya konsesi yang harus dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Perjanjian Konsesi (Catatan 49).

22. ACCRUED EXPENSES (continued)

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for training and education.

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Accrued expenses - concession fee represents concession fee to be paid to Port Authority in accordance with Concession Agreement (Note 49).

23. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

23. OTHER CURRENT LIABILITIES

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Pihak ketiga	1.182.432.796	1.023.914.350	762.147.091	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45i dan 45j)	1.066.277.650	930.066.278	608.481.268	Related parties (Note 45i and 45j)
Total	2.248.710.446	1.953.980.628	1.370.628.359	Total

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Details of other current liabilities as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Uang titipan dari pelanggan				Deposit from customers
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Swasta	462.031.106	362.541.225	119.820.796	Private
Lain-lain	63.994.238	107.486.408	137.559.314	Others
Pihak berelasi (Catatan 45i)	65.132.073	33.588.018	29.244.996	Related parties (Note 45i)
Subtotal	591.157.417	503.615.651	286.625.106	Sub-total
Liabilitas jangka pendek lainnya				Other current liabilities
Pihak ketiga	656.407.452	553.886.717	504.766.981	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45j)	1.001.145.577	896.478.260	579.236.272	Related parties (Note 45j)
Subtotal	1.657.553.029	1.450.364.977	1.084.003.253	Sub-total
Total	2.248.710.446	1.953.980.628	1.370.628.359	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**23. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
(lanjutan)**

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Uang titipan - lain-lain terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi dan koperasi pegawai.

Liabilitas jangka pendek lainnya - pihak ketiga terutama merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang jaminan penyediaan listrik dan cadangan klaim pelayanan kesehatan.

23. OTHER CURRENT LIABILITIES (continued)

Deposit from customers - private mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled with the customer or will be taken into account with subsequent services.

Deposit from customers - others mainly represents deposit from employee monthly salary for jamsostek contribution, insurance and employee co-operatives.

Other current liabilities - third party mainly represents payables from deposits received for electricity provision and claim reserves for health services.

24. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

24. TAXATION

a. Prepaid taxes

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Perusahaan				<i>The Company</i>
Pajak Pertambahan Nilai	199.195.000	345.716.736	530.467.600	<i>Value Added Tax</i>
Pajak penghasilan	176.154.037	141.996.590	183.019.881	<i>Income taxes</i>
Subtotal	<u>375.349.037</u>	<u>487.713.326</u>	<u>713.487.481</u>	<i>Sub-total</i>
Entitas anak				<i>Subsidiaries</i>
Pajak Pertambahan Nilai	659.421.104	544.447.637	582.456.403	<i>Value Added Tax</i>
Pajak penghasilan	45.765.157	129.656.277	366.131.401	<i>Income taxes</i>
Subtotal	<u>705.186.261</u>	<u>674.103.914</u>	<u>948.587.804</u>	<i>Sub-total</i>
Total	<u>1.080.535.298</u>	<u>1.161.817.240</u>	<u>1.662.075.285</u>	<i>Total</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

a. Prepaid taxes (continued)

Taksiran tagihan restitusi pajak

Estimated claims for tax refund

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4		
		31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Perusahaan				The Company
Pajak Pertambahan Nilai				Value Added Tax
2021	15.951.762	-	-	2021
2020	-	12.830.929	-	2020
2019	-	11.435.301	-	2019
2018	-	-	34.998.471	2018
Pajak penghasilan				Income tax
2021	178.619.622	-	-	2021
2020	176.820.302	137.776.872	-	2020
2019	198.549.998	220.897.155	220.897.155	2019
2018	-	171.961.012	207.638.786	2018
2015	-	381.563.183	381.563.183	2015
Subtotal	569.941.684	936.464.452	845.097.595	Sub-total
Entitas anak				Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai				Value Added Tax
2020	42.809.039	-	2.342.005	2020
2019	33.168.340	-	-	2019
2018	-	-	16.158.615	2018
Pajak penghasilan	104.741.288	376.308.994	311.303.745	Income tax
Subtotal	180.718.667	376.308.994	329.804.365	Sub-total
Total	750.660.351	1.312.773.446	1.174.901.960	Total

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4		
		31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Perusahaan				The Company
PPh badan (Pasal 29)				Corporate Income Tax (Article 29)
2021	31.110.482	-	-	2021
2020	-	18.134.450	-	2020
Pajak Pertambahan Nilai	100.043.709	229.338.295	372.512.685	Value Added Tax
Pajak penghasilan				Income taxes
Pasal 4(2)	43.240.495	59.383.623	71.712.728	Article 4(2)
Pasal 15	1.033.210	716.505	500.956	Article 15
Pasal 21	52.552.284	61.339.256	62.079.584	Article 21
Pasal 22	579.935	1.011.018	3.495.588	Article 22
Pasal 23/26	7.244.313	27.070.938	28.729.609	Article 23/26
Pasal 25	11.063.467	5.326.417	44.447.319	Article 25
Lainnya	103.171	214.273	341.384	Others
Subtotal	246.971.066	402.534.775	583.819.853	Sub-total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4		
		31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Entitas anak				Subsidiaries
PPH badan (Pasal 29)				Corporate Income Tax (Article 29)
2021	155.530.522	-	-	2021
2020	393.636	55.447.001	-	2020
2019	-	-	40.702.123	2019
Pajak Pertambahan Nilai	82.375.379	68.598.002	55.918.477	Value Added Tax
Pajak penghasilan				Income taxes
Pasal 4(2)	24.789.201	37.343.405	60.442.492	Article 4(2)
Pasal 15	356.918	205.023	169.364	Article 15
Pasal 21	39.415.682	38.843.591	40.920.599	Article 21
Pasal 22	946.457	338.152	111.818	Article 22
Pasal 23/26	15.319.754	7.075.179	9.304.932	Article 23/26
Pasal 25	11.344.250	33.743.163	29.603.564	Article 25
Lainnya	1.098.122	3.398.863	6.217.427	Others
Subtotal	331.569.921	244.992.379	243.390.796	Sub-total
Total	578.540.987	647.527.154	827.210.649	Total

c. Pajak penghasilan badan

c. Corporate income tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss for the year ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.175.326.363	3.397.696.951	Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.518.136.481	1.155.248.577	Income before corporate income tax of subsidiaries
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	1.824.197.972	-	Income before corporate income tax - The Company (formerly Pelindo I Pelindo III and Pelindo IV) - Ninth-month periods ended September 30, 2021
Laba kena pajak final	1.490.582.034	2.465.265.046	Income subject to final tax

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss for the year ended December 31, 2021 and 2020 are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(657.590.124)	(222.816.672)	Loss before corporate income tax expenses - the Company
Beda temporer:			Temporary differences:
Provisi	-	3.683.335	Provision
Penyisihan imbalan kerja karyawan	(224.559.118)	79.821.009	Provision for employee benefits
Cadangan beban pegawai	-	25.107.507	Employee expense allowance
Bonus	134.670.333	69.000.000	Bonus
Penyisihan penurunan nilai	18.922.257	56.665.265	Allowance for impairment
Bunga	-	15.018.499	Interest
Penyusutan dan amortisasi	(304.049.903)	(724.327.147)	Depreciation and amortization
Nilai wajar aset keuangan	-	(1.938.381)	Fair value of financial assets
Beda permanen:			Permanent differences:
Beban-beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	995.693.873	717.408.020	Expenses that are not deductible for tax purposes
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(694.208.181)	(1.014.073.173)	Income subject to final income tax
Beban berkaitan pajak penghasilan final	916.090.756	585.935.286	Expenses related to final income tax
Beban umum	302.540.841	389.087.895	General expenses
Beban kesejahteraan karyawan	25.106.265	133.691.541	Employees social welfare expenses
Lainnya	42.335.315	761.090.084	Others
Subtotal	1.212.542.438	1.096.169.740	Sub-total
Taksiran laba pajak	554.952.314	873.353.068	Estimated tax income

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.175.326.363	3.397.696.951
Dikurangi: Pendapatan kena pajak final	3.152.428.151	2.455.811.980
Laba sebelum pajak penghasilan badan	1.022.898.212	941.884.971
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	225.037.607	207.214.694
<u>Dampak perbedaan permanen:</u> Beban yang tidak dapat dikurangkan Penyesuaian	349.262.951 (424.435.442)	346.090.724 (466.101.124)
Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	149.865.116	87.204.294
Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	291.207.982	-
Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	441.073.098	87.204.294
Beban pajak penghasilan badan - entitas anak	558.107.989	351.550.186
Total	999.181.087	438.754.480

Untuk tujuan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan melakukan perhitungan taksiran laba (rugi) pajak secara tahunan.

24. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate are as follows:

Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	3.397.696.951
Less: Income subject to final tax	2.455.811.980
Income before corporate income tax expenses	941.884.971
Income tax calculated at applicable rate	207.214.694
<u>Effect of permanent differences:</u> Non deductible expenses Adjustment	346.090.724 (466.101.124)
Corporate income tax expense - The Company	87.204.294
Corporate income tax expense - The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021	-
Corporate income tax expense - The Company	87.204.294
Corporate income tax expense - subsidiaries	351.550.186
Total	438.754.480

For the purpose of filling the annual corporate income tax return, the Company calculate the taxable income (loss) on annual basis.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

d. The details of Income tax expenses and final tax expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Beban pajak final			Final tax expense
Perusahaan	367.537.823	341.390.936	The Company
Entitas anak	120.134.046	94.789.342	Subsidiaries
Subtotal	487.671.869	436.180.278	Sub-total
Beban pajak penghasilan badan Kini			Corporate income tax expense Current
Perusahaan	122.089.510	192.137.675	The Company
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	127.579.628	-	The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021
Entitas anak	598.064.038	553.729.430	Subsidiaries
Subtotal	847.733.176	745.867.105	Sub-total
Tangguhan			Deferred
Perusahaan	(39.974.294)	(104.933.381)	The Company
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	259.781.683	-	The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021
Entitas anak	(68.359.478)	(202.179.244)	Subsidiaries
Subtotal	151.447.911	(307.112.625)	Sub-total
Total	999.181.087	438.754.480	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

24. TAXATION (continued)

- e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan	554.952.314	873.353.068	Estimated taxable income The Company
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	579.907.401	-	ended September 30, 2021
Entitas anak	2.718.472.900	2.516.951.945	Subsidiaries
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	3.853.332.615	3.390.305.013	Total estimated taxable income
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan Perusahaan	122.089.510	192.137.675	Corporate income tax expense - current The Company
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	127.579.628	-	ended September 30, 2021
Entitas anak	598.064.038	553.729.430	Subsidiaries
Jumlah beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	847.733.176	745.867.105	Corporate income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka Perusahaan	238.114.067	336.155.553	Less prepaid income tax The Company
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	123.816.365	-	ended September 30, 2021
Entitas anak	236.414.394	408.290.675	Subsidiaries
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	598.344.826	744.446.228	Total prepaid income tax

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

- e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Taksiran utang pajak penghasilan - Pasal 29			
Perusahaan	-	18.134.450	Estimated income tax payable - Article 29 The Company
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	31.109.540	-	The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021
Entitas anak	155.530.522	54.032.762	Subsidiaries
Total	186.640.062	72.167.212	Total
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan			Estimated claims for tax refund The Company
Perusahaan	116.024.558	137.776.872	The Company (formerly Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV) - Nine-month periods ended September 30, 2021
Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV) - Periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021	62.595.063	-	Subsidiaries
Entitas anak	27.202.474	154.976.033	
Total	205.822.095	292.752.905	Total

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred taxes

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/ Year Ended December 31, 2021						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Perusahaan						The Company
Liabilitas imbalan kerja	1.370.114.018	(49.471.682)	26.413.898	160.734.141	1.507.790.375	Employers benefit liabilities
Cadangan beban pegawai	116.634.828	17.587.496	-	(79.132.384)	55.089.940	Reserve for employee expense
Penyisihan penurunan nilai piutang	224.235.926	(29.798)	-	(32.360.556)	191.845.572	Provision for impairment of receivables
Penyusutan dan amortisasi	(1.304.318.831)	(139.664.760)	-	124.568.530	(1.319.415.061)	Depreciation and amortization
Lain-lain	113.631.549	(70.167.093)	-	(43.464.456)	-	Others
Subtotal	520.297.490	(241.745.837)	26.413.898	130.345.275	435.310.826	Sub-total
Entitas anak	233.260.931	(50.533.859)	(29.951.750)	(817.310)	151.958.012	Subsidiaries
Total	753.558.421	(292.279.696)	(3.537.852)	129.527.965	587.268.838	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(117.774.083)	14.250.352	1.398.640	(2.946.530)	(105.071.621)	Subsidiaries
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/ Year Ended December 31, 2020						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Perusahaan						The Company
Liabilitas imbalan kerja	1.069.165.857	184.840.308	232.370.840	(116.262.987)	1.370.114.018	Employers benefit liabilities
Cadangan beban pegawai	114.221.887	17.443.050	-	(15.030.109)	116.634.828	Reserve for employee expense
Penyisihan penurunan nilai piutang	172.202.342	42.694.733	18.359.243	(9.020.392)	224.235.926	Provision for impairment of receivables
Penyusutan dan amortisasi	(1.325.027.593)	32.254.260	-	(11.545.498)	(1.304.318.831)	Depreciation and amortization
Lain-lain	134.071.535	(107.606.766)	-	87.166.780	113.631.549	Others
Subtotal	164.634.028	169.625.585	250.730.083	(64.692.206)	520.297.490	Sub-total
Entitas anak	76.759.274	107.176.022	50.142.944	(817.309)	233.260.931	Subsidiaries
Total	241.393.302	276.801.607	300.873.027	(65.509.515)	753.558.421	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(91.505.345)	100.361.548	(128.956.270)	2.325.984	(117.774.083)	Subsidiaries

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

1. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015

Pada tanggal 20 April 2017, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp805.287.733.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan keberatan ke DJP atas SKPKB tersebut. Sebagai hasil keberatan Perusahaan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2017, diterbitkan SKPKB revisi sebesar Rp614.304.124.

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan banding ke pengadilan pajak atas SKPKB tersebut.

Pada tanggal 26 Juli 2019, pengadilan pajak menolak pengajuan banding yang diajukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan menetapkan sanksi administrasi sebesar Rp614.304.124. Pada tanggal 22 Agustus 2019 dan 5 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp614.304.124 dan mencatatnya sebagai aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 4 Mei 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali serta membatalkan surat keputusan Direktur Jendral Pajak tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB PPh tahun pajak 2015 dan menetapkan jumlah PPh lebih bayar untuk masa Januari - Desember 2015 adalah sebesar Rp377.838.436, memerintahkan untuk mengembalikan seluruh PPh kurang bayar sebesar Rp614.304.124 berikut sanksi administrasi sebesar Rp614.304.124. Pada tanggal 5 Agustus 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menerima pengembalian sebesar Rp992.142.560.

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter

1. Tax assessment for fiscal year 2015

On April 20, 2017, the Company (formerly Pelindo II) received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp805,287,733.

On July 18, 2017, the Company (formerly Pelindo II) has filed an objection to the DJP for the SKPKB. As a result of the Company's objection, on December 22, 2017, the Company received a revised SKPKB amounting to Rp614,304,124.

On March 20, 2018, the Company (formerly Pelindo II) has filed an appeal to the tax court for the SKPKB.

On July 26, 2019, the tax court rejected the Company's (formerly Pelindo II) appeal and imposed an administrative penalty of Rp614,304,124. As a result, on August 22, 2019 and December 5, 2019, the Company made payments of Rp614,304,124, respectively and recorded as other non-current assets.

On October 17, 2019, the Company (formerly Pelindo II) filed a judicial review to the Supreme Court.

On May 4, 2021, the Company (formerly Pelindo II) received the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which decided to grant the request for a judicial review and cancel the decision letter from the Director General of Taxes regarding the taxpayer's objection to the SKPKB PPh for the 2015 tax year and determined the amount of overpaid income tax for the period January - December 2015 is amounting to Rp377,838,436, ordered to return all underpaid income tax of Rp614,304,124 including administrative sanctions amounting to Rp614,304,124. On August 5, 2021, the Company (formerly Pelindo II) has received a refund of Rp992,142,560.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) belum menerima pengembalian atas pembayaran STP terkait sanksi administrasi 100% sebesar Rp614.304.124, atas STP tersebut dicatat pada piutang lain-lain.

2. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2018

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima Surat Ketetapan Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp171.961.012 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2018. Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menerima pengembalian lebih bayar PPh badan 2018 pada tanggal 8 Januari 2021.

Pada tanggal 21 April 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun 2019 sebesar Rp126.924.148. Pada tanggal 19 Mei 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah melakukan pembayaran atas pokok dan sanksi bunga serta mencatat aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan keberatan atas SKPKB PPh badan 2019.

3. Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, Kelompok Usaha telah menerima beberapa surat ketetapan pajak untuk berbagai tahun pajak. Kelompok Usaha menyetujui sebagian ketetapan pajak tersebut dan telah membukukan tambahan beban sebesar Rp30.334.916 dan Rp11.277.104 dan Rp7.248.430 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

As of December 31, 2021, The Company (formerly Pelindo II) has not yet received a refund for the STP payment related to the 100% administrative penalty amounting to Rp614,304,124, the STP was recorded in other receivables.

2. Tax assessment for fiscal year 2018

On October 22, 2020, the Company (formerly Pelindo II) received an Assessment Letter of Overpayment ("SKPLB") amounting to Rp171,961,012 for the overpayment of corporate income tax for the 2018 fiscal year. The Company has received the refund of the 2018 corporate income tax overpayment on January 8, 2021.

On April 21, 2021, the Company (formerly Pelindo II) received SKPKB for the 2019 corporate income tax amounting to Rp126,924,148. On May 19, 2021, the Company (formerly Pelindo II) has paid the principal and interest penalties and recorded the underpayment in other non-current assets.

On July 15, 2021 the Company (formerly Pelindo II) filed an objection to the 2019 corporate income tax SKPKB.

3. In 2021, 2020 and 2019, the Group has received several tax assessment letter for various tax years. The Group has accepted a portion of these tax assessments and booked additional expenses of Rp30,334,916, Rp11,277,104 and Rp7,248,430 for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively, in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Atas jumlah sisanya, Kelompok Usaha telah mengajukan keberatan dan banding. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan dan banding adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Pajak penghasilan badan	26.060.384	8.065.337	7.248.430	Corporate income tax
Pajak lainnya	4.274.532	3.211.767	-	Other taxes
Total	30.334.916	11.277.104	7.248.430	Total

h. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No.7/2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", yang menerapkan, antara lain, tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut:

- sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% yang diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020).
- Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif di atas

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

For the remaining amounts, the Group has filed objections and appeals. As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the amount of tax assessments in the process of objection and appeal were as follows:

h. On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia signed UU No.7/2021 regarding "Harmonization of Tax Regulation", which applies, among others, the corporate income tax rate as follows:

- 22% effective starting fiscal year 2022 (previously 20% as stipulated in Perppu No.1 Year 2020 dated March 31, 2020).
- Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchanges and meet certain requirements in accordance with the government regulations, can apply tariff of 3% lower than tariff as stated above

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG OBLIGASI

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut:

25. BONDS PAYABLE

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the details of bonds payable are as follows:

31 Desember/December 31, 2021							
Obligasi/ Bonds	Pokok Utang/Debt Principal	Penerbit/ Issuer	Total/ Total	Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Discount and Transaction Cost	Neto/ Net	Jangka Pendek/ Current	Jangka Panjang/ Non- current
Senior Notes, Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD1.100.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ the Company (formerly Pelindo II)	15.695.900.000	(78.890.126)	15.617.009.874	-	15.617.009.874
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ the Company (formerly Pelindo II)	7.134.500.000	(131.298.845)	7.003.201.155	-	7.003.201.155
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ Issued in 2014	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ the Company (formerly Pelindo III)	7.134.505.000	(24.281.765)	7.110.223.235	-	7.110.223.235
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ Issued in 2018	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) / the Company (formerly Pelindo III)	7.134.505.000	(29.844.283)	7.104.660.717	-	7.104.660.717
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ Year 2016 Tranche C	Rp400.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / the Company (formerly Pelindo I)	400.000.000	(398.100)	399.601.900	-	399.601.900
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/Year 2016 Tranche D	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / the Company (formerly Pelindo I)	50.000.000	(104.501)	49.895.499	-	49.895.499
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ Year 2018 Tranche A	Rp380.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / the Company (formerly Pelindo IV)	380.000.000	(208.812)	379.791.188	-	379.791.188
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ Year 2018 Tranche B	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / the Company (formerly Pelindo IV)	1.714.511.341	(1.722.857)	1.712.788.484	-	1.712.788.484
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ Year 2018 Tranche C	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / the Company (formerly Pelindo IV)	800.000.000	(995.572)	799.004.428	-	799.004.428
Total/Total			40.443.921.341	(267.744.861)	40.176.176.480	-	40.176.176.480

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. BONDS PAYABLE (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the details of bonds payable are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2020 Disajikan kembali – Catatan 4/As restated – Note 4							
Obligasi/ Bonds	Pokok Utang/Debt Principal	Penerbit/ Issuer	Total/ Total	Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Discount and Transaction Cost	Neto/ Net	Jangka Pendek/ Current	Jangka Panjang/ Non- current
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD1.000.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II) / the Company (formerly Pelindo II)	15.515.500.000	(100.313.323)	15.415.186.677	-	15.415.186.677
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II) / the Company (formerly Pelindo II)	7.052.500.000	(133.983.613)	6.918.516.387	-	6.918.516.387
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ Issued in 2014	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) / the Company (formerly Pelindo III)	7.052.500.000	(33.100.516)	7.019.399.484	-	7.019.399.484
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ Issued in 2018	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) / the Company (formerly Pelindo III)	7.052.500.000	(52.212.171)	7.000.287.829	-	7.000.287.829
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri B/ Year 2016 Tranche B	Rp500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / the Company (formerly Pelindo I)	500.000.000	(231.948)	499.768.052	499.768.052	-
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ Year 2016 Tranche C	Rp400.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / the Company (formerly Pelindo I)	400.000.000	(663.870)	399.336.130	-	399.336.130
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ Year 2016 Tranche D	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / the Company (formerly Pelindo I)	50.000.000	(127.820)	49.872.180	-	49.872.180
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ Year 2018 Tranche A	Rp380.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / the Company (formerly Pelindo IV)	380.000.000	(481.495)	379.518.505	-	379.518.505
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ Year 2018 Tranche B	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / the Company (formerly Pelindo IV)	1.820.000.000	(101.923.019)	1.718.076.981	-	1.718.076.981
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ Year 2018 Tranche C	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / the Company (formerly Pelindo IV)	800.000.000	(1.013.674)	798.986.326	-	798.986.326
Total/Total			40.623.000.000	(424.051.449)	40.198.948.551	499.768.052	39.699.180.499

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. BONDS PAYABLE (continued)

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the details of bonds payable are as follows: (continued)

1 Januari 2020/31 Desember 2019/January 1, 2020/December 31, 2019 Disajikan kembali – Catatan 4/As restated – Note 4							
Obligasi/ Bonds	Pokok Utang/Debt Principal	Penerbit/ Issuer	Total/ Total	Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Discount and Transaction Cost	Neto/ Net	Jangka Pendek/ Current	Jangka Panjang/ Non- current
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD1.000.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II) / the Company (formerly Pelindo II)	15.291.100.000	(120.891.181)	15.170.208.819	-	15.170.208.819
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II) / the Company (formerly Pelindo II)	6.950.500.000	(136.530.625)	6.813.969.375	-	6.813.969.375
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ Issued in 2014	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) / the Company (formerly Pelindo III)	6.950.500.000	(41.943.427)	6.908.556.573	-	6.908.556.573
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ Issued in 2018	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) / the Company (formerly Pelindo III)	6.950.500.000	(74.641.343)	6.875.858.657	-	6.875.858.657
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri B/ Year 2016 Tranche B	Rp500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / the Company (formerly Pelindo I)	500.000.000	(696.675)	499.303.325	-	499.303.325
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ Year 2016 Tranche C	Rp400.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / the Company (formerly Pelindo I)	400.000.000	(928.901)	399.071.099	-	399.071.099
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ Year 2016 Tranche D	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) / the Company (formerly Pelindo I)	50.000.000	(150.947)	49.849.053	-	49.849.053
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ Year 2018 Tranche A	Rp380.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / the Company (formerly Pelindo IV)	380.000.000	545.984	380.545.984	-	380.545.984
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ Year 2018 Tranche B	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / the Company (formerly Pelindo IV)	1.820.000.000	(100.348.794)	1.719.651.206	-	1.719.651.206
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ Year 2018 Tranche C	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) / the Company (formerly Pelindo IV)	800.000.000	(1.879.783)	798.120.217	-	798.120.217
Total/Total			40.092.600.000	(477.465.692)	39.615.134.308	-	39.615.134.308

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

25. BONDS PAYABLE (continued)

Other information in relation to bonds payables as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

Obligasi / Bonds	Peringkat/ Rating	Wali Amanat/ Trustee	Tempat Pencatatan/Listed	Tanggal Terbit/Issue Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Periode Pembayaran Bunga/Intere st Payment Period	Tingkat Bunga per Tahun/ Interest Rate per Annum
Senior Notes, USD1.100.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015 i)	Baa3, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/and (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2025/ May 5, 2025	Setengah tahunan/ Semi-Annually	4,250%
Senior Notes, USD500.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015 i)	Baa3, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/and (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2045/ May 5, 2045	Setengah tahunan/ Semi-Annually	5,375%
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ Issued in 2014 i)	BBB-, BBB-, Baa3 stable (Fitch Rating, Standard and Poors, dan/and Moody's Investor Service)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	1 Oktober 2014/ October 1, 2014	1 Oktober 2024/ October 1, 2024	Setengah tahunan/Semi -Annually	4,875%
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ Issued in 2018 i)	BBB-, BBB-, Baa3 stable (Fitch Rating, Standard and Poors, dan/and Moody's Investor Service)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	2 Mei 2018/ May 2, 2018	2 Mei 2023/ May 2, 2023	Setengah tahunan/Semi -Annually	4,500%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ Year 2016 Tranche C ii)	idAA-/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2023/ June 21, 2023	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,250%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ Year 2016 Tranche D ii)	idAA-/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2026/ June 21, 2026	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,500%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Obligasi / Bonds	Peringkat/ Rating	Wali Amanat/ Trustee	Tempat Pencatatan/Listed	Tanggal Terbit/Issue Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Periode Pembayaran Bunga/Intere st Payment Period	Tingkat Bunga per Tahun/ Interest Rate per Annum
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ Year 2018 Tranche A i)	AA (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ July 4, 2018	4 Juli 2023/ July 4, 2023	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	8,000%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ Year 2018 Tranche B i)	AA (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ July 4, 2018	4 Juli 2025/ July 4, 2025	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,150%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ Year 2018 Tranche C i)	AA (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ July 4, 2018	4 Juli 2028/ July 4, 2028	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,350%

Jaminan

- i) Tidak dijamin
ii) Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan (dahulu Pelindo I) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi digunakan untuk melunasi pinjaman dan rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan. Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

25. BONDS PAYABLE (continued)

Other information in relation to bonds payables as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Collateral

- i) Unsecured
ii) These bonds are not guaranteed by special collaterals, but are guaranteed by all the Company's (formerly Pelindo I) assets, both moving and immovable goods, both existing and existing in the future to become collateral for bondholders in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the KUHP.

Proceeds from the bond offering were used to refinance loan and will be used for the Company's expansion plan and the Company's general purposes. The Company must also maintain certain financial ratios.

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG

26. LONG-TERM BANK LOANS

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Utang bank jangka panjang	9.022.242.258	11.633.468.160	9.002.598.524	Long-term bank loans Current portion
Bagian lancar	(2.365.898.747)	(504.471.670)	(388.678.828)	
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar	6.656.343.511	11.128.996.490	8.613.919.696	Long-term bank loans, net of current portion

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

31 Desember 2021	Bagian lancar/ Current portion	Bagian jangka panjang/long term portion	Total	December 31, 2021
				Subsidiaries
				PTP1
				<i>Bilateral</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.094.628.442	-	1.094.628.442	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
Pinjaman Bank Sindikasi				<i>Syndicated Bank Loans</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	416.948.060	-	416.948.060	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Indonesia Infrastructure Finance	416.948.060	-	416.948.060	<i>PT Indonesia Infrastructure Finance</i>
Subtotal	1.928.524.562	-	1.928.524.562	Sub-total
				PMT
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	417.173.318	417.173.318	<i>PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)</i>
Pinjaman Bank Sindikasi				<i>Syndicated Bank Loans</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	102.399.640	536.936.991	639.336.631	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	102.399.640	536.936.991	639.336.631	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	102.399.640	536.936.991	639.336.631	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
Subtotal	307.198.920	2.027.984.291	2.335.183.211	Sub-total
				CTP
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	133.296.919	-	133.296.919	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
Pinjaman Bank Sindikasi				<i>Syndicated Bank Loans</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.159.896.385	1.159.896.385	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT CIMB Niaga Tbk	-	802.277.366	802.277.366	<i>PT CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	722.082.824	722.082.824	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	1.202.504.863	1.202.504.863	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	402.946.011	402.946.011	<i>PT Bank Pan Indonesia Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	160.536.881	160.536.881	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</i>
PT Bank DKI	-	160.450.553	160.450.553	<i>PT Bank DKI</i>
Subtotal	133.296.919	4.610.694.883	4.743.991.802	Sub-total
				PIL
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	15.960.034	28.694.454	44.654.488	<i>PT Bank Syariah Indonesia Tbk</i>
Total pokok utang	2.384.980.435	6.667.373.628	9.052.354.063	Total principal of loans
				<i>Less:</i>
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(19.081.688)	(11.030.117)	(30.111.805)	<i>Unamortized costs of loans</i>
Total	2.365.898.747	6.656.343.511	9.022.242.258	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

31 Desember 2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)	Bagian lancar/ Current portion	Bagian jangka panjang /long term portion	Total	December 31, 2020 (As restated - Note 4)
Perusahaan				The Company
<i>Bilateral</i>				<i>Bilateral</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	148.806.322	59.403.067	208.209.389	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.089.861.217	1.089.861.217	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	124.142.809	956.918.329	1.081.061.138	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	124.142.809	487.592.996	611.735.805	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Deutsche Bank AG	82.021.890	-	82.021.890	Deutsche Bank AG
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	469.325.333	469.325.333	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Subtotal	479.113.830	3.063.100.942	3.542.214.772	Sub-total
Entitas Anak				Subsidiaries
PTP1				PTP1
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.102.929.032	1.102.929.032	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	397.016.148	397.016.148	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	397.016.148	397.016.148	PT Indonesia Infrastructure Finance
Subtotal	-	1.896.961.328	1.896.961.328	Sub-total
PMT				PMT
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	417.173.318	417.173.318	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	705.164.971	705.164.971	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	705.164.971	705.164.971	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	705.164.971	705.164.971	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal	-	2.532.668.231	2.532.668.231	Sub-total
CTP				CTP
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	271.792.678	271.792.678	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	856.675.257	856.675.257	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	845.312.356	845.312.356	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT CIMB Niaga Tbk	-	571.697.944	571.697.944	PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	514.523.660	514.523.660	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	287.575.303	287.575.303	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	114.356.603	114.356.603	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank DKI	-	114.334.632	114.334.632	PT Bank DKI
Subtotal	-	3.576.268.433	3.576.268.433	Sub-total
PIL				PIL
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	13.403.446	64.500.129	77.903.575	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
KKT				KKT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.954.394	13.946.800	25.901.194	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total pokok utang	504.471.670	11.147.445.863	11.651.917.533	Total principal of loans
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	(18.449.373)	(18.449.373)	Less: Unamortized costs of loans
Total	504.471.670	11.128.996.490	11.633.468.160	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

1 Januari 2020/31 Desember 2019 (Disajikan kembali - Catatan 4)	Bagian lancar/ Current portion	Bagian jangka panjang/ long term portion	Total	January 1, 2020/December 31, 2019 (As restated - Note 4)
Perusahaan				The Company
<i>Bilateral</i>				<i>Bilateral</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	208.209.390	208.209.390	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pinjaman bank sindikasi				Syndicated bank loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70.416.712	511.249.487	581.666.199	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	70.000.047	501.666.153	571.666.200	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	70.000.047	501.666.153	571.666.200	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Deutsche Bank AG	162.163.278	81.764.281	243.927.559	Deutsche Bank AG
Subtotal	372.580.084	1.804.555.464	2.177.135.548	Sub-total
Entitas Anak				Subsidiaries
PTP1				PTP1
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.075.917.778	1.075.917.778	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pinjaman bank sindikasi				Syndicated bank loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	145.451.537	145.451.537	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	145.451.537	145.451.537	PT Indonesia Infrastructure Finance
Subtotal	-	1.366.820.852	1.366.820.852	Sub-total
PMT				PMT
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	416.657.416	416.657.416	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	719.793.492	719.793.492	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	719.793.492	719.793.492	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	719.793.492	719.793.492	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal	-	2.576.037.892	2.576.037.892	Sub-total
CTP				CTP
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	486.511.856	486.511.856	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	557.548.955	557.548.955	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	557.541.817	557.541.817	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT CIMB Niaga Tbk	-	372.236.723	372.236.723	PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	335.008.569	335.008.569	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	187.728.093	187.728.093	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	74.447.546	74.447.546	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank DKI	-	74.446.573	74.446.573	PT Bank DKI
Subtotal	-	2.645.470.132	2.645.470.132	Sub-total
PIL				PIL
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.132.350	85.368.000	89.500.350	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
RSP				RSP
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	12.000	114.978.000	114.990.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
KKT				KKT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.954.394	25.901.023	37.855.417	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total pokok utang	388.678.828	8.619.131.363	9.007.810.191	Total principal of loans
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	(5.211.667)	(5.211.667)	Less: Unamortized costs of loans
Total	388.678.828	8.613.919.696	9.002.598.524	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/The Company (formerly Pelindo I)					
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2017-2019)	2	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah margin 3,00% / Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,00%	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2017-2019)	2	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah margin 3,00% / Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,00%	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2017-2019)	2	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah margin 3,00% / Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,00%	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2025)	7	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah margin 3,75% / Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,75%	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ <i>Credit Facility</i>	Kreditur/ <i>Creditor</i>	Jadwal Pembayaran/ <i>Repayment Schedule</i>	Jangka Waktu (Tahun)/ <i>Period (Year)</i>	Tingkat Bunga/ <i>Interest Rates</i>	Jaminan/ <i>Collateral</i>
Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) (lanjutan)/The Company (formerly Pelindo I) (continued)					
Pinjaman Bank Sindikasi / <i>Syndicated loan</i>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several <i>installment</i> (2018-2025)	7	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah marjin 3,75% / <i>Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,75%</i>	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / <i>Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.</i>
Pinjaman Bank Sindikasi/ <i>Syndicated loan</i>	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several <i>installment</i> (2018-2025)	7	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR rata-rata 3 bulan ditambah marjin 3,75% / <i>Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin of 3,75%</i>	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / <i>Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.</i>
Pinjaman Bank Sindikasi / <i>Syndicated loan</i>	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several <i>installment</i> (2019-2029)	10	Tingkat suku bunga sebesar <i>time deposit</i> Bank Mandiri 3 bulan ditambah marjin 3,00% / <i>Interest rate of 3 months Bank Mandiri time deposit plus margin of 3.00%</i>	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / <i>Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.</i>
Pinjaman Bank Sindikasi / <i>Syndicated loan</i>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several <i>installment</i> (2019-2029)	10	Tingkat suku bunga sebesar <i>time deposit</i> Bank Mandiri 3 bulan ditambah marjin 3,00% / <i>Interest rate of 3 months Bank Mandiri time deposit plus margin of 3.00%</i>	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / <i>Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021 and 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I) (lanjutan)/The Company (formerly Pelindo I) (continued)					
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2019-2029)	10	Tingkat suku bunga sebesar time deposit Bank Mandiri 3 bulan ditambah margin 3,00% / Interest rate of 3 months Bank Mandiri time deposit plus margin of 3.00%	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2021-2031)	10	Tingkat suku bunga acuan ditambah margin pada tanggal penetapan suku bunga / Bench mark interest rate plus margin at the stipulated date	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2021-2031)	10	Tingkat suku bunga acuan ditambah margin pada tanggal penetapan suku bunga/ Bench mark interest rate plus margin at the stipulated date	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2021-2031)	10	Tingkat suku bunga acuan ditambah margin pada tanggal penetapan suku bunga/ Bench mark interest rate plus margin at the stipulated date	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Permata Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2021-2031)	10	Tingkat suku bunga acuan ditambah margin pada tanggal penetapan suku bunga/ Bench mark interest rate plus margin at the stipulated date	Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari / Related to the loan agreement, the company has signed fiduciary guarantees for all of the Company asset, both movable and immovable, that are owned or will be owned at a later date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III) /The Company (formerly Pelindo III)					
Fasilitas <i>Letter of Credit / Letter of Credit Facilities</i>	Deutsche Bank AG, London Branch	Beberapa cicilan/ <i>several installment</i> (2015-2021)	5	1,79%	Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini / <i>There is no collateral given for these facilities.</i>
Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV) /The Company (formerly Pelindo IV)					
Pinjaman Bank Sindikasi / <i>Syndicated loan</i>	PT Bank Mandiri(Persero) Tbk	Beberapa cicilan/ <i>several installment</i> (2020-2031)	10	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 3,40% / <i>Interest rate of 3 months JIBOR plus margin of 3,40%</i>	Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini / <i>There is no collateral given for these facilities.</i>
Pinjaman Bank Sindikasi / <i>Syndicated loan</i>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/ <i>several installment</i> (2020-2031)	10	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 3,40% / <i>Interest rate of 3 months JIBOR plus margin of 3,40%</i>	Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini / <i>There is no collateral given for these facilities.</i>
Pinjaman Bank Sindikasi / <i>Syndicated loan</i>	PT Bank Maybank (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/ <i>several installment</i> (2020-2031)	10	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 3,40% / <i>Interest rate of 3 months JIBOR plus margin of 3,40%</i>	Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini / <i>There is no collateral given for these facilities.</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
PMT Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2016-2026)	10	JIBOR 3 Bulan +3,25%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / <i>The facility is guaranteed with collateral as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose ("TMP") dan diikat dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit fasilitas kredit / <i>Land and buildings and other objects attached to the land of the Multipurpose Terminal and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.</i> 2. Jaminan fidusia atas Fasilitas Pelabuhan berikut seluruh peralatan dan perlengkapan Fasilitas Pelabuhan terkait dengan TMP dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit kredit / <i>Fiduciary guarantee for Port Facilities along with all Port Facility equipment related to TMP with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit limit.</i> 3. Jaminan fidusia seluruh hasil klaim atas bank garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur TMP dengan <i>Security Coverage Ratio</i> 100% dari nilai bank garansi dan klaim asuransi / <i>Fiduciary guarantee of all results of claims for bank guarantees and insurance on infrastructure development projects of TMP with a Security Coverage Ratio of 100% of the value of bank guarantees and insurance claims.</i> 4. Pengalihan (cessie) atas rekening penampungan / <i>Transfer (cessie) of escrow accounts</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021 and 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
PMT					
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2016-2026)	10	JIBOR 3 Bulan +3,25%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / <i>The facility is guaranteed with collateral as follows:</i> 1. Tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose ("TMP") dan diikat dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit fasilitas kredit / <i>Land and buildings and other objects attached to the land of the Multipurpose Terminal and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.</i> 2. Jaminan fidusia atas Fasilitas Pelabuhan berikut seluruh peralatan dan perlengkapan Fasilitas Pelabuhan terkait dengan TMP dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit kredit / <i>Fiduciary guarantee for Port Facilities along with all Port Facility equipment related to TMP with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit limit.</i> 3. Jaminan Fidusia seluruh hasil klaim atas bank garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur TMP dengan <i>Security Coverage Ratio</i> 100% dari nilai bank garansi dan klaim asuransi / <i>Fiduciary guarantee of all results of claims for bank guarantees and insurance on infrastructure development projects of TMP with a Security Coverage Ratio of 100% of the value of bank guarantees and insurance claims.</i> 4. Pengalihan (cessie) atas rekening penampungan / <i>Transfer (cessie) of escrow accounts</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021 and 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
PMT					
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2016-2026)	10	JIBOR 3 Bulan +3,25%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / <i>The facility is guaranteed with collateral as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose ("TMP") dan diikat dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit fasilitas kredit / <i>Land and buildings and other objects attached to the land of the Multipurpose Terminal and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.</i> 2. Jaminan fidusia atas fasilitas pelabuhan berikut seluruh peralatan dan perlengkapan fasilitas pelabuhan terkait dengan TMP dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit kredit / <i>Fiduciary guarantee for Port Facilities along with all Port Facility equipment related to TMP with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit limit.</i> 3. Jaminan fidusia seluruh hasil klaim atas bank garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur TMP dengan <i>Security Coverage Ratio</i> 100% dari nilai bank garansi dan klaim asuransi / <i>Fiduciary guarantee of all results of claims for bank guarantees and insurance on infrastructure development projects of TMP with a Security Coverage Ratio of 100% of the value of bank guarantees and insurance claims.</i> 4. Pengalihan (cessie) atas rekening penampungan / <i>Transfer (cessie) of escrow accounts</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun/ Period (Year))	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
PMT Fasilitas Kredit / Credit Facility Agreement	PT Sarana Multi Infrastruktur	Beberapa cicilan/several installment (2018-2031)	13	JIBOR 3 Bulan +4,25%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / <i>The facility is guaranteed with collateral as follows:</i> 1. Hak tanggungan untuk seluruh tanah dan bangunan serta benda-benda lain di atas tanah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung / <i>Mortgage rights for all land and buldings as well as other objects on the land of Kuala Tanjung Multipurpose Terminal</i> 2. Jaminan fidusia atas seluruh fasilitas Terminal Multipurpose Kuala Tanjung dan seluruh peralatan serta perlengkapan fasilitas pelabuhan terkait dengan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung / <i>Fiduciary guarantee for all Kuala Tanjung Multipurpose Terminal facilities and all port facilities and equipment related to Kuala Tanjung Multipurpose Terminal</i> 3. Hak tanggungan untuk seluruh tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose Kuala Tanjung / <i>Mortgage rights for all land and buildings as well as other objects attached to the land of Kuala Tanjung Multipurpose Terminal</i> 4. Jaminan fidusia atas seluruh fasilitas Terminal Multipurpose Kuala Tanjung dan seluruh peralatan serta perlengkapan fasilitas pelabuhan terkait dengan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung / <i>Fiduciary guarantee for all Kuala Tanjung Multipurpose Terminal facilities and all port facilities and equipment related to Kuala Tanjung Multipurpose Terminal</i> 5. Jaminan fidusia atas seluruh hasil klaim bank garansi dan atau klaim asuransi Debitur atas pekerjaan pembangunan infrastruktur Terminal Multipurpose yang diterima dari kontraktor dan / atau supplier vendor / <i>Fiduciary guarantee for all bank guarantee claims and/or debtor insurance claims for the Multipurpose Terminal infrastructure development work received from contractors and/or vendor suppliers.</i> 6. Pengalihan (<i>cessie</i>) atas rekening penampungan / <i>Transfer (cessie) of escrow accounts</i> 7. Gadai deposito atas rekening <i>debt service reserve account (DSRA)</i> / <i>Pawn of time deposits on the debt service reserve account (DSRA).</i> 8. Surat pernyataan dan kesanggupan (<i>Letter of Undertaking</i>) dari para pemegang saham Debitur yang menyatakan bahwa Proyek TMP tidak akan dalam keadaan cidera janji./ <i>Letter of undertaking from the shareholders of the Debt or stating that the TMP Project will not be in a state of default.</i>

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
PTP1					
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2030)	12	JIBOR 3 Bulan +3,85%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / <i>The facility is guaranteed with collateral as follows:</i> 1. Fidusia atas hasil klaim/proceed atas jaminan pembayaran (<i>bank guarantee</i>) dan/atau SBLC dan/atau asuransi atas proyek / <i>Fiduciary over the results of claims/proceed for bank guarantees and/or SBLC and/or insurance for the project.</i> 2. Fidusia atas peralatan dan perlengkapan terminal petikemas BICT Fase II atas nama PTP1 yang dibiayai oleh kreditur sindikasi / <i>Fiduciary on BICT Phase II container terminal equipment and supplies on behalf of PTP1 financed by syndicated creditors.</i> 3. Seluruh agunan tersebut wajib diasuransikan dengan mencantumkan <i>banker's clause</i> dengan nama agen jaminan atau nama kreditur sindikasi sebagai bertanggung oleh perusahaan asuransi rekanan kreditur sindikasi / <i>All collateral must be insured by including the banker's clause with the name of the collateral agent or the name of the syndicated creditor as insured by the syndicated creditor's partner insurance company.</i>
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Indonesia Infrastructure Finance Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2030)	12	JIBOR 3 Bulan +3,85%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / <i>The facility is guaranteed with collateral as follows:</i> 1. Fidusia atas hasil klaim/proceed atas jaminan pembayaran (<i>bank guarantee</i>) dan/atau SBLC dan/atau asuransi atas proyek / <i>Fiduciary over the results of claims/proceed for bank guarantees and/or SBLC and/or insurance for the project.</i> 2. Fidusia atas peralatan dan perlengkapan terminal petikemas BICT Fase II atas nama PTP1 yang dibiayai oleh kreditur sindikasi / <i>Fiduciary on BICT Phase II container terminal equipment and supplies on behalf of PTP1 financed by syndicated creditors.</i> 3. Seluruh agunan tersebut wajib diasuransikan dengan mencantumkan <i>banker's clause</i> dengan nama agen jaminan atau nama kreditur sindikasi sebagai bertanggung oleh perusahaan asuransi rekanan kreditur sindikasi / <i>All collateral must be insured by including the banker's clause with the name of the collateral agent or the name of the syndicated creditor as insured by the syndicated creditor's partner insurance company.</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ <i>Credit Facility</i>	Kreditur/ <i>Creditor</i>	Jadwal Pembayaran/ <i>Repayment Schedule</i>	Jangka Waktu (Tahun)/ <i>Period (Year)</i>	Tingkat Bunga/ <i>Interest Rates</i>	Jaminan/ <i>Collateral</i>
PTP1 Fasilitas Kredit Bilateral / <i>Bilateral Credit Facility</i>	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2015-2030)	15	JIBOR 3 Bulan +3,35%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut / <i>The facility is guaranteed with collateral as follows:</i> 1. Tanah, bangunan dermaga dan container yard serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Petikemas Belawan Fase II dan dan diikat dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit fasilitas kredit / <i>Land, jetty buildings and container yards as well as other objects attached to the land of the Belawan Container Terminal Phase II and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.</i> 2. Seluruh hasil klaim atas garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur Dermaga dan Terminal Petikemas BICT II / <i>All results of claims for guarantees and insurance on infrastructure development projects of Jetty and BICT II.</i>
PIL Fasilitas Kredit Bilateral / <i>Bilateral Credit Facility</i>	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2017-2025)	8	9,50% per tahun untuk 3 (tiga) bulan pertama dan setara 17,50% per tahun untuk bulan berikutnya/ 9,50% per annum for the first 3 (three) months and equivalent 17,50% per annum for the remaining months.	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan dengan aset tetap berupa dua unit <i>Harbor Mobile Crane</i> (HMC) yang didanai berdasarkan akta fidusia dengan nilai pengikatan Rp103.299.200 / <i>The loan is pledged as collateral for the fixed assets of the two units of Harbor Mobile Cranes (HMC) which are funded based on a fiduciary deed with a binding value of Rp103,299,200.</i>
RSP Pinjaman Bank Sindikasi / <i>Syndicated loan</i>	PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk ("BSM")	Beberapa cicilan/several installment (2019-2029)	10	Nisbah bagi hasil untuk BSM dan RSP masing- masing sebesar 2,22% dan 97,78%. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan/ <i>The profit sharing ratio for BSM and RSP was 2.22% and 97.78%, respectively. The financing period is 12 (twelve months).</i>	Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan seluas 21.330 m2 di RSP Cabang Jakarta yang terletak di Jl. Kramat Jaya / <i>The Facility is guaranteed by collateral in the form of land and building with area 21,330 m2 in RSP Jakarta branch, which located in Jl. Kramat Jaya.</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
CTP					
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2019-2034)	15	Tranche construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)	A Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2019-2034)	15	Tranche construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)	A Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2019-2034)	15	Tranche construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)	A Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2019-2034)	15	Tranche construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)	A Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2019-2034)	15	Tranche construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) Stage B construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9%)	A Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
CTP					
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2019-2036)	15	Reference Rate + Margin Eqv 10,50% untuk Tranche A1 dan A2, dan Reference Rate + Margin eqv 12,50% untuk tranche B	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.
Pinjaman Bank Sindikasi / Syndicated loan	PT Bank DKI	Beberapa cicilan/several installment (2019-2036)	15	Reference Rate + Margin Eqv 10,50% untuk Tranche A1 dan A2, dan Reference Rate + Margin eqv 12,50% untuk tranche B	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung, tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API / This loan is secured by concession rights, all claims and operating income, escrow accounts, claims for insurance, CTP guarantees and pledges for those owned by API.
KKT					
Fasilitas Kredit Investasi / Investment loan facility	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2015-2023)	7,5	Tingkat suku bunga sebesar 10,25% efektif per bulan / Interest rate of 10,25% of effective per annum	Pinjaman ini dijamin dengan 3 unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dan lapangan penumpukan milik KKT / The collateral given for this facility were 3 units Rubber Tyred Gantry (RTG) and container yard owned by KKT

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, fasilitas tersebut mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya persyaratan rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, PTP1 tidak memenuhi sebagian persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman dan belum memperoleh surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Sesuai dengan perjanjian pinjaman, tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut dapat menyebabkan pinjaman menjadi jatuh tempo, dan oleh karenanya seluruh saldo pinjaman terutang PTP1 disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Pada tanggal 22 Februari 2022 dan 16 Maret 2022, PTP1 telah memperoleh surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut masing-masing untuk fasilitas pinjaman bilateral dan sindikasi.

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows: (continued)

Based on the loan agreement, the facility requires company to comply to certain requirement, among others financial ratios as stipulated in the Loan Agreement.

As of December 31, 2021, PTP1 did not comply to several financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement and not yet received waiver letter on the incompliance of financial ratio covenant until December 31, 2021. In accordance with the loan agreement, incompliance of financial ratio covenants may lead to the loan became due, and therefore, all the outstanding loan facility of PTP1 are presented as current liabilities. On February 22, 2022 and March 16, 2022, PTP1 has obtained waiver letters for non-fulfillment of the financial ratio requirements for bilateral and syndicated loan facilities, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

27. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION

	<i>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</i>			
	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019</u>	
Rupiah Pihak ketiga PT Indonesia Infrastruktur Finance	476.290.919	332.402.837	213.793.871	Rupiah Third parties PT Indonesia Infrastruktur Finance
Rupiah Pihak berelasi (Catatan 45f) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	949.751.736	670.300.506	437.976.537	Rupiah Related parties (Note 45f) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Total	1.426.042.655	1.002.703.343	651.770.408	Total

CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No.30 tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta. CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 26).

Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi CTP untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan memiliki limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp7.404.162.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate + Margin* eqv. 10,50% untuk tranche A1 dan A2, dan *Reference Rate + Margin* eqv. 12,50% untuk tranche B yang bersifat Subordinasi.

Berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Penundukan Diri tertanggal 22 Oktober 2019, dinyatakan bahwa Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") selaku kreditur baru telah bergabung dengan pola incremental option dan telah menjadi salah satu kreditur untuk fasilitas tranche B dalam Perjanjian Kredit dengan limit pinjaman Rp521.248.000.

Perjanjian Kredit Sindikasi telah mengalami Perubahan Pertama Terhadap Akta Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 31 Tanggal 26 Februari 2019 pada tanggal 17 Desember 2019 dengan merubah limit fasilitas kredit investasi menjadi sebesar Rp7.321.248.000.

CTP

Based on the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 45 dated December 21, 2018 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta which was restated based on the deed of Restatement of the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No.30 dated February 26, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta. CTP entered into a Loan Syndicated with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk and other banking financial institution (Note 26).

In accordance with the decision of the Syndicated Creditor for participation in the syndicated financing of CTP for the purpose of development financing investment has an Investment Credit facility limit of Rp7,404,162,000 with a maximum period of 180 months from the Signing of the Credit Agreement including Grace Period with the construction interest rate is the Reference Rate + Margin eqv. 10.50% for tranche A1 and A2, and the Reference Rate + Margin eqv. 12.50% for tranche B which is Subordinated.

Based on the Notification of Self-Submission Statement dated October 22, 2019, it was stated that Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") as a new creditor had joined the incremental option pattern and had become one of the creditors for tranche B facilities in the Credit Agreement with a loan limit of Rp521,248,000.

The Syndicated Credit Agreement has amended the First Amendment to the Restatement of the Syndicated Credit Agreement Number 31 dated February 26, 2019 on December 17, 2019 by changing the investment credit facility limit to Rp7,321,248,000 .

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**27. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK
(lanjutan)**

Berdasarkan surat Agen Fasilitas nomor SSK/3.2/4425 tanggal 29 Desember 2021 perihal Penyesuaian Keputusan Para Kreditur Sindikasi atas Permohonan Penyesuaian Ketentuan Fasilitas Kredit CTP, terdapat penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit sebagai berikut:

- Tranche A masa konstruksi dari ATD+4,94% (equiv. 7,48%) menjadi ATD+4,15% (min equiv. sebesar 6,8%) masa operasi dari ATD+4,69% (equiv 7,23%) menjadi ATD+3,90% (min equiv. sebesar 6,55%)
- Tranche B masa konstruksi dari ATD+6,94% (equiv.9,48%) menjadi ATD+6,19% (min equiv. sebesar 9%) masa operasi dari ATD+6,69% (equiv. 9,23%) menjadi ATD+5,94% (min equiv. sebesar 9%)

28. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

27. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION (continued)

Based on the Facility Agent's letter number SSK/3.2/4425 dated December 29, 2021 regarding the Adjustment of the Syndicated Creditors' Decision on the Application for Adjustment to CTP's Credit Facility Provisions, there is an adjustment to the interest rate of the credit facility as follows:

- Tranche A construction period from ATD+4.94% (equiv. 7.48%) to ATD+4.15% (min equiv. 6.8%) operating period from ATD+4.69% (equiv 7.23%) to ATD+3.90% (min equiv. of 6.55%)
- Tranche B construction period from ATD+6.94% (equiv.9.48%) to ATD+6.19% (min equiv. 9%) operating period from ATD+6.69% (equiv. 9.23%) to ATD+5.94% (min equiv. of 9%)

28. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

Disajikan kembali - Catatan 4/
As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Premium JICT (Catatan 50f)	1.967.827.813	2.087.090.104	2.325.614.688	JICT Premium (Note 50f)
Sewa diterima di muka - NPCT1 (Catatan 50d)	1.151.689.282	1.019.435.010	771.175.595	Advance rental fee - NPCT1 (Note 50d)
Premium TPK Koja (Catatan 50e)	457.634.375	418.084.656	540.840.625	TPK Koja Premium (Note 50e)
Sewa tanah dan/atau bangunan	1.142.652.587	1.407.065.371	1.239.512.721	Land rental and/or building
Total	4.719.804.057	4.931.675.141	4.877.143.629	Total
Bagian lancar (Catatan 21)	(224.748.522)	(311.226.933)	(273.061.373)	Current portion (Note 21)
Total bagian jangka panjang	4.495.055.535	4.620.448.208	4.604.082.256	Total long-term portion

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

29. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

	<i>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</i>			
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura	230.970.700	228.316.051	225.470.211	Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore
Provisi pemeliharaan terminal	264.880.104	97.790.963	35.731.131	Provision for terminal maintenance
Subtotal pihak ketiga	495.850.804	326.107.014	261.201.342	Subtotal third parties
<u>Pihak berelasi</u> (Catatan 45k)	466.538.398	466.538.398	441.350.272	<u>Related party</u> (Notes 45k)
Total	962.389.202	792.645.412	702.551.614	Total

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 berikut bunga terhutang (Catatan 50k).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 including the interest payable (Note 50k).

Provisi pemeliharaan terminal merupakan provisi atas pemeliharaan terminal dan beban bunga terkait penerapan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa (Catatan 16).

Provision for terminal maintenance represents provision for terminal maintenance and interest expense related to the application of ISAK 16 concerning Service Concession Arrangements (Note 16).

Utang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") merupakan pinjaman biaya pergantian atas pembelian tanah untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dengan batas maksimal Rp288.000.000 (Catatan 50t).

Payable to the Ministry of Public Works and Public Housing - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") represents a loan for replacement costs for the purchase of land for the Cibitung-Cilincing toll road project with a maximum limit of Rp288,000,000 (Note 50t).

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan d/h PT Sentra Jasa Aktuaria dan Rekan, Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, PT Tower Watson Purbajaga, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, PT Emerald Delta Consulting, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dan PT Padma Radya Aktuaria dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the Group recorded employee benefits liabilities based on actuarial computations performed by independent actuaries, Actuarial Consultant Yusi dan Rekan formerly PT Sentra Jasa Aktuaria, Actuarial Consultant Arya Bagiastra, PT Tower Watson Purbajaga, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, PT Emerald Delta Consulting, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan and PT Padma Radya Aktuaria using the "Projected Unit Credit" method.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Tingkat diskonto	3,49% - 7,64%	3,64% - 7,83%	7,04%-8,20%	Discount rate
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	0,00%-6,00%	4,00% - 10,00%	4,00-10,00%	Salary increase projection rate
Tingkat mortalitas	TMI 2019 & TMI III 2019	TMI 2019 & TMI III 2019	TMI 2019 & TMI III 2019	Mortality rate
Tingkat cacat tetap	1-10% dari tabel amortisasi / 1-10% of amortization table			Permanent disability rate
Tingkat pengunduran diri	1,00% untuk karyawan dibawah 30 tahun akan menurun sampai 0% pada usia 46 tahun/ 1,00% for employees under 30 years old will decrease to 0% at 46 years old			Level of resignation
Usia pensiun normal	55-58 tahun/years	55-58 tahun/years	55-58 tahun/years	Normal pension age

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

The basic assumptions used by the independent actuaries are as follows:

The employee benefit liabilities are as follows:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Perusahaan				The Company
Program pensiun	635.994.743	1.036.144.810	1.015.636.817	Pension program
Program penghargaan masa bhakti	906.174.293	849.857.115	750.788.445	Gratuity and compensation benefits
Program kesehatan pensiunan	4.126.658.787	4.300.395.029	2.248.340.341	Pension healthcare program
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	434.967.735	339.690.518	320.044.483	Other long-term employee benefits
Subtotal	6.103.795.558	6.526.087.472	4.334.810.086	Sub-total
Entitas anak				Subsidiaries
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya	457.127.973	412.055.025	487.783.044	Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program
Total	6.560.923.531	6.938.142.497	4.822.593.130	Total

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") dan untuk yang dipekerjakan sejak tahun 2004 dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

a. Pension Program

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in and before 2001 and managed by Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") and for employees hired with permanent status since 2004 managed by Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

	<i>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</i>			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Nilai kini liabilitas	1.684.814.603	1.722.106.388	1.726.722.619	<i>Present value of liabilities</i>
Nilai wajar aset program	(1.237.653.038)	(685.961.578)	(711.085.802)	<i>Fair value of plan assets</i>
Defisit program	447.161.565	1.036.144.810	1.015.636.817	<i>Deficit in plan</i>
Dampak batas atas aset	188.833.178	-	-	<i>Effect of asset ceiling</i>
Liabilitas yang diakui	635.994.743	1.036.144.810	1.015.636.817	<i>Recognized liabilities</i>

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Pension Program (continued)

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

	<i>Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember / Year Ended December 31,</i>			
	2021	2020	2019	
Biaya jasa kini	62.367.584	20.178.268	57.475.162	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	70.185.671	80.977.904	74.413.108	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa lalu	(44.092.909)	(15.110.307)	17.713.455	<i>Past service cost</i>
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	604.292	(575.097)	756.903	<i>Remeasurement of other long term employee benefits</i>
Beban yang diakui	89.064.638	85.470.768	150.358.628	<i>Recognized expense</i>

	<i>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</i>			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Liabilitas awal tahun	1.036.144.809	1.015.636.817	715.440.991	<i>Liabilities at beginning of year</i>
Beban yang diakui dalam laba rugi	89.064.638	85.470.768	193.251.615	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Penghasilan komprehensif lain	257.136.910	36.203.298	199.641.474	<i>Other comprehensive income</i>
luran pemberi kerja	(439.091.114)	(75.384.616)	(64.112.045)	<i>Employer's contributions</i>
Pembayaran manfaat	(307.260.500)	(25.781.457)	(28.585.218)	<i>Benefits payment</i>
Liabilitas akhir tahun	635.994.743	1.036.144.810	1.015.636.817	<i>Liabilities at end of year</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	1.722.106.388	1.726.722.619	1.298.489.515	<i>Present value of liabilities - beginning of year</i>
Biaya jasa kini	54.124.291	45.242.190	43.706.775	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	99.047.757	136.743.753	107.524.576	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa lalu	(17.133.479)	(39.791.371)	14.607.388	<i>Past service cost</i>
Pembayaran manfaat luran peserta program	(143.092.380)	(52.190.952)	(112.632.384)	<i>Benefits payment</i>
Ekspektasi pembayaran Imbalan	1.975.813	1.085.390	834.748	<i>Plan participants' contributions</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(32.794.099)	(93.507.894)	(67.200.908)	<i>Expected benefit payments</i>
	580.311	(2.197.347)	441.392.909	<i>Actuarial loss (gain)</i>
Nilai kini liabilitas akhir tahun	1.684.814.602	1.722.106.388	1.726.722.619	<i>Present value of liabilities - end of year</i>

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Nilai wajar aset program awal tahun	685.961.579	711.085.802	583.048.523	<i>Fair value of program assets - beginning of year</i>
Pendapatan bunga	12.586.031	16.830.138	18.827.649	<i>Interest revenue</i>
Rugi ekspektasian aset program	8.273.149	(32.200.548)	177.958.938	<i>Expected loss on program assets</i>
Imbal hasil ekspektasian aset program	14.118.819	39.126.276	26.384.278	<i>Expected return from program assets</i>
luran pemberi kerja	718.212.070	66.170.236	68.286.191	<i>Employer's contributions</i>
luran peserta program	1.975.814	1.510.734	2.160.500	<i>Plan participants' contributions</i>
Pembayaran manfaat	(129.962.126)	(3.775.647)	(88.793.401)	<i>Benefits payment</i>
Imbalan yang dibayarkan	(17.784.808)	(107.160.411)	(67.200.908)	<i>Benefits paid</i>
Kerugian aktuarial	(55.727.490)	(5.625.002)	(9.585.968)	<i>Actuarial loss</i>
Nilai wajar aset program akhir tahun	1.237.653.038	685.961.578	711.085.802	<i>Fair value of program assets - end of year</i>

Aset program yang dimiliki oleh Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

- Aset tetap 49,20%-49,90%
- Reksa dana 34,3%-49,20%
- Investasi saham 2,6%-2,90%
- Surat utang negara 7,37%-7,50%
- Deposito berjangka 0,2%-0,18%
- Penyertaan langsung 5,40%-5,50%

Plan assets owned by the Group is as follows:

- Fixed assets 49.20%-49.90%
- Mutual funds 34.3%-49.20%
- Investment in shares 2.6%-2.90%
- State bonds 7.37%-7.50%
- Time deposits 0.2%-0.18%
- Direct investment 5.40%-5.50%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	<i>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</i>			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Jatuh tempo <= 1 tahun	644.859.810	419.891.401	422.602.425	<i>Maturity <= 1 year</i>
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	355.084.278	258.894.850	213.841.891	<i>Maturity > 1 year and <= 5 years</i>
Jatuh tempo > 5 tahun	2.502.166.185	2.385.983.984	2.452.147.561	<i>Maturity > 5 years</i>
Total	3.502.110.273	3.064.770.235	3.088.591.877	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2021:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	385.531.571	444.566.671	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	27.841.170	51.782.003	<i>Current service cost</i>

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2021:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	475.932.862	397.911.793	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	3.954.834	(6.127.887)	<i>Current service cost</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Nilai kini liabilitas	906.174.293	849.857.115	750.788.445	<i>Present value of liabilities</i>
Nilai wajar aset program	-	-	-	<i>Fair value of plan assets</i>
Liabilitas yang diakui	906.174.293	849.857.115	750.788.445	Recognized liabilities
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember / Year Ended December 31,				
	2021	2020	2019	
Biaya jasa kini	56.432.013	56.769.981	52.314.545	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	53.251.768	58.786.735	54.448.359	<i>Interest cost</i>
Keuntungan aktuarial	11.298.037	(338.639)	(32.512)	<i>Actuarial gain</i>
Beban imbalan kerja lain	(171.220)	53.311.245	292.156	<i>Other employee benefit cost</i>
Beban yang diakui	120.810.598	168.529.322	107.022.548	Recognized expense
Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4				
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Liabilitas awal tahun	849.857.115	750.788.445	653.641.759	<i>Liabilities at beginning of year</i>
Beban yang diakui dalam laba rugi	120.810.598	168.529.322	107.022.548	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Penghasilan komprehensif lain	(10.304.590)	(24.231.841)	34.382.820	<i>Other comprehensive income</i>
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(54.188.830)	(45.228.811)	(44.258.682)	<i>Current year benefit payment</i>
Liabilitas akhir tahun	906.174.293	849.857.115	750.788.445	Liabilities at end of year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

	<i>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</i>			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	849.857.115	750.788.445	653.641.759	<i>Present value of liabilities - beginning of year</i>
Biaya jasa kini	56.432.013	56.769.981	52.314.544	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	53.251.768	58.786.735	54.448.359	<i>Interest cost</i>
Ekspektasi pembayaran imbalan	(54.188.830)	(45.228.811)	(44.258.682)	<i>Expected benefit payments</i>
Keuntungan aktuarial	(10.475.810)	(24.570.479)	34.350.308	<i>Actuarial gain</i>
Biaya jasa lalu	11.298.037	53.311.244	292.157	<i>Past service cost</i>
Nilai kini liabilitas akhir tahun	906.174.293	849.857.115	750.788.445	<i>Present value of liabilities - end of year</i>

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

	<i>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</i>			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Jatuh tempo <= 1 tahun	39.540.818	35.328.941	27.438.107	<i>Maturity <= 1 year</i>
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	266.485.402	225.617.887	192.447.732	<i>Maturity > 1 year and <= 5 years</i>
Jatuh tempo > 5 tahun	4.317.065.814	5.028.940.902	5.227.027.064	<i>Maturity > 5 years</i>
Total	4.623.092.034	5.289.887.730	5.446.912.903	<i>Total</i>

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2021:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	837.754.106	984.940.538	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	50.877.405	62.985.560	<i>Current service cost</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	982.860.903	838.493.009	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	62.815.823	50.938.058	Current service cost

c. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga. Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2021:

c. Pension healthcare program

The Company also provides long term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family. The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Nilai kini liabilitas	4.126.658.787	4.300.395.029	2.248.340.341	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	-	-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	4.126.658.787	4.300.395.029	2.248.340.341	Recognized liabilities
	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember / Year Ended December 31,			
	2021	2020	2019	
Biaya jasa kini	128.742.424	137.426.708	55.729.479	Current service cost
Biaya bunga	285.378.346	178.329.433	153.360.748	Interest cost
Beban yang diakui	414.120.770	315.756.141	209.090.227	Recognized expense

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

c. Pension healthcare program (continued)

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Liabilitas awal tahun	4.300.395.029	2.248.340.341	1.812.156.310	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	414.120.770	315.756.141	209.090.228	Expense recognized in profit or loss
Penghasilan komprehensif lain	(443.197.282)	1.875.603.309	381.033.684	Other comprehensive income
Pembayaran manfaat tahun berjalan	-	(62.176.467)	(70.416.757)	Benefits payment
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(144.659.730)	(77.128.295)	(83.523.124)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	4.126.658.787	4.300.395.029	2.248.340.341	Liabilities at end of year

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	4.300.395.029	2.248.340.341	1.812.156.310	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	98.088.542	118.400.675	55.729.480	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	19.026.033	-	Past service cost
Biaya bunga	285.378.346	178.329.434	153.360.748	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan	(107.321.183)	(139.304.761)	(153.939.881)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(449.881.947)	1.875.603.307	381.033.684	Actuarial loss (gain)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	4.126.658.787	4.300.395.029	2.248.340.341	Present value of liabilities - end of year

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Jatuh tempo <= 1 tahun	115.912.669	134.345.542	93.537.223	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	631.338.093	636.103.645	927.282.344	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	6.992.875.037	7.540.046.395	5.456.464.716	Maturity > 5 years
Total	7.740.125.799	8.310.495.582	6.477.284.283	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek sebagai berikut:

	<u>Kenaikan/ Increase</u>	<u>Penurunan/ Decrease</u>
Nilai kini liabilitas	671.039.756	1.825.027.257
Biaya jasa kini	11.614.945	(22.438.181)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Pension healthcare program (continued)

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects:

	<u>Kenaikan/ Increase</u>	<u>Penurunan/ Decrease</u>	
Nilai kini liabilitas	671.039.756	1.825.027.257	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	11.614.945	(22.438.181)	Current service cost

d. Other long-term employee benefits

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

**Disajikan kembali - Catatan 4/
As restated - Note 4**

	<u>31 Desember 2021/ December 31 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019</u>	
Nilai kini liabilitas	435.094.715	344.049.105	320.301.181	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(126.980)	(4.358.587)	(256.698)	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	434.967.735	339.690.518	320.044.483	Recognized liabilities

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember /
Year Ended December 31,**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Biaya jasa kini	21.199.979	28.329.075	25.691.328	Current service cost
Biaya bunga	23.450.664	25.660.954	22.449.246	Interest cost
Biaya jasa lalu	-	181.605	3.106.068	Past service cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(402.391)	2.673.067	4.665.138	Actuarial loss (gain)
Beban imbalan kerja lain	13.468.356	-	(1.437.912)	Other employee benefits expense
Beban yang diakui	57.716.608	56.844.701	54.473.868	Recognized expense

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

d. Other long-term employee benefits (continued)

	<u>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</u>			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Liabilitas awal tahun	339.690.519	320.044.483	257.645.054	<i>Liabilities at beginning of year</i>
Beban yang diakui dalam laba rugi	57.716.608	56.844.701	54.473.868	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	80.997.185	(10.351.498)	19.613.194	<i>Expenses (income) that recognized in other comprehensive incomes</i>
luran pemberi kerja	-	(25.083.594)	(8.689.332)	<i>Employee dues</i>
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(43.436.577)	(1.763.574)	(2.998.301)	<i>Current year benefit payment</i>
Liabilitas akhir tahun	434.967.735	339.690.518	320.044.483	<i>Liabilities at end of year</i>

	<u>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</u>			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	344.049.107	320.301.181	274.429.133	<i>Present value of liabilities - beginning of year</i>
Biaya jasa kini	33.051.683	28.329.075	25.691.328	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	1.738.893	-	1.668.155	<i>Past service cost</i>
Biaya bunga	23.768.841	25.885.575	23.264.452	<i>Interest cost</i>
luran peserta program	-	-	-	<i>Program participant fees</i>
Ekspektasi pembayaran imbalan	(47.367.400)	(21.700.371)	(26.297.518)	<i>Expected benefit payments</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	79.726.612	(8.766.355)	21.545.631	<i>Actuarial loss (gain)</i>
Nilai kini liabilitas akhir tahun	434.967.736	344.049.105	320.301.181	<i>Present value of liabilities - end of year</i>

	<u>Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4</u>			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Nilai wajar aset program awal tahun	4.358.587	256.698	16.784.078	<i>Fair value of program assets - beginning of year</i>
Pendapatan bunga atas aset program	318.177	-	-	<i>Interest income on program assets</i>
Imbal hasil ekspektasian aset program	-	224.621	(1.917.497)	<i>Expected return from program assets</i>
luran pemberi kerja	18.000.000	24.104.397	-	<i>Employer's contributions</i>
luran peserta program	-	-	2.692.320	<i>Plan participants' contributions</i>
Imbalan yang dibayarkan	(22.549.784)	(19.139.205)	(17.302.203)	<i>Rewards paid</i>
Kerugian aktuarial	-	(1.087.924)	-	<i>Actuarial loss</i>
Nilai wajar aset program akhir tahun	126.980	4.358.587	256.698	<i>Fair value of program assets - end of year</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Jatuh tempo <= 1 tahun	48.250.931	29.858.758	8.819.164	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	204.354.197	172.435.179	67.342.210	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	1.702.323.949	1.496.399.938	499.074.913	Maturity > 5 years
Total	1.954.929.077	1.698.693.875	575.236.287	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	52.723.184	9.967.825	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	1.393.800	5.683.057	Current service cost

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2021 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	10.547.486	52.509.098	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	10.090.419	8.884.429	Current service cost

e. Program pensiun iuran pasti

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3"), dan DPLK PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, iuran program yang dibayarkan Kelompok Usaha masing-masing sebesar Rp25.047.062, Rp29.707.971, dan Rp23.209.186.

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Other long-term employee benefits (continued)

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 are as follows:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2021:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2021:

e. Defined contribution plan

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3"), and DPLK PT Asuransi Jiwasraya. For the year ended December 31, 2021, the year ended December 31, 2020 and 2019, the contribution plans established by the Group amounted to Rp25,047,062, Rp29,707,971, and Rp23,209,186, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

31. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada tanggal 31 Desember 2021 adalah:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
Negara Republik Indonesia	8.475.067	100,00%	8.475.067.000	Republic of Indonesia

Pemegang saham Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada tanggal 31 Desember 2020 adalah:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
Negara Republik Indonesia	1.444.029	100,00%	1.444.029.000	Republic of Indonesia

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Based on General Meeting of Shareholders held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai berikut:

Based on the Regulation of Government of The Republic of Indonesia No. 58 Year 2011 dated December 22, 2011 about Additional Participation Capital of The Republic of Indonesia in the Company (formerly Pelindo II) as follows:

- 1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.
- 2) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

- 1) *The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.*
- 2) *Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue and Expenditure Budget) in 2005.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

31. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- 2) Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar Rp7.653.000 melalui:
 - a) Sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;
 - b) Sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dalam surat No. 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan (dahulu Pelindo II) yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

31. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

- 1) Approved the disbursement/placement of shares that were still in portfolio of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.
- 2) Approved additional paid-in capital of the Company (formerly Pelindo II) owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:
 - a) Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Capital contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital;
 - b) Rp24 taken from the Company's reserve capitalization as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Based on the Deed of Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Company as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company (formerly Pelindo II) by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company (formerly Pelindo II) changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

31. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang di aktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn. No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

Dengan adanya perubahan jenis saham tersebut, modal dasar Perusahaan (dahulu Pelindo II) adalah sebesar Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 3.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp1.444.029.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 1.444.028 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan penggabungan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV"), dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1f).

Dengan adanya penggabungan tersebut, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp33.000.000.000 yang terdiri dari 33.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 32.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp8.475.067.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 8.475.066 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

31. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Minister of SOEs Decree Statement as The General Meeting of Shareholders of the Company, which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 dated August 21, 2019, The Government of the Republic Indonesia, in this case represented by the Minister of SOEs, changed the types of shares that were originally without series became consisted of Series A Dwiwarna Shares and Series B shares.

With the changes in types of shares, Company's authorized capital of the Company (formerly Pelindo II) is Rp4,000,000,000 consisting of 4,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 3,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp1,444,029,000 consisting of one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 1,444,028 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

On October 1, 2021, the Company merged with Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV"), with the Company as the surviving entity (Note 1f).

With such merger, the Company's authorized capital of the company is Rp33,000,000,000 consisting of 33,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 32,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp8,475,067,000 consisting of one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 8,475,066 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. MODAL DONASI

Pada tahun 1997, Perusahaan (dahulu Pelindo II) memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

Pada tahun 2009, Perusahaan (dahulu Pelindo II) memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR

32. DONATED CAPITAL

In 1997, the Company (formerly Pelindo II) received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447.

In 2009, the Company (formerly Pelindo II) received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
				<i>Additional capital based on determination of definitive value (Note 1f)</i>
Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif (catatan 1f)	32.100.516.121	-	-	
<u>Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sependangali</u>				<u><i>Difference in value of business combination transaction of entities und common control</i></u>
PHC	239.860.000	-	-	PHC
RSP	134.385.547	134.385.547	-	RSP
BMS	38.697.264	-	-	BMS
APBS	33.152.625	-	-	APBS
MMI	(8.565.613)	-	-	MMI
ILCS	(21.792.779)	(21.792.779)	-	ILCS
PMS	(34.886.436)	-	-	PMS
Rukindo	(317.597.475)	(317.597.475)	(317.597.475)	Rukindo
TPS	(514.813.986)	-	-	TPS
CTP (Catatan 1g)	(1.203.895.262)	-	-	CTP (Note 1g)
Transaksi penggabungan entitas sependangali (Catatan 1f)	(32.100.516.121)	-	-	<i>Merger transactions of entities under common control (Note 1f)</i>
<u>Pengalihan barang milik negara</u>				<u><i>Transfer of government's assets</i></u>
Fasilitas Pelabuhan Dumai	414.128.745	-	-	<i>Dumai Port Facility</i>
2 (dua) unit kapal tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	53.560.436	-	-	<i>2 (two) units of tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port</i>
Dermaga Gunung Sitoli	37.991.647	-	-	<i>Gunung Sitoli Jetty</i>
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	19.203.989	-	-	<i>Gunung Sitoli Port Facility</i>
3 (tiga) unit forklift 3 ton dan 3 (tiga) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayait	1.686.300	-	-	<i>3 (three) unit of 3 ton forklift and 3 (three) unit of 5 ton forklift in Malahayati Port</i>
1 (satu) unit forklift 3 ton dan 1 (satu) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli	562.100	-	-	<i>1 (one) unit of 3 ton forklift and 1 (one) unit of 5 ton forklift in Gunung Sitoli Port</i>
Total	(1.128.322.898)	(205.004.707)	(317.597.475)	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

- a. Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif sebesar Rp32.100.516.121 merupakan selisih nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV sejumlah Rp39.131.554.121 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021 dengan nilai modal saham Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV pada saat penggabungan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II), yaitu sebesar Rp7.031.038.000 (Catatan 1f). Penambahan modal tersebut akan dicatat sebagai modal saham pada saat telah disetujui dalam RUPS dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Transaksi penggabungan tersebut di atas menimbulkan selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar Rp32.100.516.121 sesuai dengan metode penyatuan kepemilikan (Catatan 1f).

- b. Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000. Atas pengalihan tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo II) memiliki 100% saham Rukindo.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan	108.820.525
Nilai pengalihan	426.418.000
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(317.597.475)

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

- a. Additional capital based on determination of definitive value amounting to Rp32,100,516,121 represents difference of definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV totalling to Rp39,131,554,121, which have been determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on December 29, 2021, with the share capital of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV at the time of merger to the Company (formerly Pelindo II), which amounting to Rp7,031,038,000 (Note 1f). The additional capital will be recorded as share capital upon approval of GMS and upon approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia.

The merger transaction as stated above created the difference in value of business combination transaction of entities under common control amounting to Rp32,100,516,121 in accordance with the pooling of interest method (Note 1f).

- b. On August 2, 2013, the Company (formerly Pelindo II) received the transfer of all of Rukindo's shares owned by the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp426,418,000. After the transfer, the Company (formerly Pelindo II) owned 100% shares of Rukindo.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of Rukindo as of transfer date
Transfer amount
Difference arising from business combination of entites under common control

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

c. Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat pada tanggal 30 Juni 2020, PBM IHC melakukan pengambilalihan 103.166 lembar saham RSP yang dimiliki oleh Perusahaan (67%) senilai Rp167.500.000 dengan mekanisme sebagai berikut:

- PBM IHC menerbitkan sejumlah 584.372 lembar saham baru kepada Perusahaan yang mewakili 2% saham di PBM IHC senilai Rp96.250.000. Sehingga PBM IHC memperoleh sebanyak 59.282 lembar saham RSP milik Perusahaan (38,5%).
- PBM IHC melakukan pembelian sejumlah 43.884 lembar saham RSP milik Perusahaan (28,5%) dengan mekanisme jual beli saham senilai Rp71.250.000.

PBM IHC telah melakukan penyetoran kas kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp71.250.000.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham mengenai perubahan anggaran dasar RSP tanggal 7 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2020.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto RSP pada tanggal pengalihan	33.114.453
Nilai pengalihan	167.500.000
	<hr/>
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	134.385.547
	<hr/> <hr/>

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

b. Based on Decision-Shares Conditional Agreement on June 30, 2020, PBM IHC takeover 103,166 RSP shares owned by the Company (67%) worth Rp167,500,000 by using the following mechanism:

- PBM IHC issued 584,372 new shares to the Company which represent 2% of the shares of PBM IHC amounting to Rp96,250,000. Therefore, PBM IHC acquired 59,282 RSP shares of the Company (38.5%).
- PBM IHC purchased a total of 43,884 RSP shares owned by the Company (28.5%) with a share sale and purchase mechanism worth Rp71,250,000.

PBM IHC have transferred cash to the Company (formerly Pelindo II) amounted Rp71,250,000 on August 7, 2020 to the Company.

The Deed of Shareholder Decree Statement regarding the amendment to the RSP's articles of association dated August 7, 2020 has been notified to and received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on September 4, 2020.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of RSP as of transfer date	33.114.453
Transfer amount	167.500.000
	<hr/>
Difference arising from business combination of entites under common control	134.385.547
	<hr/> <hr/>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

- d. Berdasarkan akta jual beli saham tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengakuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49% porsi kepemilikan saham ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto ILCS pada tanggal pengalihan	27.407.221
Nilai pengalihan	49.200.000

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(21.792.779)
--	---------------------

- e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MMI No. 54 tanggal 16 April 2021, PPI mengakuisisi kepemilikan saham PT PP Properti Tbk pada MMI sebanyak 656.250.000 lembar saham atau setara dengan 21,13% porsi kepemilikan saham MMI dengan nilai pengalihan sebesar Rp70.087.500.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto MMI pada tanggal pengalihan	61.521.887
Nilai pengalihan	70.087.500

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(8.565.613)
--	--------------------

- f. Tambahan modal disetor pada BMS merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari UEPN masing-masing sebesar Rp38.697.264 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

- d. Based on share sales purchase agreement dated October 9, 2020, the Company (formerly Pelindo II) acquired the share ownership of PT Multimedia Nusantara in ILCS of 4,900,000 shares or equivalent to 49% of the share ownership of ILCS with transfer value of Rp49,200,000.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of ILCS as of transfer date	
Transfer amount	

Difference arising from business combination of entites under common control

- e. Based on the Decision of the Meeting Deed of MMI No. 54 dated April 16, 2021, PPI acquired the share ownership of PT PP Properti Tbk in MMI of 656,250,000 shares or equivalent to 21.13% of the share ownership of MMI with transfer value of Rp70,087,500.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of MMI as of transfer date	
Transfer amount	

Difference arising from business combination of entites under common control

- f. Paid in capital of BMS represents the difference between the par value and the capital contribution received from UEPN amounting to Rp38,697,264 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

- g. Tambahan modal disetor APBS merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV masing-masing sebesar Rp33.152.625 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
- h. Tambahan modal disetor PEL merupakan nominal pembelian saham kembali milik PEL dan reklasifikasi dari bagian non pengendali atas pembelian saham kembali oleh PEL. Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 24 Mei 2018 oleh Notaris Amanda Mirza Ervariana, BJTJ membeli 1% saham treasury PEL sehingga saldo tambahan modal disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.885.488. Pada tahun berjalan, PEL mendapatkan persetujuan atas penurunan modal dasar atas saham treasury PEL, sehingga saldo tambahan modal disetor pada 31 Desember 2021 adalah nihil.
- i. Tambahan modal disetor PMS merupakan selisih antara nilai nominal saham milik APBS yang dibeli oleh PMS dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV dan PT Gerbang Samudra Utama dengan setoran modal saham sebesar masing-masing Rp29.236.335 dan Rp29.223.425 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
- j. Tambahan modal disetor TPS sebesar Rp514.813.986 merupakan selisih antara nilai nominal saham milik TPS yang dibeli oleh Perusahaan dari P&O Dover (Holdings) Limited dengan setoran modal saham.
- k. Tambahan modal disetor PHC merupakan selisih antara nilai nominal saham milik PHC yang dibeli oleh PBM IHC dari Perusahaan dengan setoran modal saham Rp239.860.000 pada tanggal 31 Desember 2020.

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

- g. *Paid in capital of APBS represents the difference between the par value and the capital contribution received from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV amounting to Rp33,152,625 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.*
- h. *Paid in capital of PEL represents the shares buy-back transactions of PEL and reclassification of the non-controlling interest that forms part of the shares buy back by PEL. Based on Notarial Deed No. 2 dated May 24, 2018 by Notary Amanda Mirza Ervariana, BJTJ purchases 1% of PEL's treasury shares so that the additional balance of paid-in capital as of December 31, 2020 is Rp3,885,488, respectively. During the year, PEL received approval for a decrease in authorized capital for the PEL's treasury shares, so that the additional balance of paid-in capital as of December 31, 2021 is nil.*
- i. *Paid in capital of PMS represents the difference between the par value owned by APBS which was purchased by PMS from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV and PT Gerbang Samudra Utama with the capital contribution received amounting to Rp29,236,335 and Rp29,223,425 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.*
- j. *Paid in capital of TPS amounting to Rp514,813,986 represents the difference between the par value owned by TPS which was purchased by the Company from P&O Dover (Holdings) Limited with the capital contribution received.*
- k. *Paid in capital of PHC represents the difference between the par value owned by PHC which was purchased by the PBM IHC from the Company with the capital contribution received amounting to Rp239,860,000 as of December 31, 2020.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

- i. Tambahan modal disetor yang berasal dari pengalihan barang milik negara merupakan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah ("PP") No. 10 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp527.133.217 yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

Rincian Barang Milik Negara yang dialihkan tersebut adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pelabuhan Dumai	414.128.745
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	19.203.989
2 (dua) unit kapal tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	53.560.436
1 (satu) unit forklift 3 ton dan 1 (satu) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli	562.100
3 (tiga) unit forklift 3 ton dan 3 (tiga) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayati	1.686.300
Dermaga Gunung Sitoli	37.991.647
Total	527.133.217

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

- i. Additional paid-in capital arise from transfer of government's assets represents additional capital investment from the Republic of Indonesia which stipulated through Government Regulation ("PP") No. 10 Year 2019 dated February 22, 2019 amounting to Rp527,133,217 resulting from the transfer of Government's Assets under the Ministry of Transportation which provided from the Indonesian State Budget Year 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011.

The details of the transferred Government's Assets are as follows:

Dumai Port Facility
Gunung Sitoli Port Facility
2 (two) units of tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port
1 (one) unit of 3 ton forklift and 1 (one) unit of 5 ton forklift in Gunung Sitoli Port
3 (three) unit of 3 ton forklift and 3 (three) unit of 5 ton forklift in Malahayati Port
Gunung Sitoli Jetty
Total

34. SELISIH NILAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK NONPENGENDALI

Rincian selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Perusahaan (dahulu Pelindo II)				The Company (formerly Pelindo II)
Penawaran saham perdana perdana IKT	565.027.539	565.027.539	565.027.539	Initial public offering of IKT
Penawaran saham perdana perdana JAI	271.045.395	271.045.395	271.045.395	Initial public offering of JAI
Total	836.072.934	836.072.934	836.072.934	Total

Penurunan kepemilikan saham Perusahaan sehubungan dengan penawaran saham perdana di IKT dan JAI tidak disertai dengan hilangnya pengendalian.

34. DIFFERENCE IN VALUE OF TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTEREST

The details of difference in value of transactions with non-controlling interest are as follows:

The decrease in company ownership in connection with the initial public offerings in IKT and JAI which is not accompanied by loss of control.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

35. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2021:

Perusahaan/ The Company	Rapat Umum Pemegang Saham/General Meeting of Shareholders	Pembagian Dividen/Dividend Distribution	Cadangan Umum/General Reserve	Tanggal Pembayaran Dividen/ Date of Dividend Payment
Perusahaan (dahulu Pelindo I)/ The Company (formerly Pelindo I)	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 10 tanggal 16 September 2021/General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 10 dated September 16, 2021	-	100,00% dari laba neto atau sebesar Rp309.298.348/ 100.00% of net income or amounted to Rp309,298,348	-
Perusahaan (dahulu Pelindo II)/ The Company (formerly Pelindo II)	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah dilaksanakan tanggal 10 Mei 2021 dan telah diaktakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 01 tanggal 1 Juli 2021 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H./ General Meeting of Shareholders of the Company which was held on May 10, 2021 and was notarized through Notarial Deed No. 01 on July 1, 2021 of Nanda Fauz Iwan, S.H.	47,26% dari laba neto atau Rp560.000.000/ 47.26% of net income or amounted to Rp560,000,000	52,74% dari laba neto atau sebesar Rp624.857.249/ 52.74% of net income or amounted to Rp624,857,249	3 Juni 2021/ June 3, 2021
Perusahaan (dahulu Pelindo III)/ The Company (formerly Pelindo III)	Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Agustus 2021/Annual General Meeting of Shareholders on August 5, 2021	-	100,00% dari laba neto atau sebesar Rp1.205.564.000/ 100.00% of net income or amounted to Rp1,205,564,000	-
Perusahaan (dahulu Pelindo IV)/ The Company (formerly Pelindo IV)	Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2021/ Annual General Meeting of Shareholders on May 10, 2021	-	100,00% dari laba neto atau sebesar Rp279.970.727/ 100.00% of net income or amounted to Rp279,970,727	-

35. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2021:

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2020:

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2020:

Perusahaan/ The Company	Rapat Umum Pemegang Saham/General Meeting of Shareholders	Pembagian Dividen/Dividend Distribution	Cadangan Umum/General Reserve	Tanggal Pembayaran Dividen/ Date of Dividend Payment
Perusahaan (dahulu Pelindo I)/ The Company (formerly Pelindo I)	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 3 tanggal 6 Juli 2020/ General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 3 dated July 6, 2020	16,25% dari laba neto atau sebesar Rp60.050.953/ 16.25% of net income or amounted to Rp60,050,953	83,75% dari laba neto atau sebesar Rp309.460.760/ 83.75% of net income or amounted to Rp309,460,760	26 Agustus 2020/ August 26, 2020
Perusahaan (dahulu Pelindo II)/ The Company (formerly Pelindo II)	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 12 tanggal 24 Agustus 2020 dari Notaris Dewi Sugina Mulyani, S.H./ General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 12 on August 24, 2020 of Dewi Sugina Mulyani, S.H.	28,84% dari laba neto atau sebesar Rp708.218.661/ 28.84% of net income or amounted to Rp708,218,661	71,16% dari laba neto atau sebesar Rp1.747.544.141/ 71.16% of net income or amounted to Rp1,747,544,141	tanggal 30 Juli 2020, 31 Agustus 2020, 1 Oktober 2020 dan 3 November 2020/ July 30, 2020, August 31, 2020, October 1, 2020, and November 3, 2020

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

35. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2020: (lanjutan)

Perusahaan/ The Company	Rapat Umum Pemegang Saham/General Meeting of Shareholders	Pembagian Dividen/Dividend Distribution	Cadangan Umum/General Reserve	Tanggal Pembayaran Dividen/ Date of Dividend Payment
Perusahaan (dahulu Pelindo III)/ The Company (formerly Pelindo III)	Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 6 tanggal 15 Juli 2020 dari Notaris Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.KN./ General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 6 on July 15, 2020 of Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.KN.	25,03% dari laba neto atau sebesar Rp524.815.889/ 25.03% of net income or amounting to Rp524,815,889	74,97% dari laba neto atau sebesar Rp1.571.755.480/ 74.97% of net income or amounting to Rp1,571,755,480	4 Agustus, 4 September, 5 Oktober, dan 5 November 2020/ August 4, September 4, October 5, and November 5, 2020
Perusahaan (dahulu Pelindo IV)/ The Company (formerly Pelindo IV)	Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 6 Juli 2020/ Annual General Meeting of Shareholders on July 6, 2020	19,13% dari laba neto atau sebesar Rp83.958.446/ 19.13% of net income or amounting to Rp83,958,446	80,87% dari laba neto atau sebesar Rp354.828.887/ 80.87% of net income or amounting to Rp354,828,887	3 Agustus 2020/ August 3, 2020

35. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE (continued)

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2020: (continued)

36. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4		
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(2.212.905.575)	(1.303.892.031)	(510.069.366)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	304.610.969	291.374.572	620.425.512
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(154.208.985)	(107.028.761)	(215.365.006)
Total	(2.062.503.591)	(1.119.546.220)	(105.008.860)

Item that will not be reclassified to profit or loss
Remeasurement of defined benefit plans

Item that will be reclassified to profit or loss
Exchange difference due to financial statements translation
Changes in fair value of available-for sale financial assets

Total

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan terutama merupakan penjabaran laporan keuangan JICT, NPCT1 dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat.

Exchange difference due to financial statements translation mainly represents translation of financial statements of JICT, NPCT1 and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

37. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

37. NON-CONTROLLING INTERESTS

	Aset Neto/Net Assets			Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)			
	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	
BJTI	435.077.121	420.606.192	438.203.940	15.518.409	13.899.890	8.959.331	BJTI
PTP1	315.597.771	354.797.655	354.307.330	(39.199.884)	(5.652.855)	(6.238.521)	PTP1
IKT	238.342.114	225.354.877	198.816.669	12.691.442	(10.367.124)	30.107.262	IKT
PMT	240.559.565	372.607.432	551.529.372	(131.869.901)	(130.549.460)	(72.839.970)	PMT
JAI	135.675.953	129.040.363	128.773.880	15.124.847	14.060.080	16.483.423	JAI
PMS	63.682.361	71.857.877	135.328.492	13.214.497	8.289.749	16.178.672	PMS
EPI	54.724.011	49.807.774	48.589.605	4.891.099	3.299.008	6.417.198	EPI
KKT	32.801.635	35.250.290	31.673.693	1.414.112	6.378.203	2.786.619	KKT
PDS	13.455.278	10.343.046	7.060.394	3.112.232	45.223	1.881.546	PDS
TPS	10.705.555	8.239.056	327.952.120	3.820.347	2.889.150	4.637.452	TPS
MTI	5.614.188	5.519.876	5.898.716	63.940	15.253	202.359	MTI
TTL	4.210.531	3.676.090	2.461.793	930.082	207.509	1.108.108	TTL
PIL	871.763	822.580	815.028	49.330	(7.987)	3.341	PIL
EII	454.874	381.415	331.690	80.836	30.090	(401.664)	EII
NTS	466.525	571.252	406.084	31.491	34.139	17.391	NTS
PHCM	143.935	84.208	49.102	59.727	(33.157)	(20.607)	PHCM
MMI	-	66.201.719	68.594.301	-	(204.797)	316.272	MMI
ILCS	-	-	31.094.899	-	-	(13.004.818)	ILCS
RSP	-	-	194.516	-	-	(94.703)	RSP
PHC	-	-	3.461.633	-	-	273.097	PHC
EDII	(8.303.307)	6.808.186	49.993.206	(15.011.946)	(19.615.319)	7.565.246	EDII
Total	1.544.079.873	1.761.969.888	2.385.536.463	(115.079.340)	(117.282.405)	4.337.034	Total

38. PENDAPATAN OPERASI

38. OPERATING REVENUES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Pelayanan terminal petikemas	12.523.675.532	11.676.435.120	Container services
Pelayanan jasa kapal	5.301.304.055	4.389.645.659	Vessel services
Pelayanan jasa terminal	4.807.499.447	4.046.948.858	Terminal services
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	3.737.059.523	3.798.370.127	Land, building, water and electricity services
Jasa logistik	634.300.177	563.751.400	Logistic services
Kerjasama dan fee for services	492.430.376	254.327.379	Partnership and fee for services
Pendapatan pas pelabuhan dan terminal	207.238.912	252.328.028	Port and terminal entry fee
Pengusahaan peralatan	196.132.682	175.848.774	Equipment services
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	163.204.450	56.400.000	Network services and consultant of information system

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

38. PENDAPATAN OPERASI (lanjutan)

38. OPERATING REVENUES (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Pelayanan jasa barang	157.613.300	630.768.305	Cargo services
Jasa pengerukan	69.024.070	105.145.109	Dredging services
Pelayanan kesehatan	56.969.167	293.797.290	Medical services
Lain-lain	468.354.646	347.365.778	Others
Total	28.814.806.337	26.591.131.827	Total

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada transaksi dari satu pelanggan dengan total penjualan kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During the year ended as of December 31, 2021 and 2020, there were no sales made from any single customer with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

39. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

39. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Fase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya dan Jalan Tol Cibitung - Cilincing. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Fase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya and Cibitung - Cilincing Toll Road. Construction revenue is measured using cost method, where all costs are directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Pendapatan konstruksi	3.195.512.405	3.924.471.433	Construction revenues
Beban konstruksi	(3.195.512.405)	(3.924.471.433)	Construction expenses

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

40. BEBAN OPERASI

40. OPERATING EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Kerja sama mitra usaha	6.594.578.809	4.839.661.539	<i>Partnership</i>
Pegawai	5.776.773.548	5.424.752.602	<i>Employee</i>
Umum	3.205.464.552	3.881.753.138	<i>General</i>
Penyusutan dan amortisasi	3.199.471.975	3.262.323.970	<i>Depreciation and amortization</i>
Bahan bakar dan bahan habis pakai	1.858.083.842	1.812.150.958	<i>Fuels and supplies</i>
Pemeliharaan	1.205.821.148	761.171.028	<i>Maintenance</i>
Asuransi	381.095.875	357.709.826	<i>Insurance</i>
Administrasi kantor	214.514.237	169.980.210	<i>Office administration</i>
Beban pajak & retribusi	44.159.327	42.233.589	<i>Tax expense and retribution</i>
Lain-lain	23.983.504	124.196.500	<i>Others</i>
Total	22.503.946.817	20.675.933.360	Total

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan.

Beban umum terutama merupakan beban jasa konsultan, penyisihan penurunan nilai piutang, kontribusi kepada pihak lain, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada transaksi dari satu pemasok dengan total pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports.

General expenses mainly consist of consultants, allowance for impairment of receivables, contribution to the other parties, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

During the year ended as of December 31, 2021 and 2020, there were no purchase made from any single supplier with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA - NETO

41. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Penerimaan aset build, operate, transfer	219.657.600	-	Receive of build, operate, transfer assets
Pendapatan denda	164.990.708	21.495.028	Income from penalties
Amortisasi premium (Catatan 50a, 50b dan 50e)	146.997.708	146.997.708	Amortization of premium (Notes 50a, 50b and 50e)
Kelebihan pembayaran PBB	21.704.447	44.093.769	Overpayment of PBB
Beban pajak penghasilan final	(1.902.224)	(23.970.761)	Final income tax expense
Laba (rugi) penjualan aset tetap	(1.969.868)	2.941.075	Gain (loss) on sale of fixed asset
Beban denda	(88.995.349)	(217.099.773)	Expenses from penalties
Beban atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	(37.574.438)	(31.713.558)	Expense of non-tax state revenue (PNBP)
Rugi selisih kurs - neto	(274.562.559)	(221.928.633)	Loss on foreign exchange - net
Lain-lain - neto	80.992.081	82.647.037	Others - net
Total	229.338.106	(196.538.108)	Total

Beban denda merupakan denda pajak.

Expense from penalties represents tax penalty.

42. PENDAPATAN KEUANGAN

42. FINANCE INCOME

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Pendapatan bunga deposito	249.312.805	623.150.376	Interest income from deposits
Pendapatan bunga pinjaman	90.775.509	67.299.251	Interest income from loan
Pendapatan jasa giro	67.687.570	9.132.121	Interest income on current account
Total	407.775.884	699.581.748	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

43. BEBAN KEUANGAN

43. FINANCE COSTS

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Beban bunga obligasi	1.968.778.546	1.855.783.845	<i>Interest on provision for terminal</i>
Beban bunga pinjaman bank	461.005.512	436.671.860	<i>Interest expense from bank loans</i>
Beban bunga sewa	26.110.179	16.736.620	<i>Lease interest expenses</i>
Beban bunga, dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi	69.744.513	224.305.870	<i>Interest expenses, and amortization of discount and transaction cost</i>
Beban administrasi bank	4.738.635	7.790.398	<i>Bank administration charges</i>
Beban amortisasi penerbitan obligasi	874.035	806.801	<i>Amortization expenses</i>
Beban lain-lain	8.831.446	2.270.777	<i>Administration expenses</i>
Total	2.540.082.866	2.544.366.171	Total

44. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

44. EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
BKMS	90.170.663	57.865.279	<i>BKMS</i>
JICT	75.292.403	(56.010.859)	<i>JICT</i>
NPCT1	56.314.207	(35.870.716)	<i>NPCT1</i>
RSP	28.714.581	(6.478.544)	<i>RSP</i>
PHC	25.430.121	14.336.173	<i>PHC</i>
Ambapers	10.105.662	10.118.013	<i>Ambapers</i>
LNG	456.096	616.609	<i>LNG</i>
PCN	157.451	40.529	<i>PCN</i>
TNU	(9.921.272)	(11.795.315)	<i>TNU</i>
JBT	(21.612.324)	(12.976.627)	<i>JBT</i>
PTI	-	156.751	<i>PTI</i>
Total	255.107.588	(39.998.707)	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Pemegang saham/ <i>Controlling Shareholder</i>	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi/ <i>Concession service</i>
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa Perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Wika Haka Joint Operation	Jasa Pembangunan <i>Construction services</i>
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>

45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the company has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or have significant influence over these entities in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the controlling shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ <i>Government-related entity (continued)</i>	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa/ <i>Sales</i>
	PT Semen Padang (Persero)	Penjualan jasa/ <i>Sales</i>
	PT Brantas Abipraya (Persero)	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Jasa Klasifikasi dan Registrasi Kapal/ <i>Ship Classification & Registration services</i>
	BPPU ITS	Penjualan jasa/ <i>Sales</i>
	PT Sucofindo (Persero)	Jasa pemeriksaan/ <i>Inspection services</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ <i>Government-related entity (continued)</i>	Koperasi Pegawai PT Pelindo III	Alih daya/ <i>Outsourcing</i>
	PT Surveyor Indonesia	Jasa Pemeriksaan/ <i>Inspection services</i>
	PT Danareksa (Persero)	Jasa Keuangan / <i>Financial services</i>
	PT Sarana Bandar Nasional	Jasa Bongkar muat/ <i>Unloading services</i>
	BPKD Provinsi DKI Jakarta	Penjualan jasa/ <i>Sales</i>
	PT Multimedia Nusantara	Jasa Telekomunikasi & Informasi/ <i>IT services</i>
	PT Yodya Karya (Persero)	Konsultan/ <i>Consultant</i>
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Nindya Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Jasa pensiun/ <i>Pension services</i>
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Utama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Penjualan jasa/ <i>Sales</i>
	Direktorat Jenderal Pajak	Perpajakan/ <i>Taxation</i>
	Badan Layanan Umum Sekretariat Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Pinjaman/ <i>Loan</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/Government-related entity (continued)	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa/Sales
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa/Sales
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa/Sales
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa/Sales
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa/Sales
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa/Sales
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Virama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Krakatau Engineering Amarta Karya (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operation Activities
	PT Indonesia Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operation Activities	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pinjaman/Loan	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/Government-related entity (continued)	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman/Loan
	PT Taspen (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	BPJS Ketenagakerjaan	Penjualan jasa/Sales
	Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	Penjualan jasa/Sales
	PT Daya Radar Utama	Penjualan jasa/Sales
	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan Jasa/Sales
	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Petrokimia Gresik	Penjualan jasa/Sales
	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jasa Kesehatan/Health Service
	PT Prima Citra Nutrindo	Jasa Boga/Catering
	PT Bahtera Adhiguna	Penjualan Jasa/Sales
	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan Jasa/Sales
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Semen Tonasa	Penjualan Jasa/Sales
	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	Penjualan Jasa/Sales
	PT Pelni (Persero)	Penjualan Jasa/Sales
	Perusda-Aneka Usaha dan Jasa	Penjualan Jasa/Sales
	PT Petra Arun Gas	Penjualan Jasa/Sales
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Jasa keuangan dan pinjaman/ Financial services and loans

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/Government-related entity (continued)	Lembaga Manajemen Aset Negara	Piutang pembebasan Lahan/ Land acquisition receivables
	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Penjualan jasa/Sales
	PT Asuransi Kredit Indonesia	Jasa asuransi/Insurance Services
Entitas asosiasi/Associate entities	JICT	Sewa dan royalti/ Rental and royalty
	NPCT1	Investasi/Investment
	RSP	Kesehatan/Health services
	PHC	Jasa Kesehatan/Health Service
	KSO TPK KOJA	Penjualan/Sales
	BKMS	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities

Transaksi dengan pihak berelasi

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas (Catatan 5)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Transactions with related parties

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Cash and cash equivalent (Note 5)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)/ Percentage (%)*	
Bank							Cash in banks
Rupiah							Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.779.033.646	1,53	912.150.608	0,77	1.010.481.837	0,88	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.721.811.595	1,48	455.037.235	0,38	405.317.169	0,35	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	174.633.653	0,15	177.388.586	0,15	434.362.399	0,37	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	36.472.548	0,03	12.672.710	0,01	24.053.822	0,02	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	13.369.930	0,01	9.387.244	0,01	1.817.731	0,00	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Lain-lain	666.481	0,00	634.472	0,00	-	-	Others
Total	3.725.987.853	3,20	1.567.270.855	1,32	1.876.032.958	1,62	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

a. Kas dan setara kas (Catatan 5) (lanjutan)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

a. Cash and cash equivalent (Note 5) (continued)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Bank (lanjutan)							
Dolar AS							Cash in banks (continued)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	483.014.687	0,42	336.911.933	0,28	202.971.097	0,18	US Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20.050.440	0,02	12.901.807	0,01	26.977.820	0,02	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.460.745	0,01	39.879.104	0,03	38.504.509	0,03	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	-	2.819.753	0,00	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain	1.288.437	0,00	1.209.900	0,00	-	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Total	518.814.309	0,45	393.722.497	0,32	268.453.426	0,23	Others
							Total
Euro							Euro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	-	-	44	0,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	-	-	-	-	44	0,00	Total
Deposito Berjangka							Time Deposits
Rupiah							Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.594.189.481	2,23	550.611.127	0,46	741.324.758	0,64	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.576.448.731	2,22	1.597.705.368	1,24	2.002.052.020	1,64	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	944.053.995	0,81	804.089.799	0,67	662.986.573	0,58	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	865.288.338	0,74	866.602.921	0,73	980.171.663	0,86	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	210.707.845	0,18	78.752.087	0,07	311.290.490	0,27	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	-	-	426.000.000	0,36	125.900.000	0,11	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
Total	7.190.688.390	6,18	4.323.761.302	3,53	4.823.725.504	4,10	Total
Dolar AS							US Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	71.755.009	0,06	874.643.778	0,74	5.704.220.097	4,98	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	69.797.720	0,06	2.607.620.404	2,20	7.543.537.512	6,59	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.341.894	0,01	57.128.019	0,05	100.993.305	0,09	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	161.894.623	0,13	3.539.392.201	2,99	13.348.750.914	11,66	Total

*) dari total aset

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. Investasi jangka pendek (Catatan 6)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

b. Short-term investment (Note 6)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Deposito berjangka Rupiah						
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.500.000.000	1,29	500.000	0,00	104.642.400	0,90
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	150.000.000	0,13	-	-	-	-
Dolar AS						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.066.665.000	3,50	8.555.387.750	7,21	2.154.655.000	1,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.662.340	0,00	-	-	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	2.391.502.750	2,01	-	-
Total	5.718.327.340	4,92	10.947.390.500	9,22	2.259.297.400	2,78

*) dari total aset

*) from total assets

c. Piutang usaha (Catatan 7)

c. Trade receivables (Note 7)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Pembangunan Jawa Bali (PJB)	82.669.137	0,07	81.819.876	0,07	91.145.385	0,08
PT Djakarta Lloyd (Persero)	79.004.800	0,07	66.867.293	0,06	66.856.570	0,06
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	76.672.740	0,07	75.702.026	0,06	86.568.472	0,08
PT Pertamina Trans Kontinental	75.374.971	0,06	61.965.697	0,05	20.564.517	0,02
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	37.665.788	0,03	43.476.372	0,04	43.610.754	0,04
PT Petrokimia Gresik	31.723.908	0,03	31.723.908	0,03	35.995.746	0,03
PT Pertamina (Persero)	18.087.764	0,02	90.384.867	0,08	64.513.478	0,06
PT Daya Radar Utama	10.366.520	0,01	-	-	-	-
PCN	10.205.118	0,01	3.128.665	0,00	-	-
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	10.176.645	0,01	6.859.848	0,01	-	-
Tentara Nasional Indonesia	9.591.555	0,01	28.718.608	0,02	13.898.865	0,01
PT Bahtera Adhiguna	8.852.657	0,01	10.864.531	0,01	11.163.377	0,01
PT Perikanan Nusantara (Persero)	8.162.920	0,01	8.549.323	0,01	9.373.897	0,01
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	7.814.283	0,01	7.818.189	0,01	9.314.629	0,01
PT Semen Padang (Persero)	7.045.334	0,01	19.692.496	0,02	17.401.269	0,02
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	5.051.236	0,00	4.397.552	0,00	1.024.346	0,00
PT Dharma Lautan Nusantara	4.030.797	0,00	4.797.674	0,00	4.797.674	0,00
PT Semen Tonasa	3.589.727	0,00	525.973	0,00	21.594	0,00
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2.541.070	0,00	2.820.283	0,00	1.889.080	0,00
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.452.945	0,00	-	-	4.723.761	0,00
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2.148.780	0,00	2.697.354	0,00	1.448.414	0,00
PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	1.489.372	0,00	3.333.812	0,00	6.061.418	0,01

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Piutang usaha (Catatan 7) (lanjutan)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

c. Trade receivables (Note 7) (continued)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Instansi Pemerintah	1.323.926	0,00	1.917.562	0,00	190.719	0,00	Government Institutions
PT Kawasan Berikat Nusantara	1.166.210	0,00	-	-	-	-	PT Kawasan Berikat Nusantara
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	1.040.961	0,00	2.562.050	0,00	-	-	Ministry of Health Indonesia
PT Bukit Asam Tbk	714.416	0,00	606.642	0,00	606.642	0,00	PT Bukit Asam Tbk
BPJS Kesehatan	-	-	-	-	110.506.011	0,10	BPJS Kesehatan
Lain-lain	48.436.860	0,04	84.973.555	0,07	193.489.822	0,15	Others
Subtotal	547.400.440	0,47	646.204.156	0,54	795.166.440	0,69	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan Nilai	(284.270.735)	(0,24)	(366.851.667)	(0,32)	(228.155.423)	(0,20)	Less: Allowance for impairment
Total	263.129.705	0,23	279.352.489	0,22	567.011.017	0,49	Total

*) dari total aset

*) from total assets

d. Piutang lain-lain (Catatan 8)

d. Other receivables (Note 8)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Direktorat Jenderal Pajak	674.223.612	0,58	-	-	-	-	Directorate General of Taxes
BKMS	201.989.952	0,17	241.872.570	0,20	227.363.181	0,20	BKMS
LMAN	151.822.082	0,13	299.262.323	0,25	515.437.422	0,45	LMAN
JICT	73.637.145	0,06	740.736.508	0,62	659.701.914	0,58	JICT
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	52.267.802	0,04	52.267.802	0,04	52.267.802	0,05	Ministry of Transportation Directorate of Maritime Transport
Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	11.989.210	0,01	11.989.210	0,01	11.989.210	0,01	Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta
PT Djakarta Lloyd (Persero)	4.926.238	0,00	4.926.238	0,00	-	-	PT Djakarta Lloyd (Persero)
Instansi Pemerintah	2.508.645	0,00	2.511.770	0,00	2.688.218	0,00	Government Institutions
RSP	150.595	0,00	4.274.743	0,00	-	-	RSP
Tentara Nasional Indonesia	934.500	0,00	934.500	0,00	934.500	0,00	Indonesia Armed Forces
NPCT1	478.095	0,00	1.171.410	0,00	1.391.404	0,00	NPCT1
PT Nindya Karya (Persero)	-	-	8.745.745	0,01	-	-	PT Nindya Karya (Persero)
Lain-lain	67.365.022	0,06	59.867.710	0,05	94.765.396	0,08	Others
Subtotal	1.242.292.898	1,05	1.428.560.529	1,18	1.566.539.047	1,37	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(88.914.882)	(0,08)	(112.486.253)	(0,09)	(134.081.998)	(0,12)	Less: Allowance for impairment
Total	1.153.378.016	0,97	1.316.074.276	1,09	1.432.457.049	1,25	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

d. Piutang lain-lain (Catatan 8) (lanjutan)

Piutang dari Lembaga Manajemen Aset Negara ("LMAN") merupakan dana talangan yang telah dibayarkan oleh CTP kepada pemilik lahan dan akan diganti oleh LMAN sesuai dengan amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dimana CTP menyediakan dana talangan dengan nilai maksimum sebesar Rp4.560.709.011. Piutang ini digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 26).

e. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 10)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

d. Other receivables (Note 8) (continued)

Receivables from the State Assets Management Body ("LMAN") represent bailout funds that have been paid by CTP to land owners and will be reimbursed to LMAN in accordance with the Toll Operation Cibitung-Cilincing Toll Road Agreement amendments where CTP provides funding with a maximum of Rp4,560,709,011. These receivables used as collateral for bank loan (Note 26).

e. Accrued revenues (Note 10)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
PT Indonesia Power	17.731.187	0,02	2.477.438	0,00	1.779.312	0,00	PT Indonesia Power
KSO TPK Koja	2.023.775	0,00	-	-	-	-	KSO TPK Koja
JICT	1.410.041	0,00	8.058.465	0,01	2.600.380	0,00	JICT
BPJS Kesehatan	576.545	0,00	-	-	80.811.859	0,07	BPJS Kesehatan
PT Pertamina (Persero)	-	-	5.943.632	0,01	4.268.754	0,00	PT Pertamina (Persero)
Lainnya	11.641.773	0,02	51.410.332	0,04	33.954.200	0,03	Others
Total	33.383.321	0,04	67.889.867	0,06	123.414.505	0,10	Total

*) dari total aset

*) from total assets

f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 19)

f. Short-term bank loans (Note 19)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	-	-	-	28.193.914	0,00	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

***) dari total liabilitas

**) from total liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 19) (lanjutan)

Rukindo

Pada tanggal 30 April 2021, Rukindo memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. ("BTN") senilai Rp10.000.000 dengan suku bunga 2,00% di atas suku bunga agunan. Fasilitas ini dijamin dengan deposito senilai Rp12.000.000 dengan suku bunga deposito 3,25%. Pada tanggal 27 Oktober 2021, pinjaman ini telah dibayarkan seluruhnya.

Pada tanggal 28 Juli 2021, Rukindo memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN senilai Rp6.000.000 dengan suku bunga 2,00% di atas suku bunga agunan. Fasilitas ini dijamin dengan deposito senilai Rp8.500.000 dengan suku bunga deposito 3,25%. Pada tanggal 30 November 2021, pinjaman ini telah dibayarkan seluruhnya.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Rukindo memperoleh fasilitas pinjaman dari BTN senilai Rp6.000.000 dengan suku bunga 2,00% di atas suku bunga agunan. Fasilitas ini dijamin dengan deposito senilai Rp7.500.000 dengan suku bunga deposito 3,00%. Pada tanggal 30 November 2021, pinjaman ini telah dibayarkan seluruhnya.

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

- f. Short-term bank loans (Note 19) (continued)

Rukindo

On April 30, 2021, Rukindo obtained a loan facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk ("BTN") amounting to Rp10,000,000 with the equivalent interest rate of 2.00% above the collateral interest rate. This facility is collateralized by time deposits of Rp. 12,000,000 with an interest rate of 3.25%. As of October 27, 2021, this loan have been settled throughout.

On July 28, 2021, Rukindo obtained loan facility from BTN amounting to Rp6,000,000 with the equivalent interest rate of 2.00% above the collateral interest rate. This facility is collateralized by time deposits of Rp. 8,500,000 with an interest rate of 3.25%. As of November 30, 2021, this loan have been settled throughout.

On August 31, 2021, Rukindo obtained loan facility from BTN amounting to Rp6,000,000 with the equivalent interest rate of 2.00% above the collateral interest rate. This facility is collateralized by time deposits of Rp7,500,000 with an interest rate of 3.00%. As of November 30, 2021, this loan have been settled throughout.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

g. Utang usaha (Catatan 20)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

g. Trade payable (Note 20)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	976.412.332	1,37	1.658.107.772	2,12	2.019.192.453	2,75	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	532.060.366	0,78	953.254.016	1,22	971.717.599	1,32	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Waskita Beton Precast	111.703.005	0,15	149.137.513	0,19	267.227.953	0,36	PT Waskita Beton Precast
PT Wika Haka Joint Operation	80.051.325	0,11	-	-	-	-	PT Wika Haka Joint Operation
PT Pertamina Patraniaga	31.818.091	0,04	3.138.943	0,00	3.869.484	0,01	PT Pertamina Patraniaga
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	30.050.713	0,04	-	-	-	-	PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	17.947.428	0,02	17.947.727	0,02	13.703.333	0,02	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Pertamina (Persero)	14.693.889	0,02	37.803.219	0,05	17.664.437	0,02	PT Pertamina (Persero)
JICT	10.470.631	0,01	1.831.122	0,00	30.369	0,00	JICT
PT Brantas Abipraya (Persero)	8.957.552	0,01	15.399.700	0,02	77.857.274	0,11	PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	8.933.314	0,01	250.896.123	0,32	21.670.740	0,03	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7.811.099	0,01	7.990.599	0,01	55.749.774	0,08	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	6.800.078	0,01	17.048.004	0,02	22.646.004	0,03	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Koperasi Pegawai Maritim	6.647.447	0,01	6.535.465	0,01	4.772.648	0,01	Koperasi Pegawai Maritim
PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	6.476.575	0,01	-	-	-	-	PT Jasa Marga Tollroad Maintenance
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	6.258.858	0,01	8.824.970	0,01	7.166.473	0,01	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT Virama Karya (Persero)	5.187.290	0,01	-	-	-	-	PT Virama Karya (Persero)
PT Hutama Karya (Persero)	4.879.340	0,01	15.257.900	0,01	25.250.751	0,03	PT Hutama Karya (Persero)
RSP	4.254.408	0,01	11.770.706	0,02	-	-	RSP
Koperasi Pegawai PT Pelindo III	4.234.597	0,00	12.090.870	0,02	17.512.404	0,02	Koperasi Pegawai Pelindo III
PT Danareksa (Persero)	2.205.000	0,00	2.205.000	0,00	-	-	PT Danareksa (Persero)
Koperasi Karyawan TPK KOJA	1.939.442	0,00	1.972.257	0,00	478.459	0,00	Koperasi Karyawan TPK KOJA
PT Nusantara Regas	1.208.076	0,00	1.391.509	0,00	1.366.406	0,00	PT Nusantara Regas
PT Sarana Bandar Nasional	1.116.513	0,00	236.210	0,00	-	-	PT Sarana Bandar Nasional
PT Surveyor Indonesia (Persero)	858.959	0,00	2.022.002	0,00	3.106.596	0,00	PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	327.651	0,00	327.651	0,00	976.449	0,00	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
BPKD Provinsi DKI Jakarta	42.369	0,00	42.369	0,00	-	-	BPKD Provinsi DKI Jakarta
PT Djakarta Lloyd (Persero)	11.845	0,00	11.845	0,00	-	-	PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Sucofindo (Persero)	677.848	0,00	-	-	10.703.910	0,01	PT Sucofindo (Persero)
Lain-lain	42.314.170	0,06	92.577.476	0,12	129.495.652	0,17	Others
Total	1.926.350.211	2,70	3.267.820.968	4,16	3.672.159.168	4,98	Total

**) dari total liabilitas

**) from total liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

h. Uang untuk diperhitungkan (Catatan 21)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

h. Advances from customer (Note 21)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT Pertamina (Persero)	2.437.195	0,00	16.115.087	0,02	18.925.977	0,03	PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Patra Niaga	1.143.325	0,00	-	-	-	-	PT Pertamina Patra Niaga
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	756.582	0,00	30.241.645	0,04	1.054.036	0,00	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	446.500	0,00	-	-	466.718	0,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	109.939	0,00	30.207	0,00	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pelindo Husada Citra	3.833	0,00	310.641	0,00	-	-	PT Pelindo Husada Citra
Ambapers	-	-	255.199	0,00	-	-	Ambapers
PT Bahtera Adhiguna	-	-	2.171.448	0,00	-	-	PT Bahtera Adhiguna
Instansi Pemerintah	-	-	18.512	0,00	18.512	0,00	Government Institutions
PT Semen Padang	-	-	15.923	0,00	1.448	0,00	PT Semen Padang
Tentara Nasional Indonesia	-	-	371	0,00	708.865	0,00	Indonesian Armed Forces
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	-	-	-	-	49.603	0,00	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)
PT Pertamina Trans Kontinental	-	-	1.042	0,00	55.036	0,00	PT Pertamina Trans Kontinental
Lain-lain	3.167.576	0,00	10.130.820	0,01	19.828.608	0,03	Others
Total	8.064.950	0,00	59.290.895	0,07	41.108.803	0,06	Total

**) dari total liabilitas

**) from total liabilities

i. Uang titipan pelanggan (Catatan 23)

i. Deposits from customer (Note 23)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT Pertamina (Persero)	14.599.698	0,02	960.469	0,00	-	-	PT Pertamina (Persero)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5.000.000	0,01	-	-	-	-	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Asuransi Kredit Indonesia	3.914.953	0,01	-	-	-	-	Asuransi Kredit Indonesia
PT BNI Life Insurance	3.875.958	0,01	8.828.221	0,01	5.833.813	0,01	PT BNI Life Insurance
PT Pertamina Trans Kontinental	3.560.808	0,00	-	-	-	-	PT Pertamina Trans Kontinental
BPJS Ketenagakerjaan	3.109.284	0,00	4.366.521	0,01	-	-	BPJS Ketenagakerjaan

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

i. Uang titipan pelanggan (Catatan 23) (lanjutan)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

i. Deposits from customer (Note 23) (continued)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
DP4	1.754.067	0,00	-	-	-	-	DP4
BPJS Kesehatan	945.333	0,00	838.524	0,00	344.708	0,00	BPJS Kesehatan
PT Taspen (Persero)	937.111	0,00	8.828	0,00	-	-	PT Taspen (Persero)
PT Semen Tonasa	729.601	0,00	365.115	0,00	-	-	PT Semen Tonasa
TNI & Polri	144.496	0,00	-	-	-	-	TNI & Polri
Instansi Pemerintah	9.017	0,00	1.992.773	0,00	1.682.618	0,00	Government Institutions
PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	-	-	1.211.447	0,00	-	-	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)
Lain-lain	26.551.747	0,04	15.016.120	0,02	21.383.857	0,03	Others
Total	65.132.073	0,09	33.588.018	0,04	29.244.996	0,04	Total

**) dari total liabilitas

**) from total liabilities

j. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 23)

j. Other current liabilities (Notes 23)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	291.159.220	0,33	74.936.728	0,10	63.429.111	0,09	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero)	152.794.803	0,21	76.998.800	0,10	170.168.880	0,23	PT Wijaya Karya (Persero)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	142.416.505	0,19	72.024.980	0,09	14.637.235	0,02	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero)	128.776.800	0,12	37.000.000	0,05	-	-	PT Waskita Karya (Persero)
JICT	40.759.607	0,05	38.980.725	0,05	38.980.725	0,05	JICT
PHC	36.392.787	0,05	93.756.881	0,12	-	-	PHC
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	35.240.734	0,05	78.298.153	0,10	-	-	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,04	31.666.118	0,04	31.666.118	0,04	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Brantas Abipraya (Persero)	25.187.500	0,03	28.727.964	0,04	40.883.828	0,06	PT Brantas Abipraya (Persero)
Instansi Pemerintah	5.826.282	0,01	8.322.909	0,01	5.164.073	0,01	Government Institutions
PT Krakatau Engineering Amarta Karya (Persero)	5.165.084	0,01	62.066.662	0,08	-	-	PT Krakatau Engineering Amarta Karya (Persero)
PT Nindya Karya (Persero)	3.795.525	0,01	17.793.511	0,02	79.575.063	0,11	PT Nindya Karya (Persero)
PT Virama Karya (Persero)	2.652.991	0,00	1.024.274	0,00	-	-	PT Virama Karya (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	463.709	0,00	824.890	0,00	-	-	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	329.150	0,00	976.449	0,00	-	-	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Sucofindo (Persero)	272.727	0,00	2.184.800	0,00	-	-	PT Sucofindo (Persero)
PT Hutama Karya (Persero)	-	-	91.431.990	0,12	-	-	PT Hutama Karya (Persero)
DP4	-	-	1.084.174	0,00	2.714.983	0,00	DP4

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- j. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 23) (lanjutan)

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

- j. Other current liabilities (Notes 23) (continued)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
Lain-lain	98.246.035	0,13	178.378.252	0,23	132.016.256	0,18	Others
Total	1.001.145.577	1,24	896.478.260	1,15	579.236.272	0,79	Total

**) dari total liabilitas

***) from total liabilities

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan No.024/Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Other current liabilities to PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) represents a shortage of payment of compensation to DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No.HK.566/27/11/PI.II-11 and No.024/Kontr/I/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DP4 merupakan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan denda atas program pensiun Rukindo.

Other current liabilities to DP4 represents an obligation on the principal installments and penalties for pension program of Rukindo.

- k. Liabilitas jangka panjang lainnya (Catatan 29)

- k. Other long-term liabilities (Notes 29)

Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/ January 1, 2020/ December 31, 2019		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
BLU Set-BPJT	466.538.398	0,63	466.538.398	0,60	441.350.272	0,60	BLU Set-BPJT
Total	466.538.398	0,63	466.538.398	0,60	441.350.272	0,60	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

i. Remunerasi personil manajemen kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Kelompok Usaha adalah sebesar Rp526.692.113, Rp706.084.073 dan Rp722.747.152 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019.

**45. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

i. Key management personnel remuneration

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp526,692,113, Rp706,084,073 and Rp722,747,152 for the year ended December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019.

**46. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**46. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

31 Desember 2021/ December 31, 2021

		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	47.943.930	684.111.943	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	USD	285.116.500	4.068.327.340	Short-term investments
Piutang usaha	USD	6.295.571	89.831.507	Trade receivables
Total aset			4.842.270.790	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang obligasi	USD	2.600.000.000	37.099.400.000	Bonds payables
Utang usaha	USD	22.102.199	315.376.275	Trade payables
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.888	230.970.700	Other long-term liabilities
Total liabilitas			37.645.746.975	Total liabilities
Liabilitas neto			32.803.476.185	Net liabilities

**31 Desember 2020/
December 31, 2020
Disajikan kembali - Catatan 4/
As restated - Note 4**

		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	315.408.956	4.448.920.885	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	USD	776.100.000	10.946.890.500	Short-term investments
Piutang usaha	USD	2.345.761	33.086.965	Trade receivables
Total aset			15.428.898.350	Total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**46. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING (lanjutan)**

**46. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

		31 Desember 2020/ December 31, 2020 Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	2.600.000.000	36.673.000.000	Bonds payables	
Utang usaha	USD	28.386.682	400.394.149	Trade payables	
	EUR	8.000	138.641		
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	10.450.750	147.407.829	Other short-term liabilities	
	EUR	2.234.472	38.723.400		
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.876	228.315.886	Other long-term liabilities	
Total liabilitas			37.487.979.905	Total liabilities	
Liabilitas neto			22.059.081.555	Net liabilities	

		1 Januari 2020/31 Desember, 2019/ January 1, 2020/December 31, 2019 Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan setara kas	USD	986.779.239	13.717.218.205	Cash and cash equivalents	
	EUR	3	44		
Investasi jangka pendek	USD	155.000.000	2.154.655.000	Short-term investments	
Piutang usaha	USD	5.266.097	75.141.944	Trade receivables	
	SGD	7.645	78.902		
Piutang lain-lain	USD	863.760	12.007.128	Other receivables	
Total aset			15.959.101.223	Total assets	
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	2.600.000.000	36.142.600.000	Bonds payables	
Utang usaha	USD	66.446.192	923.668.515	Trade payables	
	EUR	7.999	124.704		
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	10.840.166	150.689.147	Other short-term liabilities	
	EUR	79.912	1.245.748		
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.135.814	224.303.950	Other long-term liabilities	
Total liabilitas			37.442.632.064	Total liabilities	
Liabilitas neto			21.483.530.841	Net liabilities	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Kelompok Usaha:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Aset Keuangan				Financial Assets
Kas dan setara kas	12.922.388.587	11.613.056.790	21.820.013.924	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	5.718.525.973	11.094.379.218	2.624.641.107	Short-term investments
Piutang usaha - neto	1.516.262.546	1.556.958.482	1.994.420.168	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	1.280.366.535	1.419.602.475	1.670.636.060	Other receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	330.968.482	503.784.713	560.692.444	Accrued revenues
Aset lancar lainnya	1.244.900	4.100.129	2.161.748	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	428.028	2.682.470	4.080.847	Other non-current assets
Total	21.770.185.051	26.194.564.277	28.676.646.298	Total

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	5.196.855	4.000.000	34.193.914	Short-term bank loans
Utang usaha	3.264.492.275	4.954.024.326	6.716.274.520	Trade payables
Beban akrual	3.699.192.020	3.664.488.679	3.838.675.350	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	2.248.710.446	1.953.980.628	1.370.628.359	Other current liabilities
Utang bank jangka panjang	6.656.343.511	11.128.996.490	8.613.919.696	Long-term bank loan
Utang obligasi	40.176.176.480	40.198.948.551	39.615.134.308	Bonds payable
Utang lembaga keuangan non-bank	1.426.042.655	1.002.703.343	651.770.408	Loan from non-bank financial institution
Liabilitas jangka panjang lainnya	968.389.200	792.645.412	702.551.614	Other non-current liabilities
Liabilitas sewa	333.885.712	394.725.913	-	Lease liabilities
Total	58.778.429.154	64.094.513.342	61.543.148.169	Total

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek - deposito berjangka, investasi jangka pendek - aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang - entitas asosiasi, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Investasi jangka pendek - efek yang diperdagangkan dan investasi jangka panjang - penyertaan saham dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar. Investasi jangka panjang - surat utang dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
- Estimasi nilai wajar utang obligasi, liabilitas sewa, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

**47. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments - time deposits, short-term investments – financial assets measured at fair value through profit or losses, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investments - associates, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discounting.
- Short-term investments - marketable securities and long-term investments - investment in share of stocks are presented at fair value using market price quotation. Long-term investments - bonds are presented at fair value by reference to similar bond price at reporting date.
- The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.
- The estimated fair values of bonds payable, lease liability, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Estimasi nilai wajar bersifat *judgemental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Kelompok Usaha akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.
- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, hirarki nilai wajar Kelompok Usaha untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

**47. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

Fair value estimation is judgemental and involving various boundaries, including:

- *Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.*
- *Fair value estimation are not always indicating value that the Group will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.*
- *Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs)*

As of December 31, 2021 and 2020, fair value hierarchy of the Group for assets which fair value were disclosed are as follows:

31 Desember 2021/December 31, 2021				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar				Non-current Assets
Properti investasi (Catatan 13)	873.433.978	-	873.433.978	- Investment properties (Note13)
31 Desember 2020/December 31, 2020				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar				Non-current Assets
Properti investasi (Catatan 13)	867.416.746	-	867.416.746	- Investment properties (Note13)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Tingkat 1 dan Tingkat 2 dan tidak ada pengalihan dari Tingkat 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan berdasarkan nilai wajar selain yang telah dijelaskan di atas.

**48. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN**

Kelompok Usaha terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Kelompok Usaha. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Kelompok Usaha bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Kelompok Usaha. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang USD.

**47. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

As of December 31, 2021, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed based on fair value other than above explained.

**48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES**

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in USD.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**48. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 46. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ (Increases) decreases on foreign exchange rates
Perubahan kurs mata uang asing 2021	(+)-100bps (-)-100bps
Perubahan kurs mata uang asing 2020	(+)-100bps (-)-100bps
Perubahan kurs mata uang asing 2019	(+)-100bps (-)-100bps

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

**48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Cash flows interest rate risk (continued)

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 46. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

	Dampak/ Effect	
Perubahan kurs mata uang asing 2021	(328.034.762) 328.034.762	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2021</i>
Perubahan kurs mata uang asing 2020	(220.591.588) 220.591.588	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2020</i>
Perubahan kurs mata uang asing 2019	(213.710.050) 213.710.050	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2019</i>

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**48. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Kelompok Usaha yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2021.

	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Total
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	
Aset					
Kas dan setara kas	12.922.388.587	-	-	-	12.922.388.587
Investasi jangka pendek	-	-	5.718.525.973	-	5.718.525.973
Total aset	12.922.388.587	-	5.718.525.973	-	18.640.914.560
Liabilitas					
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	5.196.855	-	5.196.855
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	-	2.248.710.446	-	2.248.710.446
Utang bank jangka panjang	-	-	2.365.898.747	6.656.343.511	9.022.242.258
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	-	968.389.202	968.389.202
Liabilitas sewa	-	-	76.345.578	257.540.134	333.883.712
Obligasi	-	-	-	40.176.176.480	40.176.176.480
Total liabilitas	-	-	4.696.151.626	48.058.449.327	52.754.598.953

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Kelompok Usaha mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Kelompok Usaha dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

**48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2021.

	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Total
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	
Assets					
Cash and cash equivalent	12.922.388.587	-	-	-	12.922.388.587
Short-term investments	-	-	5.718.525.973	-	5.718.525.973
Total assets	12.922.388.587	-	5.718.525.973	-	18.640.914.560
Liabilities					
Short-term bank loan	-	-	5.196.855	-	5.196.855
Other current liabilities	-	-	2.248.710.446	-	2.248.710.446
Long-term bank loan	-	-	2.365.898.747	6.656.343.511	9.022.242.258
Other long-term liabilities	-	-	-	968.389.202	968.389.202
Lease liabilities	-	-	76.345.578	257.540.134	333.883.712
Bonds	-	-	-	40.176.176.480	40.176.176.480
Total liabilities	-	-	4.696.151.626	48.058.449.327	52.754.598.953

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**48. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Kredit (lanjutan)

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 Desember 2021/ December 31 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Aset Keuangan				Financial Assets
Kas dan setara kas	12.922.388.587	11.613.056.790	21.820.013.924	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	5.718.525.973	11.094.379.218	2.624.641.107	Short-term investments
Piutang usaha - neto	1.516.262.546	1.556.958.482	1.994.420.168	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	1.280.366.535	1.419.602.475	1.670.636.060	Other receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	330.968.482	503.784.713	560.692.444	Accrued revenues
Aset lancar lainnya	1.244.900	4.100.129	2.161.748	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	428.028	2.682.470	4.080.847	Other non-current assets
Total	21.770.185.051	26.194.564.277	28.676.646.298	Total

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Kelompok Usaha saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Kelompok Usaha.

Selain itu, Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

**48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Credit Risk (continued)

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follow:

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**48. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

	2021				Jumlah/ Total	
	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years		
Pinjaman bank jangka pendek	5.196.855	-	-	-	5.196.855	Short-term bank loan
Utang usaha	3.264.492.275	-	-	-	3.264.492.275	Trade payables
Beban akrual	3.699.192.020	-	-	-	3.699.192.020	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	2.248.710.446	-	-	-	2.248.710.446	Other short-term liabilities
Utang obligasi	-	-	-	40.176.176.480	40.176.176.480	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	962.389.202	-	-	962.389.202	Other Long-term liabilities
Liabilitas sewa	76.345.578	257.540.134	-	-	333.885.712	Lease liabilities
Total	9.293.937.174	1.219.929.336	-	40.176.176.480	50.690.042.990	Total

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Kelompok Usaha mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Kelompok Usaha dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur permodalan Kelompok Usaha terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, modal donasi, tambahan modal disetor, dan saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya).

**48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity Risk (continued)

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

Capital management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owners of the Parent (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI

a) Kalibaru

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penugasan kepada Perusahaan untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengadakan Perjanjian Pemberian Konsesi untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/PI.II-12 (Perjanjian Konsesi) dimana Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok memberikan hak kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh para pihak.
- Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok berupa bank garansi sebesar Rp37.000.000 dan berlaku sampai dengan 15 Januari 2019. Yang kemudian diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2027. Jaminan pelaksanaan tersebut dicatat oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai bagian dari akun "Aset tidak lancar lainnya" (Catatan 18).

49. CONCESSION AGREEMENTS

a) Kalibaru

Based on Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 36 Tahun 2012 dated April 5, 2012 regarding Assignment to the Company to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port, on August 31, 2012, the Company (formerly Pelindo II) entered into a Concession Agreement to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port with the Office of Tanjung Priok Main Port Authority (Tanjung Priok Port Authority) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.566/15/11/PI.II-12 (Concession Agreement) in which the Tanjung Priok Port Authority granted rights to the Company (formerly Pelindo II), including the right to execute the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of executing the project without limiting the right of Tanjung Priok Port Authority in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law. Important conditions in the Concession Agreement are as follows:

- *Concession Agreement is valid for 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the required technical documents, financial documents, and performance bonds by the parties.*
- *Under the Concession Agreement, the Company (formerly Pelindo II) is required to submit a performance bond for development of Kalibaru terminal to the Tanjung Priok Port Authority in the form of bank guarantee amounting to Rp37,000,000 and is valid until January 15, 2019. Which was extended until December 31, 2027. The performance bond is recorded by the Company (formerly Pelindo II) as part of "Other non-current assets" (Note 18).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

a) Kalibaru (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok berupa pendapatan konsesi sebesar 0,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kalibaru.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan untuk membangun:
 - Infrastruktur, termasuk pekerjaan pemecah gelombang, pekerjaan pengerukan, jalan akses, reklamasi dan dermaga.
 - Suprastruktur, termasuk *container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical dan information communications technology.*
 - Kapal dan fasilitas pendukung lainnya.
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) berhak mengadakan kerjasama kemitraan, sewa dan perjanjian serupa lainnya dengan kontraktor, mitra kerjasama dan anak perusahaan yang didirikan serta pihak ketiga lainnya.
- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok untuk memberikan masukan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengenakan dan memungut tarif area konsesi di dalam area konsesi.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

a) Kalibaru (continued)

- *The Company (formerly Pelindo II) is required to pay to Tanjung Priok Port Authority, in form of concession revenues, 0.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kalibaru terminal.*
- *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company (formerly Pelindo II) is required to build:*
 - *Infrastructure, including breakwater works, dredging works, access roads, reclamation and piers.*
 - *Superstructure, including container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical and information communications technology.*
 - *Vessels and other supporting facilities.*
- *The Company (formerly Pelindo II) has the rights to enter into partnership cooperation, rental and similar agreements with contractors, partners and subsidiaries established as well as with other third parties.*
- *The initial rate applied in the concession area is set by the Company (formerly Pelindo II) based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.*
- *Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company (formerly Pelindo II) based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.*
- *The Company (formerly Pelindo II) will consult with the Tanjung Priok Port Authority regarding the rate before being applied to service users in order to provide opportunity for the Tanjung Priok Port Authority to provide advice.*
- *The Company (formerly Pelindo II) by its own discretion has the right to impose and levy concession rate within the concession area.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

a) Kalibaru (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo II) dapat memberikan wewenang kepada mitra kerjasama sehubungan dengan tarif area konsesi, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok akan mengadakan kerjasama pemanfaatan dan pengoperasian dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) selama 25 tahun yang akan dimulai segera setelah berakhirnya jangka waktu konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo II) wajib:
 - Menyerahkan penguasaannya atas tanah reklamasi secara damai dan dalam keadaan kosong bersamaan dengan area konsesi dan infrastruktur area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
 - Menyerahkan penguasaannya atas aset tidak bergerak yang dimiliki Perusahaan (dahulu Pelindo II) secara damai di dalam area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
 - Aset bergerak dalam area konsesi yang dimiliki oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II), Perusahaan (dahulu Pelindo II) dapat memilih dengan kebijaksanaannya sendiri, untuk mempertahankan hak, kepemilikan dan kepentingan atas aset bergerak dengan memindahkan atau mengeluarkan aset bergerak tersebut dari area konsesi, atau dapat menawarkan aset bergerak tersebut untuk dibeli oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dengan harga buku atau nilai wajar, yang mana lebih rendah.
 - Menyerahkan kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok seluruh dokumen terkait pengoperasian proyek.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

a) Kalibaru (continued)

- *The Company (formerly Pelindo II) may authorize cooperation partners in connection with the rate within the concession area, with condition that the implementation of such authority must be approved by the Company (formerly Pelindo II) and in accordance with applicable legislation.*
- *At the end of the concession period, the Tanjung Priok Port Authority will enter into a cooperation and operation with the Company (formerly Pelindo II) for 25 years, which will begin immediately after the expiration of the concession.*
- *At the end of the concession period, the Company (formerly Pelindo II) is obliged to:*
 - *Transfer the authorization of the reclamation land to the Tanjung Priok Port Authority in an empty condition and free of encumbrance, along with the concession area and concession area infrastructure free of any form of charges.*
 - *Transfer the authorization of the intangible assets of the Company (formerly Pelindo II) to the Tanjung Priok Port Authority free of encumbrance within the concession area and free of any form of charges.*
 - *For movable assets owned by the Company (formerly Pelindo II) within the concession area, the Company (formerly Pelindo II) may choose with its own discretion, to retain the rights, title and interest in movable assets by moving or removing the movable assets from the concession area, or may offer the movable assets to be purchased by the Tanjung Priok Port Authority with book value or fair value, whichever is lower.*
 - *Transfer all documents related to the operation of the project to the Tanjung Priok Port Authority.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

a) Kalibaru (lanjutan)

- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib: (lanjutan)
- Mengalihkan atau menyebabkan dialihkannya kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
- Memindahkan atau mengeluarkan dari area konsesi semua aset bergerak yang ingin dipindahkan atau dikeluarkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II).

b) Kijing

Pada tanggal 12 Juli 2018, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak (Otoritas Pelabuhan Pontianak) mengadakan Perjanjian Konsesi tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Perjanjian Konsesi Kijing) dimana Otoritas Pelabuhan Pontianak memberikan hak kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) termasuk hak untuk melaksanakan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak beserta fasilitas pendukungnya pada area konsesi.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi Kijing adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi Kijing berlaku selama 69 (enam puluh sembilan) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Konsesi Kijing.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan untuk membangun:
 - Infrastruktur, termasuk jalan akses, dermaga, trestel, lapangan penumpukan dan fasilitas lainnya.
 - Suprastruktur, termasuk peralatan di terminal *multipurpose*, terminal petikemas, terminal curah kering dan terminal curah cair, *electrical mechanical* serta *information communications technology*.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

a) Kalibaru (continued)

- *At the end of the concession period, the Company is obliged to: (continued)*
 - *Transfer or effectively cause transfer of contracts made with third parties to the Tanjung Priok Port Authority.*
 - *Move or take out from the concession area all current assets which the Company (formerly Pelindo II) decides to move or take out.*

b) Kijing

On July 12, 2018, the Company (formerly Pelindo II) and Port Authority Office Class II Pontianak (Pontianak Port Authority) entered into a Concession Agreement of Construction and Operation of Port Services of Terminal Kijing Pontianak Port, West Kalimantan Province (Kijing Concession Agreement) in which the Pontianak Port Authority granted rights to the Company (formerly Pelindo II), including the right to execute construction and operation of port services as well as development of Kijing Terminal Pontianak Port including its supporting facilities in the concession area.

Important provisions in the Kijing Concession Agreement are as follows:

- *Kijing Concession Agreement is valid for 69 (sixty nine) years from the signing date of the Kijing Concession Agreement.*
- *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company (formerly Pelindo II) is required to build:*
 - *Infrastructure, including access roads, piers, trestle, dock yard and other facilities.*
 - *Superstructure, including equipment in multipurpose terminal, container terminal, dry bulk terminal and liquid bulk terminal, electrical mechanical and information communications technology.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

b) Kijing (lanjutan)

- Penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan di terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.
- Lahan pada area konsesi akan diterbitkan HPL atas nama Otoritas Pelabuhan Pontianak dan HGB atas nama Perusahaan (dahulu Pelindo II).
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) berhak mengadakan kerjasama kemitraan dengan mitra kerjasama dan entitas anak Perusahaan (dahulu Pelindo II).
- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan (dahulu Pelindo II) berhak mengenakan dan memungut tarif jasa kepelabuhanan di dalam area konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo II) wajib menyerahkan seluruh aset di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan Pontianak.

c) Tanjung Priok - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo II)

Pada tanggal 11 November 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok) telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) (Perjanjian Konsesi), yang telah diadendum tanggal 15 Juli 2016, yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

b) Kijing (continued)

- *Provision and maintenance of shipping navigation channel and port basin at Kijing Terminal Pontianak Port.*
- *Land in the concession area will be issued HPL under Pontianak Port Authority and HGB under the Company (formerly Pelindo II).*
- *The Company (formerly Pelindo II) has the rights to enter into partnership cooperation with partners and subsidiaries of the Company (formerly Pelindo II).*
- *The initial rate applied in the concession area is set by the Company (formerly Pelindo II) based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.*
- *Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company (formerly Pelindo II) based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.*
- *The Company (formerly Pelindo II) has the right to impose and levy port services rate within the concession area.*
- *At the end of the concession period, the Company (formerly Pelindo II) is obliged to transfer all assets within concession area to the Pontianak Port Authority.*

c) Tanjung Priok - Port Operated by The Company (formerly Pelindo II)

On November 11, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and Tanjung Priok Main Port Authority Office (Tanjung Priok Port Authority) has signed Concession Agreement regarding Operational Activities at Port that was operated by the Company (formerly Pelindo II) (Concession Agreement), which has been amended on July 15, 2016, which includes granting rights from the Tanjung Priok Port Authority to the Company (formerly Pelindo II) to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

c) Tanjung Priok - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo II) (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut, jangka waktu konsesi adalah 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan untuk membayar pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi pada masing-masing pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap 3 (tiga) bulan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor dari pelaksanaan kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi.

Pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi ini, seluruh aset Perusahaan (dahulu Pelindo II) di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan (dahulu Pelindo II), tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan (dahulu Pelindo II).

d) Belawan - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo I)

Pada tanggal 9 November 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan ("Otoritas Pelabuhan Belawan") telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) (Perjanjian Konsesi Belawan), yang telah diaddendum tanggal 16 Juni 2016 dan 12 Juli 2017, mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan Belawan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo I) untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

c) Tanjung Priok - Port Operated by The Company (formerly Pelindo II) (continued)

Based on the Concession Agreement, the concession period is 50 (fifty) years from the date of agreement signing and the Company (formerly Pelindo II) is obliged to pay concession revenue obtained from the port operation at concession area on each port to Tanjung Priok Port Authority as Non-tax State Revenue every 3 (three) months amounting to 2.5% of gross revenue from port operation at concession area.

At the end of Concession Agreement, all the Company's (formerly Pelindo II) assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's (formerly Pelindo II) assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company (formerly Pelindo II).

d) Belawan - Port Operated by The Company (formerly Pelindo I)

On November 9, 2015, the Company (formerly Pelindo I) and Belawan Main Port Authority Office ("Belawan Port Authority") has signed Concession Agreement regarding Operational Activities at Port that was operated by the Company (formerly Pelindo I) (Belawan Concession Agreement), which has been amended on June 16, 2016 and July 12, 2017, which includes grants of rights from Belawan Port Authority to the Company (formerly Pelindo I) to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

**d) Belawan - Pelabuhan yang Diusahakan
Perusahaan (dahulu Pelindo I) (lanjutan)**

Berdasarkan Perjanjian Konsesi Belawan tersebut, jangka waktu konsesi adalah 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan Perusahaan (dahulu Pelindo I) diharuskan untuk membayar pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi pada masing-masing pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan Belawan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap 3 (tiga) bulan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor dari pelaksanaan kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi.

Pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi Belawan ini, seluruh aset Perusahaan (dahulu Pelindo I) di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan (dahulu Pelindo I), tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan (dahulu Pelindo I).

e) Kuala Tanjung

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung ("Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung") No. HK.107/1/1/KSOP.KIG-15 dan No. US.15/1/7/PI-15.TU tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung ("Perjanjian Konsesi Kuala Tanjung") dan addendumnya tanggal 16 November 2016 untuk mengubah judul perjanjian kerjasama menjadi Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Kuala Tanjung, Perusahaan (dahulu Pelindo I) telah memperoleh hak konsesi untuk melakukan kegiatan pengusahaan dermaga pada terminal *multipurpose* di Pelabuhan Kuala Tanjung, dengan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut:

- Periode perjanjian adalah selama 69 (enam puluh sembilan) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian, dengan rincian sebagai berikut:

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

**d) Belawan - Port Operated by The Company
(formerly Pelindo I) (continued)**

Based on the Belawan Concession Agreement, the concession period is 30 (thirty) years from the date of agreement signing and the Company (formerly Pelindo I) is obliged to pay concession revenue obtained from the port operation at concession area on each port to Belawan Port Authority as Non-tax State Revenue every 3 (three) months amounting to 2.5% of gross revenue from port operation at concession area.

At the end of Belawan Concession Agreement, all the Company's (formerly Pelindo I) assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's (formerly Pelindo I) assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company (formerly Pelindo I).

e) Kuala Tanjung

Based on the agreement between the Company (formerly Pelindo I) and the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia which represented by the Harbormaster and Port Authority Office of Kuala Tanjung ("Kuala Tanjung Port Authority") No. HK.107/1/1/KSOP.KIG- 15 or No. US.15/1/7/PI-15.TU dated January 23, 2015 related to Port Operation at Liquid Bulk Port in Kuala Tanjung Port ("Kuala Tanjung Concession Agreement" and its amendment dated November 16, 2016 to change the title of the cooperation agreement to Port Service Operation at Kuala Tanjung Port, the Company (formerly Pelindo I) has obtained concession rights to conduct port activities at multipurpose terminal at Kuala Tanjung Port, with provisions in this agreement, as follows:

- *Agreement period is of 69 (sixty-nine) years from the date of agreement signing, with the following details:*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

e) Kuala Tanjung (lanjutan)

- a) Masa prakonstruksi dan masa konstruksi paling lambat selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian; dan
 - b) Masa operasi terhitung sejak diterimanya izin pengoperasian terminal *multipurpose* sampai dengan berakhirnya periode perjanjian.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan sipil secara proporsional terhadap progress pembangunan.
 - Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar *fee* konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor diluar Pajak Pertambahan Nilai atas pengoperasian dermaga pada terminal *multipurpose* terhitung sejak tanggal kegiatan pengoperasian komersial.
 - Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar PNBPN atas kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor terhitung sejak bulan ke-49 (empat puluh sembilan) setelah tanggal penandatanganan kerjasama.
 - Perusahaan (dahulu Pelindo I) diberikan hak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dan/atau bermitra dengan badan usaha atau afiliasi yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan kegiatan kepelabuhanan dengan persetujuan tertulis oleh Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung.
 - Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

e) Kuala Tanjung (continued)

- a) *The pre-construction period and construction period is no later than 48 (forty eight) months, starting from the signing of the agreement; and*
 - b) *Operation period commencing from the receipt of the multipurpose terminal operating license until the end of the agreement.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to put security deposit amounting 1% from the project amount of civil construction proportionally to the construction progress.*
 - *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay concession fee amounting 2.5% from the gross revenue exclude Value Added Tax for the operational of wharves in the multipurpose terminal started from the date of commercial operation.*
 - *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay PNBPN from port service activities amounting 2.5% from gross revenue started on the 49th (forty ninth) month after the date of agreement signing.*
 - *The Company (formerly Pelindo I) were given rights to enter into agreement with other party and/or engage in partnership with other business entity or affiliate with competency to operates in port activities with written agreement from Kuala Tanjung Port Authority.*
 - *The initial tariffs to be applied in the concession area are determined by the Company (formerly Pelindo I) based on the type, structure and class of tariffs determined by Minister of Transportation.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

e) Kuala Tanjung (lanjutan)

- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) secara periodik setiap 2 (dua) tahun atau dalam kondisi-kondisi tertentu dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung dan dikonsultasikan kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung untuk memberikan masukan.
- Dalam hal jangka waktu konsesi berakhir, area konsesi dan seluruh aset dalam area konsesi sebagaimana tercantum pada Perjanjian Konsesi Kuala Tanjung akan diserahkan kepada Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f) Belawan Fase II

Pada tanggal 4 April 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan Otoritas Pelabuhan Belawan menandatangani Perjanjian Pengusahaan Terminal Belawan Fase II Pelabuhan Utama Belawan No. PR.801/1/9/OP.BLW-14 dan No. PR.02/1/15/PI-14 ("Perjanjian Konsesi Belawan Fase II") dan addendumnya tanggal 9 Februari 2016 dan 7 Mei 2018, Otoritas Pelabuhan Belawan memberikan hak konsesi kepada Perusahaan (dahulu Pelindo I) atas pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Fase II yang meliputi:

- i) Dermaga sepanjang 350m;
- ii) Causeway;
- iii) Container yard dan utilitas;
- iv) Peralatan; dan
- v) Instalasi teknologi informasi.
dengan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut:

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

e) Kuala Tanjung (continued)

- *Adjustments on tariff applied in the concession area can be carried out by the Company (formerly Pelindo I) periodically every 2 (two) years or under certain conditions by first notifying the Kuala Tanjung Port Authority and consulting the Minister of Transportation in accordance with the law and regulations.*
- *The Company (formerly Pelindo I) will consult with the Kuala Tanjung Port Authority regarding the tariff before its applied to the customer to provide opportunity for the Kuala Tanjung Port Authority to provide input and recommendation.*
- *In the event of the concession period expires, the concession area and all the assets inside the area as stipulated in the Kuala Tanjung Concession Agreement shall be handed to the Kuala Tanjung Port Authority in accordance with law and regulations.*

f) Belawan Phase II

On April 4, 2014, the Company (formerly Pelindo I) and Belawan Port Authority signed Agreement of Terminal Operation for Belawan Phase II Main Port Belawan No. PR.801/1/9/OP-BLW-14 and No. PR.02/1/15/PI-14 ("Belawan Phase II Concession Agreement") and its amendment dated February 9, 2016 and May 7, 2018, Belawan Port Authority grant concession rights to the Company (formerly Pelindo I) for Belawan Phase II container terminal operation which includes:

- i) 350m long jetty;*
- ii) Causeway;*
- iii) Container yard and utilities;*
- iv) Equipments; and*
- v) Information technology installation.
with terms in the agreement as follow:*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

f) Belawan Fase II (lanjutan)

Ketentuan dalam perjanjian diantaranya:

- Periode Perjanjian Konsesi Belawan Fase II adalah 70 (tujuh puluh) tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pembangunan Pekerjaan Sipil.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 1% dari Nilai Kontrak pekerjaan sipil secara proporsional terhadap progress pembangunan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membangun Terminal Petikemas Belawan Fase II di area konsesi.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membangun Terminal Petikemas Belawan Fase II di area konsesi.
- Jangka waktu pembangunan adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar *fee* konsesi sebesar 0,5% dari pendapatan kotor dengan periode triwulan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar PNBP atas kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan sebesar 0,5% dari pendapatan kotor terhitung sejak tanggal pengoperasian terminal.
- Jangka waktu pembangunan adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar *fee* konsesi sebesar 0,5% dari pendapatan kotor dengan periode triwulan.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

f) Belawan Phase II (continued)

The agreement arrangement are among others:

- *Belawan Phase II Concession Agreement period is 70 (seventy) years upon the date of signing of Minutes of Initiation of Civil Construction.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to put Security Deposit amounting 1% from the Project Amount of civil construction proportionally to the construction progress.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to build and develop Container Terminal Belawan Phase II in the concession area.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to build and develop Container Terminal Belawan Phase II in the concession area.*
- *The construction period is 36 (thirty six) months.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay concession fee amounting 0.5% from the gross revenue in quarterly term.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay PNBP from port service activities amounting 0.5% from gross revenue started on the date of terminal operation.*
- *The construction period is 36 (thirty six) months.*
- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay concession fee amounting 0.5% from the gross revenue in quarterly term.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

f) Belawan Fase II (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diwajibkan untuk membayar PNBK atas kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan sebesar 0,5% dari pendapatan kotor terhitung sejak tanggal pengoperasian terminal.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) diberikan hak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dan/atau bermitra dengan badan usaha atau afiliasi tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban Perusahaan (dahulu Pelindo I) atas pelaksanaan Perjanjian Konsesi Belawan Fase II.
- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo I) secara periodik setiap 2 (dua) tahun atau dalam kondisi-kondisi tertentu dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Otoritas Pelabuhan Belawan dan dikonsultasikan kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo I) akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan Belawan sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan Belawan untuk memberikan masukan.
- Dalam hal jangka waktu konsesi berakhir, area konsesi dan seluruh aset dalam area konsesi, kecuali atas aset yang diperoleh diluar investasi yang diperjanjikan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Konsesi Belawan Fase II, akan diserahkan kepada Otoritas Pelabuhan Belawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

f) Belawan Phase II (continued)

- *The Company (formerly Pelindo I) are obliged to pay PNBK from port service activities amounting 0.5% from gross revenue started on the date of terminal operation.*
- *The Company (formerly Pelindo I) were given rights to enter into agreement with other party and/or engage in partnership with other business entity or affiliate without eliminating the responsibilities and obligations of the Company (formerly Pelindo I) regarding the enforcement of the Belawan Phase II Concession Agreement.*
- *The initial tariffs to be applied in the concession area are determined by the Company (formerly Pelindo I) based on the type, structure and class of tariffs determined by Minister of Transportation.*
- *Adjustments on tariff applied in the concession area can be carried out by the Company (formerly Pelindo I) periodically every 2 (two) years or under certain conditions by first notifying the Belawan Port Authority and consulting the Minister of Transportation in accordance with the law and regulations.*
- *The Company (formerly Pelindo I) will consult with the Belawan Port Authority regarding the tariff before its applied to the customer to provide opportunity for the Belawan Port Authority to provide input and recommendation.*
- *In the event of the concession period expires, the concession area and all the assets inside the area, except for assets that excluded from the agreed investments as stipulated in the Belawan Phase II Concession Agreement, shall be handed to the Belawan Port Authority in accordance with law and regulations.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

g) Alur Pelayaran Barat Surabaya

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian kerjasama penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS") No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 dan No. HK.0501/175/P.III-2014 (Perjanjian Konsesi APBS) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2014. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan (dahulu Pelindo III) memperoleh hak untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) diharuskan untuk membiayai, merencanakan/merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran, serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS.
- Perjanjian Konsesi tidak dapat dialihkan ke pihak lain dan berlaku selama 25 tahun, yang terdiri dari masa pra-konstruksi selambat-lambatnya selama 12 bulan kalender, dan masa operasi selama 23 tahun terhitung sejak masa pemungutan pertama jasa penggunaan alur pelayaran hingga sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Konsesi APBS.
- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 3,5% dari pendapatan kotor pengoperasian APBS kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya.
- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib mengembalikan aset pengoperasian APBS yang berupa *capital dredging* kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya Perjanjian Konsesi.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

g) Alur Pelayaran Barat Surabaya

The Company (formerly Pelindo III) entered into an agreement on the provision of Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS") utilization services No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 and No. HK.0501/175/P.III-2014 (APBS Concession Agreement) with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on May 8, 2014. Based on this agreement, the Company (formerly Pelindo III) obtained the right to provide the APBS utilization services with the following conditions:

- *The Company (formerly Pelindo III) is required to finance, plan/design, build, operate, and maintain the APBS including the installation of shipping navigation facilities, as well as collecting APBS service fee.*
- *The Concession Agreement is not transferrable to another party and is valid for 25 years, consisting of the pre-construction period no later than 12 calendar months, and the operating period for 23 years from the first collection period until the end of the APBS Concession Agreement.*
- *The Company (formerly Pelindo III) is required to pay concession revenue amounting to 3.5% of the APBS operation's gross revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia every month, no later than 15 days in the following month.*
- *The Company (formerly Pelindo III) is required to return the APBS operating assets in form of capital dredging to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia as the Concession Agreement ends.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

g) Alur Pelayaran Barat Surabaya (lanjutan)

- Atas kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS, Perusahaan (dahulu Pelindo III) berhak untuk memungut tarif jasa penggunaan APBS berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 tahun.

Berdasarkan Surat dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 tanggal 5 November 2015, alur baru APBS dinyatakan siap beroperasi. Pemungutan tarif jasa pengguna APBS dilakukan 2 hari setelah sosialisasi kepada para pengguna APBS.

h) Teluk Lamong

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian penyediaan dan pelayanan perusahaan jasa kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong (TMTL) No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015 (Perjanjian Konsesi TMTL) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2015. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan (dahulu Pelindo III) memperoleh hak perusahaan TMTL untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, kegiatan pemeliharaan, dan kegiatan pengoperasian dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi tidak dapat dialihkan ke pihak lain dan berlaku selama 72 tahun sejak diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP.001/3/20/DPPL-14 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong pada tanggal 11 November 2014.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

g) Alur Pelayaran Barat Surabaya (continued)

- For the APBS utilization services provision, the Company (formerly Pelindo III) has the right to collect the APBS utilization service fee based on the mechanism required by the Law. The tariff is valid for at least 2 years.

Based on the Letter from Tanjung Perak Surabaya Main Port Authority Office No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 dated November 5, 2015, the new APBS channel was declared ready to operate. The collection of APBS service fee was carried out 2 days after the socialization to APBS users.

h) Teluk Lamong

The Company (formerly Pelindo III) entered into an agreement on the provision of port services in Terminal Multipurpose Teluk Lamong (TMTL) No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No. HK.0501/95/P.III-2015 (TMTL Concession Agreement) with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on May 19, 2015. Based on this agreement, the Company (formerly Pelindo III) obtained the TMTL utilization rights for the construction and the development of port facilities, maintenance activities, and the operational activities with the following conditions:

- The Concession Agreement is not transferrable to another party and is valid for 72 years since the issuance of the General Director of Sea Transportation's Letter No. PP.001/3/20/DPPL-14 concerning the Operational Trials at Teluk Lamong Terminal on November 11, 2014.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

h) Teluk Lamong (lanjutan)

- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan perusahaan TMTL kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap 3 bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan pertama per triwulannya.
- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib melaporkan laporan kinerja operasional dan laporan pendapatan konsesi TMTL kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap bulan dan setiap tahun, dengan laporan tahunan diaudit oleh auditor independen.
- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib mengembalikan aset konsesi TMTL yang berupa dermaga kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya Perjanjian Konsesi.
- Perusahaan (dahulu Pelindo III) berhak melakukan kerja sama dengan pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan konsesi TMTL dengan pemberitahuan tertulis kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Perusahaan (dahulu Pelindo III) berhak untuk menetapkan tarif awal jasa kepelabuhanan, melakukan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan, serta mengenakan dan memungut tarif jasa kepelabuhanan.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

h) Teluk Lamong (continued)

- *The Company (formerly Pelindo III) is required to pay concession revenue amounting to 2.5% of the TMTL's utilization service provision activities' gross revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia every 3 months, no later than 15 days in the first month of each quarter.*
- *The Company (formerly Pelindo III) is required to report TMTL's operational performance and concession revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia monthly and annually, with the annual report audited by an independent auditor.*
- *The Company (formerly Pelindo III) is required to return TMTL's concession assets in the form of port to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia as the Concession Agreement ends.*
- *The Company (formerly Pelindo III) has the right to cooperate with other competent parties to carry out TMTL's concession activities with written notification to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.*
- *The Company (formerly Pelindo III) has the right to determine the initial rates of port services, make amendments to the port services rate, and apply and collect the port services rate payment.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

**i) Tanjung Perak - Pelabuhan yang
Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo III)**

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan yang diusahakan No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015 dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak pada tanggal 9 November 2015. Perjanjian ini telah diubah dengan Perjanjian Tambahan (*Addendum*) atas Perjanjian Kegiatan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan No. HK.107/01/12/OP.Tpr-16 dan No. HK.0502/437/P.III-2016 tanggal 14 Oktober 2016. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo III) memperoleh hak perusahaan di area yang terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan milik Perusahaan (dahulu Pelindo III) yang telah diusahakan untuk kegiatan jasa kepelabuhanan dengan ketentuan di antaranya sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi berlaku selama 30 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi dan diperpanjang selama area konsesi masih diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo III) sesuai peraturan yang berlaku.
- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan perusahaan di area konsesi setiap 3 bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan pertama per triwulannya.
- Perusahaan (dahulu Pelindo III) wajib melaksanakan audit laporan keuangan tahunan secara menyeluruh dengan auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan (dahulu Pelindo III).

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

**i) Tanjung Perak - Port Operated by The
Company (formerly Pelindo III)**

The Company (formerly Pelindo III) entered into an agreement on the port services provision in the Commercial Ports No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No. HK.0501/95/P.III-2015 with Tanjung Perak Main Port Authority Office on November 9, 2015. This agreement was updated with the Additional Agreement (Addendum) on the Port Services Provision Agreement in the Ports No. HK.107/01/12/OP.Tpr-16 and No. HK.0502/437/P.III-2016 dated October 14, 2016. Based on this agreement, the Company (formerly Pelindo III) obtained the rights to commercially utilize the locations where the Company's (formerly Pelindo III) terminals and port facilities are located and operated with the following conditions:

- *The Concession Agreement is valid for 30 years since the signing of the Concession Agreement and is extended as long as the concession areas are still operated by the Company (formerly Pelindo III) in accordance with the applicable regulations.*
- *The Company (formerly Pelindo III) is required to pay concession revenue amounting to 2.5% of the commercial port utilization activities' gross revenue obtained from the concession area every 3 months, no later than the 15th of the first month of each quarter.*
- *The Company (formerly Pelindo III) is required to carry out annual financial statement audits with independent auditors appointed by the Company (formerly Pelindo III).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

**i) Tanjung Perak - Pelabuhan yang
Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo III)
(lanjutan)**

- Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan (dahulu Pelindo III) berhak diantaranya menetapkan dan memungut tarif pelayanan jasa di area konsesi serta melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- Lahan dan aset di dalam area konsesi yang telah berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tercatat sebagai aset Perusahaan (dahulu Pelindo III), tetap sebagai hak pengelolaan dan/atau aset Perusahaan (dahulu Pelindo III).
- Apabila Perusahaan (dahulu Pelindo III) telah melakukan kerja sama operasi dengan mitra kerja sama sebelum Perjanjian Konsesi ditandatangani, maka perjanjian tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Kegiatan perusahaan dari perjanjian kerja sama tersebut diperhitungkan sebagai komponen pendapatan konsesi dengan mekanisme yang disepakati dan diatur sendiri antara Perusahaan (dahulu Pelindo III) dan mitra kerja sama.

**j) Makassar - Pelabuhan yang Diusahakan
Perusahaan (dahulu Pelindo IV)**

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) mengadakan perjanjian kegiatan perusahaan kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (Otoritas Pelabuhan Makassar) melalui perjanjian No. 1/HK.301/6/DUT-2015 tanggal 9 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Konsesi No. 5/HK.301/6/DUT-2017 tanggal 24 Februari 2017.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo IV) memperoleh hak perusahaan di area yang terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan milik Perusahaan yang telah diusahakan untuk kegiatan jasa kepelabuhanan dengan ketentuan sebagai berikut:

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

**i) Tanjung Perak - Port Operated by The
Company (formerly Pelindo III) (continued)**

- Based on the Concession Agreement, the Company (formerly Pelindo III) has the right to determine and collect the service fee in the concession area and to cooperate with other parties.
- The land and assets within the concession area whose utilization rights and/or ownerships are under the Company's (formerly Pelindo III) name remain as the Company's (formerly Pelindo III) utilization rights and/or assets.
- If the Company (formerly Pelindo III) had entered into cooperation agreements before the Concession Agreement was signed, the cooperation agreements are still valid until their expiration date. The cooperation agreements' commercial activities are to be included as concession revenue components with mechanisms agreed and regulated by the Company (formerly Pelindo III) and the cooperation partners.

**j) Makassar - Port Operated by The Company
(formerly Pelindo IV)**

The Company (formerly Pelindo IV) entered into an agreement on the port services provision in the commercial port through agreement No. 1/HK.301/6/DUT-2015 dated November 9, 2015 with Makassar Main Port Authority Office (Makassar Port Authority) as amended with the Addendum to the Concession Agreement No. 5/HK.301/6/DUT-2017 dated February 24, 2017.

Based on such agreement, the Company (formerly Pelindo IV) obtained the rights to commercially utilize the location where the Company's terminals and port facilities are located and operated with the following conditions:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

j) Makassar - Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo IV) (lanjutan)

- Perjanjian konsesi berlaku selama 30 tahun sejak penandatanganan dan diperpanjang selama area konsesi masih diusahakan Perusahaan (dahulu Pelindo IV).
- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan jasa kepelabuhanan atas pelaksanaan kegiatan perusahaan di area konsesi dan dibayarkan setiap 3 bulan selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan pertama triwulan.
- Lahan dan/atau bangunan di area konsesi yang berstatus hak pengelolaan atas nama Perusahaan (dahulu Pelindo IV) diberikan kepada Otoritas Pelabuhan Makassar untuk kepentingan gedung kantor.
- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) diantaranya dapat menetapkan dan memungut tarif pelayanan jasa di area konsesi serta melakukan kerjasama dengan pihak lain.

k) Makassar New Port

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) mengadakan perjanjian perusahaan di Terminal Petikemas Makassar *New Port* (MNP) Tahap IA No. 12/HK.301/3/DUT-2015 tanggal 19 Mei 2015 dengan Otoritas Pelabuhan Makassar.

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) memperoleh hak atas perusahaan MNP untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, kegiatan pemeliharaan dan kegiatan pengoperasian dengan ketentuan sebagai berikut:

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

j) Makassar - Port Operated by The Company (formerly Pelindo IV) (continued)

- *The concession agreement is valid for 30 years since the signing of the concession agreement and is extended as long as concession areas are still operated by the Company (formerly Pelindo IV).*
- *The Company (formerly Pelindo IV) is required to pay the concession fee amounting to 2.5% of the revenues from commercial port utilization activities as stipulated in amendment agreement that obtained from concession area and shall pay at every 3 months no later than 25th of the first month of each quarter.*
- *The land and/or building are under the Company's (formerly Pelindo IV) utilization right within the concession area is transferred to Makassar Port Authority for their office buildings.*
- *The Company (formerly Pelindo IV) has the right to determine and collect the service fee in the concession area and to cooperate with other parties.*

k) Makassar New Port

The Company (formerly Pelindo IV) entered into an agreement on the port services provision in the Container Terminal Makassar New Port (MNP) Phase IA No. 12/HK.301/3/DUT-2015 dated May 19, 2015 with Makassar Port Authority.

The Company (formerly Pelindo IV) obtained the MNP utilization rights for the construction and the development of port facilities, maintenance activities and the operational activities with the following conditions:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

k) Makassar New Port (lanjutan)

- Perjanjian konsesi ini berlaku selama 70 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.
- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) melakukan kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, kegiatan pemeliharaan dan kegiatan pengoperasian terminal sepanjang 320 meter.
- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) diwajibkan untuk membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari persentase pendapatan kotor dari pelaksanaan perusahaan objek konsesi. Pembayaran pendapatan konsesi dilakukan setelah MNP ditetapkan siap beroperasi secara komersial sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan perjanjian ini.
- Perusahaan (dahulu Pelindo IV) diwajibkan untuk mengembalikan aset konsesi MNP kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya perjanjian konsesi tersebut.

Berdasarkan surat yang diterbitkan Perusahaan (dahulu Pelindo IV) pada tanggal 27 Agustus 2020 No. 8/HK.304/2/DUT-2020 kepada Otoritas Pelabuhan Makassar, Perusahaan (dahulu Pelindo IV) sedang dalam proses pengajuan permohonan pemberian konsesi atas Terminal MNP tahap IB dan IC. Perusahaan (dahulu Pelindo IV) telah memperoleh Izin Reklamasi Pengembangan Terminal MNP keseluruhan tahap I berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. KP 644 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk Melakukan Pekerjaan Reklamasi Perairan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pengajuan pemberian konsesi masih dalam proses di Otoritas Pelabuhan Makassar.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

k) Makassar New Port (continued)

- *The concession agreement is valid for 70 years since the signing of the concession agreement.*
- *The Company (formerly Pelindo IV) is providing the construction and the development of port facilities, maintenance activities, and the operational activities of the 320 meter long terminal.*
- *The Company (formerly Pelindo IV) is required to pay the concession fee amounting to 2.5% of the gross income percentage from commercial port utilization activities. The concession fee will be paid after MNP is stated ready for commercial operation in accordance with regulation and laws.*
- *The Company (formerly Pelindo IV) is allowed to cooperate with other parties as long as it is not conflicting with this concession agreement.*
- *The Company (formerly Pelindo IV) is required to return the MNP's concession assets to the Republic of Indonesia Ministry of Transportation as the concession agreement ends.*

Based on letter issued by the Company (formerly Pelindo IV) dated August 27, 2020 No. 8/HK.304/2/DUT-2020 addressed to Makassar Port Authority, the Company (formerly Pelindo IV) is still in the process of requesting the concession rights of MNP Terminal phase IB and IC. The Company (formerly Pelindo IV) has obtained a Development Reclamation Permit for MNP Terminal phase I, based on decision from Minister of Transportation No. KP 644 Year 2017 regarding Reclamation Work Permission Granting for PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) at Makassar Port Working Area and Port Area of Interest, South Sulawesi Province. Until the completion date of the consolidated financial statement, this concession rights request is still in the process at Makassar Port Authority.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

l) Gresik

Berdasarkan Perjanjian Konsesi No. 02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, BMS dan Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan Kelas II Gresik mengikatkan diri dalam perjanjian konsesi tentang kegiatan perusahaan jasa kepelabuhan terminal manyar di pelabuhan Gresik dengan jangka waktu selama 76 tahun dihitung dari sejak tanggal ditandatangani perjanjian. Pendapatan konsesi pada area konsesi Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik sebesar 2,75% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan di area konsesi.

m) Labuan Bajo

Perusahaan (dahulu Pelindo III) memiliki sebidang tanah seluas 36.333m² yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanah tersebut digunakan untuk area pembangunan fasilitas penunjang operasional dan dermaga curah cair Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Pada tanggal 31 Desember 2020, tanah tersebut diklasifikasikan sebagai aset tetap oleh Perusahaan (dahulu Pelindo III).

Perusahaan (dahulu Pelindo III) menerima surat Menteri BUMN No. S-747/MBU/09/2021 tanggal 29 September 2021 tentang persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap tanah di Terminal *Multipurpose* Pelabuhan Labuan Bajo. Dalam hal ini, Perusahaan (dahulu Pelindo III) melakukan pelepasan hak atas tanah kepada Negara Republik Indonesia c.q Kementerian Perhubungan dalam rangka pemanfaatan barang milik negara melalui penerbitan konsesi. Berdasarkan surat tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2021 Perusahaan melakukan reklasifikasi aset tanah Labuan Bajo ke aset takberwujud sebesar Rp79.905.949.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

l) Gresik

Based on the Concession Agreement No. 02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 dated December 15, 2017, BMS and the Class II of Gresik Port Authority and Authority Office bind themselves in a concession agreement concerning the activities of port terminal services in the port of Gresik for a period of 76 years from the date of the signing of the agreement. The concession revenue of Terminal Manyar in Gresik Port is 2.75% of the gross revenue of port service operations in the concession area.

m) Labuan Bajo

The Company (formerly Pelindo III) owns a plot of land of 36,333m² located Wae Kelambu, Komodo District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. The land is used for the construction of operational support facilities and a liquid bulk dock at the Wae Kelambu Multipurpose Terminal at Labuan Bajo Port. As of December 31, 2020, the land is classified as fixed asset by the Company (formerly Pelindo III).

The Company (formerly Pelindo III) received a Decree of the Minister of SOE No. S-747/MBU/09/2021 dated September 29, 2021 regarding the approval for the write-off of land fixed assets at the Labuan Bajo Multipurpose Port. The Company (formerly Pelindo III) relinquished land rights to the Republic of Indonesia c.q the Ministry of Transportation in relation to utilizing state property through the issuance of concessions. Based on that decree, as of October 1, 2021, the Company (formerly Pelindo III) reclassified the land assets of Labuan Bajo to intangible assets amounting to Rp79,905,949.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

m) Labuan Bajo (lanjutan)

Perusahaan (dahulu Pelindo III) telah mengadakan perjanjian No. HK.201/4/9/DJPL/2021 dan No. HK.05.01/5/REG3-2021 dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada tanggal 8 November 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo III) berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan di area Pelabuhan Labuan Bajo dengan skema Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN). Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani.

n) Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung

Pada tanggal 13 Februari 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan PMT menandatangani Perjanjian Penugasan Pembangunan dan Pengelolaan Terminal *Multipurpose* Kuala Tanjung Serta Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan ("Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung") Nomor: PP.21/1/4/PI-15.TU dan Nomor: PP.21/1/3/PMT-15 dimana PMT mendapatkan penugasan dari Perusahaan (dahulu Pelindo I) untuk (i) melakukan pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan terminal *multipurpose* Kuala Tanjung serta (ii) melakukan pemanfaatan dan pengelolaan lahan.

Pada tanggal 10 Februari 2016, Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan PMT menandatangani Perjanjian Bangun Guna Serah No. PP.21/1/3/PI-16.TU dan No. PP.21/1/21/PMT-16 ("Perjanjian BGS") dimana Perusahaan (dahulu Pelindo I) memberikan hak kepada PMT untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan lahan selama jangka waktu Perjanjian BGS, dengan mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

m) Labuan Bajo (continued)

The Company (formerly Pelindo III) entered into an agreement No. HK.201/4/9/DJPL/2021 and No. HK.05.01/5/REG3-2021 with Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation on November 8, 2021. Based on the agreement, The company (formerly Pelindo III) has the right to operate and carry out port service activities and port-related services in Labuan Bajo Port area under the State Property Utilization Cooperation (KSP-BMN) scheme. The agreement is valid for a period of 50 (fifty) years from the date of the signing of the agreement.

n) Kuala Tanjung Assignment Agreement

On February 13, 2015, the Company (formerly Pelindo I) and PMT signed Assignment Agreement of Construction and Management of the Kuala Tanjung Multipurpose Terminal and Land Utilization and Management ("Kuala Tanjung Assignment Agreement") No.PP.21/1/4/PI-15.TU and No: PP.21/1/3/PMT-15 whereas PMT received an assignment from the Company (formerly Pelindo I) to (i) construct, finance and manage the Kuala Tanjung multipurpose terminal and (ii) conduct land utilization and management.

On February 10, 2016, the Company (formerly Pelindo I) and PMT signed Build Operate Transfer Agreement ("BOT Agreement") No. PP.21/1/3/PI-16.TU and No. PP.21/1/21/PMT-16 whereas the Company (formerly Pelindo I) grants the right to PMT to use and manage land during the BOT Agreement, with the mechanism for land utilization and management as regulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/09/2014 concerning Guidelines for the Utilization of Fixed Assets of State-Owned Entities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

n) Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung (lanjutan)

Jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 50 (lima puluh) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung, yaitu sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 12 Februari 2065.

o) Perjanjian Penugasan Belawan Fase II

Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo I) dan PTP menandatangani Perjanjian Kerjasama Penugasan Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Petikemas Belawan Fase II ("Perjanjian Penugasan Belawan Fase II") No. PR.02/3/23/PI-14.TU dan No. US.10/1/6/PTP-14 dimana PTP mendapatkan penugasan dari Perusahaan (dahulu Pelindo I) untuk melakukan pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan terminal petikemas Belawan Fase II.

Jangka waktu Perjanjian Penugasan Belawan Fase II adalah 50 (lima puluh) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Penugasan Belawan Fase II, yaitu sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2064.

p) Gilimas

Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan (dahulu Pelindo III) sedang dalam proses pengajuan permohonan hak konsesi atas Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar. Perusahaan (dahulu Pelindo III) memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang Rencana Kegiatan Pengembangan TPGML berdasarkan keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/2016 tanggal 11 Mei 2016. Sesuai dengan prosedur, BPKP harus melakukan review di mana berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP, No.LR860/PW13/2/2017 tanggal 2 November 2017, salah satu yang masih dalam proses pembahasan adalah jangka waktu konsesi selama 59 tahun, yang masih dikaji ulang kembali akibat adanya penambahan investasi di masa depan.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

n) Kuala Tanjung Assignment Agreement (continued)

The term of the agreement is 50 (fifty) years from the signing of the Kuala Tanjung Assignment Agreement, which is from February 13, 2015 to February 12, 2065.

o) Belawan Phase II Assignment Agreement

On October 31, 2014, the Company (formerly Pelindo I) and PTP signed Agreement of Construction and Management Assignment of the Container Terminal Belawan Phase II ("Belawan Phase II Assignment Agreement") No. PR.02/3/23/PI-14.TU and No. US.10/1/6/PTP-14 whereas PTP assigned by the Company (formerly Pelindo I) to engage in construction, funding and operation of the container terminal Belawan Phase II.

The period of the Belawan Phase II Assignment Agreement is 50 (fifty) years from the signing of Belawan Phase II Assignment Agreement, which is from October 31, 2014 until October 30, 2064.

p) Gilimas

As of the date of the financial statements, the Company (formerly Pelindo III) is still in the process of requesting the concession rights for Terminal Gilimas in Lembar Port. The Company (formerly Pelindo III) obtained an Utilization Permit for Development Activity Plan TPGML based on the decision of the West Nusa Tenggara Investment Coordinating Board for Integrated Investment and Licensing Agency No. 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/2016 dated May 11, 2016. In accordance with the procedure, BPKP must conduct a review which is based on the BPKP Review Report, No.LR860/PW13/2/2017 dated November 2, 2017, one of which is still in the discussion process is the concession period of 59 years, which is still being reviewed, due to additional investment in the future.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

q) Benoa

Perusahaan (dahulu Pelindo III) sedang dalam proses pengajuan permohonan hak konsesi atas area pengembangan Pelabuhan Benoa. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa ("KSOP Kelas II Benoa") No. AL.301/1/10/KSOP.BNA.2020 tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo III) diminta menyampaikan studi kelayakan terkait rencana konsesi pengusahaan area pengembangan Pelabuhan Benoa serta penguasaan lahan yang akan dikonsesikan kepada KSOP Kelas II Benoa. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan (dahulu Pelindo III) sedang dalam proses memenuhi persyaratan tersebut.

r) Jalan Tol Cibitung-Cilincing

Pada tanggal 29 Januari 2007, CTP menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Cibitung-Cilincing No. 01/PPJT/I/Mn/2007 dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perjanjian tersebut telah diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cibitung-Cilincing antara CTP dan Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") dari notaris Rina Utami Djauhari, S.H., notaris di Jakarta, No. 10 tanggal 15 Agustus 2021. Perjanjian telah beberapa kali diAmendemen, terakhir berdasarkan Akta No. 3 tanggal 8 Desember 2020 dari Rina Utami Djauhari, Notaris di Jakarta, tentang Amendemen X Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Berdasarkan perjanjian tersebut CTP bertanggung jawab untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan perundangan-undangan. Jangka waktu perjanjian konsesi adalah 50 (lima puluh) tahun sejak Surat Perintah Mulai Kerja ("SPMK") tanggal 23 November 2018. Setelah berakhirnya masa konsesi, CTP harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT dalam kondisi terpelihara baik.

49. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

q) Benoa

The Company (formerly Pelindo III) is still in the process of requesting the concession rights for Benoa Port development area. Based on the Letter of the Head of the Benoa Class II Port Authority ("KSOP Kelas II Benoa") No. AL.301/1/10/KSOP.BNA.2020 dated December 16, 2020, the Company (formerly Pelindo III) was asked to submit a feasibility study related to the concession plan for the Benoa Port development area as well as land tenure to be concessioned to the KSOP Kelas II Benoa. Until the completion date of the consolidated financial statements, the Company (formerly Pelindo III) is in the process of complying the requirements.

r) Toll Road Cibitung-Cilincing

On January 29, 2007, CTP entered into Operation Agreement of Cibitung - Cilincing Toll Road No. 01/PPJT/I/Mn/2007 with the Government of Indonesia through Ministry of General Works and Public Housing. The agreement has been amended and restated through Deed of Operation Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road between CTP and Toll Road Regulatory Body ("BPJT") from notary Rina Utami Djauhari, S.H., notary in Jakarta, No. 10 dated August 15, 2021. The agreement has been amended several times, lastly based on Deed No. 3 dated December 8, 2020 from Rina Utami Djauhari, Notary in Jakarta, regarding Amendment X of Operation Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road.

Based on the agreement, CTP is responsible for implementing the toll road operation, including funding, technical planning, construction, operation and maintenance in accordance with the terms of the agreement and laws and regulations. The Term of the concession agreement is 50 (fifty) years in since the issuance of Instruction Letter of Work Commencement ("SPMK"). After the end of concession period, CTP should transfer the toll road to BPJT in a well maintained condition.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

**a) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

Pada tanggal 11 September 2012, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengadakan Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/17/2/PI.II-12, dengan PP yang kemudian diperpanjang dengan Perjanjian No. HK.566/19/11/PI.II-13 tanggal 6 Desember 2013. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 27 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 34 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1B selama 50 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.

Pada tanggal 23 November 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya seluruh pekerjaan menjadi sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp7.075.138.987 dan USD265.973.774 termasuk pajak pertambahan nilai.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

**a) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

On September 11, 2012, the Company (formerly Pelindo II) entered into Agreement of Constructing North Kalibaru Container Terminal Phase I Tanjung Priok Port No. HK.566/17/2/PI.II-12 with PP which was extended with Agreement No. HK.566/19/11/PI.II-13 dated December 6, 2013. The period of construction work is as follows:

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 27 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 34 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1B for 50 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.

On November 23, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 which changed among others period of work activities and total project cost to become as follows:

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Total project cost to amount to Rp7,075,138,987 and USD265,973,774 including value added tax.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**a) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

Pada tanggal 28 November 2016, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) ditetapkan selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter) ditetapkan selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan. Disamping itu, pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS harus dilakukan pada tahap 1A, tetapi serah terima pekerjaan pengerukan tersebut dilakukan bersamaan dengan serah terima seluruh pekerjaan pengerukan.
- Pekerjaan Tahap 1B ditetapkan selama 64 bulan sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III ini berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**a) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

On November 28, 2016, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 which changed among others regarding period of work activities and total project cost to become as follows:

- *Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Construction Phase 1A2 (451-850 meters) for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields. In addition, dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS should be conducted on phase 1A, however the handover of dredging should be conducted simultaneously with the handover of whole dredging.*
- *Construction Phase 1B for 64 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *The Additional Agreement (Addendum) III is effective from the day and date it is signed.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**a) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

Pada tanggal 18 November 2019, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) IV No. PD.01/18/11/1/ADP/UT/PI.II-19 dimana mengatur perubahan diantaranya:

- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp7.311.508.551 dan USD278.984.957 termasuk nilai penyesuaian harga terhadap pekerjaan pemancangan, pengerukan dan reklamasi periode Oktober 2013 sampai dengan Desember 2017 dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) IV ini berlaku terhitung sejak tanggal 28 Januari 2018.

Pada tanggal 14 Februari 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) V No. PD.01/14/2/1/ADP/UT/PI.II-20 dimana mengatur perubahan diantaranya:

- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp7.624.575.863 dan USD280.244.426 termasuk nilai penyesuaian harga terhadap klaim, pekerjaan tambah/kurang dan penyesuaian harga all item selain 3 item pekerjaan (pemancangan, pengerukan dan reklamasi) dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) V ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 18 Februari 2020.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) VI No. PD.01/18/5/1/PBT/UT/PI.II-20 dimana mengatur perubahan diantaranya:

Pada tanggal 14 Februari 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) V No. PD.01/14/2/1/ADP/UT/PI.II-20 dimana mengatur perubahan diantaranya:

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**a) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

On November 18, 2019, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into an Additional Agreement (Addendum) IV No. PD.01/18/11/1/ADP/UT/PI.II-19 which regulates changes including:

- *The cost of all work is Rp7,311,508,551 and USD278,984,957 including the value of price adjustments for the piling, dredging and reclamation works for the period October 2013 to December 2017 and including Value Added Tax (VAT) of 10%.*
- *This Addendum IV is effective as of January 28, 2018.*

On February 14, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into an Additional Agreement Letter (Addendum) V No. PD.01/14/2/1/ADP/UT/PI.II-20 which regulates changes including:

- *The cost of all work is Rp7,624,575,863 and USD280,244,426 including the value of price adjustments to claims, added/less works and price adjustments for all items other than 3 work items (embedding, dredging and reclamation) and including Value Added Tax (VAT) of 10%.*
- *This Additional Agreement Letter (Addendum) V is valid for 3 (three) months starting from February 18, 2020.*

On May 18, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into an Additional Agreement (Addendum) VI No. PD.01/18/5/1/PBT/UT/PI.II-20 which regulates changes including:

On February 14, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into an Additional Agreement Letter (Addendum) V No. PD.01/14/2/1/ADP/UT/PI.II-20 which regulates changes including:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**a) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

- Mengenai penambahan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Perjanjian Tambahan (Addendum) V.
- Perjanjian Tambahan (Addendum) VI ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2020.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) VII No.PD.01/18/8/1/PBT/UT/PI.II-20 dimana mengatur perubahan diantaranya sebagai berikut:

- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp5.909.779.468 dan USD225.967.812 termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Perjanjian Tambahan (Addendum) VII ini berlaku selama 21 (dua puluh satu) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani yaitu 18 Agustus 2020.

b) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI

Perusahaan (dahulu Pelindo II) mendirikan PPI pada tanggal 5 November 2012 (Catatan 1b). Berdasarkan Surat Perusahaan (dahulu Pelindo II) No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menginstruksikan PPI untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada PPI. PPI juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan *advisory* yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) akan dialihkan kepada PPI dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari *proceed* yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan (dahulu Pelindo II) kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan PPI agar segera memproses pekerjaan *Technical, Legal, Financial, Tax dan Insurance Advisor*.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**a) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

- *Regarding the addition of a period of 3 (three) months from the end of the term of the Additional Agreement (Addendum) V.*
- *This Additional Agreement (Addendum) VI is valid for 3 (three) months starting from May 19, 2020.*

On August 18, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PP agreed to enter into an Additional Agreement (Addendum) VII No. PD.01/18/8/1/PBT/UT/PI.II-20 which regulates changes including the following:

- *The total cost of the work was Rp5,909,779,468 and USD225,967,812 including value added tax. This Additional Agreement (Addendum) VII is valid for 21 (twenty one) months from the date it was signed, namely August 18, 2020.*

b) Project Implementation Agreement - PPI

*The Company (formerly Pelindo II) established PPI on November 5, 2012 (Note 1b). Based on Letter of the Company (formerly Pelindo II) No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company (formerly Pelindo II) instructed PPI to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal from PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the Company's (formerly Pelindo II) contractor to PPI. PPI was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company (formerly Pelindo II) shall be assigned to PPI in which the consultants' fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. The Company (formerly Pelindo II) then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed PPI to process the *Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor* works.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**b) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI
(lanjutan)**

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) memberikan kepada PPI hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum PPI menandatangani COA (Catatan 50d).

Sesuai dengan PIA, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada PPI. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada PPI.

Pada tanggal 6 Agustus 2018, novasi tidak jadi dilaksanakan dan diganti menjadi sewa/site lease yang dituangkan dalam perjanjian perubahan PIA dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai perubahan nilai dan jangka waktu sewa.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**b) Project Implementation Agreement - PPI
(continued)**

On May 30, 2013, the Company (formerly Pelindo II) and PPI signed Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), in which the Company (formerly Pelindo II) granted to PPI the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company (formerly Pelindo II) and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by the Company (formerly Pelindo II) and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which PPI entered into the COA (Note 50d).

In accordance with the PIA, the Company (formerly Pelindo II) and PPI shall then identify the existing agreements signed by the Company (formerly Pelindo II) and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to PPI. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to PPI.

As of August 6, 2018, the novation was not carried out and was changed to a lease/site lease as outlined in the PIA amendment agreement and has undergone several changes recently on December 23, 2020 regarding changes in the value and term of the lease.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani surat Perjanjian Tambahan (Addendum) V No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21, yang mengatur mengenai:

- perubahan Skema Kerja Sama yang sebelumnya Bangun Kelola Serah menjadi *site lease/sewa*;
- jangka waktu yang sebelumnya 70 (tujuh puluh) tahun menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
- jangka waktu kerjasama terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2043.

c) Perjanjian Pengelolaan Proyek - PPI

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) menunjuk PPI untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan.

PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada keuntungan untuk PPI atas penyediaan jasa ini.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Berita Acara No. PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 dan No. BAC-400-09102020-012 tentang Kesepakatan Bersama Rencana Pembaruan Manajemen Proyek Untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Implementation Agreement - PPI (continued)

On September 30, 2021, the Company and PPI (formerly Pelindo II) signed a letter of Additional Agreement (Addendum) V No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21, which regulates:

- changing the Cooperation Scheme which was previously Build Manage Handover to site lease;
- the previous period of 70 (seventy) years to 23 (twenty three) years; and
- the cooperation period is from October 1, 2020 to September 30, 2043.

c) Project Management Agreement- PPI

On February 24, 2014, the Company (formerly Pelindo II) and PPI signed Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), in which the Company (formerly Pelindo II) appointed PPI as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works.

The PMA is valid until the end of the project. There is no profit for PPI for providing this service.

On October 9, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PPI signed the Minutes No. PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 and No. BAC-400-09102020-012 concerning Mutual Agreement on Project Management Renewal Plan for Construction Work on Phase 1 of North Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok Port.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Pengelolaan Proyek - PPI (lanjutan)

Adapun maksud dalam Berita Acara ini adalah kesepakatan bersama untuk melakukan pembaruan terhadap PMA karena PIA telah mengalami perubahan skema kerja sama sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap PMA. Maka, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Baru yang akan menggantikan PMA.

Pada tanggal 18 Desember 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I di Pelabuhan Tanjung Priok No.PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 dan No.PJK-621-18122020-006.

Pada tanggal 29 April 2019, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 dan No. PJK-KJG-06-29042019-010.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No.KS.02/23/10/1/MPS/TEK/PI.II-2020 dan No.PJK-621-23102020-009.

Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan PPI menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No.PD.05.01/29/9/12/HPS/TEK/PI.II-21 dan No.PJK-621-29092021-013.

Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan PPI dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan terminal Kijing pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Project Management Agreement - PPI (continued)

The intention in this Minutes is a mutual agreement to make updates to PMA because PIA has undergone a change in the cooperation scheme so that adjustments need to be made to PMA. So, the Company (formerly Pelindo II) and PPI agreed to make a New Cooperation Agreement that would replace PMA.

On December 18, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PPI agreed on the Agreement on the Construction of Phase I of the North Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port No. PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 and No.PJK-621-18122020-006.

On April 29, 2019, the Company (formerly Pelindo II) and PPI agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 and No. PJK-KJG-06-29042019-010.

On October 23, 2020, the Company (formerly Pelindo II) and PPI agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No.KS.02/23/10/1/MPS/TEK/PI.II-2020 and No.PJK-621-23102020-009.

On September 29, 2021, the Company (formerly Pelindo II) and PPI agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. PD.05.01/29/9/12/HPS/TEK/PI.II-21 and No. PJK-621-29092021-013.

The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and PPI in performing construction and development cooperation of Kijing terminal Pontianak port in West Kalimantan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1

Berdasarkan PIA (Catatan 50b), pada tanggal 9 Juni 2014, PPI dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana PPI menunjuk NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada PPI.

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 ("SAA"), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan. PPI harus melakukan penyerahan dermaga 450 meter dan dermaga 850 meter kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 dan 31 Desember 2015.

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya. Pada tanggal 17 September 2014, PPI menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1 dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 28).

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

d) Construction and Operation Agreement - NPCT1

Based on PIA (Note 50b), on June 9, 2014, PPI and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which PPI appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meters quay and NPCT1 shall pay advance site rent and quarterly site rent to PPI.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which consist of USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meters quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meters quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 ("SAA"), the final USD30,000,000 will be paid after the completion of additional yard area. PPI shall handover the 450 meters quay and the 850 meters quay to NPCT1 on July 31, 2015 and December 31, 2015, respectively.

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 meters quay up to the commencement of operation of 850 meters quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter. On September 17, 2014, PPI received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1 and are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position (Note 28).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, PPI menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, PPI menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan *Liquidated Damage Event*.

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan PPI pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi.

Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh PPI kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

Pada tanggal 24 Juni 2016, PPI menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1 dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 28).

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial.

Pada tanggal 13 Desember 2016, PPI dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Penyediaan akses oleh PPI kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

The handover of 450 meters quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, PPI received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, PPI responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1's construction hence it is not a Liquidated Damage Event.

In addition, the handover of 850 meters quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by PPI on January 31, 2016, did not occur as well.

450 meters and 850 meters quays have been handed over by PPI to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

On June 24, 2016, PPI received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1 and are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position (Note 28).

On August 18, 2016, 450 meters quay has started its commercial operation.

On December 13, 2016, PPI and NPCT1 signed a Letter of Acceptance which regulates items as follows:

- *Provision of access to certain areas within 850 meters quay from PPI to NPCT1;*
- *Agreement on the date of commencement of operations of 450 meters quay, which was August 18, 2016;*
- *Site Works Confirmation Notice for 850 meters quay was issued on October 16, 2016 with note on certain outstanding works;*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Perkuatan sisi utara tanggal 16 Maret 2017;
 - Penyediaan dan pemasangan *variable speed water drive* dan pressure tank dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
 - Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
 - Penyelesaian fase kedua dari area *common gate* tanggal 16 Oktober 2017;
 - Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017.
- Kesepakatan bahwa tanggung jawab pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;
- Jika PPI *Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;
- Jika terdapat salah satu *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh *PPI Undertaking* telah diselesaikan.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

- *PPI will complete the following works within the time specified for each item:*
 - *Strengthening of north side by March 16, 2017;*
 - *Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;*
 - *Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;*
 - *Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;*
 - *Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.*
- *Agreement that the maintenance responsibility of concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer's report;*
- *Agreement that the date of commencement of operations of 850 meters quay will be no later than March 16, 2017;*
- *If PPI Undertakings have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;*
- *If any one of the PPI Undertakings has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 meters quay, which is USD7,000,000 until the date that all PPI Undertakings have been completed.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 16 Januari 2018, PPI dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Jalan akses keluar sisi timur area CGA tanggal 15 Desember 2017;
 - Pengoperasian *Go-live* atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
 - Pengoperasian *Go-live* OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018;
 - Tambahan area *buffer* untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
 - Penyediaan fasilitas untuk petikemas *reefer* dan *cooling room* tanggal 30 April 2018;
 - Pekerjaan perbaikan jalan akses keluar (lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
 - Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019;
 - Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, PPI akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.
 - Kesepakatan dalam Surat Keputusan mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On January 16, 2018, PPI and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows:

- PPI will complete the following works within the time specified for each item:
 - East area exit access road of CGA by December 15, 2017;
 - Go-live IT system operation by December 31, 2017;
 - Go-live OCR operation at CGA by January 31, 2018;
 - Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;
 - Entry access road west side CGA by February 28, 2018;
 - Additional buffer area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018;
 - Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018;
 - Reparation work of exit access road (north side behandle dockyard at CGA) by April 30, 2018;
 - Reparation of north side behandle dockyard at CGA by May 31, 2018;
 - Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019;
 - If the above works have not been completed on the predetermined dates, PPI will pay USD5,000/day for each work.
 - Agreement on the Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

PPI telah berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diminta dalam MOA sebelum batas waktu yang ditentukan, walaupun masih terdapat 2 (dua) item yang sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian belum digunakan karena terdapat kendala administrasi yang perlu diselesaikan antara Perusahaan dengan kontraktor pelaksana pekerjaan.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, telah disepakati bersama antara PPI dan PP terkait kelanjutan 2 (dua) *item* pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian, dimana jangka waktu pelaksanaan untuk 2 *item* pekerjaan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2022.

Pada tanggal 2 November 2020, PPI membuat kesepakatan bersama dengan NPCT1 (SMA) mengenai sewa lokasi dimuka/*Advance Site Rent* (ASR) yang menjelaskan NPCT1 menyetujui untuk membayar kepada PPI beberapa bagian dari sewa lokasi di muka (ASR) sebesar USD23.500.000 meskipun penyerahan CY 57 meter belum dipenuhi oleh PPI. Sesuai dengan ketentuan SMA, PPI diharuskan mengirimkan pemberitahuan kepada NPCT1 tentang dimulainya pelaksanaan pembangunan CY 57 meter. Pada tanggal 20 April 2020, pembangunan CY 57 meter telah dilanjutkan kembali dan ditargetkan selesai pada bulan Mei 2022.

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja antara Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPI (Catatan 1b) mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja).

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Amendemennya adalah sebagai berikut:

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

PPI has succeeded in completing all requested work within the MOA before the specified time limit, although there are still 2 (two) items that have not been used until completion of the consolidated financial statements because there are administrative constraints that need to be resolved between the Company and the contractor implementing the work.

On 18 August 2020, it was mutually agreed between the PPI and PP regarding the continuation of 2 (two) work items as outlined in the Agreement Letter, where the implementation period for 2 work items will end on May 18, 2022.

On November 2, 2020, PPI entered into a joint agreement with NPCT1 (SMA) regarding Advance Site Rent (ASR) which explained that NPCT1 agreed to pay PPI some part of the upfront location lease (ASR) of USD23,500,000 despite submission CY 57 meters has not been fulfilled by PPI. In accordance with SMA regulations, PPI is required to send a notification to NPCT1 regarding the commencement of the construction of the 57 meter CY. On April 20, 2020, the construction of the 57 meter CY has been resumed and is targeted for completion in May 2022.

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

The Master Cooperation Agreement between the Company (formerly Pelindo II) and HPI (Note 1b) sets out the terms and conditions under which Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja) is operating.

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

- Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

Perusahaan (dahulu Pelindo II)
HPI

54,91%
45,09%

*The Company (formerly Pelindo II)
HPI*

- Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.
- Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.
- Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.
- Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.
- Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) apabila arus petikemas tahunan yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.
- Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya.
- Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

- *The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:*

*The Company (formerly Pelindo II)
HPI*

- *Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.*
- *Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.*
- *The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.*
- *Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.*
- *Royalties will be paid to the Company (formerly Pelindo II) if the annual container throughput exceeds the minimum annual target.*
- *If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.*
- *The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 2 April 2019, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2018.

Pada tanggal 16 Agustus 2019, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2018 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2018 sebesar USD10,11 juta atau setara dengan Rp140,48 miliar untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan USD9,64 juta atau setara dengan Rp134 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2018 adalah 54,91% untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 26 Mei 2020, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2019.

Pada tanggal 30 November 2020, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2019 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2019 sebesar USD9,45 juta atau setara dengan Rp133,31 miliar untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan USD8,59 juta atau setara dengan Rp121,10 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2019 adalah 54,91% untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan 45,09% untuk HPI.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On April 2, 2019, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2018 net income.

On August 16, 2019, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2018 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2018 of USD10.11 million or equivalent to Rp140.48 billion for the Company (formerly Pelindo II) and USD9.64 million or equivalent to Rp134 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2018 are 54.91% for the Company (formerly Pelindo II) and 45.09% for HPI.

On May 26, 2020, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2019 net income.

On November 30, 2020, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2019 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2019 of USD9.45 million or equivalent to Rp133.31 billion for the Company (formerly Pelindo II) and USD8.59 million or equivalent to Rp121.10 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2019 are 54.91% for the Company (formerly Pelindo II) and 45.09% for HPI.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2020 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2020 sebesar USD0,35 juta atau setara dengan Rp4,92 miliar untuk Pelindo dan USD0,21 juta atau setara dengan Rp3,03 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2020 adalah 54,91% untuk Pelindo dan 45,09% untuk HPI.

Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, KSO TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Pelindo sebesar USD8,75 juta, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh KSO TPK Koja kepada Pelindo. Biaya sewa kuartalan tersebut dapat disesuaikan sesuai Revisi Perjanjian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, KSO TPK Koja telah mengakui sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.600.202 (setara dengan Rp510,37 miliar) dan USD35.171.561 (setara dengan Rp526,24 miliar).

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPI mengadakan Revisi atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok (Revisi Perjanjian) dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPI sepakat untuk memperpanjang kerjasama pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Revisi Perjanjian ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh TPK Koja kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II).

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On December 31, 2021, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2020 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2020 of USD0.35 million or equivalent to Rp4.92 billion for Pelindo and USD0.21 million or equivalent to Rp3.03 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2020 are 54.91% for Pelindo and 45.09% for HPI.

In consideration to the Revised Agreement, KSO TPK Koja will have to pay quarterly rent fee to Pelindo amounting to USD8.75 million, while royalty will no longer be paid by KSO TPK Koja to Pelindo. The quarterly rent may be adjusted in accordance with the Revised Agreement. For the years ended December 31, 2021 and 2020, KSO TPK Koja has recognized quarterly rent amounting to USD35,600,202 (equivalent to Rp510.37 billion) and USD35,171,561 (equivalent to Rp526.24 billion), respectively.

On August 5, 2014, the Company (formerly Pelindo II) and HPI entered into a Revised Cooperation Agreement for the Management of Tanjung Priok Container Terminal III (Revised Agreement), whereby the Company (formerly Pelindo II) and HPI agreed to extend the cooperation for operating Terminal Petikemas III Tanjung Priok until March 26, 2039. The Revised Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Revised Agreement, TPK Koja will have to pay quarterly rent fee amounting to USD8,750,000 to the Company (formerly Pelindo II), while royalty will no longer be paid by TPK Koja to the Company (formerly Pelindo II).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPI telah melakukan perubahan terhadap Revisi Perjanjian di atas dimana pada akhir masa perjanjian, seluruh aset yang dimiliki HPI dan bagian HPI dalam aset bersama serta pekerjaan modal akan dialihkan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) tanpa adanya pembebanan.

Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, KSO TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar USD8,75 juta, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh KSO TPK Koja kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, KSO TPK Koja telah mencatat sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar US\$35.600.202 (setara dengan Rp510,37 miliar) dan USD35.171.561 (setara dengan Rp526,24 miliar).

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.368.082 (setara dengan Rp506,7 miliar), USD35.000.000 (setara dengan Rp503,92 miliar), dan USD35.000.000 (setara dengan Rp504,02 miliar).

Dalam Revisi Perjanjian tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo II) berhak memperoleh pembayaran premium sebesar USD50.000.000 dari HPI sehubungan dengan dilanjutkannya kerjasama antara Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPI untuk pengelolaan TPK Koja. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp27.735.417. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo yang belum diamortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp471.502.083, Rp513.105.208, dan Rp540.840.625 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On June 22, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and HPI has amended the Revised Agreement mentioned above where at the end of the agreement period, all of the HPI's assets and HPI's interest in the joint assets and the capital works will be transferred to the Company (formerly Pelindo II) free of encumbrances.

In consideration to the Revised Agreement, KSO TPK Koja will have to pay quarterly rent fee to the Company (formerly Pelindo II) amounting to USD8.75 million, while royalty will no longer be paid by KSO TPK Koja to the Company (formerly Pelindo II). For the year ended December 31, 2021 and 2020, KSO TPK Koja has recorded for quarterly rent amounting to USD35,600,202 (equivalent to Rp510.37 billion) and USD5,171,561 (equivalent to Rp526.24 billion), respectively.

For the years ended December 31, 2021, 2021 and 2019, the Company (formerly Pelindo II) has recorded revenue from these quarterly rentals of USD35,368,082 (equivalent to Rp506.7 billion), USD35,000,000 (equivalent to Rp503.92 billion), and USD35,000,000 (equivalent to Rp504,02 billion) respectively.

In the Revised Agreement, the Company (formerly Pelindo II) has the right to obtain payment of premium amounting to USD50,000,000 from HPI in relation to the continuing cooperation between the Company (formerly Pelindo II) and HPI for the management of TPK Koja. For the year ended December 31, 2021 and 2020, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp27,735,417. As of December 31, 2021, 2020, and 2019 the balance of unamortized premium amounted to Rp471,502,083, Rp513,105,208, and Rp540,840,625 respectively, and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

f) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok ("Perjanjian Pemberian Kuasa") dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) menunjuk dan memberikan kuasa pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah dikuasakan (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal kontainer dan utilitas) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sehubungan dengan pemberian kuasa kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. Disamping itu, JICT juga akan membayar kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) atas sewa peralatan dan tenaga kerja yang ditempatkan Perusahaan (dahulu Pelindo II) di JICT.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa) dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

f) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT

On March 27, 1999, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into Authorization Agreement for The Operation and Maintenance of Container Terminal in Tanjung Priok Seaport ("Authorization Agreement") whereby the Company (formerly Pelindo II) appointed and conferred authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement. In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthly royalties to the Company (formerly Pelindo II) calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue. Moreover, JICT will also pay to the Company (formerly Pelindo II) for equipment rental and Company's (formerly Pelindo II) employee secondment in JICT.

On August 5, 2014, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into an Amended Authorization Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (Amended Authorization Agreement), whereby the Company (formerly Pelindo II) and JICT agreed to extend the Authorization Agreement until March 26, 2039. The Amended Authorization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

f) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar USD21.250.000 (Catatan 50g), sedangkan royalti, sewa peralatan berupa 4 (empat) RTGC dan penempatan tenaga kerja tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II). Perjanjian jasa dan teknis "know how" yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Kuasa akan diakhiri. Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, kegiatan usaha dan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) (Catatan 50j).

Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo II) akan menerima pembayaran premium sebesar USD200.000.000 dari HPJ (Catatan 50i).

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diatur dalam surat Menteri BUMN dan surat Menteri Perhubungan di bawah.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima surat dari Menteri BUMN tentang Kerjasama Pengelolaan/ Pengoperasian JICT dan TPK Koja dimana Menteri BUMN secara prinsip menyetujui rencana kerjasama usaha pengelolaan/ pengoperasian JICT dan TPK Koja, dengan kepemilikan minimal di JICT sebesar 51%, dengan persyaratan sebagai berikut:

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

In consideration to the Amended Authorization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent to the Company (formerly Pelindo II) fee amounting to USD21,250,000 (Note 50g), while royalty, equipment rental of 4 (four) RTGCs and secondment of employee will no longer be paid by JICT to the Company (formerly Pelindo II). As for the technical "know-how" and services agreement in Authorization Agreement, they will be terminated. Based on the Amended Authorization Agreement, Terminal 2 assets and business will be transferred from JICT to the Company (formerly Pelindo II) (Note 50j).

Based on the Amended Authorization Agreement, the Company (formerly Pelindo II) will receive payment of premium from HPJ amounting to USD200,000,000 (Note 50i).

On June 22, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into Amendment Agreement to the Amended Authorization Agreement which changed the amount of premium to be paid by HPJ to the Company (formerly Pelindo II) amounting to USD215,000,000. The Amended Authorization Agreement needs to have adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping as regulated in the letter of the Minister of SOEs and letter of the Minister of Transportation below.

On June 9, 2015, the Company (formerly Pelindo II) received a letter from the Minister of SOE regarding Cooperation of Management/ Operation of JICT and TPK Koja whereas the Minister of SOEs principally agrees with the plan of cooperation of JICT and TPK Koja management/operation, with minimum percentage of ownership of 51%, with requirements as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

f) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

- Memperhatikan surat Menteri Perhubungan No. HK.201/3/4 Phb 2014 tanggal 18 September 2014, terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
- Melaksanakan surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama BUMN No. S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerjasama BUMN.

Berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Menteri BUMN tanggal 7 Januari 2016, Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan melakukan revisi terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) perlu melakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, revisi atas Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa belum selesai dilakukan.

g) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan.

Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II), JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

- To comply with the letter from Minister of Transportation No. HK.201/3/4 Phb 2014 dated September 18, 2014, related to the separation of operator and regulator functions in accordance with UU No. 17 Year 2008.
- To execute letter of Vice Minister of SOE Enterprise to President Director of SOE No. S-645/MBU/WK/10/2014 dated October 9, 2014 regarding result of Assets Working Committee of SOE and Decision of Constitutional Court, especially related to State Owned Enterprises cooperation.

Based on the Letter of Minister of Transportation of the Republic of Indonesia to the Minister of SOE dated January 7, 2016, the Company (formerly Pelindo II) was directed to revise the Amended Authorization Agreement where the Company (formerly Pelindo II) needs to make adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008. Until the completion of the consolidated financial statements, the revision on Amended Authorization Agreement has not been finished.

g) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

On March 27, 1999, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into an Agreement on Utilization of The HPL Land, Port Buildings Facility, and The Container Terminal Support Facility ("Utilization Agreement") whereby the Company (formerly Pelindo II) granted and conferred the right to utilize and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement.

In consideration of the granting of the utilization right by the Company (formerly Pelindo II), JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

g) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya - JICT (lanjutan)

Perusahaan (dahulu Pelindo II) tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah 20 (dua puluh tahun) dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Penggunaan dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan sampai dengan tanggal berakhirnya Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa. Amendemen Perjanjian Penggunaan ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Penggunaan tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar USD21.250.000 sedangkan kompensasi 5% dari pendapatan kotor JICT tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II). Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD89.446.718.

h) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II), HPJ, JICT dan Kopegmar mengadakan Amendemen Perjanjian Pemegang Saham dimana para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham sebagai berikut:

- Modal Dasar JICT ditingkatkan sejumlah 18.077.584 saham Seri B.
- Tambahan 18.059.505 lembar saham Seri B untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II).
- Tambahan 18.079 lembar saham Seri B untuk Kopegmar.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT (continued)

The Company (formerly Pelindo II) retained the rights of the properties ownership. The utilization period is 20 (twenty years) from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

On August 5, 2014, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into an Amended Utilization Agreement whereby the Company (formerly Pelindo II) and JICT agreed to extend the Utilization Agreement until the date of termination of Amended Authorization Agreement. The Amended Utilization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Utilization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee to the Company (formerly Pelindo II) amounting to USD21,250,000 while compensation of 5% of JICT's gross revenue will no longer be paid by JICT to the Company (formerly Pelindo II). For the year ended December 31, 2021, 2020, and 2019 the Company (formerly Pelindo II) has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to USD89,446,718, respectively.

h) Amended Shareholders Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company (formerly Pelindo II), HPJ, JICT and Kopegmar entered into an Amended Shareholder Agreement, whereby all parties agreed to adjust the shares ownership as follows:

- *Authorized Share Capital of JICT is adjusted by increasing 18,077,584 B series shares.*
- *Additional 18,059,505 B series shares for the Company (formerly Pelindo II).*
- *Additional 18,079 B series shares for Kopegmar.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

h) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JICT tanggal 24 November 2015, para pemegang saham JICT setuju antara lain:

- Bergantung pada persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk meningkatkan modal dasar JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh).
- Bergantung pada persetujuan BKPM, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh).

Pada tanggal 7 Desember 2015, BKPM telah menyetujui perubahan modal JICT tersebut di atas. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan (dahulu Pelindo II) belum melakukan penyetoran atas tambahan setoran modal tersebut di atas. Di samping itu, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut di atas belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h) Amended Shareholders Agreement - JICT (continued)

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of JICT dated November 24, 2015, the shareholders of JICT agreed among others:

- *Subject to approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM), to increase JICT's authorized capital from Rp221,450,406 divided into 1 (one) A Series share and 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 1 (one) A Series share and 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*
- *Subject to approval from BKPM, to increase JICT's issued and paid-up capital from Rp221,450,406 divided into 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*

On December 7, 2015, BKPM has already approved the above mentioned JICT's capital changes. Until the completion of the consolidated financial statements, the Company (formerly Pelindo II) has not paid the additional paid-in capital as mentioned above. Moreover, the increase of authorized capital and issued and paid up capital has not received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

i) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPJ mengadakan Perjanjian Pembayaran Premium dimana HPJ sepakat untuk melakukan pembayaran premium kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebesar USD200.000.000 sebagai imbalan atas tetap dilanjutkannya kerja sama usaha patungan Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan HPJ. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat setiap dari persyaratan pendahuluan pada Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa telah dipenuhi (Catatan 50f). Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan HPJ mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pembayaran Premium dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Dalam keadaan tertentu dimana terjadinya pengakhiran secara lebih awal atas Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, maka premium harus dibayarkan kembali oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada HPJ secara pro-rata. Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menerima pembayaran premium tersebut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp89.446.718. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp2.027.458.958 dan Rp2.087.090.104 dan Rp2.325.614.688, dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

i) Premium Payment Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company (formerly Pelindo II) and HPJ entered into a Premium Payment Agreement, whereby HPJ agreed to pay premium to the Company (formerly Pelindo II) amounting to USD200,000,000 as consideration for continuing the joint venture of the Company (formerly Pelindo II) with HPJ. The Premium Payment Agreement will commence on the date on each of the condition precedent in the Authorization Agreement has been satisfied (Note 50f). On June 22, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and HPJ entered into Amendment Agreement to Premium Payment Agreement in which the amount of premium to be paid by HPJ was amended to USD215,000,000. In certain circumstances leading to early termination of the Amended Authorization Agreement, the premium shall be repaid by the Company (formerly Pelindo II) to HPJ using a pro-rate basis. On July 2, 2015, the Company (formerly Pelindo II) has received payment of the premium.

For the year ended December 31, 2021 and 2020, the Company (formerly Pelindo II) has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp89,446,718, respectively. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the balance of unamortized premium amounted to Rp2,027,458,958, Rp2,087,090,104 and Rp2,325,614,688, respectively, and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

j) Perjanjian Pengalihan Aset - JICT

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Terminal 2 dari JICT kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) dimana Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan JICT sepakat untuk melakukan pengalihan aset-aset milik JICT yang terdapat di Terminal 2 kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada tanggal perjanjian ini. Atas pengalihan aset-aset tersebut, Perusahaan (dahulu Pelindo II) diharuskan melakukan pembayaran sebesar USD2.816.526, yang akan dibayarkan kepada JICT menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 November 2015, yaitu sebesar Rp38.980.720.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) belum melakukan pembayaran tersebut dan kewajibannya dicatat sebagai bagian dari akun liabilitas jangka pendek lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 23).

k) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan STMS

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura (STMS) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS.

Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

j) Assets Transfer Agreement - JICT

On December 14, 2015, the Company (formerly Pelindo II) and JICT entered into Terminal 2 Assets Transfer from JICT to the Company (formerly Pelindo II) Agreement where the Company (formerly Pelindo II) and JICT agreed to transfer assets owned by JICT at Terminal 2 to the Company (formerly Pelindo II) on the date of this agreement. For the transfer of the assets, the Company (formerly Pelindo II) is obliged to make payment amounting to USD2,816,526, which will be paid to JICT in Rupiah using BI middle rate as of November 30, 2015, amounted to Rp38,980,720.

As of December 31, 2021, the Company (formerly Pelindo II) has not made the payment and the liability was recorded as part of other current liabilities account in the consolidated financial position of the Company (Note 23).

k) Shareholders Agreement IPC TPK and STMS

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore (STMS) signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounting to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS.

The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

k) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan STMS (lanjutan)

Jika dalam suatu tahun buku, Perusahaan (dahulu Pelindo II) tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

Kepemilikan saham IPC TPK pada Perusahaan (dahulu Pelindo II) yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 (Catatan 1b).

l) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., (STMS) menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK. Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

k) Shareholders Agreement IPC TPK and STMS (continued)

If, in respect of any financial year, the Company (formerly Pelindo II) has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships. Other term and conditions are stipulated in the agreement.

IPC TPK's ownership in the Company (formerly Pelindo II) established is not followed by control and therefore, the company's financial statements are not consolidated in the IPC TPK's financial statements.

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 (Note 1b).

l) Loan Agreement - Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd., Singapore

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd. (STMS) signed a Loan Agreement where STMS provides loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

The amount of the facility will be paid back through a reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and of dividends that can be distributed to IPC TPK. All interest will be paid from IPC TPK dividends.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests that was to be charged per annum.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

l) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura (lanjutan)

Pada tanggal 10 November 2016, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk merevisi tingkat bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 menjadi 0%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang revisi tingkat bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi 0%. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, IPC TPK dan STMS kembali menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang pengenaan bunga 0% untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

m) Perjanjian Penggunaan Tanah - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood)

Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Indofood atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah seluas 329.833 m² berlokasi di Jl. Sindang laut dan Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

Perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan (dahulu Pelindo II) yang digunakan oleh Indofood.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

l) Loan Agreement - Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd., Singapore (continued)

On November 10, 2016, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2016 to December 31, 2018 to become 0%.

As of December 31, 2018, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2019 to December 31, 2020 to become 0%. Then, on December 31, 2020, IPC TPK and STMS resigned the agreement to prolong the 0% interest period from January 1, 2021 to December 31, 2022.

m) Land Usage Agreement - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood)

On March 2, 2012, the Company (formerly Pelindo II) entered into an agreement with Indofood for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company (formerly Pelindo II) with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 329,833 m² which located at Jl. Sindang Laut and Jl. Raya Cilincing, North Jakarta and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.

The agreement has been approved by the Minister of State Owned Enterprise through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimization of the Company's (formerly Pelindo II) Land which is used by Indofood.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Penggunaan Tanah - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) (lanjutan)

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp1.041.059.197 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan (dahulu Pelindo II) juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/jetty sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) adalah sebesar Rp1.041.059.197. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo yang belum diamortisasi atas penggunaan bagian tanah HPL masing-masing adalah sebesar Rp536,67 miliar, Rp577,68 miliar dan Rp618,69 miliar (sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2)).

n) Perjanjian Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Teluk Lamong

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.242.1/HK.0502/P.III-2021 tanggal 27 Juli 2021 PT Krakatau Engineering - PT Amarta Karya (Persero), KSO untuk pekerjaan perpanjangan dermaga petikemas di Terminal Teluk Lamong sebesar Rp226.633.000. Pada tanggal 31 Desember 2021, pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100%.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

m) Land Usage Agreement - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) (continued)

Revenue earned by the Company (formerly Pelindo II) from the usage of land amounted to Rp1,041,059,197 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company (formerly Pelindo II) also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood.

Until December 31, 2021, the payment received by the Company (formerly Pelindo II) amounted to Rp1,041,059,197. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the balance of unamortized use of a parcel of HPL land amounted to Rp536,67 billion, Rp577,68 billion and Rp618,69 billion, respectively, (before deducted by final income tax article 4(2)).

n) Agreement of Teluk Lamong Port Extension Work

The Company (formerly Pelindo III) entered into contract No. SP2.242.1/HK.0502/P.III-2021 dated July 27, 2021 with PT Krakatau Engineering - PT Amarta Karya (Persero), KSO for container dock extension work at Teluk Lamong Terminal amounting to Rp226,633,000. As of December 31, 2021, the work progress has reached 100% completion rate.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

o) Perjanjian Pekerjaan Perkuatan Dermaga Tanjung Perak

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.307 /HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 September 2021 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk untuk pekerjaan perkuatan struktur dermaga di Terminal Berlian Pelabuhan Tanjung Perak sebesar Rp496.936.061 Pada tanggal 31 Desember 2021, pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 86%.

p) Perjanjian Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining* Balinusra

Perusahaan (dahulu Pelindo III) mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.93/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 April 2021 dan No. SP2.92/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 April 2021 dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) untuk pekerjaan *revetment* dan *retaining wall dumping* 1 dan *dumping* 2 Di Regional BaliNusra. Nilai pekerjaan masing-masing sebesar Rp129.140.000 dan Rp397.210.000 untuk *dumping* 1 dan *dumping* 2. Pada tanggal 31 Desember 2021, pekerjaan tersebut telah mencapai penyelesaian sebesar 24%.

q) Perjanjian Kerjasama - Terminal Teluk Lamong

Pada tanggal 23 Desember 2014, TTL membuat perjanjian kerjasama dengan PT Nusa Prima Logistik (NPL) terkait pelayanan pada terminal curah kering berupa pembangunan, pengoperasian dan pengadaan gudang transit komoditi curah kering. Periode perjanjian adalah 30 tahun sejak terminal curah kering tersebut beroperasi dan dapat diperpanjang kembali dengan syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak. TTL telah mendapatkan izin pengoperasian terminal curah kering pada tanggal 28 Desember 2018 dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga periode perjanjian efektif dimulai tanggal 1 Januari 2019.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

o) Agreement of Tanjung Perak Port Enhancement Work

The Company (formerly Pelindo III) entered into contract No. SP2.307 /HK.0502/P.III-2021 dated September 30, 2021 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk for the enhancement of the wharf structure at the Berlian Terminal, Tanjung Perak Port amounting to Rp496,936,061. As of December 31, 2021 the work progress has reached 86% completion rate.

p) Agreement of Balinusra *Revetment* and *Retaining* Work

The Company (formerly Pelindo III) entered into contract No. SP2.93/HK.0502/P.III-2021 dated April 30, 2021 and No. SP2.92/HK.0502/P.III-2021 dated April 30, 2021 with PT Brantas Abipraya (Persero) and PT Waskita Karya (Persero) for the *revetment* and *retaining dumping* 1 and *dumping* 2 wall at BaliNusra Region. The price of the work is amounting to Rp129,140,000 and Rp397,210,000 for *dumping* 1 and *dumping* 2, respectively. As of December 31, 2021, the work progress has reached 24% completion rate.

q) Partnership Agreement - Teluk Lamong Terminal

On December 23, 2014, TTL entered into a cooperation agreement with PT Nusa Prima Logistik (NPL) related to the dry bulk terminal services such as construction, operation and procurements of dry bulk commodities transit warehouse. The agreement period is 30 years from dry bulk terminal commenced its commercial operations and could be extended with terms and conditions which were agreed by all parties. TTL has received the permit for operating the dry bulk terminal on December 28, 2018 from Director General of Sea Transportation, therefore the effective agreement period starts on January 1, 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**r) Perjanjian Pembangunan Dermaga
Makassar New Port (MNP) Tahap I**

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) mengadakan Perjanjian Pembangunan Dermaga MNP Tahap IA dengan detail pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Perjanjian pekerjaan Paket A mengenai pekerjaan reklamasi dan pembangunan dermaga MNP senilai Rp326.868.365 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 3 dari Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notaris di Cibubur, tanggal 3 Juni 2015 dengan jangka waktu selama 725 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum III No. 15/HK.301/7/Pl.IV-2018 tanggal 12 Juli 2018 menjadi senilai Rp345.785.871 dengan jangka waktu selama 1.227 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan Paket B mengenai pekerjaan reklamasi, pengerukan, lapangan kontainer dan causeway MNP senilai Rp1.076.779.375 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 05 September 2016 dengan jangka waktu selama 830 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum II No. 1/HK.301/3/Pl.IV-2019 tanggal 15 Februari 2019 menjadi senilai Rp1.119.939.158 dengan jangka waktu selama 1.022 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**r) Construction Agreement of Makassar New
Port (MNP) Quay Phase I**

The Company (formerly Pelindo IV) entered into a Construction Agreement of MNP Quay Phase IA, with details of work as follows:

- Agreement of work Package A regarding reclamation and construction of MNP Quay amounted to Rp326,868,365 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk based on Deed No. 3 from Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notary from Cibubur, dated June 3, 2015 with 725 calendar days period since the agreement was signed.
- This agreement of work was last amended through Addendum III No. 15/HK.301/7/Pl.IV-2018 dated July 12, 2018 with changes on the agreement amount into Rp345,785,871 and agreement period into 1,227 calendar days since the agreement was signed.
- Agreement of work Package B regarding reclamation of dredging work, container yard, and causeway of MNP amounted to Rp1,076,779,375 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated 05 September 2016 with period of 830 calendar days since the agreement was signed.
- This agreement of work was last amended through Addendum II No. 1/HK.301/3/Pl.IV-2019 dated February 15, 2019 with changes on the agreement amount into Rp1,119,939,158 and agreement period into 1,022 calendar days since from the agreement was signed.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

r) Perjanjian Pembangunan Dermaga Makassar New Port (MNP) Tahap I (lanjutan)

- Perjanjian pekerjaan Paket C mengenai pekerjaan pembangunan *breakwater* MNP senilai Rp226.725.699 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 30 September 2016 dengan jangka waktu selama 600 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum IV No. 3/HK.301/13/Pl.IV-2019 tanggal 13 September 2019 dengan jangka waktu menjadi selama 1.160 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan Paket D mengenai pekerjaan bangunan fasilitas serta mekanikal dan elektrikal MNP senilai Rp258.089.700 dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 30 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 31 Januari 2018 dengan jangka waktu selama 390 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum V No. 9/HK.301/10/Pl.IV-2020 tanggal 04 September 2020 menjadi senilai Rp283.679.319 dengan jangka waktu selama 1.066 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) juga mengadakan Perjanjian Pembangunan Dermaga MNP Tahap IB dan IC senilai Rp2.748.914.600 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 01 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., notaris di Makassar, tanggal 1 Februari 2019 dengan jangka waktu sampai dengan 16 Mei 2022.

50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

r) Construction Agreement of Makassar New Port (MNP) Quay Phase I (continued)

- Agreement of work Package C regarding construction work of MNP breakwater amounted to Rp226,725,699 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated 30 September 2016 with period of 600 calendar days since from the agreement was signed.
- This agreement of work was last amended through Addendum IV No. 3/HK.301/13/Pl.IV-2019 dated September 13, 2019 with changes on the agreement period into 1,160 calendar days since the agreement was signed.
- Agreement of work Package D regarding construction of facility building including mechanical and electrical of MNP amounted to Rp258,089,700 with PT Adhi Karya (Persero) Tbk based on Deed No. 30 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated January 31, 2018 with period of 390 calendar days since from the agreement was signed.
- This agreement of work was last amended through Addendum V No. 9/HK.301/10/Pl.IV-2020 dated September 04, 2020 with changes on agreement amount into Rp283,679,319 and agreement period into 1,066 calendar days since the agreement was signed.

The Company (formerly Pelindo IV) also entered into Agreement of Constructing of MNP Quay Phase IB and IC amounted to Rp2,748,914,600 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk based on Deed No. 01 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., notary in Makassar, dated February 1, 2019 with period up until May 16, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

s. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda

Perusahaan (dahulu Pelindo IV) mengadakan perjanjian kerjasama pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda dan PT Pelabuhan Samudera Palaran dengan No. 180/12/Huk-K5/VII/2007, No. 24/PL.405/ PT-07, dan No. 20.20.07/2007 tanggal 20 Juli 2007. Perjanjian ini berjangka waktu selama 50 tahun sejak masa uji coba, yaitu 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

Dalam perjanjian, Perusahaan (dahulu Pelindo IV) mendapatkan *management fee/compensation fee* sebesar 10% dari total pendapatan kotor dari hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran. Selain itu, Perusahaan (dahulu Pelindo IV) juga menerima bagi hasil keuntungan sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pada akhir perjanjian, Perusahaan (dahulu Pelindo IV) berhak memperoleh kepemilikan bangunan infrastruktur Terminal Petikemas Palaran dari PT Pelabuhan Samudera Palaran.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan (dahulu Pelindo IV) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp32.729.045, dan Rp31.343.893 dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasi.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

s. Cooperation Agreement for The Construction and Operation of The Palaran Container Terminal Samarinda Port

The Company (formerly Pelindo IV) entered into a cooperation agreement for the construction and operation of the Palaran Container Terminal, Samarinda Port with the Samarinda City Government and PT Pelabuhan Samudera Palaran with No. 180/12/Huk-K5/VII/2007, No. 24/PL.405/PT-07, and No. 20.20.07/2007 dated July 20, 2007. This agreement has a term of 50 years from the trial period, which was 3 years since the contract signing.

In this agreement, the Company (formerly Pelindo IV) received the management fee/compensation fee amounting to 10% of gross revenue of operating Palaran Container Terminal. In addition, the Company (formerly Pelindo IV) also received the profit sharing at certain percentage from gross revenue of operating Palaran Container Terminal as regulated in this agreement.

At the end of the agreement, the Company (formerly Pelindo IV) has the right to acquire ownership of the Palaran Container Terminal infrastructure building from PT Pelabuhan Samudera Palaran.

Revenues obtained by the Company (formerly Pelindo IV) for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounting to Rp32,729,045 and Rp31,343,893, respectively and was recorded as part of operating revenues.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**t. Perjanjian Pinjaman Biaya Pergantian
Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing**

Berdasarkan Akta Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Penggantian Pembelian Tanah dalam Rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cibitung-Cilincing antara Badan Layanan Umum - Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dan CTP dari Notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H., No. 2 tanggal 4 Februari 2013, CTP memperoleh pinjaman untuk penggantian pembelian tanah dengan batas maksimal biaya pergantian Rp288.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Seksi I: Cibitung - Telaga Asih sebesar Rp11.519.488.
2. Seksi II: Telaga Asih - Tembalang sebesar Rp87.445.713.
3. Seksi III: Tembalang - Tarumajaya sebesar Rp118.906.715.
4. Seksi IV: Tarumajaya - Cilincing sebesar Rp70.128.083.

Jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah. Nilai tambah pinjaman (bunga) sebesar tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") ditambah 1%. Nilai tambah diperhitungkan setiap bulan dan wajib dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Denda tunggakan pembayaran nilai tambah sebesar 2% per bulan dari nilai tambah yang tertunggak.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp466.538.398, Rp466.538.398 dan Rp441.350.272.

**50. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**t. Loan Agreement for Cibitung-Cilincing Toll
Road Project Replacement Cost**

Based on the Notarial Deed No. 2 dated February 4, 2013 by Mrs. Trie Sulistiowarni, S.H., a Notary in Jakarta, CTP has signed an agreement with Ministry of Public Works & Human Settlements - Public Service Agencies Secretariat of Toll Road Regulatory Body ("BLU Set-BPJT"). CTP obtained expense reimbursement loan on the purchase of land for Cibitung-Cilincing toll project for a maximum expense reimbursement amount of Rp288,000,000, with the following details:

1. Section 1: Cibitung - Telaga Asih amounting to Rp11,519,488.
2. Section 2: Telaga Asih - Tembalang amounting to Rp87,445,713.
3. Section 3: Tembalang - Tarumajaya amounting to Rp118,906,715.
4. Section 4: Tarumajaya - Cilincing amounting to Rp70,128,083.

The loan period is until the completion of the land acquisition process by the Ministry of Public Works. Based on this agreement, CTP has to pay an administration fee amounting to Rp25,000,000 and estimated cost of Rp2,880,000,000 in 2013. Once in every three months, CTP will be charged an additional value (interest expense) by BLU Set-BPJT which must be paid by CTP. The interest rate on the additional value is based on the Indonesia Deposit Insurance Corporation ("LPS") interest rate plus 1%.

As of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, the outstanding balance of the payable amounting to Rp466,538,398, Rp466,538,398 and Rp441,350,272, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

51. PERKARA HUKUM

- a) Permasalahan gugatan dari PT Artha Sempana meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Pada tahun 2019, PT Artha Sempana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dengan pokok gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa dan permintaan ganti kerugian terhadap lahan yang dikuasai oleh PT Artha Sempana apabila Perusahaan (dahulu Pelindo II) ingin menguasai lahan tersebut.

Telah diterbitkan Surat Kuasa khusus dari Direktur Utama Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara No. KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 tanggal 23 April 2019.

Telah terbit Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 450/Pdt/2021/PT.DKI pada tanggal 24 November 2021 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Juni 2020.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada upaya hukum dari pihak lawan.

- b) Gugatan dari Serikat Pekerja JICT menuntut ganti rugi akibat perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

51. LAWSUIT

- a) Lawsuit Issue of PT Artha Sempana requested for cancellation of Decree of the Minister of Home Affairs No. 128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 regarding the granting of the Right to Operate (HPL) the land to the Company (formerly Pelindo II) with area of 592,771 m2 in Port of Sunda Kelapa.

In 2019, PT Artha Sempana filed a lawsuit to the North Jakarta District Court with No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr with the subject of the lawsuit for cancellation of the Decree of the Minister of Home Affairs No.128/HPL/DA/86 on December 18, 1986 which contains the granting of Land Management Rights (HPL) to the Company (formerly Pelindo II) for a land area of 592,771 m2 at the Port of Sunda Kelapa and requesting for compensation for land controlled by PT Artha Sempana if the Company (formerly Pelindo II) wishes to control the land.

A special Power of Attorney has been issued from the President Director of the Company (formerly Pelindo II) to the Head of the North Jakarta Public Attorney as State Attorney No. KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 dated April 23, 2019.

The DKI Jakarta High Court Decision Number 450/Pdt/2021/PT.DKI on November 24, 2021, has been issued which basically strengthens the Decision of the North Jakarta District Court Number 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dated June 18, 2020.

As of the completion date of this consolidated financial statements, there is no legal action from the opposing party.

- b) Lawsuit filed by Labor Union of JICT claiming compensation due to the extension of cooperation agreement on Terminal Petikemas in Pelabuhan Tanjung Priok.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Serikat Pekerja JICT mengajukan gugatan kepada JICT selaku Tergugat, Perusahaan selaku Turut Tergugat I, dan Hutchison Ports Ltd selaku Turut Tergugat II yang diregister dengan Perkara No. 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. dengan pokok gugatan menuntut pembatalan perpanjangan kerja sama pengelolaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok antara Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan JICT, pengembalian rental fee oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada JICT sebesar USD147.595 atau setara dengan Rp1.976.869.823, kerugian bonus pekerja JICT sebesar Rp45.057.583, kerugian uang training sebesar USD539, ganti rugi immateriil Rp.100.000.000, sita jaminan atas rekening bank Perusahaan,

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr pada amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada tanggal 13 Maret 2018, Serikat Pekerja JICT telah mengajukan banding dan berdasarkan informasi dari website resmi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan Nomor 184/PDT/2019.PT.DKI yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr Tanggal 1 Maret 2018

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada informasi terkait dengan upaya hukum dari pihak lawan atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

- c) Perkara dengan No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg., di Pengadilan Negeri Palembang terkait gugatan perdata dari PT Resources Alam Indonesia menuntut pembatalan Sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah atas nama Perusahaan (dahulu Pelindo II) yang diklaim tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 100/Sei Selincah dan HGB No. 101/Sei Selincah atas nama PT Susel Prima Permai (sekarang PT Resources Alam Indonesia) yang telah berakhir jangka waktunya.

51. LAWSUIT (continued)

The Labor Union of JICT has filed a lawsuit to JICT as co-defendant I, and Hutchison Ports Ltd as co-defendant II as registered by Case No. 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., the main lawsuit demanding the cancellation of the extension of the cooperation in the management of the Container Terminal at Tanjung Priok Port between the Company (formerly Pelindo II) and JICT, refund of the rental fee by the Company (formerly Pelindo II) to JICT amounting to USD147,595 or equal to to Rp1,976,869,823, JICT employee bonus loss of Rp45,057,583, loss of training money of USD539, immaterial compensation of Rp100,000,000, confiscation of guarantee on the Company's bank account.

The verdict of the North Jakarta Public Court No. 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr stated that the lawsuit was not accepted, stating that the North Jakarta Public Court was not authorized to examine and adjudicate this case.

On March 13, 2018, the JICT Labor Union has filed an appeal and based on information from the official website of the Supreme Court, the DKI Jakarta High Court has issued a decision Number 184/PDT/2019.PT.DKI which affirms the decision of the North Jakarta District Court Number 312/ Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr dated March 1, 2018.

As of the completion date of these consolidated financial statements, there is no information regarding legal remedies from the counterparty against the decision of the DKI Jakarta High Court.

- c) Case with No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg., in Palembang Public Court about civil suit from PT Resources Alam Indonesia demanding the cancellation of the Right to Operate (HPL) certificates No. 91/Sungai Selincah registered under the name of the Company (formerly Pelindo II) which is claimed to be overlapping with Right to Build (HGB) certificate No. 100/Sei Selincah and HGB certificate No. 101/Sei Selincah under the name of PT Susel Prima Permai (now PT Resources Alam Indonesia) which terms have terminated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg., dalam amarnya menyatakan diantaranya sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah atas nama Perusahaan (dahulu Pelindo II) cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Perusahaan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp25.000 per tahun sejak terbitnya sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah sampai putusan berkekuatan hukum tetap, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah seluas 23.500 m2 di Desa Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sesuai Berita Acara Sita Jaminan pada tanggal 28 Februari 2017 dengan No. 182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg, telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg. Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Februari 2018.

Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.2725K/PDT/2018 telah menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Perusahaan, sehingga perkara dimenangkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II).

PT Resource Alam Indonesia telah mendaftarkan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam hal ini Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai Termohon Peninjauan Kembali I.

Perusahaan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 392 PK/PDT/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang pada intinya menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT Resources Alam Indonesia.

51. LAWSUIT (continued)

The Palembang Public Court in Decision No. 182 / Pdt.G /2016/ PN.Plg. In its ruling stated that among them were certificates of HPL No. 91/Sungai Selincah registered under the name of the Company (formerly Pelindo II) is a juridical defective or no binding legal force, ordering the Company to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp25,000 per year since the issuance of certificate of HPL No.91/Sungai Selincah until the decision has permanent legal force, declares valid and valuable confiscation of collateral that has been placed by the Palembang Public Court on land of HPL certificate No.91/Selincah River covering an area of 23,500 m2 in the Village Sungai Selincah, Kalidoni Subdistrict, Palembang City, according to the Official Record of Confiscation on February 28, 2017 with No. 182/BA.Pdt.G/ 2016 / PN.Plg.

Appeal Decision of South Sumatera High Court No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg has reinforced the Palembang Public Court in Decision No. 182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg. The Company (formerly Pelindo II) has filed a cassation to the Supreme Court registered on February 27, 2018.

Supreme Court on the Cassation Decision No. 2725K/PDT/2018 has granted the cassation request from the Company, therefore the decision has favored the Company (formerly Pelindo II).

PT Resource Alam Indonesia registered the Judicial Review on August 12, 2019 at the Registrar of the Palembang Public Court in this case the Company (formerly Pelindo II) as the Respondent for Judicial Review I.

The Company has obtained copy of the appeal No. 392 PK/PDT/2020 Supreme Court on June 17, 2020 that stated the judicial review from PT Resources Alam Indonesia has been declined.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- d) Perkara dengan No. 151/Pdt.G/2017/PN.Plg., di Pengadilan Negeri Palembang terkait gugatan perdata dari PT Resources Alam Indonesia yang menuntut pembatalan Sertifikat HPL No. 88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan (dahulu Pelindo II) yang diklaim tumpang tindih dengan Sertifikat HGB No. 100/Sei Selincah atas nama PT Resources Alam Indonesia yang telah berakhir jangka waktunya.

Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No. 151/Pdt.G/2017/PN.Plg., dalam amarnya menyatakan diantaranya menyatakan sertifikat HPL No. 88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Perusahaan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp25.000 per tahun sejak terbitnya sertipikat HPL No. 88/Sungai Selincah sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan banding No. 80/Pdt/2018/PT.Plg dalam amarnya telah menyatakan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 151/Pdt.G/2017/PN/Plg.

Mahkamah Agung dalam putusan di tingkat Kasasi No. 2225K/Pdt/2019 dalam amar putusan telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Perusahaan).

Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan Upaya Hukum Luar biasa Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 2225K/Pdt/2019.

Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 210PK/PDT/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang pada intinya menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Perusahaan menang).

51. LAWSUIT (continued)

- d) Case with No. 151/Pdt.G/2017/PN.Plg., in Palembang Public Court about civil suit from PT Resources Alam Indonesia demanded the cancellation of Right to Operate (HPL) certificate No .88/Sungai Selincah registered under the name of the Company (formerly Pelindo II) which is claimed to be overlapped with HGB certificate No. 100/Sei Selincah registered under the name of PT Resources Alam Indonesia which terms has been terminated.

The Palembang Public Court in Decision No. 151/Pdt.G /2017/PN.Plg. in its ruling stated that among others certificates of HPL No. 88/Sungai Selincah registered under the name of the Company is a juridical defective or no binding legal force, ordering the Company to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp25,000 per year since the issuance of certificate of HPL No. 88/Sungai Selincah until the decision has permanent legal force.

Palembang High Court on the appeal decision No. 80/Pdt/2018/PT.Plg has decided to strengthen the Decision of Palembang Public Court No. 151/Pdt.G/2017/PN/Plg.

Supreme Court in the decision at cassation level No. 2225K/Pdt/2019 has rejected the application for cassation from the cassation applicant (the Company).

The Company (formerly Pelindo II) filed an extraordinary legal action review of the decision of the Supreme Court of Cassation No. 2225K/Pdt/2019.

The Company (formerly Pelindo II) has received a copy of the Supreme Court's Decision No. 210PK/PDT/2021 dated December 15, 2021, which essentially received a request for reconsideration from the petitioner for review petition (the Company wins).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- e) Perkara perdata No. 27/Pdt.G/2019/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Perusahaan (dahulu Pelindo II) selaku Tergugat I yang dikuasakan Direksi kepada Sugih Ardhian Pramono & Partners, atas sengketa tanah HPL No 2/91 Cabang Pelabuhan Banten oleh para Penggugat ahli waris Alm. H.Somad di Tindak Banding.

Salinan Putusan Banding No. 25/PDT/2020/PT BTN menyatakan bahwa permohonan banding dari para penggugat ahli waris Alm. H. Somad ditolak sehingga Perusahaan (dahulu Pelindo II) dimenangkan.

Pihak lawan mengajukan upaya Kasasi sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi dari Pengadilan Negeri Serang tanggal 9 Juni 2020.

Berdasarkan informasi dari Website resmi Mahkamah Agung, Putusan Kasasi No. 3672K/PDT/2020 tanggal 4 Desember 2020 dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (ahli waris Alm. H. Somad).

- f) Perkara perdata No. 6/Pdt.G/2020/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Perusahaan selaku Tergugat II atas gugatan lahan di Bojonegara Persil No. 42 Desa Pulo Ampel Para Penggugat yaitu Sdr. Ali Rahman Bin (Alm) Madraf.

Telah diterima Salinan Putusan Resmi Pengadilan Negeri Serang No. 6/Pdt.G/2020/PN Srg tanggal 15 Oktober 2020 yang pada intinya Gugatan dari Penggugat (Ali Rahman Bin (Alm) Madraf) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pihak Penggugat telah mengajukan Upaya Banding sebagaimana Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas (*Inzage*) tanggal 11 November 2020.

51. LAWSUIT (continued)

- e) *The civil lawsuit No. 27/Pdt.G/2019/PN.Srg in Serang State Court, Banten. The Company (formerly Pelindo II) as the Defendant I, which represented by Sugih Ardhian Pramono & Partners, on the Land Dispute of Land Usage Permit No. 2/91 Banten Port Branch, is appealed by the Plaintiff which is the heir of the late H. Somad.*

The Copy of the Appeal No. 25/PDT/2020/PT BTN stated that the appeal of the heir of late H.Somad has been rejected, therefore the decision has favored the Company (formerly Pelindo II).

The Plaintiff have proposed for the Cassation as written under the Cassation Statement Circular from Serang Public Court on June 9, 2020.

Based on information from Supreme Court website, Cassation Decision No. 3672K/PDT/2020 dated December 4, 2020, with verdict rejecting the cassation request that has been proposed by the cassation petitioners (the heir of late H. Somad).

- f) *The civil lawsuit No. 6/Pdt.G/2020/PN.Srg in Serang Public Court, Banten. The Company as the Defendant II on the land dispute in Bojonegara Persil No. 42 Desa Pulo Ampel, with Ali Rahman Bin (Alm.) Madraf as the Plaintiff.*

*The Company has received a Copy of the Decision of the Serang Public Court No. 6/Pdt.G/2020/PN Srd on October 15, 2020 which in essence the lawsuit from the plaintiff (Ali Rahman Bin (Alm) Madraf) is rejected (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).*

*Plaintiff has filed an Appeal as the Minutes of Notification of File Examination (*Inzage*) on November 11, 2020.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Kantor Advokat Akmalsyah & Co. selaku Kuasa dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 24 November 2020.

Telah diperoleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 163/PDT/2020/PT BTN tanggal 27 Januari 2021 dengan hasil putusan dimenangkan oleh Perusahaan (dahulu Pelindo II) dan sampai batas waktu yang ditentukan, Pihak lawan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*).

- g) Perkara di Pengadilan Pajak Jakarta dalam perkara Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.

Perusahaan (dahulu Pelindo II) mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put-002489.15/2018/PP/M.XXA tahun 2019.

Berdasarkan informasi dari Website Resmi Mahkamah Agung RI, Putusan Peninjauan Kembali No. 4223 B/PK/PJK/2020 dengan amar putusan Kabul PK, Batal Putusan Pengadilan Pajak, Adili Kembali, Kabul Banding. (Perusahaan (dahulu Pelindo II) dimenangkan). Perusahaan (dahulu Pelindo II) sedang menunggu salinan putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Mei 2021, Perusahaan (dahulu Pelindo II) menerima Salinan Resmi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4223B/PK/PJK/2020 yang memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali serta membatalkan surat keputusan Direktur Jendral Pajak tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB PPh tahun pajak 2015 dan menetapkan jumlah PPh lebih bayar untuk masa Januari-Desember 2015.

52. LAWSUIT (continued)

Akmalsyah & Co. Advocate as the Power of Attorney of the Company (formerly Pelindo II) has submitted a counter-memory appeal on November 24, 2020.

The Banten High Court Decision No. 163/PDT/2020/PT BTN date January 27, 2021 with the result of the decision being won by the Company (formerly Pelindo II) and until the specified time limit, the opposing party did not file a Cassation lawsuit so that the Decision has permanent legal force (*In Kracht Van Gewijsde*).

- g) Case at the Jakarta Tax Court in the case of Appeal of the Decree of the Director-General of Taxation No. KEP-01067/KEB/WPJ.19/2017 dated December 22, 2017 concerning Taxpayer Objections to The Provision of Underpaid Income Tax.

The Company (formerly Pelindo II) filed an extraordinary legal action review to the Supreme Court on the Decision of the Tax Court No. Put-002489.15/2018/PP/M.XXA in 2019.

Based on information from the Official Website of the Supreme Court of The Republic of Indonesia, The Decision of Review No. 4223 B/PK/PJK/2020 with the warning of receive PK verdict, Cancel the Decision of the Tax Court, Re-fair, Accept the Appeal (the Company (formerly Pelindo II) won). The Company (formerly Pelindo II) is awaiting a copy of the judicial review decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia

On May 4, 2021, the Company (formerly Pelindo II) received the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4223B/PK/PJK/2020 which decided to grant the request for a judicial review and cancel the decision letter from the Director General of Taxes regarding the taxpayer's objection to the SKPKB PPh for the 2015 tax year and determined the amount of overpaid income tax for the period January - December 2015.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Dirjen Pajak telah melaksanakan Putusan PK dengan melakukan pembayaran kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) pada tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp992.142.560 (Catatan 24g).

- h) Perkara No. 28/Pdt.G/2020/PN.Cbn tentang gugatan dari Budi Nugroho selaku Direktur Utama PT Intijasa Niaga kepada Perusahaan (dahulu Pelindo II) terkait Perbuatan melawan Hukum pada pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pengerukan di alur dan kolam Pelabuhan Cirebon tahun 2014.

Pengadilan Negeri Cirebon telah membacakan putusan No. 28/Pdt.G/2020/PN Cbn dengan amar putusan yang pada intinya menolak gugatan dari Penggugat.

PT Intijasa Niaga telah mengajukan upaya hukum banding namun telah dicabut sebagaimana Akta Pencabutan Banding dari Pengadilan Negeri Cirebon No. 5/Akta.Pdt.G/2021/PN.Cbn. Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

- i) Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negeri pada Kejaksaan Tinggi Jambi selaku kuasa dari Cabang Pelabuhan Jambi kepada PT Budigraha Perkasa Utama pada bulan November 2020 terkait dengan kelebihan nilai pembayaran atas pekerjaan perbaikan berat Dermaga TPK Pelabuhan Talang Duku Jambi.

Pengadilan Negeri Sengeti telah membacakan Putusan No. 53/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 15 April 2021 dengan amar putusan mengabulkan gugatan Perusahaan (dahulu Pelindo II).

- j) Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial atas 68 (enam puluh delapan) orang Eks TNO Koperasi Pekerja Kekar dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk.

Pihak tergugat atas perkara tersebut adalah:

- Koperasi Pekerja Kekar sebagai Tergugat I.
- IPC TPK sebagai Tergugat II.
- Perusahaan sebagai Turut Tergugat.

51. LAWSUIT (continued)

Directorate General of Taxation has implemented the PK Decision by making a payment to the Company (formerly Pelindo II) on August 5, 2021, amounting to Rp992,142,560 (Notes 24g).

- h) *Case No. 28/Pdt.G/2020/PN-Cbn regarding the lawsuit from Budi Nugroho as President Director of PT Intijasa Niaga to the Company (formerly Pelindo II) related to the Acts against the Law on the implementation of Dredging Work Agreement in the flow and pool's Port of Cirebon in 2014.*

The Cirebon District Court read out the verdict No. 28/Pdt.G/2020/PN Cbn with a verdict that rejects the claim from the Plaintiff.

PT Intijasa Niaga has filed an appeal but it has been revoked as stated in the Deed of Revocation of Appeal from the Cirebon District Court No. 5/Akta.Pdt.G/2021/PN.Cbn. The case has permanent legal force

- i) *Civil Lawsuit by the State Attorney General at the Jambi High Prosecutor's Office as the power of the Jambi Pelabuban Branch to PT Budigraha Perkasa Utama in November 2020 with an overpayment value for the work of heavy repairs TPK Port Talang Duku Jambi.*

The Sengeti District Court has read its Decision No. 53/Pdt.G/2020/PN Snt dated April 15, 2021 with the decision to grant the Company (formerly Pelindo II)'s lawsuit.

- j) *Industrial Relations Lawsuit filed by 68 (sixty-eight) former nonpermanent staff at Koperasi Pekerja Kekar with Case Number 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk.*

The defendants in this lawsuit:

- *Koperasi Pekerja Kekar as Defendant I.*
- *IPC TPK as Defendant II.*
- *The Company as co-Defendant.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Pada tanggal 12 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Putusan 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk memutuskan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, memutuskan Tergugat I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan menghukum Tergugat I untuk membayar pesangon 2 (dua) kali upah sebulan sesuai dengan ketentuan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja/Kepmenaker Pasal 22 nomor 150 tahun 2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi di Perusahaan (dahulu Pelindo II)), dengan besaran Rp6.472.030. Pesangon tersebut dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Putusan. Selain itu, menghukum Tergugat I untuk membayar upah proses dengan besaran Rp2.013.318 dan dibayarkan segera tanpa dicicil. Upah proses dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Putusan.

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 12 April 2021, Koperasi Pekerja Kekar sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I mengajukan Kasasi dengan mengajukan Memori Kasasi tertanggal 5 Mei 2021, yang pada pokoknya menolak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut.

Atas Memori Kasasi yang diajukan oleh Koperasi Pekerja Kekar tersebut, IPC TPK sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II mengajukan Kontra Memori Kasasi tertanggal 24 Mei 2021 dan Bantahan tertanggal 25 Juni 2021.

Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memutus perkara kasasi No.1343/K/Pdt.Sus.PHI/2021 yang pada inti amar putusannya:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Koperasi Pekerja Kekar Cabang Panjang,
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, tanggal 12 April 2021.

51. LAWSUIT (continued)

On April 12, 2021, Tanjung Karang Public Court judges with case number 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk decided to grant some of the lawsuit, which is decided that Defendant I had terminated the employment relationship (PHK), sentenced Defendant I to pay severance pay of 2 (two) times a month's wages by the provisions (Regulation of the Minister of Manpower/Kepmenaker Article 22 number 150 the year 2000 concerning Termination of Employment and Severance Pay, Service Period Award and Compensation at the Company (formerly Pelindo II)), amounting to Rp6,472,030. The severance pay is paid no later than 14 (fourteen) days after the Decision. In addition, ordered Defendant I to pay processing fees in the amount of Rp2,013,318 and paid immediately without installments. Processing fees are paid no later than 14 (fourteen) days after the Decision.

Based on the decision of the Tanjung Karang District Court on April 12, 2021, Koperasi Pekerja Kekar as the Petitioner for Cassation, Defendant I first filed a Cassation by filing a Memorandum of Cassation dated May 5, 2021, essentially rejected the Tanjung Karang District Court Decision.

About the Memorandum of Cassation submitted by the Koperasi Pekerja Kekar, IPC TPK as the Respondent for Cassation II, Defendant II first filed a Counter Memorandum of Cassation dated May 24, 2021, and a Rebuttal dated June 25, 2021.

The Panel of Judges of the Supreme Court has decided on the cassation case No. 1343/K/Pdt.Sus.PHI/2021 which in essence the verdict:

1. Reject the request for cassation from the Cassation Applicant Koperasi Pekerja Kekar of Panjang Branch,
2. Correcting the decision of the Industrial Relations Court at the Tanjung Karang District Court Number 02/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, April 12, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

51. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 59 juncto Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I sejak dibacakan putusan ini;

Perusahaan menang karena diputus oleh majelis Hakim pada tingkat Pertama dan Kasasi tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat.

52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS SPSL No. 5 tanggal 16 Februari 2022 tentang Perubahan Nama Perseroan, para pemegang saham SPSL menyetujui perubahan Anggaran Dasar SPSL tentang nama Perusahaan dari sebelumnya PT Pelindo Solusi Logistik menjadi PT Pelindo Logistik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0011769.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS PPI No. 6 tanggal 16 Februari 2022 tentang Perubahan Nama Perseroan, para pemegang saham PPI menyetujui perubahan Anggaran Dasar PPI tentang nama Perusahaan dari sebelumnya PT Pengembang Pelabuhan Indonesia menjadi PT Pelindo Solusi Logistik.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012004.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022.

51. LAWSUIT (continued)

So, the full warning is as follows:

In exception:

- To reject the exceptions submitted by the Defendants in their entirety;

In Main Case:

- Granted the Plaintiffs' claim in part;
- To declare that Defendant I had terminated the employment relationship of the Plaintiffs in contravention of Article 59 in conjunction with Article 164 of Law Number 13 of 2003;
- Declaring the termination of the employment relationship between the Plaintiffs and Defendant I since the reading of this decision;

The Company won because it was decided by the panel of judges at the first level and the Cassation did not have a legal relationship with the Respondents in the original Cassation of the Plaintiffs.

52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. Based on Deed of the Shareholders Decision in lieu of GMS of SPSL No. 5 dated February 16, 2022 regarding Change of The Company's Name, the shareholders of SPSL agreed on the amendment of Article of Association of SPSL regarding the change of the Company's name from PT Pelindo Solusi Logistik to PT Pelindo Logistik Indonesia.

Such Amendment of the Article of Association has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-0011769.AH.01.02.Tahun 2022 dated February 16, 2022.

- b. Based on Deed of the Shareholders Decision in lieu of GMS of PPI No. 6 dated February 16, 2022 regarding Change of The Company's Name, the shareholders of PPI agreed on the amendment of Article of Association of PPI regarding the change of the Company's name from PT Pengembang Pelabuhan Indonesia to PT Pelindo Solusi Logistik.

Such Amendment of the Article of Association has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-0012004.AH.01.02.Tahun 2022 dated February 17, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- c. Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan (dahulu Pelindo II) berikut dialihkan kepada SPMT:
- Saham IKT sebanyak 1.296.144.749 lembar saham atau setara dengan 71,28% dengan nilai nominal Rp129.614.474.900 (nilai penuh).
 - Saham PTP sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-1049/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPMT menerbitkan 129.614 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham IKT dan PTP dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada SPMT.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

**52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- c. On January 3, 2022, the following shares owned by the Company (formerly Pelindo II) were transferred to SPMT:
- IKT shares amounting to 1,296,144,749 shares or equivalent to 71.28% with nominal value of Rp129,614,474,900 (full amount).
 - PTP shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).

The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-1049/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPMT issued 129,614 new shares and 24,750 new shares for the Company (formerly Pelindo II) with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of IKT and PTP shares from the Company (formerly Pelindo II) to SPMT, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

d. Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan (dahulu Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV) berikut dialihkan kepada SPJM:

- Saham JAI sebanyak 4.063.504.600 lembar saham atau setara dengan 76,89% dengan nilai nominal Rp406.350.460.000 (nilai penuh).
- Saham JPPI sebanyak 2.475.000 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).
- Saham EII sebanyak 28.050 lembar saham atau setara dengan 99,29% dengan nilai nominal Rp28.050.000.000 (nilai penuh).
- Saham EPI sebanyak 2.400.000 lembar saham atau setara dengan 55,00% dengan nilai nominal Rp24.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham PMS sebanyak 305.000.000 lembar saham atau setara dengan 98,23% dengan nilai nominal Rp305.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham Rukindo sebanyak 611.622 lembar saham atau setara dengan 99,91% dengan nilai nominal Rp611.622.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-1050/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPJM menerbitkan 406.350 saham baru, 24.750 saham baru, 28.050 saham baru, 24.000 saham baru, 305.000 saham baru dan 611.622 saham baru untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham JAI, JPPI, EII, EPI, PMS dan Rukindo dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada SPJM.

**52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

d. On January 3, 2022, the following shares owned by the Company (formerly Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV) were transferred to SPJM:

- JAI shares amounting to 4,063,504,600 shares or equivalent to 76.89% with nominal value of Rp406,350,460,000 (full amount).
- JPPI shares amounting to 2,475,000 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).
- EII shares amounting to 28,050 shares or equivalent to 99.29% with nominal value of Rp28,050,000,000 (full amount).
- EPI shares amounting to 2,400,000 shares or equivalent to 55.00% with nominal value of Rp24,000,000,000 (full amount).
- PMS shares amounting to 305,000,000 shares or equivalent to 98.23% with nominal value of Rp305,000,000,000 (full amount).
- Rukindo shares amounting to 611,622 shares or equivalent to 99.91% with nominal value of Rp611,622,000,000 (full amount).

The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-1050/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPJM issued 406,350 new shares, 24,750 new shares, 28,050 new shares, 24,000 new shares, 305,000 new shares and 611,622 new shares for the Company (formerly Pelindo II) with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of JAI, JPPI, EII, EPI, PMS and Rukindo shares from the Company (formerly Pelindo II) to SPJM, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

e. Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV) berikut dialihkan kepada SPTP:

- Saham BJTI sebanyak 1.079.138 lembar saham atau setara dengan 96,84% dengan nilai nominal Rp1.079.138.000.000 (nilai penuh).
- Saham TPS sebanyak 254.489.274 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp127.244.637.000 (nilai penuh).
- Saham TTL sebanyak 134.325 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp134.325.000.000 (nilai penuh).
- Saham PTP1 sebanyak 855.724.000 lembar saham atau setara dengan 70,00% dengan nilai nominal Rp855.724.000.000 (nilai penuh).
- Saham KKT sebanyak 125 lembar saham atau setara dengan 50,00% dengan nilai nominal Rp62.500.000 (nilai penuh).
- Saham IPC TPK sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-1048/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

**52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

e. *On January 3, 2022, the following shares owned by the Company (formerly Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV) were transferred to SPTP:*

- *BJTI shares amounting to 1,079,138 shares or equivalent to 96.84% with nominal value of Rp1,079,138,000,000 (full amount).*
- *TPS shares amounting to 254,489,274 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp127,244,637,000 (full amount).*
- *TTL shares amounting to 134,325 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp134,325,000,000 (full amount).*
- *PTP1 shares amounting to 855,724,000 shares or equivalent to 70.00% with nominal value of Rp855,724,000,000 (full amount).*
- *KKT shares amounting to 125 shares or equivalent to 50.00% with nominal value of Rp62,500,000 (full amount).*
- *IPC TPK shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).*

The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-1048/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPTP menerbitkan 1.079.138 saham baru, 127.244 saham baru, 134.325 saham baru, 855.724 saham baru, 62 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT dan IPC TPK dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada SPTP.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

- f. Pada tanggal 28 Februari 2022, saham-saham milik Perusahaan (dahulu Pelindo I, Pelindo II dan Pelindo IV) berikut dialihkan kepada SPSL (dahulu PPI):
- Saham MTI sebanyak 34.283.150 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp17.141.575.000 (nilai penuh).
 - Saham NTS sebanyak 60.240 lembar saham atau setara dengan 99,16% dengan nilai nominal Rp60.240.000.000 (nilai penuh).
 - Saham PIL sebanyak 204.820 lembar saham atau setara dengan 99,67% dengan nilai nominal Rp204.820.000.000 (nilai penuh).
 - Saham PPK sebanyak 759.000 lembar saham atau setara dengan 90,00% dengan nilai nominal Rp759.000.000.000 (nilai penuh).
 - Saham PLI (dahulu SPSL) sebanyak 101.898 lembar saham atau setara dengan 99,90% dengan nilai nominal Rp101.898.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-133/MBU/02/2022 pada tanggal 25 Februari 2022. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

**52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

In relation to such transfer of right of shares, SPTP issued 1,079,138 new shares, 127,244 new shares, 134,325 new shares, 855,724 new shares, 62 new shares and 24,750 new shares for the Company (formerly Pelindo II) with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT and IPC TPK shares from the Company (formerly Pelindo II) to SPTP, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

- f. On February 28, 2022, the following shares owned by the Company (formerly Pelindo I, Pelindo II and Pelindo IV) were transferred to SPSL (formerly PPI):
- MTI shares amounting to 34,283,150 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp17,141,575,000 (full amount).
 - NTS shares amounting to 60,240 shares or equivalent to 99.16% with nominal value of Rp60,240,000,000 (full amount).
 - PIL shares amounting to 204,820 shares or equivalent to 99.67% with nominal value of Rp204,820,000,000 (full amount).
 - PPK shares amounting to 759,000 shares or equivalent to 90.00% with nominal value of Rp759,000,000,000 (full amount).
 - PLI (formerly SPSL) shares amounting to 101,898 shares or equivalent to 99.90% with nominal value of Rp101,898,000,000 (full amount).

The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-133/MBU/02/2022 on February 25, 2022. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPSL (dahulu PPI) menerbitkan 1.714.157 saham baru, 6.024.000 saham baru, 20.482.000 saham baru, 75.900.000 saham baru dan 10.189.800 saham baru untuk Perusahaan (dahulu Pelindo II) dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham MTI, NTS, PIL, PPK dan PLI (dahulu SPSL) dari Perusahaan (dahulu Pelindo II) kepada SPSL (dahulu PPI).

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Maret 2022.

53. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Pandemi *COVID-19* tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan atau operasi Kelompok Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Kelompok Usaha digolongkan sebagai "jasa esensial" oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak diwajibkan untuk menutup kegiatan operasinya sebagai akibat dari langkah yang diambil Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran *COVID-19*. Kelompok Usaha tidak mengalami gangguan yang signifikan terhadap kegiatan operasionalnya.

Kelompok Usaha akan terus menilai situasi, bekerja sama dengan otoritas setempat untuk mendukung upaya dalam mencegah penyebaran *COVID-19*, dan menerapkan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis Kelompok Usaha.

Dampak akhir dari virus *COVID-19* terhadap kegiatan usaha Kelompok Usaha dalam jangka pendek maupun panjang tetap tidak dapat dipastikan dan akan tergantung pada berbagai faktor yang tidak dapat diperkirakan secara akurat oleh Kelompok Usaha, termasuk durasi, tingkat keparahan, kemungkinan terjadinya kembali dan skala pandemi serta sifat dan ketegasan langkah yang diambil oleh pemerintah.

**52. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

In relation to such transfer of right of shares, SPSL (formerly PPI) issued 1,714,157 new shares, 6,024,000 new shares, 20,482,000 new shares, 75,900,000 new shares and 10,189,800 new shares for the Company (formerly Pelindo II) with nominal value of Rp10,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of MTI, NTS, PIL, PPK and PLI (formerly SPSL) shares from the Company (formerly Pelindo II) to SPSL (formerly PPI), respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated March 1, 2022.

53. MACROECONOMIC UNCERTAINTY

The COVID-19 pandemic did not have a significant impact on the Group's financial or operating performance the year ended Desember 31, 2021 and 2020. The Group is classified as an "essential service" by the Government. Therefore, the Group is not required to close its operations as a result of the steps taken by the Government to break the chain of spread of COVID-19. The Group did not experience significant disruption to operational activities.

The Group will continue to assess the situation, work closely with local authorities to support efforts to prevent the spread of COVID-19, and implement actions to minimize the impact on the Group's business.

The ultimate impact of the COVID-19 virus on the Group's business activities in the short and long term remains uncertain and will depend on a variety of factors that the Group cannot accurately predict, including the duration, severity, likelihood of reoccurrence and scale of the pandemic and the nature and extent of the pandemic. decisive steps taken by the government.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

54. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

54. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Group's business segments is as follows:

31 Desember/December 31, 2021

	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	28.353.022.778	461.783.559	28.814.806.337	-	28.814.806.337	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	5.399.655.411	1.317.551.756	6.717.207.167	(6.717.207.167)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen					28.814.806.337	Total segment operating revenues
Beban operasi	(27.309.172.059)	(1.649.297.717)	(28.958.469.776)	6.454.522.959	(22.503.946.817)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	2.041.653.978	(39.558.040)	2.002.095.938	(1.772.757.832)	229.338.106	Other operating income - net
Laba usaha					6.540.197.626	Operating income
Pendapatan keuangan	587.319.404	5.235.434	592.554.838	(184.778.954)	407.775.884	Finance income
Beban keuangan	(3.357.351.484)	(78.509.211)	(3.435.860.695)	895.777.829	(2.540.082.866)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.626.599.275	-	1.626.599.275	(1.371.491.687)	255.107.588	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					4.662.998.232	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(473.745.661)	(13.926.208)	(487.671.869)	-	(487.671.869)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					4.175.326.363	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(821.369.756)	(26.363.420)	(847.733.176)	-	(847.733.176)	Current
Tangguhan	(150.992.261)	(455.650)	(151.447.911)	-	(151.447.911)	Deferred
Laba tahun berjalan					3.176.145.276	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	140.129.226.645	2.199.514.469	142.328.741.114	(26.099.666.614)	116.229.074.500	Segment assets
Liabilitas segmen	90.795.308.159	2.036.440.753	92.831.748.912	(14.529.832.436)	78.301.916.476	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	4.161.043.395	71.865.183	4.232.908.578	(1.033.436.603)	3.199.471.975	Segment depreciation and amortization

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

54. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

54. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

		31 Desember 2021/December 31, 2020					
	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total		
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues	
Pendapatan operasi eksternal	25.564.536.111	1.026.595.716	26.591.131.827	-	26.591.131.827	External operating revenues	
Pendapatan operasi antar segmen	5.654.340.622	1.040.617.946	6.694.958.568	(6.694.958.568)	-	Inter-segment operating venues	
Total pendapatan operasi segmen					26.591.131.827	Total segment operating revenues	
Beban operasi	(25.157.491.937)	(2.010.773.976)	(27.168.265.913)	6.492.332.553	(20.675.933.360)	Operating expenses	
Pendapatan operasi lainnya - neto	(170.496.231)	134.828.547	(35.667.684)	(160.870.424)	(196.538.108)	Other operating income - net	
Laba usaha					5.718.660.359	Operating income	
Pendapatan keuangan	822.774.118	(4.432.727)	818.341.391	(118.759.643)	699.581.748	Finance income	
Beban keuangan	(3.396.549.936)	(20.047.524)	(3.416.597.460)	872.231.289	(2.544.366.171)	Finance costs	
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.112.175.109	-	1.112.175.109	(1.152.173.816)	(39.998.707)	Equity in income of associates and joint control entity - net	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					3.833.877.229	Income before final tax and corporate income tax	
Beban pajak final	(434.688.403)	(1.533.430)	(436.221.833)	41.555	(436.180.278)	Final tax expense	
Laba sebelum pajak penghasilan badan					3.397.696.951	Income before corporate income tax	
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax	
Kini	(725.083.124)	(31.651.454)	(756.734.578)	10.867.473	(745.867.105)	Current	
Tangguhan	298.823.770	8.288.855	307.112.625	-	307.112.625	Deferred	
Laba tahun berjalan					2.958.942.471	Income for the year	
Posisi keuangan						Financial position	
Aset segmen	141.344.212.696	9.892.111.717	151.236.324.413	(32.659.576.619)	118.576.747.794	Segment assets	
Liabilitas segmen	92.292.535.867	819.275.449	93.111.811.316	(14.809.894.840)	78.301.916.476	Segment liabilities	
Penyusutan dan amortisasi segmen	1.368.562.653	1.794.588.672	3.163.151.325	99.172.645	3.262.323.970	Segment depreciation and amortization	
Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year then Ended December 31,							
		2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)					
	2021						
Pendapatan Operasi						Operating Revenues	
Regional 1		3.397.814.392		3.083.766.414		Region 1	
Regional 2		11.598.172.973		10.547.833.716		Region 2	
Regional 3		9.906.466.364		9.320.309.563		Region 3	
Regional 4		3.912.352.608		3.639.222.134		Region 4	
Total		28.814.806.337		26.591.131.827		Total	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

54. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

54. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

	Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4			
	31 December 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 January 1, 2020/ December 31, 2019	
Aset tidak lancar				Non-current asset
Regional 1	13.646.983.523	13.745.364.115	13.291.183.214	Region 1
Regional 2	41.600.903.896	40.779.140.983	36.568.735.012	Region 2
Regional 3	26.490.572.342	25.699.270.922	24.449.054.266	Region 3
Regional 4	11.110.020.372	10.469.776.022	9.319.025.017	Region 4
Total	92.848.480.133	90.693.552.042	83.627.997.509	Total

55. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

55. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Non-cash of investing activities for the year ended December 31, 2021 and 2020, are as follow:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year then Ended December 31,		
	2021	2020 (Disajikan kembali - Catatan 4)/ (As restated - Note 4)	
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	45.773.043	398.618.777	Addition of right-of-use assets through lease liabilities
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap	89.535.918	192.396.381	Capitalization of borrowing costs
Penambahan aset tetap melalui penambahan utang	159.270.441	193.128.224	Acquisition of fixed assets through payable
Penambahan aset tetap melalui uang muka	172.467.503	233.903.658	Acquisition of fixed assets through advance
Penambahan aset tetap melalui kapitalisasi bunga pinjaman	86.962.770	130.487.626	Acquisition of fixed assets through interest capitalization

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(DAHULU PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
(FORMERLY PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

55. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

55. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION (continued)

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	Non- arus kas/Non-cash flow				31 Desember 2021/ December 31, 2021	
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others		
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	1.196.855	-	-	5.196.855	Short-term bank loans
Utang bank	8.057.199.727	(2.758.419.792)	13.896.971	-	5.312.676.906	Bank loan
Utang obligasi	40.198.948.551	(372.969.276)	349.524.870	672.335	40.176.176.480	Bonds payable
Dividen	-	(560.000.000)	-	560.000.000	-	Dividend
Liabilitas sewa	398.376.465	(76.616.932)	-	12.126.179	333.885.712	Lease liabilities
Total	48.658.524.743	(3.766.809.145)	363.421.841	572.798.514	45.827.935.953	Total